



Katalog BPS.

# LAPORAN SOSIAL INDONESIA 2006

Perkembangan Tingkat Kesejahteraan Penduduk Perdesaan



<http://>



**Badan Pusat Statistik**

**LAPORAN  
SOSIAL  
INDONESIA  
2006**

**Perkembangan Tingkat Kesejahteraan  
Penduduk Perdesaan**

**Sub Direktorat Laporan Statistik  
Direktorat Analisis Statistik**

# LAPORAN SOSIAL INDONESIA 2006

## Perkembangan Tingkat Kesejahteraan Penduduk Perdesaan

ISSN : 1858-09...  
No. Publikasi : 06330.0...  
Katalog BPS : 4108.  
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman : ...

Naskah:  
Subdirektorat Laporan Statistik

Gambar Kulit:  
Sub Direktorat Laporan Statistik  
(Gambar bersumber dari <http://lava.nationalgeographic.com>)

Diterbitkan oleh:  
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:  
CV. Nario Sari

**Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya**

## LAPORAN SOSIAL INDONESIA 2006

Pengarah : Sunaryo Urip

Editor : Sri Indrayanti  
Vera Lisna

Penulis : Vera Lisna  
Sofaria Ayuni  
Indah Budiati  
Ema Tusianti

Pengolahan Data/Penyiapan Draft : Ema Tusianti  
Chairul Anam

Kontributor Data : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat  
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial  
Direktorat Statistik Kependudukan



Publikasi **Laporan Sosial Indonesia 2006** merupakan penerbitan ke delapan yang dimaksudkan untuk memberikan laporan dan evaluasi tentang keadaan dan permasalahan sosial yang telah terjadi selama periode beberapa tahun terakhir serta kecenderungan terjadinya perubahan sosial di masyarakat.

Laporan yang disajikan pada setiap edisi berbeda berdasarkan topik tertentu yang dianggap cukup menarik untuk disajikan. Topik-topik yang dibahas tersebut dapat berupa permasalahan sosial yang dihadapi anak-anak dan balita, wanita, bahkan orang tua yang telah lanjut usia (lansia), permasalahan kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, atau permasalahan sosial lainnya.

Publikasi Laporan Sosial Indonesia 2006 menyajikan informasi mengenai **"Perkembangan Tingkat Kesejahteraan Penduduk Perdesaan"**. Secara umum publikasi ini menganalisis perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Data yang digunakan untuk penulisan laporan ini diperoleh dari hasil pendataan melalui Potensi Desa (Podes) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk melengkapi hasil analisis, laporan ini juga menyajikan berbagai informasi penting yang diperoleh dari studi mendalam yang dilaksanakan di 5 (lima) provinsi di Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga dapat terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih. Semua kritik dan saran sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Jakarta, Agustus 2007  
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Rusman Heriawan  
NIP. 340003999

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

**Kata Pengantar**  
**Daftar Isi**  
**Daftar Tabel**  
**Daftar Gambar**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang .....
- 1.2 Ruang Lingkup .....
- 1.3 Tujuan Penelitian .....

**BAB II KEPENDUDUKAN**

- 2.1 Jumlah Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk .....
- 2.2 Keluarga Berencana .....
- 2.3 Sumber Penghasilan Utama .....
- 2.4 Keluarga Pertanian .....
- 2.5 Usaha Rumahtangga perdesaan .....

**BAB III FASILITAS PERDESAAN**

- 3.1 Fasilitas Kesehatan .....
- 3.2 Fasilitas Pendidikan .....
- 3.3 Fasilitas Perumahan dan Lingkungan .....
- 3.4 Fasilitas Komunikasi dan Informasi .....
- 3.5 Infrastruktur .....

**BAB IV TINGKAT KESEJAHTERAAN PENDUDUK PERDESAAN**

- 4.1 Kesehatan .....
- 4.2 Pendidikan .....
- 4.3 Ketenagakerjaan .....
- 4.4 Perumahan .....

**BAB V TINGKAT KEMISKINAN PENDUDUK PERDESAAN**

- 5.1 Metode Penghitungan Angka Kemiskinan .....
- 5.2 Garis Kemiskinan .....
- 5.3 Ukuran Kemiskinan .....
- 5.4 Perkembangan Kemiskinan Perdesaan .....
- 5.5 Tingkat Kecukupan Gizi .....
- 5.6 Pola Pengeluaran Penduduk .....
- 5.7 Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Perdesaan .....

**BAB VI STUDI KUALITATIF TENTANG KESEJAHTERAAN PENDUDUK PERDESAAN**

6.1 Pendahuluan .....  
6.2. Gambaran Wilayah Penelitian .....  
    6.2.1. Kondisi Geografis .....  
    6.2.2. Perkembangan Kelurahan/Desa .....  
6.3 Gambaran Kesejahteraan Penduduk .....  
    6.3.1. Kesehatan .....  
    6.3.2. Pendidikan .....  
    6.3.3. Ketenagakerjaan .....  
    6.3.4. Fasilitas Perdesaan .....  
6.4. Gambaran Rumah Tangga Perdesaan .....  
    6.4.1. Perumahan .....  
    6.4.2. Pengeluaran Rumah Tangga .....  
6.5. Program Peningkatan Kesejahteraan Penduduk .....

**LAMPIRAN: HASIL STUDI KUALITATIF KESEJAHTERAAN PENDUDUK PERDESAAN**

Hasil Studi Kualitatif Kesejahteraan Penduduk Perdesaan,  
Kabupaten Siak - Riau .....  
Hasil Studi Kualitatif Kesejahteraan Penduduk Perdesaan,  
Kabupaten Kendal - Jawa Tengah .....  
Hasil Studi Kualitatif Kesejahteraan Penduduk Perdesaan,  
Kabupaten Banjar - Kalimantan Selatan .....  
Hasil Studi Kualitatif Kesejahteraan Penduduk Perdesaan,  
Kabupaten Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat .....  
Hasil Studi Kualitatif Kesejahteraan Penduduk Perdesaan,  
Kabupaten Gowa - Sulawesi Selatan .....

**Daftar Pustaka** .....

DAFTAR TABEL

Halaman

**BAB II KEPENDUDUKAN**

Tabel 2.1.1. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Pedesaan .....

Tabel 2.1.2 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan di Perdesaan,  
2000 - 2005 .....

Tabel 2.1.3 Persentase Wanita 10 tahun ke Atas yang Melakukan  
Perkawinan Pertama di Usia Kurang dari 16 tahun di Perdesaan,  
2000 - 2006 .....

Tabel 2.1.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Perdesaan menurut Provinsi,  
2000 - 2005 .....

Tabel 2.2.1 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Pernah  
Menggunakan/Memakai Alat KB dan yang Sedang Menggunakan/Memakai  
Alat KB di Daerah Perdesaan, 2000-2006 .....

Tabel 2.2.2 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Alat /  
Cara KB yang Sedang Digunakan/Dipakai di Daerah Perdesaan,  
2000-2006 .....

Tabel 2.3. Persentase Desa menurut Pulau dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian  
Besar Penduduk di Perdesaan, 2000 - 2005 .....

Tabel 2.4.1 Persentase Keluarga Pertanian menurut Propinsi dan Sub Sektor, 2003

Tabel 2.4.2 Persentase Desa yang Sebagian Besar Penduduknya Bekerja di Sektor  
Pertanian menurut Pulau dan Sub Sektor, 2000 - 2005 .....

Tabel 2.5.1. Persentase Desa yang Memiliki Unit Usaha Masyarakat menurut Pulau  
dan Jenis Usaha, 2005 .....

**BAB III FASILITAS PEDESAAN**

Tabel 3.1.1. Persentase Banyaknya Desa yang Mempunyai Sarana Kesehatan  
menurut Pulau dan Jenis Sarana Kesehatan .....

Tabel 3.1.2. Persentase Desa Tanpa Fasilitas Kesehatan Yang Mudah Mencapai .....  
Sarana Kesehatan, .....

Tabel 3.1.3. Persentase Banyaknya Desa yang Memiliki Tenaga  
Kesehatan yang Tinggal di Desa Menurut Pulau dan Jenis  
Tenaga Kesehatan .....

Tabel 3.2.1 Persentase Banyaknya Desa yang Mempunyai Fasilitas Pendidikan .....  
menurut Pulau dan Tingkat Pendidikan .....

Tabel 3.3.1. Persentase Banyaknya Desa yang Mempunyai Lembaga Pendidikan  
Keterampilan menurut Pulau dan Jenis Keterampilan .....

Tabel 3.3.2. Persentase Banyaknya Desa menurut Pulau dan Jenis Tempat  
Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga .....

Tabel 3.3.3. Persentase Banyaknya Desa yang Memiliki Lapangan/Gelanggang  
Olah Raga menurut Pulau dan Jenis Lapangan Olah Raga .....

Tabel 3.3.4. Persentase Banyaknya Desa yg Memiliki Keluarga Pengguna Listrik menurut Pulau .....

Tabel 3.3.5. Persentase Banyaknya Desa menurut Pulau dan Jenis Tempat Membuang Sampah Sebagian Besar Keluarga .....

Tabel 3.4.1. Persentase Banyaknya Desa yang Memiliki Prasarana Komunikasi menurut Pulau .....

Tabel 3.5.1. Persentase Banyaknya Desa menurut Pulau dan Jenis Permukaan Jalan .....

Tabel 3.5.2. Persentase Banyaknya Desa menurut Pulau dan Fasilitas Penerangan Jalan Utama Desa .....

**BAB IV TINGKAT KESEJAHTERAAN PENDUDUK PEDESAAN**

Tabel 4.1.1. Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006 .....

Tabel 4.1.2. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006 .....

Tabel 4.1.3. Persentase Bayi menurut Penolong Persalinan dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006 .....

Tabel 4.2.1. Angka Melek Huruf menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006 .....

Tabel 4.2.2. Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006 .....

Tabel 4.2.3. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006 .....

Tabel 4.2.4. Angka Partisipasi Murni menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006 .....

Tabel 4.2.5. Rata-rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006 .....

Tabel 4.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006 .....

Tabel 4.3.2. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Sektor Usaha dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006 .....

Tabel 4.3.3. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006 .....

Tabel 4.3.4. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006 .....

Tabel 4.4. Persentase Rumah Tinggal menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006 .....

**BAB V TINGKAT KEMISKINAN PENDUDUK PERDESAAN**

Tabel 5.1. Daftar Paket Komoditi Dasar .....

Tabel 5.4. Beberapa Indikator Kemiskinan, tahun 2002-2006 .....

Tabel 5.5. Rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita per hari penduduk perdesaan .....

## Daftar Tabel

---

- Tabel 5.6.1. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan (Rp), 2002-2006 .....
- Tabel 5.6.2. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan Menurut Golongan Pengeluaran (Rupiah), 2003 - 2006 .....
- Tabel 5.7.1. Indikator Kependudukan Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin di Perdesaan, 2005 dan 2006 .....
- Tabel 5.7.2. Indikator Pendidikan Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin di Perdesaan, 2005 dan 2006 .....
- Tabel 5.7.3. Indikator Ketenagakerjaan Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin di Perdesaan, 2005 dan 2006 .....
- Tabel 5.7.4. Indikator Perumahan Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin di Perdesaan, 2005 dan 2006 .....

## **BAB VI STUDI KUALITATIF TENTANG KESEJAHTERAAN PENDUDUK PERDESAAN**

- Tabel 6.1. Daftar Wilayah Studi Kualitatif Kesejahteraan Penduduk Perdesaan, 2005 .....

### 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah diketahui bahwa separuh dari penduduk Indonesia bermukim di perdesaan dan mayoritas bekerja di sektor pertanian. Namun demikian, pendapatan yang diterima dari sektor pertanian lebih kecil dibandingkan industri dan perdagangan. Kurangnya kemampuan finansial penduduk perdesaan mengakibatkan kurang baiknya kualitas kehidupan mereka yang ditandai dengan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk perdesaan yang dapat digambarkan melalui berbagai indikator antara lain kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan. Sebagai akibatnya, tingkat kemiskinan perdesaan juga menjadi lebih besar dibandingkan perkotaan.

Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana termasuk infrastruktur yang disediakan pemerintah, antara lain puskesmas, sekolah, sarana penerangan dan akses terhadap air bersih. Tetapi pada kenyataannya berbagai fasilitas yang diperlukan tersebut tidak cukup memadai bahkan untuk fasilitas dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Oleh karena itu pembangunan nasional perlu diarahkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk termasuk mereka yang tinggal di perdesaan. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan tentu saja perlu direncanakan dengan baik. Perencanaan yang baik memerlukan data yang akurat sebagai titik tolak pembangunan. Begitu juga, pembangunan di perdesaan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduknya perlu disusun dengan bantuan data penunjang yang memadai antara lain dari hasil pendataan yang dilakukan oleh BPS seperti Susenas dan Podes.

Untuk keperluan penentuan desa tertinggal, BPS telah beberapa kali melakukan identifikasi desa tertinggal melalui berbagai variabel hasil pendataan Podes dan Susenas. Hasil *scoring* desa tertinggal tersebut digunakan baik oleh pemerintah daerah maupun berbagai instansi terkait sebagai dasar evaluasi maupun perencanaan pembangunan desa.

Berbagai program pembangunan khususnya di perdesaan telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduknya, antara lain program Asuransi Kesehatan bagi Penduduk Miskin (Askeskin), pemberian beras miskin (raskin) dan Bantuan Tunai Langsung (BLT). Perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk perdesaan selama beberapa tahun terakhir khususnya setelah diluncurkannya berbagai program pembangunan melatarbelakangi penulisan publikasi ini. Untuk melengkapi laporan ini dilakukan juga studi mendalam di beberapa wilayah yang tergolong ke dalam desa tertinggal.

### **1.2. Ruang Lingkup**

Laporan Sosial Indonesia Tahun 2006 disusun untuk menggambarkan perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk perdesaan selama periode 2000 - 2006. Analisis yang dilakukan diutamakan dari sudut pandang kesejahteraan sosial seperti tingkat kesehatan, pendidikan dan perumahan. Analisis dilengkapi dengan perkembangan tingkat kemiskinan serta infrastruktur perdesaan. Untuk itu berbagai data hasil survei dan sensus yang dilakukan BPS digunakan untuk mendukung analisis, antara lain Susenas, Podes, Supas dan SP.

Untuk melengkapi laporan dilakukan pula studi mendalam di beberapa desa yang tergolong ke dalam desa tertinggal yang berada di provinsi Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Studi mendalam ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif melalui wawancara kepada perangkat pemerintah daerah serta beberapa rumah tangga terpilih.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Laporan ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk perdesaan selama periode 2000 - 2006. Secara umum, tujuan dari penulisan laporan ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Mengetahui perkembangan jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk perdesaan
2. Mengetahui perkembangan fasilitas perdesaan di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan dan lingkungan, komunikasi dan informasi serta infrastruktur
3. Mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk perdesaan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan serta perumahan dan lingkungan hidup
4. Mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan penduduk perdesaan
5. Mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk perdesaan di lokasi studi mendalam

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun dengan masalah kependudukan yang cukup serius, yaitu jumlah penduduk yang besar disertai dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata. Jumlah penduduk bukan hanya merupakan modal bagi suatu negara, tetapi juga akan merupakan beban dalam pembangunan. Oleh karena itu pembangunan nasional perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Di samping itu, perkembangan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas serta pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

### **2.1. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk**

Hasil Sensus Penduduk (SP) menunjukkan bahwa pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia di daerah perdesaan mencapai 115,9 juta jiwa. Kemudian berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) tercatat jumlah penduduk Indonesia di perdesaan pada tahun 2005 meningkat menjadi 121,4 juta jiwa. Seiring pertambahan jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduknya juga bertambah. Selama periode 1990-2000 tingkat pertumbuhan penduduk perdesaan di Indonesia rata-rata masih minus 0,61 persen per tahun, dengan jumlah penduduk perdesaan sebanyak 123,1 juta jiwa pada tahun 1990. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk perdesaan meningkat menjadi 0,93 persen per tahun selama periode 2000-2005.

Hasil SP 2000 menyajikan data penduduk pada 30 provinsi di Indonesia tanpa Timor Timur yang sudah bukan menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, ada penambahan empat provinsi baru yang merupakan pecahan dari provinsi yang sudah ada yaitu Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, dan Maluku Utara. Tabel

## Bab 2. Kependudukan

**Tabel 2.1.1. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Perdesaan**

[Diolah dari hasil Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus 2005]

Propinsi	2000	2005	1990 - 2000	2000 - 2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
N.A. Darussalam	1 249 167	-	-8,00	-
Sumatera Utara	6 600 392	6 328 978	-0,02	-0,84
Sumatera Barat	3 014 492	3 192 774	-0,57	1,16
Riau	2 696 224	2 893 637	1,91	1,42
Jambi	1 725 314	1 912 900	0,85	2,09
Sumatera Selatan	4 494 586	4 498 770	0,08	0,02
Bengkulu	1 102 458	1 106 539	1,62	0,07
Lampung	5 237 766	5 614 402	-0,06	1,40
Bangka Belitung	512 302	615 846	-	3,75
Kepulauan Riau	-	262 424	-	-
<b>Sumatera</b>	<b>26 632 701</b>	<b>26 426 270</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,16</b>
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	17 752 001	18 835 583	-2,63	1,19
Jawa Tengah	18 496 082	18 992 223	-1,18	0,53
DI Yogyakarta	1 321 965	1 363 464	-2,00	0,62
Jawa Timur	20 554 769	21 331 968	-1,36	0,75
Banten	3 872 447	4 256 118	-	1,91
<b>Jawa</b>	<b>61 997 264</b>	<b>64 779 356</b>	<b>-1,09</b>	<b>0,88</b>
Bali	1 581 662	1 665 299	-2,53	1,04
NTT	3 219 813	3 581 068	1,07	2,15
NTB	2 486 663	2 698 425	-1,15	1,65
<b>Bali &amp; Nusa Tenggara</b>	<b>7 288 138</b>	<b>7 944 792</b>	<b>-0,59</b>	<b>1,74</b>
Kalimantan Barat	2 747 810	2 954 448	0,62	1,46
Kalimantan Tengah	1 294 172	1 359 945	1,18	1,00
Kalimantan Selatan	1 897 847	2 025 932	0,02	1,31
Kalimantan Timur	1 032 320	1 237 075	0,73	3,69
<b>Kalimantan</b>	<b>6 972 149</b>	<b>7 577 400</b>	<b>0,57</b>	<b>1,68</b>
Sulawesi Utara	1 250 407	1 328 956	-4,16	1,23
Sulawesi Tengah	1 610 268	1 833 407	1,25	2,63
Sulawesi Selatan	5 490 546	5 906 646	0,41	1,47
Sulawesi Tenggara	1 402 444	1 533 532	2,28	1,80
Gorontalo	618 271	680 460	-	1,94
<b>Sulawesi</b>	<b>10 371 936</b>	<b>11 283 001</b>	<b>0,65</b>	<b>1,70</b>
Maluku	859 940	890 406	-5,41	0,70
Maluku Utara	464 142	665 878	-	7,49
Papua	1 275 102	1 803 115	0,32	7,18
<b>Maluku dan Papua</b>	<b>2 599 184</b>	<b>3 359 399</b>	<b>-0,51</b>	<b>5,27</b>
<b>Indonesia</b>	<b>115 861 372</b>	<b>121 370 218</b>	<b>-0,61</b>	<b>0,93</b>

2.1.1 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk perdesaan per tahun pada periode tahun 2000-2005 di masing-masing provinsi bervariasi. Tingkat

pertumbuhan penduduk terendah terjadi di provinsi Sumatera Utara, yaitu mencapai minus 0,84 persen per tahun, sedangkan yang tertinggi terjadi di Maluku Utara dan Papua, masing-masing sebesar 7,49 persen dan 7,18 persen per tahun. Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), jumlah penduduk NAD tahun 2005 menurut Sensus Penduduk Aceh-Nias tahun 2005 mencapai 3,97 juta, sehingga pertumbuhannya selama tahun 2000-2005 sangat tinggi yaitu 26,02 persen per tahun. Sementara jika dilihat menurut pulau, tingkat pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 0,88 persen per tahun. Sebaliknya tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 5,27 persen per tahun. Sementara Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi penduduknya tumbuh kurang dari 2 persen per tahun.

Keberhasilan pembangunan daerah perdesaan di bidang kependudukan tercermin pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang terlihat semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih). Hal ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan atau angka beban tanggungan semakin kecil. Rendahnya angka beban tanggungan akan memberikan kesempatan pada penduduk usia produktif untuk lebih meningkatkan kualitas hidupnya. Tabel 2.1.2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2000 angka beban tanggungan tercatat sebesar 58,97 kemudian turun

**Tabel 2.1.2 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan di Perdesaan, 2000 - 2005**

[Diolah dari hasil Sensus Penduduk 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus 2005]

<b>Tahun</b>	<b>0 - 14</b>	<b>15 - 64</b>	<b>65 +</b>	<b>Angka Beban Tanggungan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
2000	32,08	62,91	5,02	58,97
2005	30,32	64,56	5,12	54,90

menjadi 54,90 pada tahun 2005. Hal ini berarti secara rata-rata tanggungan setiap 100 penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif telah berkurang dari 59 orang pada tahun 2000 menjadi 55 orang pada tahun 2005.

Menurunnya angka beban tanggungan juga diikuti dengan turunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun). Menurut hasil SP 2000, penduduk perdesaan yang berusia muda mencapai 32,08 persen, kemudian menurut hasil SUPAS 2005 turun menjadi 30,32 persen. Sedangkan untuk penduduk usia tua (65 tahun atau lebih) meningkat dari 5,02 persen menjadi 5,12 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur umur penduduk daerah perdesaan di Indonesia berada pada tahap transisi dari penduduk muda ke penduduk tua.

### **Wanita yang Pertama Kali Kawin di Usia Kurang dari 16 Tahun**

Pada umumnya wanita mulai aktif secara seksual pada umur belasan tahun. Pada sebagian masyarakat, perempuan melakukan hubungan seks pada masa remaja karena diharapkan menikah dan melahirkan anak pada usia muda. Sementara pada masyarakat lainnya, pernikahan biasanya dilangsungkan pada usia sedikit lebih tua. Terlepas dari norma yang mempengaruhi para perempuan usia muda, hubungan seksual yang dimulai pada usia belasan tahun mengandung resiko-resiko tertentu. Usia perkawinan yang relatif muda dianggap sebagai salah satu penghalang untuk mencapai masa depan yang lebih baik akibat beban mengurus rumah tangga yang terlalu awal. Bagi seorang wanita, pernikahan awal, terutama melahirkan anak, mempunyai pengaruh yang dalam dan berkepanjangan terhadap kesejahteraan, pendidikan dan kemampuan memberikan sumbangsih terhadap masyarakatnya. Dengan memberikan kesempatan kepada wanita untuk terus bersekolah dapat membantu wanita untuk menunda usia perkawinan, terutama di daerah perdesaan.

**Tabel 2.1.3 Persentase Wanita 10 tahun ke Atas yang Melakukan Perkawinan Pertama di Usia Kurang dari 16 tahun di Perdesaan, 2000 - 2006**

[Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)]

Propinsi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
N.A. Darussalam	-	-	-	3,45	4,15	8,34	6,86
Sumatera Utara	4,26	3,71	3,44	3,10	4,27	3,61	3,60
Sumatera Barat	11,32	10,72	9,81	9,50	8,51	9,66	8,97
Riau	10,63	8,53	7,01	7,43	7,19	8,11	8,42
Jambi	17,03	15,68	13,90	14,35	11,63	13,18	13,23
Sumatera Selatan	7,66	9,78	9,85	8,36	8,68	9,09	8,21
Bengkulu	13,20	9,08	10,03	9,70	8,47	12,33	11,83
Lampung	13,65	12,51	9,46	12,19	10,20	13,39	14,76
Bangka Belitung	-	10,76	4,73	6,93	9,23	7,33	6,25
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	6,45	7,03
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	26,98	24,43	23,21	22,20	21,92	26,56	27,87
Jawa Tengah	17,13	16,19	14,64	14,13	13,66	14,36	13,66
DI Yogyakarta	5,32	8,36	6,22	5,49	7,67	4,80	6,72
Jawa Timur	24,31	23,40	21,46	21,13	19,72	20,20	18,39
Banten	-	22,22	21,27	19,14	19,44	21,93	17,69
Bali	2,61	2,32	1,39	1,38	1,90	2,65	1,73
NTT	5,83	3,22	3,19	3,33	4,27	5,57	5,18
NTB	1,68	1,28	1,21	1,28	1,23	2,14	1,78
Kalimantan Barat	6,51	5,70	6,02	5,66	5,80	6,78	6,32
Kalimantan Tengah	5,13	5,21	4,41	6,89	5,64	7,98	7,60
Kalimantan Selatan	22,64	21,63	20,64	18,66	15,74	17,97	19,29
Kalimantan Timur	12,53	12,11	8,18	10,02	8,35	11,66	17,05
Sulawesi Utara	3,28	1,49	2,05	1,86	1,68	2,13	3,31
Sulawesi Tengah	11,49	11,96	8,03	9,26	8,01	9,78	10,10
Sulawesi Selatan	12,08	10,20	10,10	9,58	9,78	10,66	11,03
Sulawesi Tenggara	6,26	6,86	7,24	6,09	5,57	7,53	8,47
Gorontalo	-	7,50	5,44	5,77	6,14	8,22	8,63
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	7,47
Maluku	-	1,19	-	3,98	2,04	3,74	3,77
Maluku Utara	-	2,85	-	3,29	2,67	4,92	6,03
Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-	-	5,23
Papua	7,41	6,05	-	6,18	6,20	6,88	10,65
<b>Indonesia</b>	<b>17,06</b>	<b>15,70</b>	<b>14,58</b>	<b>13,90</b>	<b>13,34</b>	<b>15,02</b>	<b>14,53</b>

Pada Tabel 2.1.3 tampak bahwa selama tahun 2000-2006 ada kecenderungan wanita di daerah perdesaan mulai menunda usia perkawinan pertamanya. Hal ini tercermin dari kecenderungan menurunnya persentase wanita di perdesaan yang melakukan perkawinan pertama di usia kurang dari 16 tahun. Pada tahun 2000 persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya ketika berusia kurang dari 16 tahun masih cukup tinggi, yaitu sebesar 17,06 persen. Penurunan

terus terjadi setiap tahun sampai dengan tahun 2004 menjadi sebesar 13,34 persen. Meskipun pada tahun 2005 sempat mengalami kenaikan menjadi 15,02 persen, namun pada tahun 2006 turun kembali menjadi 14,53 persen. Keadaan ini tidak terlepas dari pengaruh kemajuan teknologi lewat berbagai informasi di media cetak dan elektronik yang berdampak pada perubahan pola pikir yang akan membuka wawasan baru bagi wanita khususnya di perdesaan.

Jika ditinjau menurut provinsi, persentase wanita yang pertama kali kawin di usia kurang dari 16 tahun bervariasi. Persentase tertinggi selama periode tahun 2000-2006 terjadi di provinsi Jawa Barat, yaitu pada tahun 2006 tercatat sekitar 27,87 persen. Selain Jawa Barat, beberapa provinsi juga tercatat memiliki persentase yang cukup tinggi yaitu Kalimantan Selatan (19,29 persen), Jawa Timur (18,39 persen), Banten (17,69 persen) dan Kalimantan Timur (17,05 persen). Sementara itu Bali dan Nusa Tenggara Barat tercatat memiliki persentase terendah yaitu masing-masing 1,73 persen dan 1,78 persen.

### **Rasio Jenis Kelamin**

Perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari perkembangan rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Menurut hasil penghitungan SP 2000 dan SUPAS 2005 rasio jenis kelamin penduduk daerah perdesaan di Indonesia berada di atas 100, yaitu masing-masing 100,8 pada tahun 2000 dan 101,7 pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki perdesaan di Indonesia lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Pada tahun 2000 dan 2005, sebagian besar provinsi memiliki angka rasio jenis kelamin di atas 100. Sedangkan provinsi-provinsi yang rasio jenis kelaminnya di bawah 100 adalah Sumatera Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Rendahnya rasio jenis kelamin di enam provinsi tersebut berkaitan dengan pola

migrasi di provinsi tersebut yaitu banyaknya penduduk yang bermigrasi provinsi lain. Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkenal dengan pengekspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri memiliki rasio jenis kelamin terendah, yaitu

**Tabel 2.1.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Perdesaan menurut Provinsi, 2000 - 2005**

[Diolah dari hasil Sensus Penduduk 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus 2005]

<b>Propinsi</b>	<b>2000</b>	<b>2005</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
N.A. Darussalam	101,8	-
Sumatera Utara	100,2	102,0
Sumatera Barat	96,1	97,5
Riau	106,8	103,8
Jambi	104,3	105,9
Sumatera Selatan	102,1	104,4
Bengkulu	104,1	107,3
Lampung	108,3	109,8
Bangka Belitung	105,1	108,9
Kepulauan Riau		110,1
<b>Sumatera</b>	<b>102,9</b>	<b>104,4</b>
DKI Jakarta	-	-
Jawa Barat	102,1	102,5
Jawa Tengah	100,1	100,3
DI Yogyakarta	96,2	98,9
Jawa Timur	97,6	98,9
Banten	102,4	104,7
<b>Jawa</b>	<b>99,9</b>	<b>100,7</b>
Bali	100,5	103,5
NTT	97,9	100,0
NTB	94,7	92,8
<b>Bali dan Nusa Tenggara</b>	<b>97,3</b>	<b>98,2</b>
Kalimantan Barat	105,6	106,5
Kalimantan Tengah	107,9	107,6
Kalimantan Selatan	100,5	102,1
Kalimantan Timur	112,6	111,4
<b>Kalimantan</b>	<b>105,6</b>	<b>106,3</b>
Sulawesi Utara	106,9	106,2
Sulawesi Tengah	105,8	106,4
Sulawesi Selatan	95,0	94,9
Sulawesi Tenggara	101,0	102,1
Gorontalo	102,7	104,3
<b>Sulawesi</b>	<b>99,3</b>	<b>99,5</b>
Maluku	103,2	103,1
Maluku Utara	106,6	106,2
Papua	111,0	113,2
<b>Maluku dan Papua</b>	<b>107,6</b>	<b>109,1</b>
<b>Indonesia</b>	<b>100,8</b>	<b>101,8</b>

94,7 pada tahun 2000 dan turun menjadi 92,8 pada tahun 2005.

### 2.2. Keluarga Berencana

Pertambahan jumlah penduduk setiap tahun menjadi salah satu masalah kependudukan di Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu usaha pemerintah dalam upaya pengendalian jumlah penduduk ialah mengadakan Program Keluarga Berencana (KB). Indonesia pernah tercatat sebagai negara paling berhasil dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB. Berkat keberhasilan itu Indonesia memperoleh *Population Award* dari PBB dan menjadi kiblat dunia internasional dalam program KB. Ketika itu gaung KB sangat gencar karena semua pihak ikut berpartisipasi dan berperan serta dalam mendukung suksesnya program ini. Tiap hari program KB selalu muncul di media cetak dan elektronik ditambah petugas KB yang jumlahnya ribuan, baik petugas lapangan maupun masyarakat secara bergotong royong menghimbau supaya ber-KB. Namun cerita sukses ini hanya menjadi sejarah, saat ini gema KB tidak segenyar di

**Tabel 2.2.1 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Pernah Menggunakan/Memakai Alat KB dan yang Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB di Daerah Perdesaan, 2000-2006**

[Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)]

Rincian	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Yang Pernah Menggunakan Alat/Cara KB							
- Perdesaan	69,64	68,17	68,52	69,82	71,11	73,61	78,78
- Indonesia	70,55	69,70	68,93	70,78	71,97	74,05	79,76
Yang sedang menggunakan Alat/Cara KB							
- Perdesaan	53,39	51,03	53,44	53,51	56,10	57,67	57,36
- Indonesia	54,35	52,54	54,19	54,54	56,71	57,89	57,91

era tahun 80 dan 90-an, citra KB di masyarakat luar terus menurun, dunia internasional tidak lagi melihat Indonesia sebagai kiblat KB. Gaung gerakan KB lewat penyuluhan-penyuluhan yang dulu aktif dilakukan sekarang berkurang keaktifannya. Hal ini berimbas pada konsumen pemakai alat/cara KB (wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin) yang persentasenya lebih rendah dibandingkan dengan yang pernah menggunakan alat/cara KB (Tabel 2.2.1).

Di daerah perdesaan, persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang pernah menggunakan alat/cara KB selama tahun 2000-2006 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2000 wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang pernah menggunakan alat/cara KB sebesar 69,64 persen. Pada tahun 2001 persentasenya turun sekitar 1,5 persen menjadi 68,17 persen. Namun pada tahun 2002 persentasenya meningkat kembali menjadi 68,52 persen hingga mencapai 78,78 persen pada tahun 2006. Jika dibandingkan dengan angka secara nasional (perkotaan + perdesaan), relatif sedikit perbedaannya. Namun jika dilihat kumulatif peningkatannya, ternyata selama tahun 2000-2006 persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang pernah menggunakan alat/cara KB di perdesaan meningkat sekitar 9 persen, sementara wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB hanya meningkat sekitar 4 persen.

Tabel 2.2.2 menyajikan persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin menurut alat/cara KB yang sedang digunakan di daerah perdesaan. Dibandingkan alat KB lainnya, alat KB suntik paling banyak diminati oleh wanita usia 15-49 tahun di perdesaan. Alat KB lain yang cukup banyak diminati adalah pil, kemudian di urutan selanjutnya alat KB AKDR/IUD, susuk KB, dan lainnya (MOW/tubektomi, MOP/vasektomi, kondom, intravag/tisu, dan alat/cara tardisional).

Selain paling banyak diminati, perkembangan pemakai alat KB suntik ini selama tahun 2000-2006 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2000 konsumen KB suntik baru sebesar 40,32 persen, namun setiap tahunnya

## Bab 2. Kependudukan

Tabel 2.2.2 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Alat /Cara KB yang Sedang Digunakan/Dipakai di Daerah Perdesaan, 2000-2006

[Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)]

Rincian	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Suntikan							
- Perdesaan	40,32	46,98	49,49	51,16	55,97	58,96	59,95
- Indonesia	41,37	47,36	49,09	51,08	54,92	57,27	58,40
Pil							
- Perdesaan	30,15	26,57	25,95	25,56	24,64	23,30	24,64
- Indonesia	28,81	25,99	25,49	25,05	24,52	23,36	24,77
AKDR/IUD							
- Perdesaan	10,74	9,14	8,55	8,52	7,42	6,80	5,60
- Indonesia	13,15	11,31	10,93	10,69	9,64	9,06	7,60
Susuk KB							
- Perdesaan	12,30	11,92	10,52	9,15	7,23	6,14	5,42
- Indonesia	8,97	8,86	7,84	6,98	5,55	4,73	4,27
Lainnya							
- Perdesaan	6,49	5,40	5,48	5,60	4,74	4,80	4,40
- Indonesia	7,70	6,49	6,65	0,18	5,39	5,57	4,96

meningkat hingga mencapai 59,95 persen pada tahun 2006. Sebaliknya pada periode yang sama pemakai alat KB selain suntik mengalami penurunan. Alat KB pil misalnya, pemakainya berkurang dari 30,15 persen pada tahun 2000 menjadi 24,64 persen pada tahun 2006. Kemudian pemakai alat KB AKDR/IUD turun dari 10,74 persen menjadi 5,60 persen, pemakai alat KB susuk turun dari 12,30 persen menjadi 5,42 persen, dan pemakia alat KB lainnya berkurang dari 6,49 persen menjadi 4,40 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa para konsumen alat KB selain suntik beralih ke alat KB suntik. Alasan beralihnya ke alat KB suntik ini karena mudah dijangkau harganya, praktis, efektif, serta minimnya resiko kehamilan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai.

### **2.3. Sumber Penghasilan Utama**

Sesuai dengan kondisi daerahnya yang merupakan areal perdesaan dan masih banyak lahan persawahan, maka sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di perdesaan berasal dari sektor pertanian. Pada Tabel 2.3. terlihat bahwa penghasilan utama sebagian besar penduduk perdesaan bersumber dari sektor pertanian. Menurut hasil penghitungan Potensi Desa (PODES) Sensus Penduduk tahun 2000 tercatat 97,16 persen desa dengan sumber penghasilan mayoritas penduduknya berasal dari pertanian. Kemudian dari hasil penghitungan PODES Sensus Pertanian tahun 2003 dan PODES Sensus Ekonomi tahun 2005 persentasenya meningkat menjadi 97,64 persen dan 97,76 persen. Oleh karena itu peranan sektor pertanian yang begitu besar dalam penciptaan kesempatan kerja terutama di daerah perdesaan perlu ditinjau dan dikaji secara sungguh-sungguh dan mendasar. Untuk itu diperlukan suatu usaha yang mampu menciptakan penambahan output misalnya dengan cara meningkatkan investasi dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan mengembangkan teknologi industri berorientasi pada pertanian.

Pada periode 2000-2005, mayoritas pulau-pulau di Indonesia mengalami peningkatan jumlah desa dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduknya dari sektor pertanian di seluruh propinsinya, kecuali Pulau Sumatera. Sementara itu jumlah desa yang sumber penghasilan utama sebagian besar penduduknya dari sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan besar/eceran, dan jasa rata-rata kurang dari 1 persen. Jika dilihat perkembangannya selama tahun 2000-2005, jumlah desa yang sumber penghasilan utama sebagian besar penduduknya dari sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan besar/eceran, dan jasa rata-rata mengalami penurunan, kecuali sektor pertambangan dan penggalian meningkat dari 0,14 persen menjadi 0,25 persen. Pola seperti ini terjadi di setiap pulau di Indonesia.

## Bab 2. Kependudukan

**Tabel 2.3. Persentase Desa menurut Pulau dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk di Perdesaan, 2000 - 2005**

[Diolah dari Pendataan Potensi Desa Sensus Penduduk 2000, Sensus Pertanian 2003, dan Sensus Ekonomi 2005]

Sektor	Sumatera	Jawa	Bali & Kalimantan Nusa Tenggara	Sulawesi	Maluku & Papua	Indonesia	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Pertanian</b>							
2000	97,54	96,10	98,56	96,67	98,06	98,53	97,16
2003	97,28	97,75	98,55	96,74	98,20	98,21	97,64
2005	97,47	97,26	98,84	97,70	98,45	98,92	97,76
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>							
2000	0,09	0,13	0,03	0,52	0,09	0,07	0,14
2003	0,16	0,06	0,09	0,83	0,22	0,16	0,20
2005	0,38	0,12	0,14	0,44	0,23	0,17	0,25
<b>Industri Pengolahan</b>							
2000	0,22	1,36	0,36	0,72	0,21	0,19	0,66
2003	0,33	0,82	0,35	0,56	0,09	0,18	0,46
2005	0,28	1,26	0,41	0,42	0,12	0,23	0,58
<b>Perdagangan Besar/eceran</b>							
2000	0,52	0,74	0,31	0,55	0,48	0,14	0,55
2003	0,31	0,36	0,26	0,44	0,53	0,12	0,35
2005	0,46	0,56	0,24	0,42	0,43	0,08	0,44
<b>Jasa</b>							
2000	-	-	-	-	-	-	-
2003	0,96	0,57	0,52	1,00	0,55	0,86	0,76
2005	0,75	0,52	0,33	0,62	0,51	0,40	0,58
<b>Lainnya</b>							
2000	1,63	1,67	0,75	1,55	1,16	1,06	1,49
2003	0,96	0,44	0,23	0,44	0,41	0,45	0,60
2005	0,66	0,28	0,05	0,39	0,26	0,19	0,39

### 2.4. Keluarga Pertanian

BPS mendefinisikan keluarga pertanian sebagai keluarga yang sekurang-kurangnya salah satu anggota keluarganya melakukan kegiatan bertani/berkebun, menanam tanaman kayu-kayuan, beternak ikan di kolam, karamba maupun tambak, menjadi nelayan, melakukan perburuan,

atau penangkapan satwa liar, mengusahakan ternak/unggas, atau berusaha dalam jasa pertanian. Menurut hasil penghitungan PODES 2003, terdapat sekitar 38,45 juta keluarga pertanian di daerah perdesaan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebagian besar keluarga bekerja pada sub sektor tanaman pangan dan peternakan, masing-masing sebesar 47,28 dan 30,48 persen. Selebihnya bekerja pada sub sektor perkebunan sebesar 16,58 persen, perikanan sebesar 3,41 persen, dan kehutanan sebesar 2,25 persen.

Gambaran keluarga pertanian menurut provinsi tidak jauh berbeda dengan keadaan secara nasional, yaitu mayoritas bekerja pada sub sektor tanaman pangan, kecuali pada Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku Utara. Di Provinsi Riau dan Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar keluarga pertanian bekerja pada sub sektor perkebunan masing-masing sebanyak 38,74 persen dan 53,23 persen, kemudian di urutan kedua pada sub sektor peternakan masing-masing sebanyak 29,93 persen dan 18,22 persen. Demikian juga Provinsi Jambi dan Maluku Utara sebagian besar keluarga pertanian bekerja pada sub sektor perkebunan masing-masing sebanyak 39,64 persen dan 41,14 persen, hanya saja di urutan kedua pada sub sektor tanaman Pangan masing-masing sebanyak 32,52 persen.

Desa-desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, ternyata juga lebih dominan bekerja pada sub sektor tanaman pangan. Di urutan kedua adalah desa-desa yang mayoritas penduduknya bekerja pada sub sektor perkebunan. Selebihnya merupakan desa-desa yang penduduknya bekerja pada sub sektor perikanan, kehutanan, peternakan, dan sub sektor pertanian lainnya.

Jika dilihat perkembangannya selama tahun 2000-2005, desa yang penduduknya bekerja pada sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan dari 77,82 persen menjadi 66,72 persen. Sebaliknya desa yang penduduknya bekerja pada sub sektor perkebunan pada periode yang sama meningkat dari 16,38 persen menjadi 27,96 persen. Desa yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sub sektor

## Bab 2. Kependudukan

Tabel 2.4.1 Persentase Keluarga Pertanian menurut Propinsi dan Sub Sektor, 2003

[Diolah dari Pendataan Potensi Desa Sensus Pertanian 2003]

Provinsi	Tanaman pangan	Perkebunan	Kehutanan	Peternakan	Perikanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N.A. Darussalam	41.31	18.38	0.54	35.59	4.18
Sumatera Utara	45.71	25.95	0.31	25.25	2.78
Sumatera Barat	52.63	19.75	0.58	23.55	3.48
Riau	21.89	38.74	1.34	29.93	8.09
Jambi	32.52	39.64	0.68	25.67	1.50
Sumatera Selatan	39.59	32.91	0.17	24.76	2.57
Bengkulu	40.30	39.08	0.26	18.34	2.02
Lampung	47.96	17.94	0.71	29.66	3.73
Bangka Belitung	15.78	53.23	0.59	18.22	12.18
<b>Sumatera</b>	<b>41.63</b>	<b>27.03</b>	<b>0.54</b>	<b>27.16</b>	<b>3.64</b>
DKI Jakarta					
Jawa Barat	61.96	5.64	2.57	27.19	2.64
Jawa Tengah	52.26	12.12	4.00	28.76	2.85
DI Yogyakarta	40.76	12.20	7.46	38.57	1.01
Jawa Timur	49.15	10.55	2.22	35.73	2.36
Banten	61.43	9.44	1.16	25.83	2.14
<b>Jawa</b>	<b>53.37</b>	<b>9.95</b>	<b>3.01</b>	<b>31.15</b>	<b>2.53</b>
Bali	34.25	22.78	0.31	40.29	2.38
NTT	47.25	6.60	1.60	40.43	4.12
NTB	33.65	17.75	2.77	43.97	1.85
<b>Bali &amp; Nusa Tenggara</b>	<b>37.38</b>	<b>15.85</b>	<b>1.95</b>	<b>42.26</b>	<b>2.56</b>
Kalimantan Barat	44.90	28.78	1.64	21.58	3.10
Kalimantan Tengah	47.38	21.09	8.28	17.29	5.95
Kalimantan Selatan	56.85	15.56	1.31	17.59	8.69
Kalimantan Timur	46.94	17.10	2.69	22.70	10.57
<b>Kalimantan</b>	<b>48.79</b>	<b>22.43</b>	<b>2.88</b>	<b>19.88</b>	<b>6.02</b>
Sulawesi Utara	37.70	32.28	0.76	22.21	7.06
Sulawesi Tengah	34.60	34.59	1.15	23.97	5.70
Sulawesi Selatan	38.74	20.49	0.79	35.27	4.72
Sulawesi Tenggara	30.24	32.76	1.07	27.10	8.83
Gorontalo	46.04	13.85	1.14	32.36	6.60
<b>Sulawesi</b>	<b>37.25</b>	<b>25.32</b>	<b>0.89</b>	<b>30.73</b>	<b>5.80</b>
Maluku	37.03	31.70	1.72	17.29	12.25
Maluku Utara	32.52	41.14	2.21	17.52	6.62
Papua	46.57	8.91	8.24	31.06	5.22
<b>Maluku dan Papua</b>	<b>41.70</b>	<b>20.33</b>	<b>5.51</b>	<b>25.15</b>	<b>7.31</b>
<b>Indonesia</b>	<b>47.28</b>	<b>16.58</b>	<b>2.25</b>	<b>30.48</b>	<b>3.41</b>

perikanan juga sedikit meningkat meskipun angkanya masih di bawah 5 persen. Tampaknya terjadi pergeseran usaha atau pekerjaan penduduk untuk mendapatkan penghasilan dari sub sektor tanaman pangan ke sub sektor perkebunan dan perikanan. Sementara desa yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sub sektor kehutanan dan peternakan selama tahun 2000-2005 masih di bawah 1,5 persen.

**Tabel 2.4.2 Persentase Desa yang Sebagian Besar Penduduknya Bekerja di Sektor Pertanian menurut Pulau dan Sub Sektor, 2000 - 2005**

[Diolah dari Pendataan Potensi Desa Sensus Penduduk 2000, Sensus Pertanian 2003, dan Sensus Ekonomi 2005]

Sektor	Sumatera	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tanaman Pangan							
2000	67.58	94.86	87.44	72.47	64.60	65.97	77.82
2003	60.73	90.58	80.56	68.56	52.82	57.47	71.73
2005	56.77	90.11	75.39	58.03	46.09	55.23	66.72
Perkebunan							
2000	27.35	2.35	9.46	17.88	27.27	17.11	16.38
2003	29.58	2.64	10.81	16.62	33.65	17.96	17.55
2005	39.82	7.10	21.49	32.50	45.48	30.74	27.96
Kehutanan							
2000	0.24	0.06	0.34	3.71	0.25	6.99	0.98
2003	0.61	0.21	0.19	3.62	0.72	7.39	1.27
2005	0.12	0.09	0.14	2.71	0.36	4.24	0.74
Peternakan							
2000	0.25	0.33	0.25	0.23	0.29	0.34	0.29
2003	0.37	0.16	0.55	0.44	0.33	0.29	0.30
2005	0.09	0.53	0.71	0.65	0.28	0.38	0.37
Perikanan							
2000	3.79	1.72	2.00	4.99	6.59	5.98	3.58
2003	4.81	2.55	2.78	6.55	8.64	7.23	4.70
2005	3.09	2.02	2.16	5.95	7.63	8.44	4.01
Pertanian Lainnya							
2000	0.78	0.68	0.51	0.71	1.01	3.60	0.95
2003 *)	3.90	3.86	5.11	4.21	3.84	9.66	4.44
2005	0.10	0.15	0.11	0.16	0.17	0.96	0.20

Catatan : \*) Termasuk Sub Sektor Hortikultura

Pulau Jawa menempati urutan pertama dalam hal jumlah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian sub sektor tanaman pangan, yaitu sekitar 95 persen pada tahun 2000 dan turun menjadi sekitar 90 persen pada tahun 2005. Sedangkan Pulau Sulawesi menempati urutan terakhir, yaitu sekitar 65 persen pada tahun 2000 dan turun menjadi sekitar 46 persen pada tahun 2005. Secara keseluruhan semua pulau mengalami penurunan jumlah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian sub sektor tanaman pangan. Sebaliknya jumlah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian sub sektor perkebunan mengalami peningkatan pada semua pulau. Untuk sub sektor lainnya keadaannya di masing-masing pulau tidak jauh berbeda dengan kondisi secara nasional.

### **2.5. Usaha Rumah Tangga Perdesaan**

Pada rumah tangga perdesaan sering diasumsikan bahwa sumber utama pendapatan masyarakat berasal dari lahan pertanian, yang akan dikaitkan dengan luas tanah yang dimiliki dengan besarnya pendapatan rumah tangga petani. Masyarakat masih beranggapan bahwa semakin luas tanah yang dimiliki oleh petani, semakin tinggi pendapatan yang diterima. Pada saat ini kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan keluarga tidak lagi sepenuhnya tergantung kepada tanah yang dimiliki sebagai indikator pendapatan utama rumah tangga. Usaha pertanian di perdesaan saat ini sudah tidak begitu dominan dan tidak lagi memberikan sumbangan yang besar bagi pendapatan rumah tangga di perdesaan. Hal ini disebabkan mayoritas rumah tangga perdesaan khususnya yang memiliki lahan yang sempit beranggapan bahwa kegiatan sekitar usaha tani merupakan suatu keharusan (tradisi nenek moyang sejak dahulu), sedangkan bagi rumah tangga yang lain kegiatan usaha tani dapat merupakan jalan menambah tingkat subsistensi. Untuk menambah pendapatannya, masyarakat di beberapa desa membuka usaha selain usaha di sektor pertanian.

Dari hasil PODES 2005 tercatat bahwa desa yang masyarakatnya memiliki usaha bengkel mobil/motor ada

sekitar 23,04 persen. Kemudian desa yang masyarakatnya memiliki usaha persewaan alat pesta dan usaha bengkel alat elektronik masing-masing sekitar 19,86 persen dan 15,55 persen. Selanjutnya adalah usaha bengkel las (13,20 persen), salon kecantikan (11,79 persen), pangkas rambut (10,56 persen), fotocopy ( 5,37 persen), dan agen perjalanan wisata (0,63 persen). Desa yang masyarakatnya memiliki usaha bengkel mobil/motor paling banyak terdapat di Pulau Maluku dan Papua, yaitu sekitar 31,83 persen. Sedangkan paling sedikit terdapat di Pulau Jawa, yaitu sekitar 20,86 persen. Untuk desa yang memiliki usaha persewaan alat pesta juga banyak terdapat di Pulau Maluku dan Papua (24,69 persen), sebaliknya yang paling sedikit di Pulau Kalimantan (11,06 persen).

**Tabel 2.5. Persentase Desa yang Memiliki Unit Usaha Masyarakat menurut Pulau dan Jenis Usaha, 2005**

[Diolah dari Pendataan Potensi Desa Sensus Ekonomi 2005]

Sektor	Sumatera	Jawa	Bali & Kalimantan Nusa Tenggara	Sulawesi	Maluku & Papua	Indonesia	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bengkel mobil/motor	23,43	20,86	26,78	28,78	28,17	31,83	23,04
Bengkel alat elektronik	12,76	17,28	16,06	16,36	13,14	12,68	15,55
Usaha fotocopy	5,23	5,24	7,96	6,38	4,70	7,42	5,37
Agen perjalanan wisata	0,86	0,55	0,42	0,75	0,41	1,13	0,63
Pangkas rambut	11,91	10,19	8,16	12,79	9,11	5,26	10,56
Salon kecantikan	10,65	13,18	8,75	12,59	8,47	6,48	11,79
Bengkel las	14,09	13,14	12,74	11,30	12,74	10,52	13,20
Persewaan alat pesta	21,07	19,56	19,13	11,06	23,26	24,69	19,86

Sepuluh dari penduduk Indonesia tinggal di daerah perdesaan. Oleh karena itu berbagai fasilitas sangat diperlukan untuk dapat memberikan kemudahan bagi penduduk desa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, transportasi sebagai penghubung keluar masuk wilayah dan penghubung dengan daerah lainnya serta aktivitas penduduk desa. Dengan melihat potensi yang ada di desa dapat digambarkan keberhasilan pembangunan serta tingkat kesejahteraan penduduk perdesaan.

#### **3.1. Fasilitas Kesehatan**

Salah satu aspek penting yang dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk adalah kualitas fisik penduduk yang biasanya dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Peningkatan derajat kesehatan penduduk sangat ditunjang oleh tersedianya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di suatu daerah termasuk perdesaan. Penduduk perdesaan yang sehat akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk perdesaan secara keseluruhan.

Fasilitas kesehatan yang umumnya mudah diakses atau dikunjungi penduduk desa untuk berobat dan sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar adalah puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), bidan praktek, polindes dan posyandu. Namun fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut belum menjangkau seluruh daerah perdesaan di Indonesia.

Berbagai informasi mengenai data potensi desa dapat diperoleh melalui hasil pendataan yang dilakukan BPS setiap akan melakukan sensus. Tabel 3.1.1 yang merupakan hasil pendataan Podes untuk Sensus Penduduk 2000, Sensus Pertanian 2003 dan Sensus Ekonomi 2006 menunjukkan bahwa pada tahun 2000 hanya sekitar 8,60 persen dan 31,72 persen dari seluruh desa yang ada di Indonesia yang masing-masing memiliki Puskesmas dan Pustu. Sementara itu di tahun 2003 terjadi penurunan pada fasilitas puskesmas yaitu menjadi 7,99 persen. Salah satu penyebabnya adalah adanya pemekaran wilayah selama periode 2000 - 2005 yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah puskesmas. Tetapi kemudian

### Bab 3. Fasilitas Perdesaan

pada tahun 2005 terjadi peningkatan menjadi 8,67 persen desa yang memiliki fasilitas puskesmas dan 32,27 persen desa yang memiliki fasilitas puskesmas pembantu.

**Tabel 3.1.1. Persentase Banyaknya Desa yang Mempunyai Sarana Kesehatan menurut Pulau dan Jenis Sarana Kesehatan**

Jenis Sarana Kesehatan	Sumatera	Jawa	Bali + Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku + Papua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Puskesmas							
2000	7,20	9,04	10,85	9,39	9,72	8,26	8,60
2003	7,04	8,12	10,04	8,90	8,59	7,28	7,99
2005	7,93	8,31	9,97	10,26	9,66	8,48	8,67
Puskesmas Pembantu							
2000	29,62	26,98	42,62	40,07	39,95	30,19	31,72
2003	29,81	28,42	42,12	39,75	38,36	27,16	32,13
2005	30,61	28,08	41,71	41,97	37,69	27,06	32,27
Praktek Bidan							
2000	27,29	55,30	14,10	21,10	14,70	2,61	32,21
2003	27,46	59,86	14,34	19,12	14,29	5,27	32,29
2005	32,25	67,81	17,36	22,64	15,65	4,56	36,81
Posyandu							
2000	87,71	99,04	98,56	90,85	94,44	63,79	91,61
2003	83,85	98,83	96,66	84,04	86,93	63,67	88,27
2005	82,46	99,36	97,26	87,53	92,96	61,83	88,69
Polindes							
2000	59,39	54,44	54,50	49,06	40,00	26,40	52,05
2003	49,25	49,37	53,47	46,05	35,26	19,95	45,17
2005	39,01	47,32	49,40	43,05	31,05	16,77	39,77

Distribusi menurut pulau menunjukkan bahwa di antara 6 kelompok pulau di Indonesia, Bali dan Nusa Tenggara memiliki persentase terbesar untuk desa dengan fasilitas puskesmas yaitu masing-masing 10,85 persen pada tahun 2000 dan 10,04 persen pada tahun 2003. Sedangkan pada tahun 2005 pulau Kalimantan tercatat memiliki persentase terbesar yaitu 10,26 persen dari seluruh desa yang ada di pulau tersebut. Kondisi serupa juga terjadi pada fasilitas puskesmas pembantu, yaitu tahun 2000 dan 2003 tercatat masing-masing 42,62 persen dan 42,12 persen di antara seluruh desa yang ada di pulau Bali dan Nusa Tenggara yang memiliki fasilitas puskesmas pembantu dan merupakan persentase terbesar di antara pulau-pulau di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2005 Kalimantan tercatat

memiliki persentase terbesar yaitu 41,97 persen. Kondisi ini kemungkinan disebabkan karena terjadi penambahan jumlah desa akibat adanya pemekaran wilayah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara tidak diimbangi dengan pembangunan fasilitas kesehatan di desa-desa baru tersebut.

Hasil Podes 2000 menunjukkan bahwa sekitar 32,21 persen desa di Indonesia memiliki praktek bidan. Berbeda dengan puskesmas dan pustu, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada fasilitas praktek bidan pada tahun 2005 yaitu menjadi 36,81 persen. Jika ditinjau menurut pulau, lebih dari separuh desa yang ada di pulau Jawa sudah memiliki praktek bidan. Bahkan tahun 2005 ada sebanyak 67,81 persen desa di seluruh Jawa yang sudah memiliki praktek bidan.

Upaya untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat suatu wilayah/desa juga dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas kesehatan posyandu. Kegiatan posyandu umumnya dilakukan sebulan sekali untuk memantau tingkat kesehatan bayi dan balita serta ibu hamil. Berdasarkan hasil Podes 2003 tercatat ada sebanyak 88,27 persen desa di Indonesia yang memiliki posyandu. Tetapi angka ini lebih rendah dari hasil Podes sebelumnya yaitu sekitar 91,61 persen. Namun demikian, pada tahun 2005 terjadi sedikit peningkatan yaitu menjadi sekitar 88,69 persen desa di Indonesia yang memiliki posyandu.

Mayoritas desa-desa di setiap pulau sudah memiliki fasilitas posyandu. Bahkan pada tahun 2005 hanya sekitar 0,64 persen desa yang ada di pulau Jawa yang belum memiliki fasilitas ini. Tidak berbeda dengan pulau Jawa, hanya sedikit desa yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang belum memiliki posyandu. Sementara itu, masih cukup banyak desa di Maluku dan Papua yang belum memiliki posyandu, yaitu sekitar 36,21 persen pada tahun 2000. Angka ini terus meningkat menjadi sekitar 38,17 persen pada tahun 2005.

Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin dan poliklinik umumnya berada di daerah perkotaan, hanya desa-desa tertentu saja yang memiliki fasilitas tersebut.

### Bab 3. Fasilitas Perdesaan

Terbatasnya akses dan layanan kesehatan tersebut membuat penduduk yang tinggal di perdesaan sangat kurang mendapatkan layanan kesehatan dari rumah sakit. Tabel 3.1.2 menunjukkan bahwa tingkat kemudahan bagi penduduk Pulau Maluku dan Papua yang tinggal di desa untuk mencapai sarana-sarana kesehatan yang tidak terdapat di desanya sangat rendah. Hasil Podes 2003 menunjukkan bahwa mayoritas desa di Maluku dan Papua yang tidak memiliki rumah sakit sulit untuk menjangkau rumah sakit lain yang berada di luar desanya, yaitu sekitar 90,56 persen. Keadaan ini lebih buruk

**Tabel 3.1.2. Persentase Desa Tanpa Fasilitas Kesehatan Yang Mudah Mencapai Sarana Kesehatan,**

Sarana Kesehatan	Rumah Sakit		Rumah Sakit Bersalin/ Rumah Bersalin		Poliklinik/Balai Pengobatan		Puskesmas		Apotik	
	Mudah	Sulit	Mudah	Sulit	Mudah	Sulit	Mudah	Sulit	Mudah	Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2000										
Sumatera	46,74	53,26	41,17	58,83	49,29	50,71	49,43	50,57	69,76	30,24
Jawa	80,49	19,51	76,22	23,78	82,73	17,27	81,49	18,51	87,92	12,08
Bali + Nusa Tenggara	46,23	53,77	29,92	70,08	30,75	69,25	40,86	59,14	65,85	34,15
Kalimantan	36,31	63,69	23,04	76,96	25,86	74,14	29,65	70,35	48,53	51,47
Sulawesi	44,39	55,61	36,72	63,28	37,47	62,53	40,88	59,12	62,63	37,37
Maluku + Papua	13,67	86,33	10,52	89,48	9,17	90,83	16,27	83,73	20,87	79,13
Total	54,55	45,45	47,96	52,04	52,71	47,29	54,58	45,42	67,10	32,90
2003										
Sumatera	46,38	53,62	46,99	53,01	52,43	47,57	71,5	28,50	52,00	48,00
Jawa	78,73	21,27	79,29	20,71	83,22	16,78	89,80	10,20	82,44	17,56
Bali + Nusa Tenggara	39,18	60,82	33,32	66,68	43,33	56,67	62,83	37,17	37,02	62,98
Kalimantan	33,49	66,51	29,59	70,59	33,08	66,92	54,76	45,24	34,79	65,21
Sulawesi	44,95	55,05	40,91	59,09	44,81	55,19	69,81	30,19	48,15	51,85
Maluku + Papua	9,44	90,56	8,68	91,32	17,62	82,38	31,64	68,36	10,30	89,70
Total	51,36	48,64	50,25	49,75	55,36	44,64	71,37	28,63	54,80	45,20
2005										
Sumatera	52,18	47,82	51,88	48,12	57,78	42,22	73,88	26,12	56,03	43,97
Jawa	81,16	18,84	82,10	17,90	85,59	14,41	90,80	9,20	84,57	15,43
Bali + Nusa Tenggara	43,52	56,48	37,70	62,30	45,84	54,16	64,05	35,95	41,53	58,47
Kalimantan	37,61	62,39	33,12	66,88	36,18	63,82	57,12	42,88	38,68	61,32
Sulawesi	46,88	53,12	44,82	55,18	46,70	53,30	69,99	30,01	49,38	50,62
Maluku + Papua	15,85	84,15	12,75	87,25	21,56	78,44	37,35	62,65	14,85	85,15
Total	55,37	44,63	54,00	46,00	58,53	41,47	73,32	26,68	57,85	42,15

dibandingkan hasil Podes sebelumnya yaitu sekitar 86,33 persen. Tetapi pada tahun 2005 turun menjadi sekitar 84,15 persen.

Puskesmas sebagai salah satu fasilitas layanan kesehatan dasar belum dimiliki semua desa yang ada di Indonesia. Dari hasil Podes 2000 tercatat ada sebanyak 45,42 persen desa tanpa puskesmas yang sulit untuk menjangkau fasilitas tersebut. Namun dengan adanya pembangunan fasilitas kesehatan di desa, terjadi penurunan yang signifikan selama periode 5 tahun berikutnya, yaitu menjadi 28,63 persen desa pada tahun 2003 dan 26,68 persen desa pada tahun 2005. Jika dilihat per pulau ternyata pada tahun 2000 hampir 83,73 persen desa-desa yang ada di Pulau Maluku dan Papua tidak memiliki puskesmas dan sulit untuk menjangkau fasilitas tersebut. Tetapi kemudian terjadi penurunan yang cukup tajam yaitu menjadi 68,36 persen pada tahun 2003 dan 62,65 persen pada tahun 2005.

Selain fasilitas dan sarana kesehatan, perlu diperhatikan juga prasarana kesehatan yaitu tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan. Dari hasil Podes 2003 diketahui bahwa kurang dari 10 persen desa memiliki tenaga kesehatan dokter. Angka ini lebih rendah dari hasil Podes tahun 2000. Tetapi hasil Podes 2005 menunjukkan adanya peningkatan persentase desa yang memiliki tenaga kesehatan dokter yaitu menjadi 10,42 persen. Jika dilihat per pulau, hasil Podes 2000, 2003 dan 2005 menunjukkan bahwa tenaga dokter yang tinggal di desa-desa tersebut yang ada di Pulau Maluku dan Papua masih dibawah 6 persen, demikian pula untuk desa-desa di Pulau Kalimantan dan Sumatera masih di bawah 10 persen.

Desa-desa yang memiliki tenaga kesehatan bidan dari hasil Podes tahun 2000 tercatat 68,52 persen, namun dari hasil Podes tahun 2003 terjadi penurunan yang cukup tinggi yaitu menjadi 61,00 persen desa. Kemudian, pada tahun 2005 terjadi peningkatan menjadi 66,02 persen.

### Bab 3. Fasilitas Perdesaan

Selain bidan, dukun bayi, baik yang terlatih maupun yang tidak terlatih, juga cukup banyak tersedia di perdesaan. Dari hasil Podes 2000 tercatat masing-masing sekitar 69,46 dan 51,11 persen desa yang memiliki dukun bayi terlatih dan tidak terlatih. Namun keberadaan dukun bayi berkurang masing-masing menjadi 64,66 persen desa dan 46,41 persen desa pada tahun 2005.

**Tabel 3.1.3. Persentase Desa yang Memiliki Tenaga Kesehatan Menurut Pulau dan Jenis Tenaga Kesehatan**

Tenaga Kesehatan	Sumatera	Jawa	Bali + Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku + Papua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dokter							
2000	8,17	13,09	14,35	8,33	10,73	5,12	10,29
2003	8,74	11,56	12,05	8,32	10,41	4,03	9,57
2005	9,58	12,96	12,59	8,99	10,54	4,15	10,42
Bidan							
2000	69,44	75,97	68,42	61,34	61,16	49,69	68,52
2003	60,11	71,58	65,75	50,32	56,91	40,47	61,00
2005	62,46	79,98	73,40	55,62	61,60	41,86	66,02
Dukun Bayi Terlatih							
2000	54,88	86,55	77,66	60,93	78,00	45,75	69,46
2003	52,93	83,26	77,53	60,88	78,33	42,84	66,73
2005	47,99	81,97	79,47	59,05	76,82	42,87	64,66
Dukun Bayi Tidak Terlatih							
2000	51,24	40,25	71,75	61,65	63,14	51,16	51,11
2003	46,22	33,32	55,70	55,66	55,04	54,08	45,45
2005	47,43	33,16	58,18	57,76	55,11	55,40	46,41

Hasil Podes 2003 menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang sifatnya profesional di Pulau Jawa masing-masing ada sekitar 11,56 persen desa yang memiliki dokter dan 71,58 persen desa yang memiliki bidan. Sedangkan untuk tenaga dukun bayi terlatih sekitar 83,26 persen desa. Pada tahun 2005, desa-desa di Pulau Jawa yang memiliki dukun bayi terlatih mengalami penurunan menjadi 81,97 persen, sedangkan untuk tenaga kesehatan bidan dan dokter mengalami peningkatan masing-masing menjadi 79,98 persen desa dan 12,96 persen desa.

**3.2. Fasilitas Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam membangun suatu daerah supaya maju dan mandiri. Karena pendidikan merupakan salah satu penunjang dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung program pembangunan daerah. Keberhasilan pendidikan harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah, peningkatan mutu tenaga pengajarnya dan melakukan berbagai program pendidikan seperti program wajib belajar. Dari hasil Podes dapat diperoleh informasi fasilitas pendidikan yang dapat memberikan gambaran jumlah fasilitas pendidikan yang dapat digunakan sebagai sarana memperoleh kesempatan yang luas bagi penduduk desa untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai. Pembangunan sarana gedung sekolah

**Tabel 3.2.1 Persentase Banyaknya Desa yang Mempunyai Fasilitas Pendidikan menurut Pulau dan Tingkat Pendidikan**

Fasilitas Pendidikan	Sumatera	Jawa	Bali + Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku + Papua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TK							
2000	15,03	65,12	29,22	19,88	31,62	7,61	34,53
2003	16,45	67,09	31,38	22,87	36,55	6,78	35,20
2005	22,89	74,10	38,19	29,95	47,87	10,02	42,26
SD dan sederajat							
2000	77,84	99,39	96,95	93,41	94,20	77,58	89,54
2003	76,60	99,35	97,13	92,13	95,06	70,21	88,04
2005	76,33	99,33	96,89	93,38	94,48	71,68	88,24
SLTP dan sederajat							
2000	22,08	32,88	29,25	21,63	26,30	14,47	26,05
2003	22,54	31,74	27,78	23,55	27,91	13,13	25,63
2005	24,45	34,58	28,90	26,40	29,07	15,01	27,82
SMU dan sederajat + SMK							
2000	7,68	9,69	8,93	5,99	7,88	3,86	8,03
2003	9,26	9,08	8,53	7,69	8,64	4,31	8,51
2005	11,34	11,51	11,05	9,54	10,65	6,18	10,68

ternyata belum meliputi seluruh desa yang ada di Indonesia serta belum merata di semua tingkat/jenjang pendidikan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada keberpihakan kepada orang miskin (*pro-poor*). Biaya pendidikan yang ditawarkan di Indonesia saat ini sangat mahal dan sulit dijangkau oleh sebagian besar penduduk khususnya penduduk yang tinggal di desa. Karenanya banyak penduduk desa yang memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka, sebab beban biaya pendidikan yang ada tidak seimbang dengan kemampuan keuangan mereka. Masyarakat desa selalu mengatakan bahwa "janganakan untuk menyekolahkan anak, untuk makan sehari-hari saja, susahnya minta ampun". Karenanya tingkat pendidikan penduduk perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan.

Keberadaan fasilitas pendidikan formal yang ada di desa-desa di Indonesia untuk tingkat SD dan sederajat sudah cukup memadai, yaitu dari hasil Podes 2000 tercatat sekitar 89,54 persen desa yang memiliki fasilitas/gedung SD dan sederajat. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2003 menjadi 88,04 persen desa, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2005 menjadi 88,24 persen. Berdasarkan hasil Podes tahun 2000, 2003 dan 2005 tercatat lebih dari 99 persen desa yang ada di Pulau Jawa sudah memiliki fasilitas Sekolah Dasar dan sederajat. Banyaknya desa yang sudah memiliki fasilitas SD dan sederajat ini juga tercatat di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.1. Sedangkan desa-desa yang memiliki fasilitas gedung SD dan sederajat di Pulau Sumatera serta Pulau Maluku dan Papua tercatat antara 70 - 78 persen.

Pemerintah saat ini terus menambah gedung-gedung sekolah baru sebagai fasilitas pendidikan dengan tujuan dapat menciptakan suasana belajar dan mengajar yang lebih baik walaupun belum menjangkau semua desa. Tidak hanya pendidikan dasar tetapi juga pendidikan tingkat lanjut terutama setelah diberlakukannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Dilihat dari perkembangannya, hasi

Podes 2003 menunjukkan bahwa fasilitas sekolah tingkat SLTP baru dimiliki oleh 26,05 persen desa. Kemudian hasil Podes berikutnya menunjukkan adanya sedikit penurunan yaitu menjadi 25,63 persen desa. Namun demikian, pada tahun 2005 terjadi peningkatan yaitu menjadi 27,82 persen desa. Diantara enam pulau besar yang ada di Indonesia, Pulau Jawa tercatat memiliki jumlah desa dengan fasilitas SLTP terbanyak yaitu sekitar 34,58 persen pada tahun 2005. Sedangkan Pulau Maluku dan Papua memiliki persentase paling kecil yaitu sekitar 15,01 persen.

Hasil Podes juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin sedikit pula desa yang memiliki fasilitas gedung sekolah untuk tingkat pendidikan tersebut. Pada jenjang pendidikan SMU dan sederajat termasuk SMK tercatat bahwa pada tahun 2000 dan 2003 kurang dari 10 persen desa baik yang ada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa yang memiliki gedung sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Tetapi hasil Podes 2005 menunjukkan sedikit peningkatan yaitu menjadi lebih dari 10 persen kecuali Pulau Kalimantan (9,54 persen) serta Pulau Maluku dan Papua (6,18 persen).

Ketersediaan fasilitas pendidikan pra sekolah berupa Taman Kanak-kanak (TK) yang ditujukan bagi anak-anak usia 4-6 tahun menunjukkan bahwa pada tahun 2003 hanya 35,20 persen desa yang memiliki sarana tersebut. Angka ini meningkat menjadi 42,26 persen pada tahun 2005. Pulau Jawa tercatat memiliki persentase terbesar untuk desa-desa yang memiliki fasilitas TK yaitu 74,10 persen pada tahun 2005, sedangkan pulau-pulau lainnya berkisar antara 10 - 48 persen.

Selain fasilitas pendidikan formal, fasilitas pendidikan non formal juga memberikan kontribusi bagi peningkatan pendidikan masyarakat termasuk di perdesaan. Pendidikan ini meliputi kursus keterampilan yang dapat membantu penduduk untuk memiliki ketrampilan, kepandaian atau memiliki nilai tambah tersendiri bagi orang yang mengikutinya. Kursus adalah penyelenggaraan pendidikan non formal yang mempunyai kurikulum tertentu, jangka waktu tertentu, dan

tempat tertentu, yang dikelola oleh suatu lembaga/yayasan. Lembaga pendidikan keterampilan yang sebagian besar banyak dimiliki desa-desa adalah memasak, menjahit dan kecantikan, montir mobil/motor dan elektronik.

Fasilitas lembaga pendidikan keterampilan menjahit dan kecantikan tercatat yang terbanyak di antara fasilitas lainnya. Hasil Podes 2000 menunjukkan ada sebanyak 3,16 persen desa yang memiliki lembaga keterampilan tersebut, kemudian meningkat masing-masing menjadi 3,48 persen dan 2,98 persen pada tahun 2003 dan 2005. Selama kurun waktu 2000-2005 desa-desa yang mempunyai lembaga pendidikan keterampilan montir mobil/motor dan elektronik terus mengalami penurunan dari 1,54 persen desa pada tahun 2000 menjadi hanya 1,29 persen pada tahun 2005.

**Tabel 3.3.1. Persentase Banyaknya Desa yang Mempunyai Lembaga Pendidikan Keterampilan menurut Pulau dan Jenis Keterampilan**

Lembaga Pendidikan Keterampilan	Sumatera	Jawa	Bali + Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku + Papua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Memasak							
2000	0,29	0,28	0,42	0,24	0,30	0,46	0,30
2003	0,53	0,44	0,44	0,53	0,36	0,23	0,45
2005	0,32	0,23	0,11	0,16	0,18	0,11	0,23
Menjahit & Kecantikan							
2000	3,24	4,62	2,12	1,00	2,43	0,80	3,16
2003	3,64	5,01	2,55	1,38	3,28	0,66	3,48
2005	3,81	4,14	1,90	1,04	1,74	0,53	2,98
Montir Mobil/ Motor & Elektronik							
2000	1,77	1,60	1,36	1,25	1,65	0,53	1,54
2003	1,88	1,33	1,10	1,02	1,82	0,37	1,44
2005	2,13	1,01	0,79	1,06	0,91	0,21	1,29
Lainnya							
2000	6,10	6,18	6,42	3,90	6,13	3,94	5,78
2003	1,95	2,54	1,71	1,03	1,26	0,53	1,82
2005	3,29	4,3	2,82	2,33	1,80	0,99	3,09

### **3.3. Fasilitas Perumahan dan Lingkungan**

Upaya peningkatan kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih dan teratur. Sementara itu kebersihan dan keteraturan lingkungan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai, salah satunya adalah tempat buang air besar. Dari seluruh desa yang ada di wilayah Indonesia mayoritas rumah tangga menggunakan bukan jamban sebagai fasilitas buang air besar, yaitu pada tahun 2000 ada sekitar 52,60 persen. Tetapi angka ini terus menurun sampai periode 2005 dan digantikan dengan fasilitas jamban baik jamban sendiri, jamban bersama maupun jamban umum. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.3.2. Persentase banyaknya desa dengan sebagian besar rumah tangganya menggunakan jamban sendiri sebagai fasilitas buang air besar menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2000 ada sebanyak 38,25 persen desa kemudian meningkat menjadi 44,80 persen pada tahun 2005. Sedangkan untuk tempat buang air besar jamban bersama dan jamban umum selama periode 2000-2005 masih dibawah 7 persen.

Desa-desanya yang berada di Pulau Maluku dan Papua mayoritas menggunakan bukan jamban sebagai fasilitas buang air besar, yaitu pada tahun 2003 sekitar 69,58 persen dan pada tahun 2005 masih ada sebanyak 69,25 persen desa. Begitu juga dengan desa-desanya di Kalimantan 57,60 persen desa yaitu pada tahun 2003 dan pada tahun 2005 sebanyak 56,12 persen desa yang menggunakan bukan jamban. Fasilitas jamban sendiri cukup banyak terdapat di desa-desanya yang berada di pulau Sulawesi dan pulau Jawa. Dari hasil Podes 2005 tercatat 54,56 persen desa di pulau Sulawesi dan 52,59 persen desa di pulau Jawa menggunakan jamban sendiri sebagai fasilitas tempat buang air besar mayoritas rumah tangga.

Kegiatan olah raga merupakan salah satu kegiatan fisik yang memiliki banyak kelebihan, salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan. Sejalan dengan itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga sangat diharapkan untuk

**Tabel 3.3.2. Persentase Banyaknya Desa menurut Pulau dan Jenis Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga**

Tempat Buang Air Besar	Sumatera	Jawa	Bali + Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku + Papua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jamban Sendiri							
2000	35,14	43,17	46,64	25,34	50,89	18,31	38,25
2003	40,72	49,80	51,32	32,86	56,43	19,33	43,44
2005	42,46	52,59	43,85	36,32	54,56	21,05	44,80
Jamban Bersama							
2000	2,22	5,48	2,36	4,10	1,79	3,74	3,55
2003	4,15	5,93	2,73	5,64	2,43	3,04	4,46
2005	3,75	4,48	2,55	4,15	2,66	2,89	3,73
Jamban Umum							
2000	8,97	4,34	0,39	2,90	2,46	9,13	5,60
2003	10,61	4,60	0,41	3,90	2,50	8,05	6,30
2005	9,79	3,75	1,06	3,41	2,44	6,81	5,59
Bukan Jamban							
2000	53,68	47,01	50,61	67,66	44,86	68,82	52,60
2003	44,52	39,67	45,54	57,60	38,64	69,58	45,80
2005	43,99	39,18	52,55	56,12	40,34	69,25	45,88

meningkatkan kualitas kesehatan. Untuk itu perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana olah raga.

Kelengkapan fasilitas desa yang memiliki lapangan/gelanggang olahraga sebagai salah satu sarana untuk berolah raga bagi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Berdasarkan hasil Podes tercatat lapangan/gelanggang olah raga yang paling banyak dimiliki oleh desa-desa adalah bola voli yaitu sekitar 75,09 persen desa (2000), meningkat menjadi 78,26 persen desa (2003) dan sedikit menurun pada tahun 2005 menjadi 78,09 persen desa. Sedangkan fasilitas lapangan/gelanggang olah raga sepak bola baru dimiliki olah sekitar 53,97 persen desa pada tahun 2000 kemudian meningkat menjadi 57,47 persen des. Namun pada tahun 2005 terjadi penurunan menjadi 55,50 persen desa. Fasilitas olahraga lainnya yang cukup banyak dimiliki desa adalah lapangan bulutangkis. Dari hasil Podes 2005 tercatat 40,94 persen desa di Indonesia sudah memiliki lapangan bulutangkis.

**Tabel 3.3.3. Persentase Banyaknya Desa yang Memiliki Lapangan/Gelanggang Olah Raga menurut Pulau dan Jenis Lapangan Olah Raga**

Lapangan/ Gelanggang Olah Raga	Sumatera	Jawa	Bali + Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku + Papua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sepak Bola							
2000	44,92	61,21	51,03	55,66	62,33	48,00	53,97
2003	48,52	64,80	52,42	62,86	68,68	47,17	57,47
2005	49,85	63,09	49,35	61,01	59,43	41,88	55,50
Bola Voli							
2000	69,79	81,60	77,89	70,54	81,24	62,00	75,09
2003	72,98	84,11	82,18	77,14	86,36	64,56	78,26
2005	75,69	84,80	76,79	77,52	80,30	61,01	78,09
Bulu Tangkis							
2000	35,05	49,42	21,67	37,58	37,16	6,74	37,65
2003	38,41	51,44	22,35	45,55	43,61	6,22	40,01
2005	40,87	54,23	19,45	46,21	38,57	6,03	40,94
Lainnya							
2000	3,91	7,20	5,58	4,67	5,52	2,34	5,26
2003	3,35	5,26	2,90	3,66	4,02	1,36	3,85
2005	4,94	8,11	4,55	5,63	6,46	1,94	5,89

Salah satu fasilitas pokok yang penting agar rumah menjadi nyaman untuk ditinggali adalah tersedianya aliran listrik. Listrik merupakan sumber penerangan yang paling baik dibandingkan sumber penerangan lainnya seperti petromak dan pelita. Hal ini disebabkan karena listrik lebih praktis dan modern, serta tidak menimbulkan polusi. Listrik PLN adalah fasilitas penerangan yang paling banyak digunakan oleh rumahtangga di Indonesia, baik berfungsi sebagai sarana penerangan juga dipakai untuk kebutuhan rumahtangga lainnya. Pada tahun 2000 sekitar 77,54 persen desa sudah dialiri listrik PLN, kemudian sedikit menurun pada tahun 2003 menjadi 76,00 persen desa. Pada tahun 2005, jumlah desa yang sudah menikmati listrik meningkat lagi menjadi 78,12 persen.

Bila dilihat per pulau, desa-desa yang merupakan pengguna listrik PLN sudah hampir merata di Pulau Jawa yaitu mencapai 97,19 persen desa (tahun 2000) dan dari hasil Podes 2005 sudah mencapai 98,96 persen. Sebaliknya, desa-desa

### Bab 3. Fasilitas Perdesaan

pengguna listrik di Maluku dan Papua pada tahun 2000, baru mencapai 26,50 persen desa dan pada tahun 2005 mengalami sedikit peningkatan menjadi 27,54 persen desa.

**Tabel 3.3.4. Persentase Banyaknya Desa yg Memiliki Keluarga Pengguna Listrik menurut Pulau**

Pulau	PLN			Non PLN		
	2000	2003	2005	2000	2003	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	77,51	78,75	80,29	22,50	28,35	25,91
Jawa	97,19	98,57	98,96	9,33	9,31	4,70
Bali + Nusa Tenggara	57,80	53,79	57,02	22,06	39,84	45,40
Kalimantan	60,29	59,23	62,60	34,61	44,71	44,32
Sulawesi	74,58	71,64	78,03	25,72	29,17	33,31
Maluku + Papua	26,50	25,58	27,54	14,40	22,88	23,13
Total	77,54	76,00	78,12	19,03	24,55	23,21

Jenis tempat pembuangan sampah yang digunakan oleh rumah tangga merupakan salah satu perilaku masyarakat yang terkait dengan kebersihan dan kesehatan. Untuk pendataan Podes, BPS mengelompokkan jenis-jenis tempat pembuangan sampah ke dalam empat kelompok yaitu tempat sampah kemudian diangkut, dalam lubang dibakar, sungai dan lainnya. Membuang sampah di tempat sampah kemudian diangkut merupakan sarana yang paling baik. Namun mayoritas rumah tangga membuangnya di dalam lubang kemudian dibakar. Ini ditunjukkan dari hasil Podes yang mencatat sekitar 62,95 persen desa dengan mayoritas rumah tangga membuang sampah di dalam lubang kemudian dibakar. Bahkan angka ini terus meningkat menjadi 65,68 persen pada tahun 2003 dan 66,72 persen pada tahun 2005. Sedangkan untuk fasilitas pembuangan di tempat sampah kemudian diangkut hanya terdapat di sekitar 1,95 persen desa pada tahun 2005.

Banyaknya desa yang sebagian rumahtangganya membuang sampah ke dalam lubang lalu dibakar mencatat persentase tertinggi di seluruh pulau kecuali di Pulau Maluku dan Papua selama periode 2000-2005. Persentase tertinggi

**Tabel 3.3.5. Persentase Banyaknya Desa menurut Pulau dan Jenis Tempat Membuang Sampah Sebagian Besar Keluarga**

Jenis Tempat Membuang Sampah	Sumatera	Jawa	Bali + Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku + Papua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tempat Sampah Kemudian Diangkut							
2000	3,15	2,61	3,91	1,84	3,11	1,47	2,77
2003	2,77	1,84	2,73	1,83	3,65	1,15	2,36
2005	2,67	1,29	1,95	2,17	2,36	0,63	1,95
Dalam Lubang Dibakar							
2000	59,28	81,67	49,36	42,25	64,14	26,69	62,95
2003	64,74	84,05	53,99	44,39	70,41	28,90	65,68
2005	70,60	82,31	49,08	46,44	67,75	30,09	66,72
Sungai							
2000	8,57	1,75	7,24	21,61	1,97	6,64	6,55
2003	7,38	1,70	2,38	26,23	2,75	4,72	6,38
2005	7,32	2,39	2,90	26,42	3,09	5,53	6,73
Lainnya							
2000	29,00	14,01	44,62	31,24	30,57	65,19	27,73
2003	25,11	12,41	40,90	27,55	23,18	65,22	25,59
2005	19,41	14,02	46,07	24,97	26,80	63,75	24,60

yang dilakukan sebagian besar rumahtangga di Pulau Maluku dan Papua dalam membuang sampah adalah dengan cara lainnya.

### 3.4. Fasilitas Komunikasi dan Informasi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memberi dampak pada perkembangan jenis dan keragaman alat media massa sehingga menjadi lebih canggih dan modern. Sejalan dengan makin berkembangnya teknologi di bidang elektronika dan informasi, peran media cetak semakin tergeser oleh media elektronik. Media elektronik merupakan alat penyampaian informasi yang paling cepat, efektif dan efisien dengan cakupan yang sangat luas, yaitu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan tanpa membedakan status sosial dan ekonomi. Dalam era globalisasi sarana komunikasi dan informasi yang memadai sangat dibutuhkan tidak hanya oleh penduduk di perkotaan tetapi di desapun sangat membutuhkan fasilitas tersebut.

### Bab 3. Fasilitas Perdesaan

Berdasarkan hasil Podes 2000 dan 2003 desa-desa yang mempunyai prasarana komunikasi untuk pos keliling

**Tabel 3.4.1. Persentase Banyaknya Desa yang Memiliki Prasarana Komunikasi menurut Pulau**

Prasarana Komunikasi	Sumatera	Jawa	Bali + Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku + Papua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Telepon Umum Koin							
2000	1,54	13,23	6,58	1,30	3,59	1,74	5,98
2003	1,79	7,86	3,93	1,52	4,08	1,35	4,00
2005	1,52	3,03	2,25	2,03	2,83	1,03	2,20
Wartel							
2000	2,81	21,62	4,63	2,85	4,47	1,81	9,35
2003	10,44	39,51	11,38	10,24	16,54	3,75	19,56
2005	20,40	58,76	20,15	15,73	32,24	7,76	32,07
Warnet							
2000	0,47	1,46	0,61	0,39	0,57	0,29	0,80
2003	1,18	0,91	1,25	0,99	1,54	0,80	1,10
2005	0,60	0,59	0,87	0,44	0,88	0,44	0,62
Kantor Pos/ Kantor Pos Pembantu							
2000	3,95	5,02	5,38	6,40	4,70	3,02	4,65
2003	3,90	4,03	3,58	5,49	3,66	2,55	3,93
2005	3,44	3,38	3,01	4,20	3,06	1,52	3,26
Pos Keliling							
2000	17,29	28,29	11,24	12,94	11,11	1,74	18,45
2003	17,84	34,82	13,60	9,92	13,63	2,51	20,17
2005	14,15	21,41	11,35	7,91	8,62	2,21	13,89

mengalami peningkatan dari 18,45 persen menjadi 20,17 persen. Namun pada tahun 2005 desa-desa yang memiliki prasarana pos keliling mengalami penurunan menjadi 13,89 persen. Prasarana komunikasi yang sangat pesat perkembangannya sampai ke desa adalah wartel, yaitu dari hasil Podes tahun 2000 tercatat baru 9,35 persen desa, meningkat menjadi 32,07 persen desa pada tahun 2005. Sebaliknya desa-desa yang mempunyai prasarana kantor pos/ kantor pos pembantu terus mengalami penurunan. Berdasarkan hasil podes tahun 2000 diketahui ada sebanyak 4,65 persen desa dengan sarana kantor pos/kantor pos pembantu, kemudian dari hasil Podes tahun 2005 tercatat hanya tinggal 3,26 persen desa.

Persentase desa-desa di Pulau Jawa yang mempunyai prasarana wartel dari hasil podes tahun 2005 tercatat sebanyak 58,76 persen desa. Kenaikan ini sangat signifikan bila dibandingkan dengan hasil podes tahun 2000 yang baru mencapai 21,62 persen desa. Berbeda dengan wartel, persentase desa-desa di Pulau Jawa yang memiliki warnet justru berkurang yaitu dari 1,46 persen desa pada tahun 2000 menjadi 0,91 persen desa pada tahun 2005.

#### **3.5. Infrastruktur**

Salah satu prasarana transportasi yang amat menunjang kelancaran roda perekonomian suatu wilayah/daerah adalah jalan. Untuk kelancaran pembangunan suatu wilayah maka peningkatan pembangunan prasarana jalan perlu diprioritaskan guna lebih memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus pengangkutan komoditi pertanian dan perdagangan. Pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan sangat berpengaruh untuk membuat suatu daerah menjadi terbuka dan berkembang.

Kondisi permukaan jalan-jalan di daerah perdesaan di Indonesia dari hasil Podes tahun 2000 menunjukkan ada sekitar 46,95 persen desa dengan permukaan jalan aspal/beton con blok, 29,38 persen desa dengan permukaan jalan diperkeras, serta 16,26 persen desa permukaan jalannya masih tanah dan lainnya. Dari hasil podes tahun 2005 menunjukkan adanya peningkatan persentase desa untuk semua jenis permukaan jalan.

Fasilitas penerangan jalan di suatu wilayah sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakat selain itu juga dapat mengurangi tingkat kejahatan. Dengan adanya penerangan terutama di jalan-jalan utama desa membuat desa tersebut tidak lagi sebagai desa yang terisolir dari lingkungan sekitarnya. Dari hasil Podes 2000 diperoleh informasi bahwa masih banyak desa-desa yang tidak mempunyai penerangan pada jalan utama desanya yaitu ada sekitar 65,43 persen desa, sedangkan desa yang sudah ada penerangan jalan dengan listrik PLN dan non PLN baru mencapai 22,35 persen desa dan desa

**Tabel 3.5.1. Persentase Banyaknya Desa menurut Pulau dan Jenis Permukaan Jalan**

Jenis Permukaan Jalan	Sumatera	Jawa	Bali + Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku + Papua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aspal/Beton Con Blok							
2000	47,08	54,19	53,52	32,24	49,83	20,48	46,95
2003	47,28	52,46	44,85	29,70	45,61	21,26	44,63
2005	46,34	62,42	50,89	31,59	49,57	22,92	48,56
Diperkeras							
2000	30,91	38,83	19,95	15,69	26,01	8,12	29,38
2003	30,94	41,69	24,97	18,15	28,51	10,23	30,57
2005	31,72	32,67	24,27	19,58	29,49	11,18	28,37
Tanah dan Lainnya							
2000	17,71	6,85	24,89	21,30	18,59	37,44	16,26
2003	17,14	5,56	22,02	22,50	13,15	40,38	15,86
2005	19,68	4,78	24,13	31,36	17,91	45,23	18,45
Jumlah							
2000	95,71	99,86	98,36	69,24	94,44	66,04	92,59
2003	95,36	99,70	91,85	70,35	87,26	71,87	91,05
2005	97,73	99,87	99,30	82,54	96,98	79,33	95,39

yang memakai penerangan jalan non listrik ada sebanyak 11,78 persen desa. Selama beberapa tahun berikutnya terjadi perkembangan yang menggembirakan, desa-desa yang tidak ada penerangan dan desa-desa dengan penerangan jalan utama desanya non listrik semakin menurun yaitu pada tahun 2005 tercatat masing-masing sekitar 50,29 persen desa dan 0,45 persen desa saja. Sebaliknya desa-desa yang menggunakan penerangan jalan utama berasal dari listrik PLN dan non PLN meningkat yaitu menjadi sekitar 49,25 persen desa pada tahun 2005.

**Tabel 3.5.2. Persentase Banyaknya Desa menurut Pulau dan Fasilitas Penerangan Jalan Utama Desa**

Fasilitas Penerangan Jalan	Sumatera	Jawa	Bali + Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku + Papua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Listrik PLN & Non PLN							
2000	20,21	29,15	20,59	25,99	16,46	5,39	22,35
2003	34,44	72,75	23,10	38,65	26,57	7,80	42,61
2005	41,81	80,13	27,09	37,44	40,08	9,74	49,25
Non Listrik							
2000	4,04	27,96	2,39	5,06	2,85	1,81	11,78
2003	1,35	0,68	0,16	0,78	0,32	0,36	0,80
2005	0,74	0,28	0,16	0,57	0,14	0,44	0,45
Tidak ada Penerangan							
2000	75,12	42,32	76,97	68,86	80,47	92,58	65,43
2003	57,95	19,67	78,31	63,96	64,58	87,61	51,26
2005	57,44	19,60	72,75	62,02	59,79	89,60	50,29

**4.1. Kesehatan**

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari indikator kesehatan yang menggambarkan kualitas penduduk secara fisik. Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik. Dengan fisik yang baik tersebut, maka segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari akan berjalan dengan lancar, baik bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Salah satu indikator yang menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

**Tabel 4.1.1. Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006**

Tahun	Angka Kesakitan		Rata-rata Lama Sakit	
	Perdesaan	Indonesia	Perdesaan	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	15,4	15,1	6,3	6,1
2001	15,1	14,7	5,8	5,6
2002	15,8	15,3	6,0	5,8
2003	15,0	14,7	5,9	5,7
2004	16,8	16,2	5,7	5,5
2005	16,8	15,8	6,0	5,8
2006	18,4	17,4	5,7	5,6

Tabel 4.1.1 menggambarkan angka kesakitan dan rata-rata lama sakit penduduk menurut daerah berdasarkan data susenas. Selama periode 2000-2006, penduduk perdesaan cenderung lebih banyak mengalami gangguan kesehatan, misalnya saja pada tahun 2006, angka kesakitan di perdesaan 18,4 persen, sementara angka kesakitan nasional hanya 17,4 persen. Demikian halnya dengan rata-rata lama sakit, penduduk di perdesaan sedikit lebih lama mengalami gangguan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perdesaan lebih rentan terhadap suatu penyakit

## Bab 4. Kesejahteraan Penduduk Perdesaan

yang salah satunya penyebabnya adalah kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di daerah perdesaan.

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Termasuk di dalamnya adalah tempat rujukan penduduk untuk berobat yang dapat menunjukkan akses penduduk untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk di perdesaan berbeda dengan penduduk perkotaan, hal ini dapat disebabkan karena ketersediaan dan jarak ke fasilitas tersebut serta perilaku penduduk itu sendiri. Pada umumnya penduduk yang berobat ke rumah sakit maupun dokter lebih banyak di perkotaan dibandingkan di perdesaan, karena di perkotaan cukup banyak tersedia sarana kesehatan dan jaraknya pun tidak terlalu jauh atau mudah dijangkau. Selain itu kesadaran penduduk untuk menjaga kesehatan di perkotaan juga lebih baik.

**Tabel 4.1.2. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006**

Tahun Daerah		Tempat Berobat					% Penddk berobat jalan
		Rumah Sakit	Prak Klinik	Dokter/Puskesmas	PetugasDukun/Kesehatan batra		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2000	Perdesaan	5,6	20,6	36,3	26,2	11,3	34,9
	Indonesia	9,2	28,1	32,6	21,1	8,9	35,8
2001	Perdesaan	4,2	21,2	36,1	28,5	10,0	36,1
	Indonesia	8,0	30,3	32,2	22,3	7,3	38,2
2002	Perdesaan	4,8	22,1	32,9	28,7	11,6	36,4
	Indonesia	7,4	30,8	30,5	22,8	8,6	38,8
2003	Perdesaan	6,4	21,1	37,9	25,8	8,8	36,4
	Indonesia	10,0	28,7	33,1	20,3	7,9	38,6
2004	Perdesaan	6,2	19,9	42,4	23,4	7,7	36,6
	Indonesia	9,3	28,3	37,3	18,5	6,7	38,2
2005	Perdesaan	8,8	20,2	39,3	25,6	6,0	32,6
	Indonesia	12,1	26,6	35,2	20,3	5,8	34,4
2006	Perdesaan	8,7	17,1	42,7	23,6	7,8	32,1
	Indonesia	12,2	23,1	39,2	18,5	7,1	34,1

Selama periode 2000-2006, persentase penduduk yang berobat jalan di rumah sakit dan praktek dokter/klinik selalu lebih tinggi pada level nasional, sementara penduduk perdesaan lebih banyak berobat di puskesmas, petugas kesehatan, dukun/pengobatan tradisional dan lainnya. Hasil Susenas yang dirangkum pada Tabel 4.1.2 menyajikan data penduduk perdesaan yang berobat di puskesmas, petugas kesehatan, dukun/pengobatan tradisional dan lainnya pada tahun 2006 masing-masing 42,7 persen, 23,6 persen dan 7,8 persen, sementara penduduk Indonesia secara keseluruhan yang berobat di puskesmas, petugas kesehatan, dukun/pengobatan tradisional dan lainnya masing-masing hanya 39,2 persen, 18,5 persen dan 7,1 persen. Hal ini berbeda dengan penduduk yang berobat di rumah sakit dan dokter/klinik. Pada tahun 2006, persentase penduduk perdesaan yang berobat pada kedua tempat tersebut masing-masing hanya 8,7 persen dan 17,1 persen, sedangkan persentase penduduk Indonesia secara keseluruhan yang berobat di rumah sakit dan dokter/klinik mencapai 12,2 persen dan 23,1 persen.

Untuk menunjang kesehatan penduduk perlu diperhatikan juga prasarana kesehatan seperti penolong persalinan. Hal ini berkaitan dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu, dimana pemerintah mengupayakan agar para ibu hamil dapat melahirkan dengan selamat, demikian pula bayi yang dilahirkan dapat terlahir dengan sehat. Usaha tersebut adalah mendorong para ibu hamil agar dapat melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan yang telah didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk ke daerah-daerah terpencil yang ada di wilayah perdesaan.

Pada periode 2000-2006 terlihat bahwa sudah lebih dari 50 persen bayi di perdesaan yang ditolong oleh petugas kesehatan dalam proses kelahirannya. Sementara itu persalinan bayi yang ditolong oleh dukun tradisional semakin berkurang. Pada tahun 2000, persentase persalinan bayi yang ditolong oleh tenaga dukun tradisional sebesar 46,8 persen, setahun kemudian turun menjadi sebesar 46,4 persen,

## Bab 4. Kesejahteraan Penduduk Perdesaan

kemudian tahun 2002 menjadi 43,8 persen. Penurunan ini terus terjadi hingga tahun 2006, yaitu menjadi 33,9 persen.

Bila dibandingkan dengan kondisi nasional, memang persentase persalinan bayi yang ditolong petugas kesehatan di perdesaan jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase nasional, perbedaannya mencapai 4,9 persen (tahun 2004) hingga 6,2 persen. Perbedaan paling besar terjadi pada tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2001, peningkatan persentase bayi yang ditolong tenaga kesehatan di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan peningkatan persentase bayi yang ditolong tenaga kesehatan di perdesaan.

**Tabel 4.1.3. Persentase Bayi menurut Penolong Persalinan dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006**

Tahun	Daerah	Tenaga Kesehatan				Bukan Tenaga Kesehatan		
		Dokter	Bidan	Lainnya	Total	Dukun	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2000	Perdesaan	3,6	45,7	1,5	50,8	46,8	2,4	49,2
	Indonesia	8,0	54,1	1,4	63,5	34,4	2,1	36,5
2001	Perdesaan	3,8	45,8	1,2	50,7	46,4	0,4	46,8
	Indonesia	9,2	54,0	1,1	64,2	33,8	0,3	34,1
2002	Perdesaan	4,0	48,6	1,2	53,8	43,8	2,5	46,3
	Indonesia	9,9	55,8	1,0	66,7	31,5	1,8	33,3
2003	Perdesaan	4,0	50,1	1,4	55,4	41,8	2,8	44,6
	Indonesia	8,8	58,0	1,2	67,9	30,0	2,1	32,1
2004	Perdesaan	4,6	55,2	1,3	61,1	36,0	3,0	39,0
	Indonesia	9,8	60,6	1,2	71,5	26,3	2,2	28,5
2005	Perdesaan	5,9	55,2	1,2	62,3	34,6	3,2	37,7
	Indonesia	12,9	59,4	1,1	73,4	24,2	2,5	26,6
2006	Perdesaan	7,1	55,6	1,0	63,6	33,9	2,5	36,4
	Indonesia	13,6	60,6	0,9	75,1	23,1	1,8	24,9

### 4.2. Pendidikan

Aspek lainnya yang juga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk ialah pendidikan, karena pendidikan dapat menentukan sejauh mana masyarakat akan berkembang sehingga dapat membantu pembangunan di wilayahnya. Salah satu indikator yang dapat mencerminkan

## **Bab 4. Kesejahteraan Penduduk Perdesaan**

keberhasilan pembangunan pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini angka melek huruf penduduk dewasa yang merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya.

**Tabel 4.2.1. Angka Melek Huruf menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006**

Tahun/daerah		Kelompok Umur					Jenis Kelamin Laki-Laki + Perempuan		
		15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 49	50 +	L	P	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2000	Perdesaan	98,0	97,0	94,3	85,4	58,4	89,8	79,1	84,4
	Indonesia	98,7	98,1	96,2	89,6	66,0	93,0	84,3	88,6
2001	Perdesaan	97,7	97,0	94,3	84,7	56,4	89,1	78,1	83,6
	Indonesia	98,4	98,1	96,2	88,9	64,0	92,3	83,5	87,9
2002	Perdesaan	98,3	97,6	95,7	87,1	61,0	90,7	80,8	85,7
	Indonesia	98,8	98,5	97,2	90,9	67,9	93,5	85,7	89,5
2003	Perdesaan	98,2	97,4	95,6	87,2	62,9	90,9	81,6	86,2
	Indonesia	98,7	98,4	97,1	90,7	69,7	93,5	86,2	89,8
2004	Perdesaan	98,4	97,7	96,4	88,7	63,5	91,6	82,5	87,0
	Indonesia	98,8	98,6	97,7	91,9	70,1	94,0	86,8	90,4
2005	Perdesaan	98,3	97,8	96,7	89,3	66,0	91,8	83,2	87,5
	Indonesia	98,9	98,6	97,9	92,4	72,6	94,3	87,5	90,9
2006	Perdesaan	98,5	97,8	96,7	90,3	68,7	92,4	84,5	88,4
	Indonesia	98,9	98,6	97,9	93,0	74,9	94,6	88,4	91,5

Pada umumnya angka melek huruf daerah perdesaan berbeda dengan nasional, namun bila dilihat pada periode tahun 2000-2006 perbedaannya sudah tidak terlalu jauh. Hal ini terutama terjadi pada kelompok umur muda, misalnya pada umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun perbedaan angka melek huruf perdesaan dengan nasional tidak mencapai lebih dari 1,1 persen. Ini menunjukkan bahwa angka melek huruf perdesaan dengan perkotaan pada kelompok umur muda tersebut sudah tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian mulai kelompok umur 25 tahun ke atas tampak perbedaan yang cukup besar terutama pada kelompok umur 50 tahun ke atas

yaitu lebih dari 6,2 persen. Hasil Susenas 2006 menunjukkan bahwa angka melek huruf kelompok umur 50 tahun ke atas di perdesaan hanya 68,7 persen, sementara secara nasional sudah mencapai 74,9 persen.

Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, angka melek huruf perempuan baik di perdesaan maupun secara nasional selalu lebih rendah dari laki-laki namun keduanya menunjukkan trend yang semakin meningkat pada periode 2000-2006. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kemampuan baca tulis penduduk Indonesia secara keseluruhan termasuk penduduk perdesaan. Dengan diluncurkannya berbagai program pendidikan khususnya melalui kegiatan pemberantasan buta huruf diharapkan penduduk Indonesia akan bebas buta huruf. Oleh karena itu melalui suatu komitmen global yaitu *Millennium Development Goals* (MDGs) Indonesia turut berpartisipasi salah satunya dalam pengurangan angka buta huruf dengan target pencapaian sampai tahun 2015.

Gambaran lain mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Secara umum tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan tingkat pendidikan perdesaan dan nasional yang disajikan pada Tabel 4.2.2. Selama periode 2000-2006, persentase penduduk yang tidak sekolah, belum tamat SD dan tamat SD di perdesaan lebih tinggi dari nasional. Sebaliknya, persentase penduduk yang tamat SMP, SMA/SMK, diploma dan sarjana (baik S1, S2 maupun S3) di perdesaan selalu lebih rendah dari angka nasional.

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan secara keseluruhan, pada periode 2000-2006, lebih dari sepertiga penduduk perdesaan memiliki ijazah tertinggi SD. Kemudian sekitar lebih dari 25 persen belum tamat SD, dan lebih dari 10 persen tidak sekolah. Sementara sisanya adalah tamat SMP ke atas. Pada tahun 2006, penduduk perdesaan yang tamat SD sekitar 36,8 persen, kemudian penduduk yang belum

## Bab 4. Kesejahteraan Penduduk Perdesaan

tamat SD dan tidak/belum sekolah masing-masing sekitar 25,2 persen dan 10,0 persen. Sedangkan yang tamat SMP ke atas baru 28,0 persen.

**Tabel 4.2.2. Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006**

Tahun	Daerah	Tingkat Pendidikan								
		Tidak Sekolah	BlmTamatSD	SMP	SM	DI/II	DIII	DIV+	SMP +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2000	Perdesaan	13,0	30,0	36,2	12,3	7,7	0,4	0,2	0,4	21,0
	Indonesia	9,7	24,3	32,4	15,3	15,2	0,6	0,8	1,7	33,6
2001	Perdesaan	13,7	29,2	37,1	11,9	7,1	0,4	0,2	0,4	20,0
	Indonesia	10,2	24,1	32,8	14,8	14,7	0,6	0,9	1,8	32,8
2002	Perdesaan	11,6	27,8	38,4	13,4	7,6	0,5	0,3	0,5	22,3
	Indonesia	8,6	22,6	33,3	15,9	15,6	0,8	1,0	2,1	35,4
2003	Perdesaan	11,3	26,6	38,3	14,2	8,3	0,4	0,3	0,5	23,8
	Indonesia	8,5	21,9	33,4	16,6	16,2	0,7	0,9	1,8	36,2
2004	Perdesaan	10,6	25,8	37,3	15,8	9,1	0,4	0,3	0,6	26,2
	Indonesia	7,9	21,5	32,3	17,6	17,1	0,6	0,9	2,0	38,2
2005	Perdesaan	10,6	26,2	37,2	15,2	9,2	0,6	0,3	0,7	26,0
	Indonesia	7,8	21,4	32,3	17,1	17,1	0,8	1,0	2,4	38,4
2006	Perdesaan	10,0	25,2	36,8	16,2	10,2	0,6	0,3	0,7	28,1
	Indonesia	7,4	20,8	31,7	17,6	18,1	0,8	1,0	2,6	40,1

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah di perdesaan yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari suatu indeks yang menggambarkan persentase penduduk perdesaan yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

APS penduduk perempuan di perdesaan yang berada pada kelompok umur 7-12 tahun maupun 13-15 tahun selalu lebih tinggi dari APS laki-laki, namun pada kelompok umur 16-19 tahun APS laki-laki justru lebih tinggi dari APS

#### Bab 4. Kesejahteraan Penduduk Perdesaan

perempuan. Hal ini mungkin disebabkan perempuan pada usia yang sudah menjelang dewasa sudah tidak bersekolah lagi, sementara penduduk laki-laki masih bertahan untuk melanjutkan sekolah. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya partisipasi perempuan khususnya yang tinggal di perdesaan untuk bersekolah pada tingkat yang lebih tinggi.

**Tabel 4.2.3. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006**

Tahun	Daerah	Kelompok Umur								
		7-12			13-15			16-19		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2000	Perdesaan	94,0	94,9	94,4	73,6	74,0	73,8	39,5	37,2	38,4
	Indonesia	95,1	95,9	95,5	79,4	79,8	79,6	51,6	50,8	51,2
2001	Perdesaan	94,1	95,0	94,5	72,3	74,4	73,3	37,3	35,4	36,4
	Indonesia	95,2	96,0	95,6	78,9	79,8	79,4	50,2	48,1	49,2
2002	Perdesaan	94,7	95,6	95,1	72,3	73,0	72,6	37,6	35,7	36,7
	Indonesia	95,8	96,5	96,1	78,9	79,5	79,2	50,7	48,8	49,8
2003	Perdesaan	95,1	96,1	95,6	74,8	76,5	75,6	39,0	38,9	38,9
	Indonesia	96,0	96,8	96,4	80,5	81,6	81,0	51,3	50,7	51,0
2004	Perdesaan	95,9	96,4	96,1	78,6	80,1	79,3	43,4	42,5	43,0
	Indonesia	96,6	96,9	96,8	83,1	84,0	83,5	53,9	53,0	53,5
2005	Perdesaan	96,4	96,8	96,6	79,3	81,0	80,1	44,2	44,8	44,5
	Indonesia	97,0	97,3	97,1	83,7	84,4	84,0	54,0	53,8	53,9
2006	Perdesaan	96,4	97,2	96,7	79,5	81,1	80,3	45,0	45,0	45,0
	Indonesia	97,1	97,7	97,4	83,8	84,4	84,1	54,1	53,7	53,9

Pada periode 2000-2006 terlihat bahwa pada perbedaan APS penduduk perdesaan dengan nasional pada kelompok umur 7-12 tahun tidak lebih dari 1,1 persen, sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun sudah mencapai di atas 3,8 persen namun tidak lebih dari 6,7 persen. Sementara itu, perbedaan mencolok terjadi pada kelompok umur 16-19 tahun yang mencapai 8,9 persen hingga 12,8 persen. Sebagai contoh, APS pada kelompok umur 16-19 tahun di perdesaan pada tahun 2006 hanya 45,0 persen, angka nasional sekitar 53,9 persen. Sedangkan pada tahun 2000, APS pada kelompok umur 16-19 tahun di perdesaan

hanya 38,4 persen, sementara angka nasional sekitar 51,2 persen.

Bila APS digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya, Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan, yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SM (mencakup SMA dan SMK, serta yang sederajat) untuk penduduk usia 16-19 tahun. APM untuk tingkat SD dihitung dengan membagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah SD dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APM tingkat SMP dihitung dengan membagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah SMP dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Begitu juga APM tingkat SLTA dihitung dengan membagi jumlah penduduk usia 16-19 tahun yang bersekolah di SMA atau SMK dengan jumlah penduduk usia 16-19 tahun.

Pada periode 2001-2006, APM perdesaan pada semua kelompok umur menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, baik APM laki-laki maupun perempuan. Kecuali tahun 2003 terjadi penurunan yang tidak terlalu besar pada APM perempuan, yaitu APM perempuan di perdesaan pada tahun 2002 mencapai 93,1 persen, kemudian pada tahun 2003 menjadi 93,0 persen. Sedangkan pada tahun 2000, APM SMP dan SLTA lebih tinggi dari tahun 2001 sementara APM SD menunjukkan peningkatan pada tahun 2001.

Bila dibandingkan dengan angka nasional, selama periode 2000-2006, APM perdesaan pada tingkat pendidikan SD, baik laki-laki maupun perempuan selalu lebih tinggi dari nasional, namun selisihnya tidak lebih dari 0,6 persen. Kecuali tahun 2002 untuk jenis kelamin laki-laki dan pada tahun 2001 pada setiap kategori. Pada tahun 2002, APM tingkat SD di perdesaan untuk jenis kelamin laki-laki, sekitar 92,6 persen, sedangkan APM secara nasional sedikit berbeda, yaitu sekitar 92,7 persen. Kondisi ini berbeda dengan APM tingkat SMP

## Bab 4. Kesejahteraan Penduduk Perdesaan

dan SLTA, yaitu angka perdesaan lebih rendah dari nasional, dengan selisih yang cukup signifikan. Akan tetapi selisih tersebut menunjukkan kondisi yang cenderung semakin menurun dari waktu ke waktu. Hal tersebut menunjukkan semakin kecilnya perbedaan antara APM perdesaan dengan APM nasional.

**Tabel 4.2.4. Angka Partisipasi Murni menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006**

Tahun	Daerah	Tingkat Pendidikan								
		SD			SMP			SLTA		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2000	Perdesaan	92,0	92,3	92,2	52,3	54,7	53,4	26,3	26,5	26,4
	Indonesia	92,1	92,5	92,3	59,1	61,6	60,3	38,6	40,1	39,3
2001	Perdesaan	92,5	93,0	92,7	51,3	54,6	52,8	24,5	24,3	24,4
	Indonesia	92,7	93,0	92,9	59,1	61,9	60,5	37,1	37,2	37,1
2002	Perdesaan	92,6	93,1	92,8	53,3	55,0	54,1	25,6	25,2	25,4
	Indonesia	92,7	92,8	92,7	60,9	62,4	61,6	38,7	37,5	38,1
2003	Perdesaan	92,6	93,0	92,8	56,2	58,8	57,5	28,5	29,0	28,7
	Indonesia	92,5	92,6	92,6	62,6	64,5	63,5	40,5	40,6	40,6
2004	Perdesaan	93,3	93,2	93,3	58,9	61,5	60,1	32,4	31,7	32,1
	Indonesia	93,1	93,0	93,0	64,2	66,4	65,2	43,2	42,7	43,0
2005	Perdesaan	93,6	93,6	93,6	58,9	61,5	60,2	32,5	33,0	32,8
	Indonesia	93,3	93,2	93,3	64,3	66,5	65,4	43,6	43,4	43,5
2006	Perdesaan	94,1	93,6	93,9	61,9	61,7	61,8	33,5	33,4	33,5
	Indonesia	93,8	93,3	93,5	66,5	66,5	66,5	43,8	43,8	43,8

Selisih APM tingkat SMP di perdesaan dan nasional berkisar antara 4,7 persen (tahun 2006) hingga 7,7 persen (tahun 2001). Misalnya pada tahun 2006 APM tingkat SMP di perdesaan hanya mencapai 61,8 persen, sementara secara nasional mencapai 66,5 persen. Sedangkan selisih APM tingkat SLTA di perdesaan dan nasional berkisar antara 10,3 persen (tahun 2006) hingga 13,0 persen (tahun 2000). Pada tahun 2006 APM tingkat SLTA di perdesaan hanya mencapai 33,5 persen, sementara secara nasional mencapai 43,8 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada periode 2000-2006 rata-rata lama sekolah penduduk di perdesaan berbeda dengan nasional, baik laki-laki maupun perempuan. Selisihnya mencapai 1,2 tahun hingga 1,3 tahun. Bila dilihat menurut jenis kelamin baik di perdesaan ataupun nasional, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih lama dari perempuan dengan perbedaan sekitar 1 tahun atau satu tingkat. Pada tahun 2006, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki adalah 6,7 tahun yang berarti sudah tamat SD atau putus sekolah di kelas 1 SMP, sementara perempuan baru mencapai 5,7 tahun atau setara dengan kelas 5 SD atau putus sekolah di kelas 6 SD.

**Tabel 4.2.5. Rata-rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006**

Tahun	Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	Perdesaan	6,1	4,9	5,5
	Indonesia	7,4	6,2	6,8
2001	Perdesaan	6,0	4,9	5,4
	Indonesia	7,3	6,2	6,7
2002	Perdesaan	6,3	5,2	5,7
	Indonesia	7,6	6,5	7,0
2003	Perdesaan	6,4	5,3	5,8
	Indonesia	7,6	6,6	7,1
2004	Perdesaan	6,6	5,5	6,0
	Indonesia	7,8	6,7	7,2
2005	Perdesaan	6,5	5,5	6,0
	Indonesia	7,8	6,8	7,3
2006	Perdesaan	6,7	5,7	6,2
	Indonesia	7,9	7,0	7,4

Bila dilihat perkembangannya selama enam tahun terakhir, hanya terjadi sedikit peningkatan pada rata-rata lama sekolah penduduk di perdesaan baik laki-laki maupun perempuan yang hanya meningkat kurang dari 1 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki dari 6,1 tahun menjadi 6,7 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan dari 4,9 menjadi 5,7 tahun. Kondisi ini juga terjadi pada tingkat nasional, dengan perubahan yang juga tidak terlalu besar dibandingkan daerah perdesaan. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki dari 7,4 tahun menjadi 7,9 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan dari 6,2 tahun menjadi 7,0 tahun.

### 4.3 Ketenagakerjaan

Berjalannya roda perekonomian di perdesaan tidak terlepas dari kondisi ketenagakerjaan dengan indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK menggambarkan persentase penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang termasuk kedalam angkatan kerja, sedangkan TPT menggambarkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah

**Tabel 4.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006**

Tahun	Perdesaan	Indonesia	Perdesaan	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	72,8	67,8	4,1	6,1
2001	73,1	68,6	6,1	8,1
2002	72,3	67,8	7,0	9,1
2003	72,1	67,9	7,7	9,7
2004	71,5	67,6	7,9	9,9
2005 (Nov)	70,2	66,8	9,1	11,2
2006 (Agt)	69,2	66,2	8,4	10,3

## Bab 4. Kesejahteraan Penduduk Perdesaan

mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

TPAK di perdesaan pada periode 2000-2006 terlihat lebih tinggi dari TPAK nasional, dengan selisih 3,0 persen hingga 5,0 persen. Bila dilihat perkembangannya, maka terlihat TPAK di perdesaan semakin menurun, kecuali pada tahun 2001 yang mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di perdesaan yang berpotensi secara ekonomis untuk melakukan pekerjaan semakin menurun. Sementara TPT di perdesaan pada periode 2000-2006 lebih rendah dibandingkan dengan nasional, dengan selisih sekitar 2 persen. Hal ini disebabkan karena sektor potensial yang masih menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia terdapat di perdesaan. Bila dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu, TPT baik di perdesaan maupun nasional terlihat semakin meningkat, kecuali pada tahun 2006 yang diperoleh dari hasil Sakernas bulan Agustus angka ini turun menjadi 8,4 persen di perdesaan dan 10,3 persen pada level nasional. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi secara makro.

**Tabel 4.3.2. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Sektor Usaha dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006**

Tahun	Pertanian		Industri		Jasa	
	Perdesaan	Indonesia	Perdesaan	Indonesia	Perdesaan	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2000	66,1	45,3	10,0	13,5	23,9	41,2
2001	65,2	43,8	13,2	18,7	21,7	37,5
2002	65,6	44,3	13,1	18,8	21,3	36,9
2003	67,9	46,4	12,2	17,7	19,9	35,9
2004	63,9	43,3	13,2	18,0	22,9	38,7
2005 (Nov)	64,6	44,0	12,6	18,8	22,8	37,3
2006 (Agt)	62,9	42,0	14,1	18,6	23,0	39,4

Seperti diketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia bertumpu pada sektor pertanian, terutama masyarakat perdesaan. Hal ini ditunjukkan pada hasil Sakernas yang disajikan pada Tabel 4.3.2. Pada periode 2000-2006 persentase penduduk perdesaan yang bekerja pada sektor pertanian mencapai lebih dari 62 persen, sementara pada level nasional, persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian tidak lebih dari 46,4 persen. Sektor berikutnya yang diminati penduduk perdesaan adalah sektor jasa dengan persentase sekitar 19 persen hingga 24 persen dan sektor industri tidak lebih dari 14,1 persen.

Bila dilihat menurut status pekerjaan dengan membandingkan antara pekerja di perdesaan dan nasional, terlihat bahwa selama periode 2001-2006, pekerja di perdesaan lebih banyak yang berusaha dibantu pekerja tidak dibayar, pekerja bebas di sektor pertanian dan pekerja yang tidak dibayar/pekerja keluarga. Perbedaan paling besar terjadi pada pekerja yang berusaha dibantu pekerja tidak dibayar, dengan selisih mencapai 7,2 persen hingga 8,6 persen. Kemudian diikuti oleh pekerja keluarga dengan selisih persentase mencapai 6,3 persen hingga 7,7 persen dan selisih persentase pekerja bebas pertanian pada posisi ke tiga dengan nilai antara 1,4 persen dan 2,3 persen.

Sedangkan pada kategori lainnya, lebih banyak berada pada level nasional atau dengan kata lain lebih banyak berada di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Persentase pekerja dengan status buruh atau karyawan menduduki peringkat selisih terbesar antara nasional dan perdesaan, yaitu mencapai lebih dari 12,8 persen. Sementara persentase pekerja dengan kategori berusaha sendiri antara perdesaan dan nasional selisihnya tidak lebih dari 2,5 persen. Sedangkan persentase pekerja berusaha dibantu dengan buruh tetap dan pekerja bebas non pertanian di perdesaan dan nasional tidak terlalu jauh berbeda. Sementara pada tahun 2000, terjadi perbedaan struktur status pekerjaan yang diminati pekerja di Indonesia dengan kondisi tahun 2001-2006. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan konsep dan definisi.

## Bab 4. Kesejahteraan Penduduk Perdesaan

**Tabel 4.3.3. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006**

Tahun	Daerah	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu Pekerja tdk dibayar	Berusaha dibantu Pekerja	Buruh/ Karyawan	Pekerja Keluarga	Pekerja Bebas Pertanian	Pekerja bebas Non Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2000	Perdesaan	20,1	30,0	1,8	21,4	26,6	-	-
	Indonesia	21,7	23,1	2,3	32,8	20,1	-	-
2001	Perdesaan	17,4	29,7	2,6	15,8	26,4	5,5	2,5
	Indonesia	19,2	22,4	3,1	29,3	19,4	4,0	2,7
2002	Perdesaan	17,0	32,6	2,5	13,9	23,9	6,5	3,6
	Indonesia	19,2	24,0	3,0	27,4	17,6	4,9	3,9
2003	Perdesaan	15,5	31,9	2,4	12,6	28,0	6,4	3,1
	Indonesia	18,2	24,1	2,9	26,0	20,3	5,0	3,5
2004	Perdesaan	17,4	30,5	2,7	14,2	25,1	6,4	3,7
	Indonesia	19,5	22,9	3,2	27,2	18,5	4,8	4,0
2005 (Nov)	Perdesaan	15,9	29,8	2,7	14,6	25,2	7,9	3,9
	Indonesia	18,4	22,3	3,0	27,7	18,0	5,9	4,6
2006 (Agt)	Perdesaan	18,5	28,1	2,4	15,3	23,3	8,1	4,3
	Indonesia	20,4	20,9	3,0	28,1	16,9	5,8	4,8

Catatan: Tahun 2000 hanya terdapat lima kategori

Idealnya seorang pekerja murni dapat bekerja sesuai dengan jam kerja yang telah disepakati, yaitu minimal 35 jam selama seminggu. Tabel 4.3.4 menggambarkan persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal yang dapat dikategorikan juga sebagai pengangguran tidak kentara. Walaupun TPT di perdesaan lebih rendah dari nasional, atau dengan kata lain tingkat kesempatan kerja di perdesaan lebih tinggi, namun bila dilihat dari jumlah jam kerja, justru jumlah jam kerja penduduk yang bekerja di perdesaan lebih sedikit dari jam kerja normal. Pada periode 2000-2006, persentase penduduk yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam seminggu di perdesaan berkisar antara 7 persen hingga 11 persen, sementara persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam tidak lebih dari 45 persen. Bila dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu, jumlah pekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu, semakin

meningkat. Kecuali pada tahun 2001 yang mengalami penurunan dari tahun 2000.

**Tabel 4.3.4. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006**

Tahun	< 15 Jam		< 35 Jam	
	Perdesaan	Indonesia	Perdesaan	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	10,6	8,2	44,8	35,4
2001	7,1	5,6	31,6	24,9
2002	5,8	4,6	40,3	31,5
2003	6,1	4,7	40,8	31,8
2004	6,3	4,8	42,0	32,4
2005 (Nov)	8,1	6,5	42,2	33,0
2006 (Agt)	8,9	6,9	42,7	33,0

### 4.4 Perumahan

Kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga yang dapat ditunjukkan melalui fisik bangunan tempat tinggal serta fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut diantaranya luas lantai hunian per kapita, sumber air minum dan fasilitas tempat buang air besar. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah dengan luas lantai minimal 10 m<sup>2</sup> per kapita, dengan demikian bila luas rumah tinggal per kapita kurang dari 10 m<sup>2</sup> menandakan rumah tinggal tersebut kurang layak untuk dihuni. Pada periode 2000-2006, rumah tinggal yang kurang layak di huni di perdesaan berkisar antara 19,0 persen hingga 24,1 persen. Bila di dibandingkan dengan nasional, rumah tinggal yang kurang layak di perdesaan lebih sedikit dibandingkan dengan nasional. Misalnya pada tahun 2006 persentase rumah tinggal dengan luas lantai kurang dari 10 m<sup>2</sup> di perdesaan sekitar

23,1 persen, sementara secara nasional sekitar 24,1 persen. Hal ini disebabkan lebih padatnya penduduk perkotaan dibandingkan dengan perdesaan.

Fasilitas lain yang membuat nyaman dan sehat penghuni suatu rumah tinggal adalah sumber air minum yang bersih. Ketersediaan air bersih ini merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk minum itu sendiri dan untuk memasak. Contoh air yang aman untuk minum dan memasak diantaranya air yang bersumber dari kemasan, karena air kemasan sudah mengalami proses penyaringan, demikian halnya dengan air leding. Selain itu, sumur/mata air terlindung dengan jarak terhadap pembuangan limbah/kotoran lebih dari 10 meter juga dikategorikan sebagai air bersih yang layak digunakan untuk minum.

Rumah tinggal dengan sumber air minum dari kemasan dan leding di perdesaan persentasenya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan nasional, dengan selisih lebih dari 12 persen. Pada tahun 2006, persentase rumah tinggal yang menggunakan air leding dan kemasan di perdesaan hanya 10,0 persen, sementara secara nasional sudah mencapai 22,8 persen. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterjangkauan air kemasan yang sulit di dapatkan di perdesaan. Sebaliknya, penduduk di perdesaan lebih mudah mendapatkan air bersumber dari sumber air lainnya, tidak seperti di perkotaan yang penduduknya sudah padat, sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih, akhirnya masyarakat perkotaan cenderung memanfaatkan air kemasan dan air leding.

Dengan lebih sedikitnya rumah tinggal penduduk perdesaan yang menggunakan air leding dan air kemasan menyebabkan lebih rendahnya persentase pengguna air bersih di perdesaan. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 4.4, dimana persentase rumah tinggal dengan sumber air minum bersih di perdesaan jauh lebih rendah dari persentase nasional, dengan selisih lebih dari 8,7 persen. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang diiringi dengan penambahan perumahan di perdesaan

## **Bab 4. Kesejahteraan Penduduk Perdesaan**

---

menyebabkan jarak sumber air minum seperti sumur atau mata air terlindung terhadap tempat penampungan kotoran/tinja tidak lagi berjarak lebih dari 10 m, di sisi lain akses terhadap air kemasan atau air leding tidak berlangsung cepat seperti di perkotaan.

Ketersediaan jamban milik sendiri, merupakan fasilitas perumahan yang tidak kalah pentingnya dengan sumber air minum. Dengan tersedianya jamban sendiri apalagi dilengkapi dengan saluran pembuangan yang tertutup, rumah akan nyaman dan sehat. Pengertian jamban milik sendiri adalah jamban yang penggunaannya khusus bagi anggota rumah tangga tanpa bercampur dengan anggota rumah tangga lainnya, sehingga kenyamanan pemakaiannya dapat terjaga. Sedangkan pengertian jamban dengan saluran pembuangan tertutup adalah jamban dengan menggunakan tangki septik (*septic tank*) sebagai tempat pembuangan akhir tinja atau kotoran, sehingga lebih higienis dibandingkan dengan tempat penampungan tinja lainnya seperti kolam, sawah, sungai, kebun atau lobang tanah.

Penduduk perdesaan pada umumnya belum menggunakan jamban sendiri yang dilengkapi dengan tangki septik, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.4. Pada periode 2000-2006, tidak lebih dari 23 persen penduduk perdesaan mempunyai rumah tinggal yang dilengkapi jamban sendiri dengan tangki septik, sementara secara nasional sudah lebih dari 28 persen penduduk menggunakan jamban sendiri dengan tempat pembuangan tinja yang higienis. Pada tahun 2006, penduduk perdesaan hanya 20,3 persen yang mempunyai rumah dengan dilengkapi fasilitas jamban sendiri yang menggunakan tangki septik, sementara secara nasional sudah mencapai 33,6 persen.

Dengan masih rendahnya kualitas perumahan di perdesaan dilihat dari segi semakin bertambahnya rumah tinggal dengan luas hunian per kapita kurang dari 10 m<sup>2</sup> dan masih sedikitnya rumah tinggal yang menggunakan sumber air minum bersih serta masih terbatasnya penduduk yang mempunyai rumah tinggal dengan jamban sendiri yang

## **Bab 4. Kesejahteraan Penduduk Perdesaan**

dilengkapi tangki septik, diharapkan pembangunan perumahan yang semakin hari semakin bertambah di perdesaan lebih memperhatikan aspek-aspek tersebut. Salah satunya dengan cara peningkatan kesejahteraan penduduk perdesaan.

**Tabel 4.4. Persentase Rumah Tinggal menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2000-2006**

Tahun	Daerah	Luas Lantai Per kapita < 10 m <sup>2</sup>	Air minum leding & kemasan	Air minum bersih *)	Jamban sendiri dgn tangki septik**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2000	Perdesaan	24,7	7,0	19,0	15,5
	Indonesia	25,5	20,0	32,3	28,5
2001	Perdesaan	20,6	6,8	36,5	16,8
	Indonesia	21,7	19,7	47,1	31,9
2002	Perdesaan	21,8	6,4	36,6	18,0
	Indonesia	22,8	19,7	46,8	33,5
2003	Perdesaan	20,5	6,7	37,8	20,4
	Indonesia	21,7	18,9	46,9	34,0
2004	Perdesaan	19,0	7,6	39,9	22,1
	Indonesia	20,0	20,4	48,6	36,4
2005	Perdesaan	21,3	9,1	39,0	51,8
	Indonesia	22,2	22,0	48,9	60,3
2006	Perdesaan	23,1	10,0	40,3	20,3
	Indonesia	24,1	22,8	49,7	33,6

Catatan:

\*) bersumber dari air leding, kemasan dan pompa, serta sumur/mata air terlindung dengan jarak terhadap pembuangan limbah/kotoran > 10 meter

\*\*) Tahun 2005 jamban milik sendiri tanpa melihat memakai tangki septik atau tidak

Tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia antara lain dapat digambarkan melalui indikator-indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin serta tingkat ketimpangan pendapatan penduduk. Sejak tahun 1984 BPS telah menghitung beberapa indikator kemiskinan yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai sumber data utamanya. Dengan metode pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang digunakan BPS sampai saat ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

Cakupan estimasi jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut terus berkembang dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten/kota. Walaupun hanya bersifat makro, data hasil Susenas dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin, seperti tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, sumber penghasilan sehari-hari, jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan dan kondisi tempat tinggal. Data tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah dan para pengambil keputusan dalam mendistribusikan dana bantuan dan sebagai bahan penyusunan perencanaan program pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Bab ini mengulas kondisi kemiskinan penduduk perdesaan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir melalui beberapa indikator kemiskinan seperti  $P_0$ ,  $P_1$  dan  $P_2$  serta beberapa ukuran kesejahteraan rakyat seperti tingkat kecukupan gizi, pola pengeluaran penduduk dan berbagai indikator sosial ekonomi yang menggambarkan karakteristik rumah tangga miskin.

### 5.1. Metode Penghitungan Angka Kemiskinan

Untuk menghitung jumlah penduduk miskin dengan metode pendekatan kebutuhan dasar, terlebih dahulu perlu ditentukan paket komoditi kebutuhan dasar makanan dan non-

## Bab 5. Kemiskinan Penduduk Perdesaan

---

makanan. Paket komoditi dasar ini digunakan untuk menghitung Garis Kemiskinan (GK) sebagai dasar penentuan (*threshold*) penduduk miskin. Dengan perkataan lain, Garis Kemiskinan yang diperoleh merupakan gabungan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), yaitu konsumsi pengeluaran per kapita per bulan yang setara dengan 2.100 kkal per hari ditambah nilai kebutuhan minimum konsumsi non-makanan per bulan.

Paket komoditi makanan dapat dievaluasi setiap tiga tahun sekali menggunakan hasil Susenas Modul Konsumsi karena komoditi makanan yang dicakup cukup rinci. Sedangkan paket komoditi non-makanan tidak dapat diperbaharui sesuai pola konsumsi dari hasil Susenas Modul Konsumsi karena jenis komoditinya tidak rinci. Oleh karena itu, melalui Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar Non-Makanan (SPKKD) yang dilakukan BPS pada tahun 1993, 1995 dan 2004, paket komoditi non-makanan yang digunakan sebagai dasar penghitungan GKNM dapat disesuaikan.

Hasil SPKKD tahun 2004 menunjukkan bahwa kelompok penduduk referensi di pedesaan memiliki rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan antara 99.650 rupiah sampai 133.928 rupiah. Angka ini lebih kecil dibandingkan perkotaan yaitu antara 138.856 rupiah sampai 196.764 rupiah.

*Rata-rata pengeluaran kelompok penduduk referensi di pedesaan tahun 2004 antara Rp. 99.650,- sampai Rp. 133.928,- per kapita per bulan*

Pemilihan paket komoditi makanan dan non-makanan bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis komoditi makanan dan non-makanan yang merupakan kebutuhan dasar kelompok penduduk marjinal yang selanjutnya dijadikan sebagai standar kebutuhan minimum makanan. Pemilihan kebutuhan dasar dilakukan dengan asumsi bahwa kelompok penduduk marjinal akan selalu mengutamakan kebutuhan dasar dibandingkan kebutuhan lainnya. Dengan perkataan lain, kebutuhan dasar adalah sejumlah komoditi yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk marjinal.

Paket komoditi dasar ini tidak dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang membedakan adalah nilai pengeluarannya yang dapat menggambarkan perbedaan

kuantitas harga. Sehingga, secara tidak langsung perbedaan ini menggambarkan perbedaan kualitas barang yang umumnya dikonsumsi oleh penduduk perkotaan dan perdesaan. Dengan cara ini terpilih 52 jenis komoditi makanan dan 36 jenis komoditi non-makanan yang tercantum pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1. Daftar Paket Komoditi Dasar**

Makanan		Jenis Komoditi Non-Makanan
Jenis Komoditi	Satuan	
(1)	(2)	(3)
1. Beras	Kg	1. Perumahan
2. Beras ketan	Kg	2. Listrik
3. Jagung pipilan	Kg	3. Air
4. Tepung terigu	Kg	4. Minyak tanah
5. Ketela pohon	Kg	5. Kayu bakar
6. Ketela rambat	Kg	6. Obat nyamuk, korek api, baterai
7. Gaplek	Kg	7. Perlengkapan mandi
8. Tongkol/Tuna/Cakalang	Kg	8. Barang kecantikan
9. Kembung	Kg	9. Perawatan kulit/muka
10. Teri	Kg	10. Kesehatan
11. Bandeng	Kg	11. Pemeliharaan kesehatan
12. Mujair	Kg	12. Pendidikan
13. Daging sapi	Kg	13. Bensin
14. Daging babi	Kg	14. Pos dan benda pos
15. Daging ayam ras	Kg	15. Pengangkutan
16. Daging ayam kampung	Kg	16. Foto
17. Tetelan	Kg	17. Pakaian jadi laki-laki dewasa
18. Telur ayam ras	Kg	18. Pakaian jadi perempuan dewasa
19. Telur itik/manila	Butir	19. Pakaian jadi anak-anak
20. Susu kental manis	397 gr	20. Keperluan menjahit
21. Susu bubuk	Kg	21. Alas kaki
22. Bayam	Kg	22. Tutup kepala
23. Buncis	Kg	23. Sabun cuci
24. Kacang panjang	Kg	24. Bahan pemeliharaan pakaian
25. Tomat sayur	Ons	25. Handuk/ikat pinggang
26. Daun ketela pohon	Kg	26. Perlengkapan perabot rumah tangga
27. Nangka muda	Kg	27. Perkakas rumah tangg
28. Bawang merah	Ons	28. Alat dapur/makan
29. Cabe merah	Ons	29. Arloji/jam
30. Cabe rawit	Ons	30. Tas
31. Kacang tanah tanpa kulit	Kg	31. Mainan anak
32. Tahu	Kg	32. PBB
33. Tempe	Kg	33. Pajak kendaraan bermoto
34. Mangga	Kg	34. Pungutan lain
35. Salak	Kg	35. Perayaan hari raya agama
36. Pisang ambon	Kg	36. Upacara agama
37. Pepaya	Kg	
38. Minyak kelapa	Liter	
39. Kelapa	Butir	
40. Gula pasir	Ons	
41. Gula merah	Ons	
42. Teh	Ons	
43. Kopi	Ons	
44. Garam	Ons	
45. Kemiri	Ons	
46. Terasi/petis	Ons	
47. Kerupuk	Ons	
48. Mie instan	80 gr	
49. Roti manis	Potong	
50. Kue kering	Ons	
51. Kue basah	Buah	
52. Rokok kretek filter	Batang	

### 5.2. Garis Kemiskinan

Berdasarkan paket komoditi dasar makanan dan non-makanan yang telah ditentukan, dihitung Garis Kemiskinan yang merupakan gabungan dari GKM dan GKNM dengan prosedur sebagai berikut :

1. Menentukan kelompok penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas estimasi garis kemiskinan tahun  $t$  yang dihitung dari garis kemiskinan tahun  $(t-1)$  yang digerakkan dengan tingkat inflasi selama periode tahun  $(t-1)$  sampai tahun  $t$ .
2. Berdasarkan penduduk referensi tersebut, dipilih 52 komoditi dasar makanan untuk tingkat nasional. Selanjutnya dihitung rata-rata harga dari ke-52 komoditi di setiap provinsi. Rata-rata harga ini selanjutnya akan digunakan sebagai deflator dalam menghitung pengeluaran riil penduduk. Rata-rata harga dihitung secara tertimbang dengan penimbang proporsi pengeluaran (*budget share*) masing-masing komoditi yang tercakup dalam paket nasional terhadap total pengeluaran ke-52 komoditi. Rata-rata harga dihitung terpisah antara daerah perkotaan dan perdesaan, dengan formula sebagai berikut :

$$P_{ij} = \sum P_{ijk} \alpha_{ik}$$

$i$  = perkotaan/perdesaan;  $j$  = provinsi;  $k$  = komoditi

$P_{ij}$  = Rata-rata harga di daerah  $i$  di provinsi  $j$

$P_{ijk}$  = Rata-rata harga komoditi  $k$  di daerah  $i$  di provinsi  $j$

$\alpha_{ik}$  = Proporsi pengeluaran komoditi  $k$  (bundel nasional) tahun  $t$  di daerah  $i$  yang dihitung dari  $V_{ik}/V_i$  ( $V_{ik}$  = pengeluaran komoditi  $k$  di daerah  $i$ ;  $V_i$  = total pengeluaran dari 52 komoditi di daerah  $i$ ).

3. Setelah diperoleh nilai  $P_{ij}$  di setiap provinsi untuk masing-masing daerah perkotaan dan perdesaan, selanjutnya dihitung nilai pengeluaran riil masing-masing rumah tangga setelah sebelumnya  $P_{ij}$  distandarkan terlebih dahulu terhadap DKI Jakarta dengan formula berikut :

$$P_{is} = \frac{P_{ij}}{P_{DKI}}$$

$P_{is}$  = Deflator harga

Pengeluaran riil masing-masing rumah tangga dihitung dengan formula berikut :

$$RE = \frac{E}{P_{is}}$$

RE = Pengeluaran riil rumah tangga;

E = Pengeluaran nominal

Proses ini akan menghasilkan distribusi pengeluaran riil penduduk di setiap provinsi untuk masing-masing daerah perkotaan dan perdesaan.

4. Berdasarkan distribusi pengeluaran riil tersebut dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM diperoleh dari formula :

$$GKM_j = \sum P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum V_{jk}$$

$j$  = daerah perkotaan/perdesaan;  $k$  = jenis komoditi

$GKM_j$  = Garis Kemiskinan Makanan Daerah  $j$  (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kkal).

$P_{jk}$  = Harga komoditi  $k$  di daerah  $j$ .

$Q_{jk}$  = Rata-rata kuantitas komoditi  $k$  yang dikonsumsi di daerah  $j$ .

$V_{jk}$  = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi  $k$  di daerah  $j$ .

Untuk memperoleh GKM setara 2100 kilo kalori, maka dilakukan perkalian antara harga implisit kalori dari penduduk referensi dengan besaran 2100 menggunakan formula berikut :

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum V_{jk}}{\sum K_{jk}}$$

$\overline{HK}_j$  = harga rata-rata kalori di daerah  $j$

$K_{jk}$  = kalori komoditi  $k$  di daerah  $j$

Selanjutnya penyetaraan GKM dilakukan dengan mengalikan harga rata-rata kalori dengan 2.100, yaitu :

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2.100$$

$F_j$  = Kebutuhan minimum makanan di daerah j yang menghasilkan energi 2.100 kkal per kapita per hari.

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) dihitung dengan formula berikut :

$$GKNM_j = \sum r_i V_i$$

$i$  = komoditi non-makanan terpilih

$j$  = daerah (perkotaan/perdesaan)

$GKNM_j$  = Garis Kemiskinan Non-Makanan di daerah j

$r_i$  = Rasio pengeluaran komoditi non-makanan  $i$  terhadap sub kelompok pengeluaran menurut daerah pada penduduk referensi yang dihitung dari SPKKD 2004.

$V_i$  = Nilai pengeluaran komoditi non-makanan  $i$  menurut daerah.

### 5.3. Ukuran Kemiskinan

Setelah mendapatkan Garis Kemiskinan, guna menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, BPS menggunakan tiga buah ukuran kemiskinan yang diperoleh dari hasil rumusan Foster-Greer-Thorbecke (FGT) pada tahun 1984, dengan formula :

$$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

$\alpha = 0, 1, 2$

$z$  = Garis Kemiskinan ( $GK = GKM + GKNM$ )

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah GK; ( $i = 1, 2, \dots, q$ );  $y_i < z$

$q$  = Jumlah penduduk yang berada di bawah GK

$n$  = jumlah penduduk

$P_0$  = Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index*) yang

menggambarkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

$P_1$  = Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin. Indeks ini juga dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya dana yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan.

$P_2$  = Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) yang merupakan kuadrat poverty gap index, secara implisit memberikan penimbang yang lebih pada unit observasi yang makin jauh berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga, semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tiga buah ukuran kemiskinan hasil rumusan FGT (*Foster-Greer-Thorbecke*) yaitu  $P_0$  (*Head Count Index*),  $P_1$  (*Poverty Gap Index*) dan  $P_2$  (*Poverty Severity Index*)

Selain tiga ukuran kemiskinan, ketimpangan pendapatan juga seringkali digunakan sebagai salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ukuran ketimpangan pendapatan yang biasa digunakan BPS ialah Gini Ratio yang dihitung dengan formula berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fp_i * (Fc_i - Fc_{i-1})$$

GR = Gini ratio

$fp_i$  = frekuensi penduduk kelas pengeluaran ke-i

$Fc_i$  = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran kelas pengeluaran ke-i

$Fc_{i-1}$  = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran kelas pengeluaran ke-(i-1)

$0 \leq GR \leq 1$ ; GR bernilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan GR bernilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.

### 5.4. Perkembangan Kemiskinan Perdesaan

Sampai dengan tahun 2002 penghitungan angka kemiskinan dilakukan oleh BPS setiap tiga tahun sekali dengan memisahkan angka perkotaan dan perdesaan. Untuk keperluan Dana Alokasi Umum (DAU), angka kemiskinan sejak tahun 2002 sampai 2004 dihitung sampai tingkat kabupaten/kota. Tabel 5.4.1 menyajikan beberapa indikator yang dapat menggambarkan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan penduduk perdesaan.

Garis kemiskinan (GK) yang menjadi batas penentu miskin atau tidaknya menunjukkan bahwa GK perdesaan lebih rendah daripada GK Indonesia (perkotaan + perdesaan), yang juga berarti lebih rendah daripada GK perkotaan. GK perdesaan terus meningkat selama periode 2002 - 2006 disebabkan oleh kenaikan harga dan perbaikan taraf kehidupan.

Secara absolut, jumlah penduduk miskin perdesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan turun selama periode 2002 - 2005 yaitu dari 25,1 juta menjadi 22,7 juta. Tetapi kemudian meningkat lagi menjadi 24,8 juta pada tahun 2006. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya dua kali kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) selama tahun 2005, sehingga menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat.

Persentase penduduk miskin (*Head Count Index*) perdesaan juga menunjukkan pola yang sama, yaitu dari 21,1 persen pada tahun 2002 turun menjadi 19,5 persen pada tahun 2005. Angka ini meningkat lagi pada tahun 2006 bahkan lebih besar dari tahun 2002 yaitu mencapai 21,8 persen.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Indonesia selama periode 2002-2005 juga berkurang dari 38,4 juta menjadi 35,1 juta. Kemudian meningkat lagi menjadi 39,3 juta pada tahun 2006. Sekitar dua per tiga dari seluruh penduduk miskin yang ada di Indonesia bermukim di perdesaan. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin perdesaan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.1.

*Jumlah penduduk miskin di perdesaan selama periode 2002-2005 turun dari 25,1 juta menjadi 22,7 juta, dan meningkat lagi menjadi 24,8 juta pada tahun 2006*

Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap ratio*) yang dinotasikan dengan  $P_1$  menggambarkan kesenjangan

**Tabel 5.4. Beberapa Indikator Kemiskinan, tahun 2002-2006**

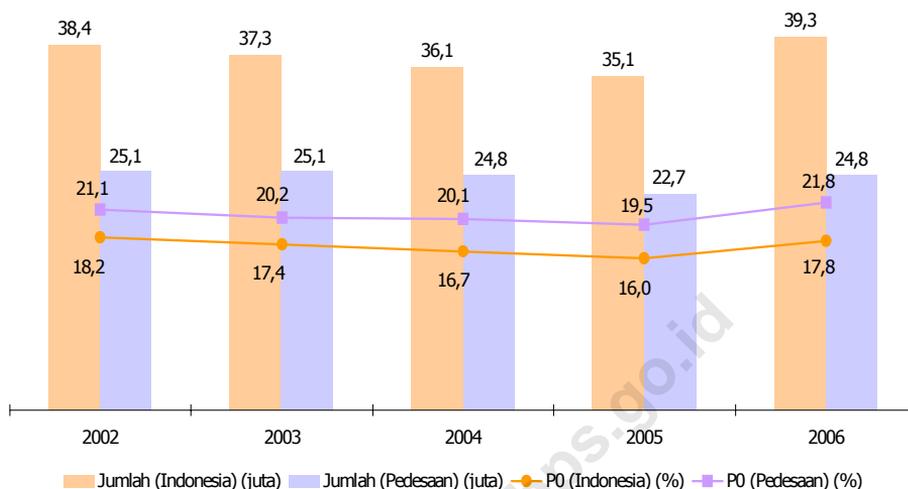
Rincian	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Perdesaan</b>					
GK	96 512	105 888	108 725	117 259	130 584
P <sub>0</sub> (%)	21,1	20,2	20,1	19,5	21,8
Jumlah (juta)	25,1	25,1	24,8	22,7	24,8
P <sub>1</sub>	3,34	3,53	3,43	3,34	4,19
P <sub>2</sub>	0,85	0,93	0,90	0,89	1,22
GR	0,25	0,24	0,25	0,27	0,26
<b>Indonesia</b>					
GK	108 889	118 554	122 775	129 108	151 997
P <sub>0</sub> (%)	18,2	17,4	16,7	16,0	17,8
Jumlah (juta)	38,4	37,3	36,1	35,1	39,3
P <sub>1</sub>	3,01	3,13	2,89	2,78	3,43
P <sub>2</sub>	0,79	0,85	0,78	0,76	1,00
GR	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33

Sumber : Susenas Panel 2002 - 2006

*Sekitar dua per tiga dari seluruh penduduk miskin di Indonesia bermukim di pedesaan*

pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Secara umum, indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia selama periode 2002-2005 cenderung menurun kecuali pada tahun 2003 terjadi sedikit peningkatan. Tetapi tahun 2006 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 2,78 menjadi 3,43. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan penduduk pedesaan selama periode 2002-2006 berfluktuatif, yaitu pada tahun 2002 tercatat sebesar 3,34 kemudian naik menjadi 3,53 dan 3,43 selama periode 2003-2004. Pada tahun 2005 kembali turun menjadi 3,34 namun meningkat drastis pada tahun berikutnya menjadi 4,19. Hal yang perlu dicatat adalah secara umum indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih besar daripada angka nasional yang berarti juga lebih besar dari perkotaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jarak rata-rata

Gambar 5.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2002 - 2006



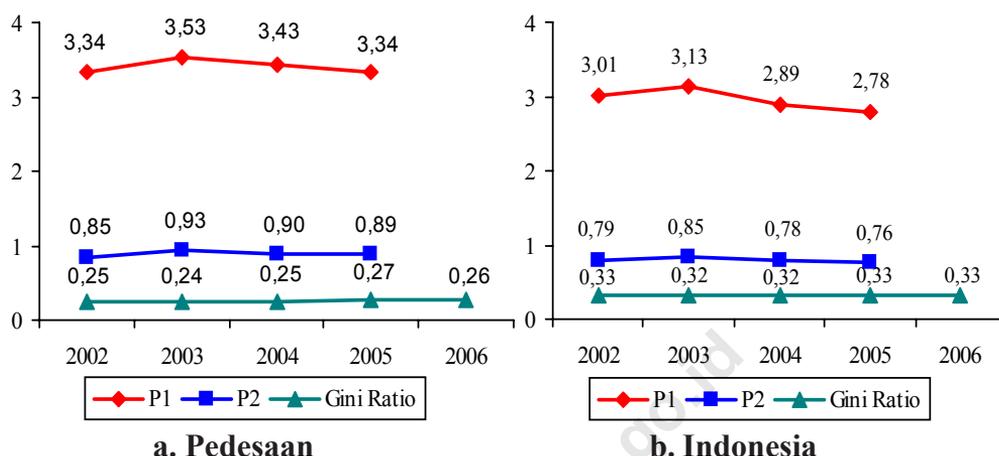
pengeluaran penduduk miskin pedesaan terhadap garis kemiskinan pedesaan relatif lebih besar dibandingkan perkotaan.

Ukuran kemiskinan yang dapat menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin ialah indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*) yang dinotasikan dengan  $P_2$ . Sejak tahun 2003, indeks keparahan kemiskinan di pedesaan masih lebih besar dibandingkan tahun 2002 (0,85) walaupun menunjukkan kecenderungan menurun yang mengindikasikan turunnya ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk miskin di pedesaan. Sejalan dengan ukuran-ukuran kemiskinan lainnya, terjadi peningkatan indeks keparahan kemiskinan pedesaan tahun 2006. Jika dibandingkan dengan angka nasional yang relatif lebih kecil dapat disimpulkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi dari perkotaan.

*Jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin pedesaan terhadap garis kemiskinannya relatif lebih besar dibandingkan perkotaan*

Gini Ratio (GR) yang merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran seluruh penduduk lebih kecil dari indeks keparahan kemiskinan baik di pedesaan maupun secara nasional. Rendahnya GR dibandingkan  $P_2$  salah satunya

Gambar 5.2.  $P_1$ ,  $P_2$  dan Gini Ratio



disebabkan oleh rendahnya ketimpangan pengeluaran antar penduduk pada golongan atas. Hasil Susenas menunjukkan bahwa GR perdesaan lebih rendah dari GR perkotaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk yang tinggal di perdesaan lebih rendah daripada perkotaan. Salah satu penyebabnya ialah harga barang-barang konsumsi di perdesaan relatif sama sedangkan di perkotaan lebih bervariasi. Perkembangan  $P_1$ ,  $P_2$  dan Gini Ratio dapat dilihat pada Gambar 5.2.

### 5.5. Tingkat Kecukupan Gizi

Selain ukuran kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang dinyatakan dalam konsumsi kalori dan protein.

Jumlah rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita per hari dihitung dengan menjumlahkan hasil kali antara kuantitas setiap komoditi makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan proteinnya. Kebutuhan kalori biasanya diperoleh dari konsumsi makanan pokok (karbohidrat) dan kebutuhan protein sebagian besar diperoleh dari konsumsi

## Bab 5. Kemiskinan Penduduk Perdesaan

makanan hewani seperti daging, ikan, telur dan susu. Kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia per hari mengacu pada hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (2004) yaitu masing-masing sebesar 2.000 kilo kalori dan 52 gram protein. Tabel 5.5. menyajikan konsumsi kalori dan protein penduduk perdesaan di Indonesia selama tahun 2003-2006.

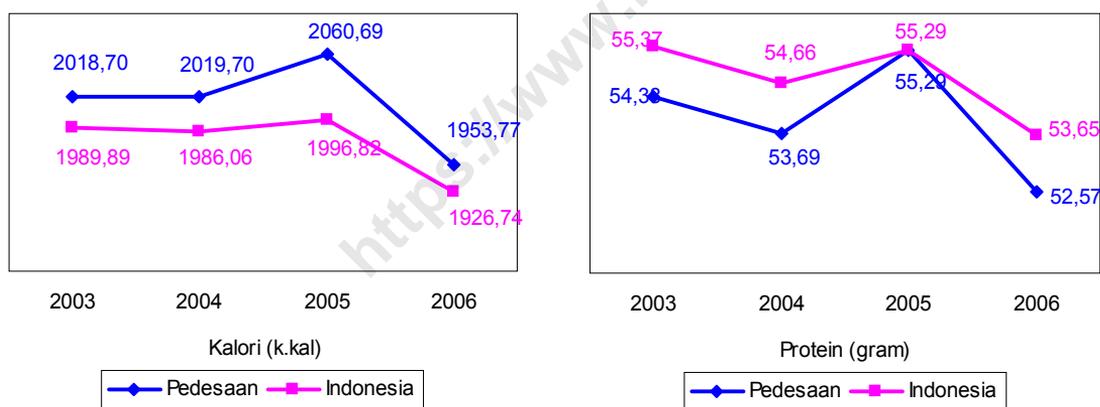
Rata-rata kalori dan protein per kapita per hari yang dikonsumsi oleh penduduk perdesaan lebih dari 90 persen berasal dari makanan yang dimasak di rumah. Sedangkan sisanya berasal dari makanan dan minuman jadi yang dikonsumsi baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tabel 5.5. menunjukkan bahwa rata-rata jumlah kalori yang dikonsumsi oleh penduduk perdesaan lebih besar dari rata-rata jumlah kalori yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia secara keseluruhan. Dengan perkataan lain penduduk perdesaan lebih banyak mengkonsumsi kalori dari pada penduduk perkotaan.

**Tabel 5.5. Rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita per hari penduduk perdesaan**

Rincian	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kalori (k.kal)</b>				
1. Makanan dimasak di rumah	1 851,57	1 848,37	1 878,63	1 787,70
2. Makanan dan minuman jadi	167,13	171,33	182,06	166,07
<b>Total Pedesaan</b>	<b>2 018,70</b>	<b>2 019,70</b>	<b>2 060,69</b>	<b>1 953,77</b>
<b>Total Indonesia</b>	<b>1 989,89</b>	<b>1 986,06</b>	<b>1 996,82</b>	<b>1 926,74</b>
<b>Protein (gram)</b>				
1. Makanan dimasak di rumah	49,94	49,24	50,61	48,32
2. Makanan dan minuman jadi	4,44	4,45	4,68	4,25
<b>Total Pedesaan</b>	<b>54,38</b>	<b>53,69</b>	<b>55,29</b>	<b>52,57</b>
<b>Total Indonesia</b>	<b>55,37</b>	<b>54,66</b>	<b>55,29</b>	<b>53,65</b>

Sumber : Susenas Modul 2002; Susenas Panel 2003-2006

Sementara itu, rata-rata jumlah protein yang dikonsumsi penduduk perdesaan lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan. Perbandingan angka konsumsi kalori dan protein antara penduduk perdesaan dengan perkotaan menunjukkan bahwa penduduk perdesaan lebih banyak mengonsumsi makanan pokok yang banyak mengandung karbohidrat seperti beras dan jagung daripada makanan berprotein yang bersumber dari hewani seperti daging, ayam, telur dan susu. Salah satu penyebab lebih tingginya konsumsi kalori penduduk perdesaan ialah karena aktivitas penduduk perdesaan yang umumnya membutuhkan energi lebih besar yang dihasilkan dari karbohidrat. Namun demikian, rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk perdesaan masih memenuhi syarat kecukupan gizi sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII pada tahun 2004 yaitu 2.000 kilo kalori dan 52 gram protein.



**Gambar 5.3. Konsumsi Kalori dan Protein, 2003 - 2006**

Konsumsi kalori dan protein selama periode 2002-2006 yang berfluktuatif belum dapat menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi kalori dan protein yang signifikan dari penduduk Indonesia termasuk penduduk yang tinggal di perdesaan, seperti ditunjukkan pada Gambar 5.3. Namun demikian, peningkatan konsumsi kalori dan protein penduduk perdesaan sampai tahun 2005 yang bersumber dari makanan

jadi dapat dipandang sebagai perubahan pola konsumsi terkait modernisasi.

### **5.6. Pola Pengeluaran Penduduk**

Gambaran tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk dapat juga ditunjukkan melalui pola pengeluaran penduduk. Hasil Susenas menunjukkan bahwa pengeluaran makanan cenderung mengikuti pola kuadratis (kurva) yaitu porsi pengeluaran makanan meningkat sejalan dengan bertambahnya pendapatan sampai pada suatu titik yang merupakan titik jenuh kebutuhan konsumsi makanan. Selanjutnya porsi pengeluaran makanan menurun dan digantikan dengan meningkatnya porsi pengeluaran non-makanan.

Tabel 5.6.1 menunjukkan bahwa nilai pengeluaran penduduk perdesaan per kapita per bulan untuk konsumsi makanan selama periode 2002-2006 terus meningkat dari 101.692 rupiah pada tahun 2002 menjadi 132.218 rupiah pada tahun 2006 atau meningkat sekitar 30,02 persen. Begitu juga, angka nasional meningkat dari 120.649 rupiah pada tahun 2002 menjadi 155.362 rupiah pada tahun 2006 atau meningkat sekitar 28,77 persen. Tetapi peningkatan nilai pengeluaran ini hanya menggambarkan kenaikan harga karena porsi pengeluaran makanan menurun baik di perdesaan maupun secara nasional. Pengeluaran non-makanan penduduk perdesaan juga meningkat sekitar 60,48 persen dari 51.092 rupiah pada tahun 2002 menjadi 81.991 rupiah pada tahun 2006. Secara nasional juga meningkat sekitar 60,70 persen dari 85.687 rupiah pada tahun 2002 menjadi 137.699 rupiah pada tahun 2006.

Besarnya peningkatan nilai pengeluaran non-makanan tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan harga tetapi juga karena adanya peningkatan porsi pengeluaran non-makanan sebagai pengganti berkurangnya porsi pengeluaran makanan. Gambar 5.4.a menunjukkan pada tahun 2002 sekitar 66,56 persen pengeluaran penduduk perdesaan digunakan untuk kebutuhan

**Tabel 5.6.1. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan (Rp), 2002-2006**

Rincian	2002	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Perdesaan</b>					
Makanan	101 692 (66,56)	107 764 (64,62)	108 112 (63,06)	122 249 (62,53)	132 218 (61,72)
Non-makanan	51 092 (33,44)	58 992 (35,38)	63 324 (36,94)	73 262 (37,47)	81 991 (38,28)
<b>Total</b>	<b>152 784</b> <b>(100,00)</b>	<b>166 756</b> <b>(100,00)</b>	<b>171 435</b> <b>(100,00)</b>	<b>195 512</b> <b>(100,00)</b>	<b>214 210</b> <b>(100,00)</b>
<b>Indonesia</b>					
Makanan	120 649 (58,47)	127 957 (56,89)	128 459 (54,58)	143 672 (53,86)	155 362 (53,01)
Non-makanan	85 687 (41,53)	96 945 (43,11)	106 878 (45,42)	123 079 (46,14)	137 699 (46,99)
<b>Total</b>	<b>206 336</b> <b>(100,00)</b>	<b>224 902</b> <b>(100,00)</b>	<b>235 337</b> <b>(100,00)</b>	<b>266 751</b> <b>(100,00)</b>	<b>293 061</b> <b>(100,00)</b>

Catatan : Angka dalam tanda kurung menyatakan persentase

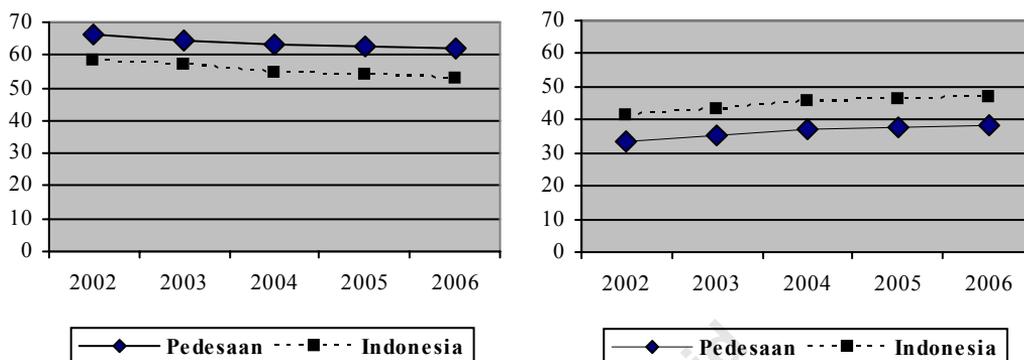
Sumber : Susenas Modul 2002; Susenas Panel 2003-2006

makanan. Angka ini turun menjadi 61,72 persen pada tahun 2006. Persentase pengeluaran makanan penduduk perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan Indonesia secara keseluruhan yang juga berkurang dari 58,47 persen pada tahun 2002 menjadi 53,01 persen pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan besarnya porsi pengeluaran penduduk perdesaan untuk konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan penduduk perkotaan.

Penurunan porsi pengeluaran makanan digantikan dengan peningkatan porsi pengeluaran non-makanan. Gambar 5.4.b menunjukkan porsi pengeluaran non-makanan penduduk perdesaan tahun 2002 sekitar 33,44 persen, naik menjadi 38,28 persen pada tahun 2006. Namun, porsi pengeluaran

Gambar 5.4.

Persentase pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita per bulan



a. Makanan

b. Non-makanan

non-makanan penduduk Indonesia secara keseluruhan masih lebih tinggi daripada penduduk pedesaan, yaitu meningkat dari 41,53 persen pada tahun 2002 menjadi 46,99 persen pada tahun 2006. Bergesernya porsi pengeluaran penduduk pedesaan dari makanan ke non-makanan menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pola konsumsi. Hal ini mengindikasikan peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk pedesaan di Indonesia yang berdampak pada penurunan kemiskinan penduduk pedesaan.

Besarnya nilai dan persentase pengeluaran makanan dan non-makanan menurut golongan pengeluaran yang merupakan proxy pendapatan juga dapat menggambarkan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk. Porsi pengeluaran rata-rata per kapita per bulan untuk konsumsi makanan penduduk pedesaan setiap tahunnya menurut golongan pengeluaran per kapita per bulan menunjukkan kecenderungan menurun dari golongan pengeluaran terendah (< 60.000 rupiah) sampai tertinggi (3 500.000 rupiah). Kelompok penduduk pedesaan pada golongan pengeluaran kurang dari 60 ribu rupiah per bulan mengeluarkan sekitar tiga perempat dari seluruh pengeluarannya untuk konsumsi makanan (72,56 persen). Sedangkan, penduduk dengan golongan pengeluaran 500 ribu

*Besarnya porsi pengeluaran dari makanan ke non-makanan di pedesaan mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk pedesaan di Indonesia mengalami peningkatan*

rupiah atau lebih per bulannya hanya mengeluarkan sekitar dua perlimanya untuk konsumsi makanan. Dengan perkataan lain, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran penduduk cenderung akan semakin kecil porsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanannya.

Sebaliknya, porsi pengeluaran non-makanan dari penduduk dengan golongan pengeluaran rendah lebih kecil daripada penduduk dengan golongan pengeluaran tinggi. Penduduk perdesaan dengan pengeluaran kurang dari 60 ribu rupiah per bulannya hanya mengeluarkan sekitar seperempat dari seluruh pengeluarannya untuk kebutuhan non-makanan, sedangkan bagi mereka yang pengeluarannya minimal 500 ribu rupiah menghabiskan lebih dari setengah total pengeluarannya sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi non-makanannya, yaitu sekitar 57,49 persen pada tahun 2006.

Tabel 5.6.2 menunjukkan tidak ada perbedaan persentase pengeluaran penduduk perdesaan dan penduduk Indonesia secara keseluruhan pada golongan pengeluaran kurang dari 60 ribu rupiah per kapita per bulan baik makanan maupun non-makanan. Hal ini terjadi karena tidak ada penduduk perkotaan yang termasuk dalam golongan pengeluaran kurang dari 60 ribu rupiah per kapita per bulan. Sedangkan penduduk perdesaan dengan golongan pengeluaran tertinggi, yaitu 500 ribu rupiah atau lebih per bulan, mengeluarkan lebih banyak untuk konsumsi makanan daripada penduduk Indonesia secara keseluruhan pada golongan pengeluaran yang sama. Ini menunjukkan persentase pengeluaran makanan penduduk perdesaan lebih tinggi daripada penduduk perkotaan. Sebaliknya, persentase pengeluaran non-makanan penduduk perdesaan lebih rendah dari pada penduduk Indonesia. Gambaran perkembangannya dapat dilihat pada Gambar 5.5.

*Semakin tinggi golongan pengeluaran penduduk cenderung porsi pengeluaran untuk makanan semakin berkurang*

## Bab 5. Kemiskinan Penduduk Perdesaan

**Tabel 5.6.2. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan Menurut Golongan Pengeluaran (Rupiah), 2003 - 2006**

### a. Perdesaan

Golongan Pengeluaran (Rupiah)	2003	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Makanan</b>				
< 60 000	40 366 (73,89)	38 937 (74,08)	36 770 (68,67)	37 454 (72,56)
60 000–79 999	51 224 (70,86)	50 724 (70,37)	49 538 (69,78)	52 055 (71,91)
80 000–99 999	63 579 (70,32)	62 115 (68,49)	64 823 (71,11)	66 118 (72,69)
100 000–149 999	84 595 (68,38)	84 586 (67,51)	86 409 (68,37)	88 588 (69,72)
150 000–199 999	115 020 (66,99)	113 514 (65,71)	113 774 (65,56)	116 408 (67,01)
200 000–299 999	152 975 (63,77)	150 388 (62,95)	151 223 (62,78)	152 931 (63,13)
300 000–499 999	206 413 (57,04)	198 852 (55,42)	210 355 (56,62)	210 761 (56,41)
≥ 500 000	253 306 (38,42)	252 899 (38,01)	351 877 (48,20)	302 320 (42,51)
<b>Non-Makanan</b>				
< 60 000	14 261 (26,11)	13 625 (25,92)	16 780 (31,33)	14 164 (27,44)
60 000–79 999	21 062 (29,14)	21 356 (29,63)	21 452 (30,22)	20 332 (28,09)
80 000–99 999	26 836 (29,68)	28 574 (31,51)	26 336 (28,89)	24 843 (27,31)
100 000–149 999	39 122 (31,62)	40 710 (32,49)	39 982 (31,63)	38 479 (30,28)
150 000–199 999	56 681 (33,01)	59 236 (34,29)	59 764 (34,44)	57 302 (32,99)
200 000–299 999	86 898 (36,23)	88 528 (37,05)	89 644 (37,22)	89 299 (36,87)
300 000–499 999	155 432 (42,96)	159 940 (44,58)	161 172 (43,38)	162 889 (43,59)
≥ 500 000	405 972 (61,58)	412 435 (61,99)	378 126 (51,80)	408 905 (57,49)
<b>Total</b>				
< 60 000	54 627 (100,00)	52 562 (100,00)	53 550 (100,00)	51 618 (100,00)
60 000–79 999	72 285 (100,00)	72 081 (100,00)	70 990 (100,00)	72 387 (100,00)
80 000–99 999	90 415 (100,00)	90 689 (100,00)	91 159 (100,00)	90 961 (100,00)
100 000–149 999	123 717 (100,00)	125 296 (100,00)	126 391 (100,00)	127 067 (100,00)
150 000–199 999	171 701 (100,00)	172 751 (100,00)	173 538 (100,00)	173 711 (100,00)
200 000–299 999	239 873 (100,00)	238 915 (100,00)	240 868 (100,00)	242 231 (100,00)
300 000–499 999	361 845 (100,00)	358 792 (100,00)	371 527 (100,00)	373 650 (100,00)
≥ 500 000	659 278 (100,00)	665 335 (100,00)	730 002 (100,00)	711 225 (100,00)

Tabel 5.6.2. (Lanjutan...)

**b. Indonesia**

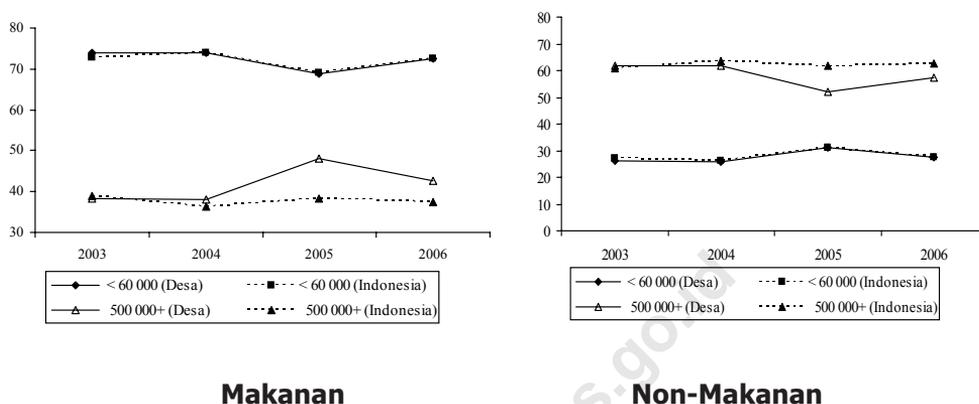
<b>Golongan Pengeluaran (Rupiah)</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Makanan</b>				
< 60 000	39 577 (72,84)	38 894 (73,96)	37 017 (69,05)	37 454 (72,56)
60 000–79 999	51 087 (70,63)	50 419 (69,94)	49 257 (69,23)	52 243 (72,11)
80 000–99 999	63 214 (69,79)	61 699 (68,00)	64 215 (70,44)	65 773 (72,16)
100 000–149 999	84 201 (67,50)	83 713 (66,61)	85 379 (67,14)	88 122 (69,11)
150 000–199 999	112 512 (65,11)	111 073 (63,97)	111 827 (64,23)	114 608 (65,68)
200 000–299 999	148 231 (60,93)	144 870 (59,67)	145 442 (59,65)	148 036 (60,33)
300 000–499 999	197 548 (52,41)	191 298 (51,02)	198 015 (52,23)	202 436 (53,10)
≥ 500 000	293 521 (38,89)	282 058 (36,28)	310 737 (38,28)	307 968 (37,47)
<b>Non-Makanan</b>				
< 60 000	14 754 (27,16)	13 692 (26,04)	16 590 (30,95)	14 164 (27,44)
60 000–79 999	21 245 (29,37)	21 673 (30,06)	21 889 (30,77)	20 205 (27,89)
80 000–99 999	27 368 (30,21)	29 038 (32,00)	26 943 (29,56)	25 375 (27,84)
100 000–149 999	40 549 (32,50)	41 962 (33,39)	41 781 (32,86)	39 388 (30,89)
150 000–199 999	60 283 (34,89)	62 561 (36,03)	62 275 (35,77)	59 884 (34,32)
200 000–299 999	95 030 (39,07)	97 904 (40,33)	98 370 (40,35)	97 334 (39,67)
300 000–499 999	179 411 (47,59)	183 632 (48,98)	181 087 (47,77)	178 833 (46,90)
≥ 500 000	461 193 (61,11)	495 434 (63,72)	500 963 (61,72)	513 907 (62,53)
<b>Total</b>				
< 60 000	54 331 (100,00)	52 585 (100,00)	53 607 (100,00)	51 618 (100,00)
60 000–79 999	72 332 (100,00)	72 092 (100,00)	71 146 (100,00)	72 448 (100,00)
80 000–99 999	90 581 (100,00)	90 737 (100,00)	91 158 (100,00)	91 148 (100,00)
100 000–149 999	124 750 (100,00)	125 676 (100,00)	127 160 (100,00)	127 510 (100,00)
150 000–199 999	172 795 (100,00)	173 634 (100,00)	174 103 (100,00)	174 491 (100,00)
200 000–299 999	243 261 (100,00)	242 774 (100,00)	243 811 (100,00)	245 370 (100,00)
300 000–499 999	376 959 (100,00)	374 931 (100,00)	379 102 (100,00)	381 270 (100,00)
≥ 500 000	754 714 (100,00)	777 492 (100,00)	811 700 (100,00)	821 876 (100,00)

Catatan : Angka dalam tanda kurung menyatakan persentase

Angka tahun 2002 tidak ditampilkan karena perbedaan golongan pengeluaran terendah

Sumber : Susenas Panel 2003 - 2006

**Gambar 5.5.**  
**Persentase pengeluaran rata-rata makanan dan non-makanan per kapita per bulan pada golongan pengeluaran < 60.000 rupiah dan ≥ 500.000 rupiah**



### 5.7. Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Perdesaan

Beberapa indikator sosial dan ekonomi dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik rumah tangga miskin dari berbagai aspek di perdesaan seperti kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan.

#### Kependudukan

Rumah tangga miskin cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga (art) lebih besar baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada tahun 2006 rata-rata jumlah art miskin di perdesaan sebesar 4,75, sedangkan rata-rata jumlah art tidak miskin sebesar 3,69. Besarnya rata-rata jumlah art rumah tangga miskin ini merupakan indikasi tingginya tingkat kelahiran rumah tangga miskin di perdesaan. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Tingginya tingkat kelahiran tentu saja semakin memperburuk kondisi kemiskinan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu kesadaran untuk menunda atau membatasi kelahiran salah satunya melalui keikutsertaan pada program Keluarga Berencana perlu ditingkatkan lagi khususnya bagi pasangan

suami isteri yang tergolong dalam rumah tangga miskin.

**Tabel 5.7.1. Indikator Kependudukan Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin di Perdesaan, 2005 dan 2006**

Uraian	2005		2006	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rata-rata Jumlah ART	4,78	3,77	4,75	3,69
2. KRT Laki-laki (%)	89,00	87,94	89,45	86,97
KRT Perempuan (%)	11,00	12,06	10,55	13,03
3. HCI KRT Laki-laki (%)	16,48	-	17,58	-
HCI KRT Perempuan (%)	15,10	-	14,38	-

Sumber : Susenas Panel 2005 dan 2006

Secara harfiah, seorang isteri dalam suatu rumah tangga merupakan pendamping suami yang bertugas sebagai ibu yang melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anaknya. Tetapi, ketidakhadiran suami dalam rumah tangga menuntut isteri untuk berperan ganda yaitu menggantikan peran suami dalam hal mencari nafkah. Di antara seluruh rumah tangga miskin di perdesaan pada tahun 2005, sekitar 11 persen dikepalai oleh perempuan. Meskipun turun pada tahun 2006 tetapi tidak cukup signifikan karena hanya mencapai sekitar 10,55 persen. Sedangkan *Head Count Index* (HCI) tahun 2005 menunjukkan bahwa 15,10 persen dari seluruh rumah tangga di perdesaan dengan KRT perempuan merupakan rumah tangga miskin. Persentase ini turun menjadi 14,38 pada tahun 2006.

### **Pendidikan**

Rumah tangga miskin umumnya tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kondisi ini diperkuat lagi dengan rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak yang merupakan asset kehidupan di masa depan sehingga

## Bab 5. Kemiskinan Penduduk Perdesaan

dapat memutus mata rantai kemiskinan khususnya bagi rumah tangga yang tergolong dalam kemiskinan kronis. Tidak adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan sangat dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan kepala rumah tangga.

Rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*) kepala rumah tangga miskin di perdesaan tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar 4,21 tahun dan 4,18 tahun. Dengan perkataan lain, rata-rata kepala rumah tangga miskin di perdesaan hanya berkesempatan mengenyam pendidikan sampai kelas 4 SD atau putus sekolah pada semester I kelas 5 SD. Jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin di perdesaan dengan rata-rata lama sekolah lebih tinggi, perbedaannya hampir mencapai 1½ tahun. Selain itu, mayoritas kepala rumah tangga miskin di perdesaan hanya berpendidikan rendah, yaitu pada tahun 2005 sekitar 85,64 persen. Sedangkan KRT yang berpendidikan SLTP atau lebih hanya sekitar 14,36 persen.

Ketidakmampuan penduduk miskin untuk membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya merupakan faktor penghambat bagi peningkatan kualitas hidupnya karena mereka tidak dapat memperoleh berbagai informasi yang

**Tabel 5.7.2. Indikator Pendidikan Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin di Perdesaan, 2005 dan 2006**

Uraian	2005		2006	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. MYS KRT (tahun)	4,21	5,60	4,18	5,49
2. Pendidikan KRT (%)				
Tdk Sekolah/Tdk Tamat SD	39,61	29,12	51,13	38,80
SD	46,03	43,44	34,85	36,83
SLTP	9,30	13,28	1,66	1,06
SMA+	5,06	14,16	12,36	23,31
3. KRT Buta Huruf (%)	21,79	12,38	22,40	13,20

Sumber : Susenas Panel 2005 dan 2006

hanya bisa didapat apabila seseorang memiliki kemampuan baca dan tulis. Pada tahun 2005 ada sekitar 21,79 persen rumah tangga miskin di perdesaan yang dikepalai oleh KRT buta huruf. Tahun berikutnya meningkat menjadi 22,40 persen.

**Ketenagakerjaan**

Kondisi kemiskinan suatu rumah tangga tentunya sangat dipengaruhi oleh kemampuan perekonomian rumah tangga tersebut yang berasal dari penghasilan utama yang diperolehnya. Mayoritas penduduk perdesaan bekerja di sektor pertanian. Sekitar 70 persen rumah tangga miskin di perdesaan dikepalai oleh seorang kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, sedangkan rumah tangga tidak miskin hanya

**Tabel 5.7.3. Indikator Ketenagakerjaan Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin di Perdesaan, 2005 dan 2006**

Uraian	2005		2006	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sumber Penghasilan Utama KRT (%)				
Tidak bekerja	8,8	8,7	8,1	9,9
Pertanian	69,7	54,3	71,9	54,8
Industri	6,6	6,8	4,9	7,1
Lainnya	14,9	30,2	15,1	28,1
2. Status Pekerjaan KRT (%)				
Tidak Bekerja	8,8	8,7	8,1	9,9
Berusaha (sendiri + buruh tidak tetap/tidak dibayar)	63,3	57,4	64,6	55,8
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	1,7	4,5	1,9	4,5
Buruh dan Pekerja Bebas	25,2	28,5	24,8	28,8
Pekerja Tidak Dibayar	1,0	0,9	0,6	1,0
3. Jumlah Jam Kerja KRT Per Minggu (jam)				
< 15	6,8	7,3	8,1	7,8
15-34	28,5	27,7	32,4	28,0
35-44	31,0	29,1	28,6	28,9
45+	33,7	35,9	30,9	35,3
Rata-rata	38,2	38,8	37,1	38,4

Sumber : Susenas Panel 2005 dan 2006

sekitar 50 persen. Rendahnya pendapatan petani menyebabkan banyak petani yang tergolong ke dalam rumah tangga miskin khususnya petani gurem.

Status pekerjaan KRT juga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Lebih dari 60 persen rumah tangga miskin di pedesaan dikepalai oleh seorang KRT yang bersatus berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar. Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan rumah tangga miskin untuk membayar buruh dalam kegiatan perekonomiannya sehari-hari sehingga hanya bisa bekerja sendiri atau mempekerjakan anggota rumah tangga lainnya seperti isteri dan anak sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Kepala rumah tangga miskin di pedesaan rata-rata bekerja selama 38,2 jam per minggu pada tahun 2005 kemudian turun menjadi 37,1 jam per minggu pada tahun 2006. Proporsi KRT rumah tangga miskin di pedesaan yang bekerja selama 35 jam atau lebih per minggunya ada sekitar 64,7 persen pada tahun 2005 kemudian sedikit menurun pada tahun 2006 menjadi 59,5 persen. Angka-angka ini merupakan cerminan rendahnya upah atau pendapatan yang diterima rumah tangga miskin di pedesaan karena ternyata walaupun tingginya jumlah jam kerja per minggu tidak serta merta membawa dampak kepada perbaikan perekonomian rumah tangga.

### **Perumahan**

Kondisi perumahan juga dapat menggambarkan karakteristik kemiskinan suatu rumah tangga, antara lain luas lantai per kapita, sumber air minum dan jenis jamban. Luas lantai per kapita menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kriteria rumah sehat menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO). Hampir sepertiga dari seluruh rumah tangga miskin di pedesaan bertempat tinggal di rumah dengan luas lantai 8 m<sup>2</sup> atau kurang untuk setiap anggota rumah tangganya. Sementara untuk rumah tangga tidak miskin cukup kecil yaitu hanya sekitar 10,60 persen tahun 2005 dan 12,71 persen tahun 2006.

Air minum bersih yang menjadi penunjang kesehatan dan kelangsungan hidup manusia juga tidak cukup dinikmati oleh rumah tangga miskin di perdesaan. Lebih dari 40 persen rumah tangga miskin di perdesaan tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih karena hanya mampu mengambil air dari mata air/sumur tak terlindung, air sungai dan air hujan untuk digunakan sebagai air minum.

Karakteristik kemiskinan melalui indikator perumahan ini juga dilengkapi dengan tingginya proporsi rumah tangga miskin di perdesaan yang hanya menggunakan jamban umum dan bahkan tidak menggunakan jamban sama sekali, yaitu sekitar setengah dari seluruh rumah tangga miskin di perdesaan. Mereka yang tidak menggunakan jamban umumnya melakukannya di sungai atau bahkan di kebun. Hal ini tidak saja mengganggu kesehatan bagi anggota rumah tangga miskin itu sendiri tetapi juga dapat mencemari lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan rumah tangga lainnya.

**Tabel 5.7.4. Indikator Perumahan Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin di Perdesaan, 2005 dan 2006**

Uraian	2005		2006	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Luas Lantai Per Kapita (%)				
<= 8 m <sup>2</sup>	30,10	10,60	34,75	12,71
9-15 m <sup>2</sup>	45,84	36,64	45,20	39,59
> 16 m <sup>2</sup>	24,06	52,76	20,05	47,70
2. Sumber Air Minum (%)				
Air Bersih	58,61	73,06	57,78	69,53
Lainnya	41,39	26,94	42,22	30,47
3. Jenis Jamban (%)				
Sendiri	35,88	52,35	31,32	50,11
Bersama	10,71	8,77	14,45	14,20
Umum/Tidak Ada	53,41	38,88	54,23	35,69

Sumber : Susenas Panel 2005 dan 2006

### **6.1. Pendahuluan**

Guna melengkapi analisis kuantitatif tentang kesejahteraan penduduk perdesaan, bab ini akan memaparkan rangkuman hasil studi kualitatif yang dilakukan di 10 (sepuluh) wilayah penelitian di lima propinsi, yang pemilihannya dilakukan secara *purposive*.

Studi kualitatif dilakukan dengan mewawancarai beberapa responden dari sekitar 50 rumah tangga dengan menggunakan kuesioner tak berstruktur. Selain itu, dipilih juga beberapa informan yang terdiri dari beberapa tokoh masyarakat seperti lurah dan camat/sekretaris camat yang mengetahui dengan pasti tentang situasi kesejahteraan penduduk di wilayah penelitian.

**Tabel 6.1. Daftar Wilayah Studi Kualitatif Kesejahteraan Penduduk Perdesaan, 2005**

<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan/Desa</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Riau	Siak	Minas	Minas Barat Rantau Bertuah
2. Jawa Tengah	Kendal	Kaliwungu	Kedungsuren Magelung
3. Kalimantan Selatan	Banjar	Kertak Hanyar	Banua Hanyar Pandan Sari
4. Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Lingsar	Karang Bayan Peteluan Indah
5. Sulawesi Selatan	Gowa	Somba Opu	Samata Mawang

### **6.2. Gambaran Wilayah Penelitian**

#### **6.2.1. Kondisi Geografis**

Kondisi geografis wilayah penelitian sangat beragam, dari mulai dataran sampai dengan berbukit-bukit. Wilayah

penelitian yang berbukit-bukit adalah desa Minas Barat di Provinsi Riau, Desa Karang Bayan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Desa Magelung di Provinsi Jawa Tengah. Sementara Desa Peteluah Indah di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki topografi datar. Topografi Desa Rantau Bertuah di Provinsi Riau, sekitar 0-2 persen merupakan dataran, 2-8 persen berombak, 8-25 persen bergelombang dan 25-40 persen berbukit.

Sementara itu jarak antara lokasi desa dengan ibukota masing-masing kecamatan terpilih berkisar antara 4 km sampai dengan 20 km. Misalnya, jarak Desa Banua Hanyar ke ibukota Kecamatan Kertak Hanyar di Provinsi Kalimantan Selatan sekitar 4-5 km dengan jarak tempuh sekitar 15-20 menit menggunakan ojek. Belum ada kendaraan umum yang menuju ke desa tersebut. Sementara jarak Desa Pandan Sari lebih jauh lagi, yaitu sekitar 15-20 km dari ibukota Kecamatan Kertak Hanyar, dengan waktu tempuh sekitar 60 menit menggunakan angkutan darat ataupun angkutan sungai. Desa Kedungsuren memiliki jarak terjauh dari ibukota kecamatan dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Kaliwungu, yaitu sekitar 10 km.

### **6.2.2. Perkembangan Kelurahan/Desa**

Dari 5 (lima) kecamatan terpilih, Kecamatan Kertak Hanyar di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 25 desa. Jumlah desa ini tidak mengalami perubahan atau pemekaran wilayah selama tiga tahun terakhir. Sementara jumlah desa paling sedikit dijumpai di Kecamatan Minas, yakni 5 (lima) desa. Sampai dengan tahun 2006, telah terjadi dua kali pemekaran terhadap Kecamatan Minas, pertama pada tahun 2001, menjadi Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Mandau. Kemudian pada tahun 2003 Kecamatan Minas mekar kembali menjadi Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis.

Jumlah desa di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah ada 15 desa. Kecamatan Kaliwungu pada tahun 2006 dimekarkan menjadi Kecamatan

Kaliwungu dan Kecamatan Kaliwungu Selatan. Sementara Kecamatan Lingsar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Narmada pada tahun 2003, terdiri dari 10 desa. Kecamatan Somba Opu di Kota Gowa, Sulawesi Selatan memiliki 14 kelurahan. Sebelum tahun 1997, Kecamatan Somba Opu hanya terdiri dari 4 (empat) desa.

Kriteria Desa Tertinggal yang digunakan di lima wilayah penelitian ternyata sangat beragam. Di Kecamatan Kertak Hanyar misalnya, ada dua kategori desa tertinggal, yaitu yang berada di daerah tertinggal dan di daerah tidak tertinggal. Beberapa faktor penyebab desa tertinggal di daerah tidak tertinggal, antara lain adalah sulitnya lapangan pekerjaan, kurangnya fasilitas pendidikan, dan kurangnya fasilitas kesehatan yang tersedia di desa yang dikategorikan tertinggal tersebut. Sedangkan faktor utama penyebab desa tertinggal di daerah yang tidak tertinggal adalah tidak tersedianya akses transportasi. Jumlah desa tertinggal di Kecamatan Kertak Hanyar ada sebanyak lima desa.

Sementara penentuan klasifikasi desa tertinggal di Kecamatan Minas menurut Sekretaris Camat dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi masyarakat dan sisi desanya. Aspek perekonomian dan sosial budaya masyarakat merupakan penilaian dari sisi masyarakat. Sementara dari sisi desa, jumlah fasilitas kantor desa, infrastruktur seperti listrik, dan kondisi alam desa merupakan aspek yang dinilai. Dari lima desa yang ada, tiga desa masuk kedalam kategori desa tertinggal. Penentuan desa tertinggal ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.

Kriteria desa tertinggal di Kecamatan Lingsar hampir serupa dengan yang diberlakukan di Kecamatan Minas, yaitu menggunakan kondisi alam/keadaan lingkungan dan kondisi masyarakatnya. Ada lima desa yang diklasifikasikan sebagai desa tertinggal. Demikian pula dengan penentuan desa tertinggal di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Kaliwungu yang menggunakan dua aspek, masing-masing kondisi alam

dan kondisi penduduknya. Di Kecamatan Somba Opu, banyaknya penduduk miskin, letak pemukiman penduduk yang jauh dari jalan raya serta letak kelurahan yang jauh dari ibukota Kecamatan Somba Opu menjadi penentu desa tertinggal. Desa yang dikategorikan tertinggal adalah desa-desa yang berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kaliwungu.

### **6.3. Gambaran Kesejahteraan Penduduk**

Salah satu program pembangunan regional adalah mendorong laju pertumbuhan suatu daerah yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, yang utamanya diindikasikan dengan semakin berkurangnya masyarakat miskin. Suksesnya pelaksanaan pembangunan daerah sangat tergantung dari dukungan seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah (pusat dan daerah), swasta maupun masyarakat.

Pembahasan tentang gambaran kesejahteraan penduduk akan mencakup berbagai aspek, yaitu : kesehatan, pendidikan, pengeluaran rumah tangga, perumahan, sosial budaya, fasilitas perdesaan, dan lain-lain.

#### **6.3.1. Kesehatan**

Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang biasanya ada di tingkat desa adalah puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan poliklinik desa (polindes). Disamping itu, keberadaan toko obat dan posyandu juga sangat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Faktor penting lainnya adalah keberadaan tenaga kesehatan yang melayani penduduk, seperti dokter, bidan, dan mantri kesehatan. Peran dukun bayi terutama dukun bayi terlatih juga sangat membantu masyarakat yang masih menggunakan jasa mereka dalam membantu proses persalinan.

Dari sepuluh desa di lima wilayah penelitian, hanya Desa Peteluah Indah di Kecamatan Lingsar yang mempunyai fasilitas kesehatan yang cukup memadai, yakni 1 (satu) puskesmas dan 1 (satu) pustu. Tenaga kesehatan yang melayani terdiri dari 2 orang dokter, 8 orang perawat, 1 orang mantri kesehatan, dan 1 orang bidan desa. Disamping itu, juga tersedia 6 orang dukun bayi yang sudah terlatih.

Fasilitas pustu hanya tersedia di Desa Minas Barat dan Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas, Kelurahan Samata di Kecamatan Somba Opu, serta Desa Kedungsuren di Kecamatan Kaliwungu, masing-masing dengan 1 (satu) pustu. Sementara masyarakat di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar hanya dilayani oleh polindes, demikian pula di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu. Dibandingkan tujuh desa lainnya, ketersediaan fasilitas kesehatan di Desa Banua Hanyar dan Desa Pandan Sari di Kecamatan Kertak Hanyar, serta di Kelurahan Mawang terlihat paling minim. Untuk keperluan berobat, penduduk Desa Banua Hanyar dan Desa Pandan Sari harus pergi ke desa lain. Sementara di Kelurahan Mawang hanya terdapat tiga posyandu yang dilayani oleh seorang bidan yang bertempat tinggal di Kelurahan Tombolo.

Tenaga kesehatan yang ada di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar terdiri dari bidan desa dan mantri kesehatan masing-masing 1 orang dan 5 (lima) orang dukun bayi yang terlatih. Sementara, di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu tenaga kesehatan yang melayani masyarakat hanya seorang bidan dan seorang dukun bayi terlatih. Di Desa Minas Barat, Kecamatan Minas tenaga kesehatan yang ada di puskesmas pembantu hanya 1 (satu) orang bidan, sedangkan dokter hanya ada di puskesmas induk di Desa Minas Jaya yang berjarak 3 (tiga) meter dari desa ini. Selain itu, tenaga kesehatan lainnya adalah 3 (tiga) orang dukun bayi terlatih dan 2 (dua) orang dukun bayi tidak terlatih. Jumlah posyandu di desa ini berjumlah 3 (tiga), masing-masing berlokasi di pustu, di KM 40, dan KM 49. Tenaga kesehatan yang berada di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas terdiri dari seorang bidan, seorang mantri kesehatan, seorang dukun bayi terlatih, dan 3 (tiga) orang dukun bayi tidak terlatih.

### **6.3.2. Pendidikan**

Agar setiap anak usia sekolah (7-24 tahun) mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat mengakses pendidikan, maka penyediaan sarana dan prasarana belajar, seperti gedung sekolah dan tenaga pengajar tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga pihak swasta bahkan masyarakat pada umumnya.

Bangunan sekolah untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU) tidak tersedia di dua desa di Kecamatan Kertak Hanyar, masing-masing Desa Banua Hanyar dan Desa Pandan Sari. Anak-anak usia sekolah di dua desa ini terpaksa bersekolah di luar desanya. Untuk jenjang pendidikan SD, mereka harus menempuh jarak 1-2 km, SMP 3-6 km, dan SMA 4-6 km. Sementara di Desa Minas Barat, Kecamatan Minas tersedia 4 (empat) bangunan sekolah untuk SD, dan 1 (satu) bangunan SMP. Sedangkan di Desa Rantau Bertuah tersedia 1 (satu) bangunan SD dan 1 (satu) bangunan Madrasah Tsanawiyah. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terdapat di wilayah penelitian lainnya. Umumnya, hanya tersedia bangunan SD, sedangkan untuk bangunan SMP hanya terdapat di Kelurahan Samata, Kota Gowa, dan Desa Kedungsuren, Kecamatan Kaliwungu. Sementara bangunan SMU sama sekali tidak tersedia di seluruh wilayah penelitian. Murid SMA di Minas Barat dan Desa Rantau Bertuah harus bersekolah di Desa Minas Jaya, yang merupakan satu-satunya SMU di Kecamatan Minas.

Salah satu indikator pendidikan penting lainnya yang akan dilihat adalah tingkat buta huruf. Penduduk yang buta huruf di Desa Minas Barat relatif banyak. Masih ada sekitar 30 persen penduduk usia 7-40 tahun yang buta huruf. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk terutama Suku Sakai tidak bersekolah, mereka lebih memilih untuk mencari nafkah dibandingkan belajar. Sementara penduduk yang buta huruf di Desa Rantau Bertuah umumnya mereka yang sudah berusia di atas 40 tahun.

Penduduk yang buta huruf di dua desa Kecamatan Kertak Hanyar rata-rata sekitar 10 persen dan kebanyakan adalah penduduk usia tua. Baik di Desa Banua Hanyar maupun Desa Pandan Sari tidak ada program pemberantasan buta huruf. Kondisi serupa juga dijumpai di Desa Kedungsuren maupun di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu. Dalam hal kemampuan baca tulis, sebagian besar penduduk di kedua desa tersebut sudah dapat membaca dan menulis, walaupun ada yang buta huruf, mereka adalah penduduk yang sudah berusia tua (kira-kira 65 tahun ke atas), sehingga program-program pemberantasan buta huruf sudah tidak berjalan lagi saat ini. Adapun program Paket A dan Paket B sejak beberapa tahun terakhir kurang berjalan lancar.

Demikian pula penduduk yang buta huruf di dua kelurahan Kecamatan Somba Opu, tercatat ada sekitar 10 persen, dan umumnya berusia tua. Namun demikian, Program Pemberantasan Buta Huruf Paket B yang sudah dimulai sejak tahun 2003 tetap diadakan. Program-program pendidikan luar sekolah yang tujuannya untuk memberantas buta aksara yang ada di desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar antara lain ada Kelompok Belajar (Kejar) dan Gerakan Pengentasan Aksara (Getas). Sasaran program tersebut adalah untuk penduduk usia 40 tahun ke atas. Sedangkan di Desa Peteluah Indah, program pemberantasan buta aksara yang ada adalah Keaksaraan Fungsional, karena di desa tersebut memiliki PKBM disalah satu dusun.

### **6.3.3. Ketenagakerjaan**

Mata pencaharian sebagian besar penduduk di seluruh wilayah penelitian adalah sebagai petani, baik sebagai buruh tani, penyewa/penggarap atau mengerjakan sawah milik sendiri. Petani di Desa Banua Hanyar dan Desa Pandan Sari kebanyakan hanya sebagai buruh tani, sedangkan pemilik lahan sawah di dua desa ini rata-rata berasal dari luar desa. Selain sebagai petani, penduduk yang lain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan tukang ojek, sopir klotok/jasa angkutan perahu, tukang kayu, tukang batu, tukang cukur dan warung.

Gambaran yang tidak jauh berbeda juga terlihat di Desa Karang Bayan, dimana lahan persawahan dan lahan kering (ladang, tegalan dan perkebunan) cukup luas. Meskipun wilayah ini merupakan daerah pertanian, namun sebagian besar penduduk hanya sebagai buruh tani saja atau sebagai petani penggarap yang mengerjakan lahan milik orang lain dengan sistim bagi hasil. Sawah dan tanah kebun yang mereka garap adalah milik orang lain. Demikian pula yang yang terlihat di Desa Peteluah Indah, hampir 70 persen hanya sebagai buruh tani, hanya sedikit yang menjadi petani pemilik. Sebagian besar lahan persawahan dan tanah perkebunan di Desa Peteluah Indah dimiliki atau dikuasai oleh orang-orang kota yang tinggal di Mataram. Di samping mata pencaharian sebagai petani, penduduk di kedua desa ini ada juga yang bekerja di sektor perdagangan dan sektor industri.

Mayoritas penduduk Kelurahan Samata memiliki mata pencaharian di sektor pertanian di wilayahnya sendiri, tidak menggarap lahan sawah di kelurahan/desa lain, yaitu sekitar 60 persen dari penduduk yang bekerja. Sisanya bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Makassar, sehingga tingkat mobilitas kerja bagi pekerja buruh bangunan sangat tinggi, karena sebagian besar dilakukan di kota. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di Kelurahan Mawang. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan bangunan, namun tidak seperti penduduk di Kelurahan Samata, tingkat mobilitas kerja di Mawang sangat rendah karena kebanyakan dari mereka bekerja di desa mereka sendiri, jarang yang bekerja di kota atau di kelurahan/desa lain.

Kondisi ketenagakerjaan di Desa Kedungsuren dan Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu relatif sama, yaitu sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Sementara sekitar 40 persen penduduk di Desa Minas Barat, Kecamatan Minas bekerja sebagai petani palawija dan petani kelapa sawit. Penduduk yang bekerja di luar desa hanya sekitar 5 orang dan umumnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan, namun keluarga mereka tetap tinggal di Desa Minas Barat. Mengingat letak desanya yang dikelilingi oleh hutan akasia milik PT Arara Abadi, maka sebagian besar penduduk Desa

Rantau Bertuah, Kecamatan Minas bekerja sebagai buruh pada perusahaan tersebut. Hanya sebagian kecil yang bekerja menjadi pedagang, petani sayuran, dan jasa perorangan, seperti tukang urut, atau pengobatan alternatif lainnya.

Tingkat pengangguran di wilayah penelitian pada umumnya relatif tinggi, berkisar 40 – 60 persen, kecuali di Desa Kedungsuren dan Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu yang relatif rendah. Rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di dua desa ini disebabkan relatif tingginya angka penduduk yang bekerja di kota (urbanisasi). Tingginya angka pengangguran ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan informasi mengenai lapangan pekerjaan dan keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia. Di Desa Minas Barat misalnya, tingginya angka pengangguran disebabkan oleh budaya penduduk asli (suku Sakai) yang enggan bersekolah sehingga tingkat pendidikan mereka umumnya rendah, disamping juga sifat malas bekerja yang dimiliki mereka.

Sementara, tingkat pengangguran di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat cukup tinggi dalam kurun waktu 2003-2006. Hal ini sebagai dampak dari peristiwa "bom Bali" yang menyebabkan banyak penduduk harus kehilangan pekerjaan, karena banyak industri kerajinan rumahtangga yang tutup. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan mereka juga menyebabkan sulit untuk mendapatkan pekerjaan di kota.

### **6.3.4. Fasilitas Perdesaan**

Fasilitas perdesaan di wilayah penelitian mencakup sarana jalan (diaspal, diperkeras, dan jalan tanah), fasilitas listrik, sarana ibadah, dan lain sebagainya. Sarana jalan di wilayah Desa Karang Bayan menuju ibukota kecamatan dan desa-desa disekitarnya sudah cukup memadai, dengan kondisi jalan yang di aspal sepanjang 9 km, 17 km diperkeras dan 12 km merupakan jalan tanah. Sementara jalan utama di permukiman penduduk berupa semen dengan lebar 2 meter. Namun adanya sarana jalan yang cukup memadai ini tidak

didukung oleh ketersediaan kendaraan umum (sejenis mikrolet), hanya ada ojek, itupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Kondisi serupa juga ditemui di Desa Peteluah Indah, jalan menuju ke kecamatan dan desa-desa sekitar yang diaspal hanya sejauh 6 km, diperkeras 12 km dan tanah 11 km. Jalan-jalan di pemukiman penduduk adalah tanah diperkeras yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua saja. Alat transportasi yang ada antara lain angkutan umum (bemo), ojek dan cidomo.

Jalan utama yang menghubungkan Desa Minas Barat ke ibukota kecamatan adalah jalan aspal beton, sedangkan dari kantor desa ke pemukiman penduduk sebagian besar masih berupa tanah dilapisi kerikil. Alat transportasi dari desa ke kecamatan dapat menggunakan oplet (roda empat) atau bus. Berbeda dengan Desa Minas Barat yang cukup ramai dilalui oleh kendaraan umum, Desa Rantau Bertuah letaknya terpencil di tengah hutan akasia milik PT Arara Abadi. Jarak antara pusat pemerintah kecamatan ke kantor Desa Rantau Bertuah sekitar 33 Km. Sementara jarak dari kantor desa dengan jalan raya utama saja mencapai 14 Km. Jalan dari jalan raya untuk menuju desa tersebut masih berbentuk jalan tanah dilapisi batu-batu kecil seperti kerikil.

Sarana transportasi di Kedungsuren relatif kurang, jenis angkutan yang digunakan mengandalkan ojek dan angkutan desa yang jumlah dan waktu beroperasinya terbatas. Oleh karena itu bagi yang memiliki pendapatan lebih, biasanya mereka mempunyai kendaraan sendiri terutama motor. Selain minimnya angkutan, kendala lain yang dihadapi penduduk Kedungsuren adalah akses jalan menuju kecamatan yang terbuat dari aspal dengan kondisi yang rusak berat. Sementara jalan lain diantaranya jalan tanah dan *paving* yang menghubungkan antar desa. Tidak jauh berbeda dengan sarana transportasi di Kedungsuren, di Desa Magelung angkutan umum yang diandalkan masyarakat adalah ojek dan angkutan desa yang berbentuk mobil bak terbuka dengan kuantitas dan waktu yang terbatas. Hanya saja keadaan jalan aspal yang menghubungkan desa dengan kecamatan sudah sangat bagus karena baru berumur satu tahun.

Penduduk di Desa Kedungsuren dan Desa Magelung sekitar 90 persen sudah menggunakan listrik PLN sejak tahun 90-an, namun bukan berarti setiap rumah memiliki rekening sendiri. Hal ini disebabkan banyak rumahtangga yang menggunakan listrik PLN secara bersama-sama (patungan) atau penduduk setempat menggunakan istilah "nyalur". Dengan adanya fasilitas listrik, lampu penerangan di jalan dapat membuat kenyamanan dan keamanan para pemakai jalan. Sementara itu, mayoritas rumah penduduk di Kelurahan Samata sudah dapat memanfaatkan fasilitas listrik, namun masih ada sekelompok masyarakat yang terisolir yang belum mendapatkan listrik. Sementara di Kelurahan Mawang, walaupun lokasinya agak lebih jauh dari kota dibandingkan dengan Kelurahan Samata, namun seluruh penduduk Mawang sudah dapat menikmati fasilitas listrik.

Meskipun Desa Minas Barat relatif dekat dari pusat pemerintahan Tingkat I, mudah dijangkau dan letaknya di pinggir jalan raya utama, namun fasilitas listrik belum masuk ke desa ini. Penerangan di rumah-rumah penduduk umumnya menggunakan lampu teplok atau sentir dengan bahan bakar minyak tanah. Hanya beberapa keluarga cukup mampu saja yang menggunakan diesel.

Dibandingkan dengan di daerah perkotaan, kegiatan beribadah secara berjamaah di perdesaan terlihat lebih banyak dilakukan. Hal ini menyebabkan banyak didirikan tempat ibadah seperti mesjid dan mushola. Di desa Karang Bayan, terdapat 4 (empat) mesjid, 1 (satu) mushola, dan 1 (satu) pura, yang keberadaannya sudah lebih dari 3 (tiga) tahun. Sedangkan gereja tidak tersedia di desa ini, lokasi gereja ada di desa lain yang berjarak sekitar 6 km. Fasilitas tempat ibadah yang ada di desa Peteluah Indah antara lain 6 mesjid, 30 musholla dan 1 pura, fasilitas gereja ada di desa lain dengan jarak terdekat sekitar 5 km.

Tempat ibadah yang ada di Desa Kedungsuren terdiri dari 6 mesjid dan 21 mushola, sementara di Desa Magelung ada sebanyak 5 mesjid dan 17 langgar. Meskipun keberadaan tempat ibadah tersebut sudah ada sebelum tahun 2003,

namun kondisi bangunannya masih sangat bagus. Hal ini dikarenakan penduduk sekitar tergolong religius, sehingga mereka sangat mengutamakan sarana ibadah tersebut. Sementara di Kelurahan Samata, fasilitas tempat ibadah yang tersedia adalah 6 mesjid, dengan jarak terdekat hanya 100 meter. Keberadaan mesjid-mesjid tersebut sudah ada lebih dari 3 tahun yang lalu. Sedangkan tempat ibadah di desa Banua Hanyar terlihat sangat minim, hanya ada 2 mushola, tempat ibadah yang lain tidak tersedia. Tempat ibadah untuk umat muslim di Desa Minas Barat ada satu mesjid (Al'Falah) dan tiga mushola. Sedangkan untuk kaum nasrani ada tiga gereja. Kondisi mesjid setelah direnovasi tiga tahun yang lalu terlihat lebih besar dan lebih luas bangunannya.

Sarana olah raga di Desa Karang Bayan untuk sepak bola, bulu tangkis, dan bola voli sementara waktu masih menggunakan tanah milik pemerintah daerah. Sementara, sarana olah raga yang ada di Desa Kedungsuren cukup beragam, seperti lapangan bola, bulutangkis dan tenis meja, dengan jarak sekitar 300 m hingga 6 km. Penggunaan sarana olahraga ini gratis dan dikelola oleh masyarakat secara mandiri melalui organisasi kepemudaan. Di Desa Magelung, sarana olah raga yang tersedia diantaranya lapangan voli, lapangan bola dan bulu tangkis. Masing-masing berjarak 200 m, 1,5 km dan 500 m dari kantor desa.

Fasilitas komunikasi seperti kantor pos tidak tersedia di Desa Kedungsuren dan Desa Magelung. Lokasi kantor pos terdekat berjarak sekitar 12 km dari kantor Desa Kedungsuren. Sedangkan dari kantor Desa Magelung, kantor pos terdekat berjarak sekitar 4 km. Di Desa Karang Bayan, pelayanan untuk berkirim surat difasilitasi dengan kantor pos keliling yang ada setiap hari Selasa dan berlokasi di kantor desa. Sebuah kantor pos pembantu, sudah ada lebih dari 3 tahun yang lalu di Kelurahan Samata.

### **6.4. Gambaran Rumah Tangga Perdesaan**

Dalam penelitian ini jumlah rumah tangga yang dijadikan responden pada masing-masing desa ada sebanyak

5 (lima) rumah tangga sehingga jumlah seluruh rumah tangga di wilayah penelitian berjumlah sekitar 50 rumah tangga. Umumnya wawancara dilakukan terhadap kepala rumah tangga, namun di Desa Minas Barat dan Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas yang menjadi responden adalah ibu-ibu. Hal ini dikarenakan wawancara dilakukan pada saat suami mereka sedang bekerja.

#### **6.4.1. Perumahan**

Mayoritas status kepemilikan rumah di wilayah penelitian adalah milik sendiri, selebihnya ada yang merupakan rumah dinas, rumah kontrakan, dan lain sebagainya. Kecuali di Desa Magelung, kebanyakan luas rumah di sembilan desa hampir sama, yakni berkisar dari 24 m<sup>2</sup> hingga 72 m<sup>2</sup>. Namun di Desa Peteluah Indah, Lombok Barat ada responden yang kondisi rumahnya cukup memprihatinkan karena musibah badai pada tahun 2005. Pada saat wawancara, luas lantai rumah yang masih bisa digunakan untuk berlindung hanya 6 m<sup>2</sup>. Luas rumah responden di Desa Magelung rata-rata lebih luas dibanding di desa lainnya, yaitu berkisar dari 68 m<sup>2</sup> hingga 135 m<sup>2</sup> atau dengan luas hunian per kapita berkisar dari 8,5m<sup>2</sup> hingga 42 m<sup>2</sup>.

Sumber air bersih yang digunakan responden untuk keperluan memasak sangat beragam, mulai dari air sumur, air PAM, dan air leding yang diperoleh dengan membeli menggunakan jerigen. Demikian pula, untuk fasilitas penerangan, rumah tangga ada yang menggunakan listrik PLN, diesel, lampu sentir, dan lampu teplok.

Untuk fasilitas tempat buang air besar atau jamban juga sangat beragam. Di Desa Kedungsuren dan Desa Magelung misalnya, responden tidak ada yang memiliki jamban, sehingga bila ingin buang air besar, mereka harus berjalan ke sungai. Demikian pula dengan responden di Desa Banua Hanyar dan Desa Pandan Sari, Kecamatan Kertak Hanyar serta Desa Karang Bayan dan Desa Peteluah Indah di Kecamatan Lingsar, mereka harus pergi ke sungai bila ingin buang air

besar. Sementara seluruh responden di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu sudah mempunyai jamban sendiri. Kondisi sangat berbeda dengan fasilitas jamban di Kelurahan Mawang yang juga berada di Kecamatan Somba Opu, kebanyakan responden masih menggunakan jamban umum, bahkan ada yang buang air besar di semak-semak. Fasilitas jamban umum juga digunakan oleh responden di Desa Minas Barat. Kecamatan Minas.

### **6.4.2. Pengeluaran Rumah Tangga**

Pengeluaran rumah tangga responden di Desa Karang Bayan dan Desa Peteluah Indah, Kecamatan Lingsar masing-masing berkisar antara Rp. 600.000,- - Rp. 800.000,- sebulan dan Rp. 600.000,- - Rp. 900.000,- sebulan. Dari seluruh pengeluaran, porsi pengeluaran untuk makanan lebih besar dibandingkan non makanan. Pengeluaran non makanan yang dirasakan cukup besar oleh setiap rumah tangga adalah pengeluaran untuk transport dan pengeluaran untuk listrik, sementara untuk minyak tanah cukup sedikit karena untuk memasak mereka masih menggunakan kayu bakar.

Sementara pengeluaran rumah tangga responden untuk makanan di Desa Banua Hanyar dan Desa Pandan Sari, Kecamatan Kertak Hanyar berkisar Rp. 600.000,— Rp. 1.200.000,- sebulan. Untuk pengeluaran non makanan yang rutin seperti untuk sewa/kontrak rumah, membayar listrik, membeli minyak tanah/kayu bakar, membeli air untuk minum/masak pada masing-masing rumah tangga juga tidak jauh berbeda yaitu sekitar Rp 115.000,- sampai Rp 170.000,- per bulannya. Sedangkan untuk pengeluaran yang lainnya seperti barang dan jasa, pakaian, barang-barang tahan lama dan pajak, pungutan dan asuransi pada masing-masing rumah tangga sangat bervariasi. Besarnya pengeluaran rumah tangga responden per bulan di Kelurahan Samata dan Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu hampir serupa dengan pengeluaran rumah tangga responden di Desa Banua Hanyar dan Desa Pandan Sari.

Dibandingkan rumah tangga responden di desa lainnya, pengeluaran rumah tangga responden di Desa Minas Barat dan Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas merupakan pengeluaran rumah tangga tertinggi, yakni berkisar Rp. 700.000,- - Rp. 2.300.000,- sebulan. Dari seluruh pengeluaran, porsi pengeluaran untuk makanan lebih besar dibandingkan non makanan, berkisar antara 60 sampai dengan 80 persen.

Pengeluaran rumah tangga responden di Desa Kedungsuren dan Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu tercatat paling rendah diantara rumah tangga responden di seluruh wilayah penelitian, yaitu berkisar dari sekitar Rp. 50.000,- hingga Rp. 180.000,- per kapita per bulan. Bila diasumsikan rata-rata anggota rumah tangga ada 5 (lima) orang, maka pengeluaran rumah tangga sebulan berkisar dari Rp. 250.000,- hingga Rp. 900.000,-.

#### **6.4.3. Sosial Budaya**

Aspek sosial budaya yang akan dibahas meliputi kepemilikan kartu Askes Miskin (Askin) sebagai pengganti Kartu Sehat, pembagian beras miskin (raskin) dan pendapat tentang taraf hidup mereka dibanding kondisi tiga tahun yang lalu. Kartu Askin dan raskin yang difokuskan untuk penduduk miskin merupakan program pengentasan kemiskinan yang menjadi program pemerintah secara nasional.

Kartu Askin sudah dimiliki oleh seluruh rumah tangga responden di Kelurahan Samata dan Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu. Dengan kartu Askin, pasien akan dibebaskan dari biaya perawatan rumah sakit. Pasien hanya dibebankan untuk membeli obat yang dibutuhkan. Sebaliknya seluruh rumahtangga terpilih di Desa Kedungsuren dan Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu belum mendapatkan kartu sehat walaupun sudah diajukan dan belum pernah mendapat bantuan atau keringanan biaya kesehatan dalam berobat selama setahun terakhir.

Sementara di Desa Banua Hanyar, dari 5 (lima) rumah tangga responden hanya 3 responden yang mengaku pernah memiliki dan menggunakan kartu sehat untuk mendapat keringanan dalam berobat. Namun kartu sehat itu sekarang sudah tidak berfungsi lagi, sekarang sudah lebih mudah untuk mendapatkan keringanan berobat. Bagi masyarakat yang kurang mampu cukup dengan menunjukkan surat pengantar dari ketua RT setempat, KTP dan KK saja kepada petugas Puskesmas tempat mereka berobat. Hal ini sudah berlaku sekitar setahun terakhir baik di Desa Banua Hanyar maupun Desa Pandan Sari.

Rumah tangga responden yang mempunyai kartu sehat di Desa Karang Bayan hanya tiga rumah tangga. Sedangkan di Desa Peteluah Indah semua rumah tangga responden rumah tangga tidak mempunyai kartu sehat, namun tiga rumah tangga memiliki kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dapat digunakan untuk berobat gratis.

Jatah raskin yang telah ditetapkan pemerintah sebanyak 10 kg per rumah tangga sebulan dengan harga Rp.1 000,- per kg, ternyata realisasinya tidak demikian. Banyaknya raskin yang diterima penduduk hanya 10 liter per rumah tangga. Hal ini terjadi di rumah tangga responden di Kecamatan Somba Opu. Belum lagi rumah tangga penerima raskin nampaknya salah sasaran, rumah tangga yang berhak mendapat raskin justru tidak mendapat jatah, sebaliknya rumah tangga yang dianggap mampu secara finansial mendapat jatah raskin. Sementara semua rumah tangga responden di Desa Kedungsuren pernah membeli beras raskin, namun jumlahnya bervariasi, tidak 120 kg selama setahun, kisarannya antara 30 kg hingga 90 kg. Bahkan di Desa Magelung banyaknya raskin yang dibeli dalam setahun hanya 30 kg hingga 48 kg.

Pembagian raskin di Desa Banua Hanyar maupun Desa Pandan Sari, Kecamatan Kertak Hanyar masih ada di dua desa ini. Setiap rumah tangga masing-masing mendapat jatah 10 liter sebulan dengan harga Rp.12.000,- Mereka bisa membeli lebih dari 10 liter jika ada rumah tangga yang tidak mengambil jatahnya. Kadang-kadang mereka sengaja tidak mengambil

jatah bersanya dengan alasan masih mempunyai simpanan beras dari hasil panen. Rumah tangga responden di Desa Karang Bayan dan Desa Peteluah Indah hanya bisa mendapatkan jatah raskin 4 kg per bulan, dan jatah tersebut dapat diperoleh oleh seluruh warga tidak difokuskan pada penduduk miskin saja.

Pendapat rumah tangga responden di Kelurahan Samata dan Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu tentang kondisi taraf hidup keluarga dibandingkan keadaan 3 tahun yang lalu ternyata ada dua pendapat. Sebagian besar penduduk yang menjadi responden mengaku lebih parah karena biaya hidup semakin meningkat, sementara kesempatan kerja sangat kecil. Tetapi dari responden yang menjabat sebagai pejabat pemerintahan setempat mempunyai jawaban yang berbeda, mereka menyatakan bahwa kondisi taraf hidup mereka lebih baik dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Karena sekarang ada raskin, ada Kartu Askin dan anak-anak dapat sekolah dengan baik.

Pada umumnya rumah tangga responden di seluruh wilayah penelitian mempunyai pendapat yang berbeda berkaitan dengan penilaian terhadap perubahan taraf hidup dibandingkan dengan kondisi 3 (tiga) tahun yang lalu. Ada yang menjawab lebih parah, lebih baik, atau sama saja. Rumah tangga responden yang menjawab lebih parah biasanya terkait dengan kegiatan usaha yang sedang dijalani, seperti rumah tangga responden di Desa Karang Bayan, dimana usaha istrinya sebagai pedagang sayuran sedang mengalami kerugian karena banyak dagangan yang tidak laku.

### **6.5. Program Peningkatan Kesejahteraan Penduduk**

Program pembangunan infrastruktur desa dijumpai hampir di seluruh wilayah penelitian, diantaranya berupa pengerasan jalan, pengerasan jalan, pembuatan jembatan, irigasi merupakan beberapa program di Kecamatan Kertak Hanyar. Sementara di Kecamatan Somba Opu, berupa

## ***Bab 6. Studi Kualitatif Tentang Kesejahteraan Penduduk Perdesaan***

---

pembangunan *ring road* yang menghubungkan Kelurahan Samata dengan Kota Makassar.

Program lainnya seperti yang dijumpai di Kecamatan Minas, yaitu Program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I), yaitu program yang bertujuan untuk membuat penduduk lebih sejahtera yang disponsori oleh PT Chevron Pacific yang sebelumnya bernama PT Caltex. Di Kecamatan Lingsar, pemberdayaan kepada masyarakat dalam Program P4K, yaitu memberi pelatihan berupa budidaya di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Program lainnya, adalah Gerakan Sayang Ibu, program di bidang pendidikan melalui program orang tua asuh untuk siswa SMA dan pemberian dana BOS, serta pemberian dan penyaluran raskin. Sementara di Kecamatan Somba Opu, program peningkatan kesejahteraan penduduk berupa pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di setiap kelurahan, dan diadakannya Sanggar Pendidikan Anak Soleh (SPAS) berupa TPA dan TKA gratis bagi penduduk miskin. Program pengurangan pengangguran di Kecamatan Kaliwungu berupa kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan usaha *Home Industry*.

## Kecamatan Minas - Siak - Riau

### 1. Gambaran Kecamatan Wilayah Penelitian

#### 1.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Minas yang posisi pusat pemerintahannya berada di Desa Minas Timur terletak di antara  $100^{\circ} 54'$  –  $101^{\circ} 34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 40'$  –  $1^{\circ} 13'$  Lintang Utara. Dilihat batas-batasnya, Kecamatan Minas berbatasan dengan Kecamatan Kandis di sebelah utara, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru di sebelah selatan, Kabupaten Rokan Hulu di sebelah barat, serta Kecamatan Tualang dan Kecamatan Sungai Mandau di sebelah Timur. Tinggi Kecamatan Minas dari permukaan air laut berkisar antara 0 sampai dengan 102 meter. Jarak dari Kecamatan Minas ke Pekanbaru (ibu kota Propinsi Riau) lebih dekat dibandingkan jarak dari Kecamatan Minas ke Sri Indrapura (ibu kota Kabupaten Siak). Perjalanan dari Pekanbaru ke Kecamatan Minas lewat jalan darat dengan angkutan umum paling lama hanya sekitar satu jam. Sedangkan jarak dari ibukota kecamatan Minas ke ibukota Kabupaten Siak (Sri Indrapura) mencapai sekitar 100 Km. Perjalanan dari Kecamatan Minas ke Kota Sri Indrapura jika ditempuh lewat jalan darat mencapai sekitar 3,5 jam dengan menggunakan angkutan umum. Alternatif lain jika dilakukan lewat sungai menggunakan speed boat dapat ditempuh hanya sekitar 2 jam, namun demikian ongkosnya lebih mahal dibandingkan lewat jalan darat.

Wilayah Kecamatan Minas seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Dengan topografi yang berbukit dan berlembah ternyata di bawah tanah wilayah Kecamatan Minas memiliki cadangan minyak mentah yang cukup besar dan hingga saat ini masih berproduksi.

Luas wilayah Kecamatan Minas adalah  $346,35 \text{ Km}^2$ , atau 4,05 persen dari luas Kabupaten Siak. Tingkat kesuburan tanah di Kecamatan Minas secara umum adalah sedang dengan sebagian besar lahan pertanian digunakan untuk tegalan, kebun, ataupun ladang. Sungai yang melewati Kecamatan Minas adalah Sungai Mandau. Disamping itu Sungai Mandau juga melewati kecamatan lain seperti Kecamatan Kandis dan Kecamatan Sungai Mandau. Sementara itu Kecamatan Minas juga dilewati oleh 4 danau seperti Danau Ketialau, Danau air Hitam, Danau Besi, dan Danau Tembatu Sonsang.

#### 1.2. Perkembangan Kelurahan/Desa

Kecamatan Minas dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Mandau yang dilaksanakan pada tahun 2001 berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 13 tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Siak. Kemudian pada tahun 2003 dimekarkan kembali menjadi Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan

pembangunan dari pemerintahan kecamatan. Dengan demikian potensi yang ada di kecamatan ini secara tidak langsung dapat terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat dibandingkan pemerintah yang lama.

Saat ini, secara administratif Kecamatan Minas terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Mandi angin, Desa Minas Barat, Desa Rantau Bertuah, Desa Minas Timur, dan Desa Minas Jaya. Dari 5 desa tersebut terdapat 10 Dusun, 32 Rukun Warga (RW) dan 98 Rukun Tetangga. Menurut Sekretaris Camat (Pak Hendro), sebelum tahun 2003 di Kecamatan Minas terdapat tujuh desa, yaitu Sam Sam, Kandis, Belutu, Mandi angin, Minas Barat, Rantau Bertuah, dan Minas. Seiring pemekaran wilayah Kecamatan Minas menjadi dua (Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis) pada tahun 2003, terjadi juga pemisahan tiga desa dari Kecamatan Minas. Ketiga desa tersebut adalah Desa Belutu, Desa Sam Sam, dan Desa Kandis yang keluar dari Kecamatan Minas dan bergabung dengan Kecamatan Kandis. Sementara di dalam Kecamatan Minas sendiri juga terjadi pemekaran wilayah, yaitu Desa Minas Timur pecah menjadi dua desa masing-masing Desa Minas timur dan Desa Minas Jaya yang merupakan pusat perekonomian Kecamatan Minas.

### **1.3. Klasifikasi Desa tertinggal**

Dari 5 desa di Kecamatan Minas terdapat 3 desa yang masih dalam kategori desa tertinggal, masing-masing Desa Rantau Bertuah, Desa Mandi Angin, dan Desa Minas Barat. Klasifikasi desa tertinggal di Kecamatan Minas Barat ditentukan oleh Kabupaten dan Badan Pusat Statistik Siak. Menurut Pak SekCam, penentuan desa tertinggal terhadap ketiga desa tersebut sudah sesuai dengan situasi dan kondisi desa-desa tersebut yang sangat minim jika dilihat tingkat sosial ekonomi masyarakat dan kondisi serta letak desa tersebut yang susah dijangkau.

Kriteria utama dalam menilai/menentukan klasifikasi desa tertinggal menurut Pak SekCam ditinjau dari 2 sisi, yaitu sisi masyarakat dan sisi desanya. Dari sisi masyarakat, dilihat perekonomian dan sosial budaya masyarakat. Kemudian sisi desanya dilihat dari jumlah fasilitas kantor untuk desa yang masih minim, infrastruktur desa seperti listrik yang belum masuk desa, dan kondisi alam itu sendiri. Sebagai contoh kondisi alam Desa Rantau Bertuah dan Mandi Angin, sebagian besar tanah di desa tersebut tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam karena merupakan daerah Trans HTI yang dikelilingi oleh Hutan Akasia milik HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri) PT Arara Abadi (perusahaan kayu Akasia). Sehingga sebagian besar masyarakatnya juga bekerja pada PT Aarara Abadi sebagai buruh kasar.

Masyarakat di dua desa tersebut hanya dapat bertanam kelapa sawit untuk dijual, namun sering terjadi konflik dengan pihak PT Arara Abadi. Menurut riwayat kepemilikan, dulu masyarakat mempunyai lahan dari PT Arara Abadi. Namun karena tidak ada ketransparanan mengenai batas-batas yang jelas dari PT Arara Abadi, maka tanah warga diklaim oleh PT Arara Abadi sebagai miliknya. Saat ini masih ada beberapa masyarakat yang menanam kelapa sawit untuk dusahakan. Sehingga program pemda

sekarang untuk ekonomi kerakyatannya membentuk kelompok-kelompok tani kelapa sawit dengan membeli sebagian tanah dari PT Arara Abadi di wilayah Mandi Angin dan Rantau Bertuah. Untuk membantu usaha kelompok tani tersebut, jika panen besar mereka berhasil pemerintah bersama pihak swasta berencana membangun pabrik kelapa sawit untuk menampung produksi kelapa sawit mereka.

#### **1.4. Program Peningkatan kesejahteraan Penduduk**

Kebijakan dan upaya yang sudah dilaksanakan untuk memajukan Kecamatan Minas dalam bidang pembangunan adalah Program K2I atau Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memberantas kebodohan dan pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan di dua desa, yaitu Rantau Bertuah dan Mandi Angin. Disamping dari PEMDA Kabupaten Siak, dana juga diperoleh dari Subsidi Kompensasi dana BBM (PKPSBBM) yang dimulai tahun 2005. Namun dana dari subsidi kompensasi dana BBM khusus ditujukan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang sudah terwujud sampai saat ini adalah pembangunan los pasar, mesjid, drainase, sumur bor, dan rumah ibadah. Rencana dana dari Bupati (Pemda) sebesar 1 miliar rupiah yang dikelola oleh pemerintah untuk infrastruktur belum cair, karena sampai saat wawancara belum selesai juknisnya, sehingga pembangunan infrastruktur untuk desa tertinggal dari dana tersebut belum dapat diterapkan, menunggu juknis dari kabupaten.

Program-program dalam mensejahterakan kehidupan warga yang sudah berjalan adalah dari PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang dulunya bernama PT. CALTEX. Wujud kegiatannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan untuk generasi mudanya berupa pelatihan mobiler, montir, las, salon, dan menjahit. Kegiatan PT. CPI ini bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau. Kegiatannya dilakukan di ibu kota Propinsi (Pakanbaru), tetapi pesertanya dari masyarakat Kecamatan Minas, khususnya warga tiga desa (Mandi Angin, Rantau Bertuah, dan Minas Barat) yang merupakan desa di wilayah komoditas operasional CPI. Pelatihan dilaksanakan setahun sekali, terutama untuk suku asli yaitu Suku Sakai yang rata-rata pendidikannya rendah.

Partisipasi aparat desa dengan warga dalam membangun desanya cukup bagus kecuali desa Minas Barat. Hal ini disebabkan latar belakang pendidikan mereka yang rendah. Warga Desa Minas Barat sebagian besar adalah Suku Sakai yang kurang berminat pada pendidikan.

Selain dari PEMDA, bantuan dana diperoleh dari PT. CPI atau PT. CALTEX. Namun tidak seluruhnya bantuan tersebut dalam bentuk dana, sebagian ada yang berbentuk fisik, dan campuran antara fisik dan dana. Bantuan yang sudah terwujud saat ini dari PT. CALTEX di antaranya adalah pembangunan untuk jembatan (dana dan fisik), masjid (dana), dan Sekolah Menengah Atas (fisik). Sedangkan bantuan dari Komisi Pemberantasan Kemiskinan (KPK) Kabupaten Siak yang sudah terlaksana adalah pembangunan rumah miskin berbentuk rumah kayu/papan yang memenuhi standar kesehatan. Rumah ini ditujukan bagi warga yang miskin dan belum memiliki rumah.

Pemilihan dilakukan lewat seleksi yang ketat agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Rencana pembangunannya tiap tahun berkesinambungan di tiap kecamatan (13 Kecamatan), sedangkan jatah untuk desanya bergantian secara bergilir. Namun calon penerima bantuan dilihat dulu ada masalah atau tidak, terutama masalah lahan, jangan sampai ada sengketa. Warga yang mau menerima juga diselidiki kesungguhannya, karena pernah ada kasus salah satu warga sudah dapat rumah dijual lagi dan mereka tinggal di hutan. Tahun 2005 pembangunan di Kecamatan Minas sudah dilakukan di Minas Timur sebanyak 5 unit rumah. Tahun 2006 ini rencana akan dibangun lagi tapi belum tahu seberapa banyak. Biasanya dari pihak kecamatan mengusulkan terlebih dahulu nama-nama yang layak mendapat rumah.

Kendala yang sering dihadapi pihak aparat dalam pembangunan di Kecamatan Minas adalah sering terjadi demo dari warga akibat kecemburuan sosial, terutama suku asli yaitu Suku Sakai. Biasanya demo dilakukan di depan kantor kecamatan. Menurut Pak Hendro, tipe warga asli Suku Sakai agak susah untuk diajak berfikir ke depan mengingat latar pendidikan yang rendah dan sudah menjadi sifat mereka jika ada warga dari suku lain mendapat fasilitas lebih selalu ribut. Cara meredam kemarahan mereka biasanya dengan diajak dialog secara bersikap dingin sambil bercanda, baru berhasil.

## **2. Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Tertinggal**

Berdasarkan penghitungan yang diperoleh dari data PODES 2003, di Kecamatan Minas terdapat tiga desa dengan indeks komposit terendah yaitu Minas Barat, Mandi Angin, dan Rantau Bertuah. Lewat diskusi dengan aparat terkait di Kabupaten Siak dan Kecamatan Minas serta pertimbangan kemudahan lokasi dan jarak antara dua desa terdekat, akhirnya dipilih Desa Minas Barat dan Desa Rantau Bertuah untuk keperluan studi mendalam ini.

### **2.1. Kondisi Geografis**

Desa Minas Barat merupakan Desa swadaya yang terdiri atas 2 dusun, 4 RW, dan 12 RT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Mandau, sebelah selatan dengan Desa Rantau Bertuah, sebelah barat dengan Kecamatan Kandis, dan sebelah timur dengan Desa Minas Timur. Luas desanya menurut Pak Kades H. M. Bungsu J. Bin Jaonang adalah sekitar 637 Ha. Kondisi Desa Minas Barat sekitar 70 persennya berbukit-bukit dan dilalui banyak anak sungai, seperti Sungai Mandi Angin, Sungai Minas, Sungai Pelombayan, Sungai Arang, Sungai Sibayak, Sungai Gondang, Sungai Pancur, Sungai Batang Mengkuang, dan masih banyak yang lain. Letak Desa Minas Barat berada di sekitar jalan Raya utama yang dilewati oleh kendaraan umum dan Kantor Desanya berada di pinggir jalan raya, sehingga memudahkan kita untuk mencapai kesana dari pusat kota kecamatan di Minas Jaya yang jaraknya sekitar 12 Km. Potensi utama yang banyak dihasilkan di desa ini adalah kelapa sawit. Hasil produksi kelapa sawit dari kebun warga dijual sendiri langsung ke PKS (Penampungan Kelapa Sawit) yaitu pabrik pengolahan kelapa sawit. Satu Kg kelapa sawit dihargai antara 400 sampai dengan 500

rupiah. Produksi mereka tergantung dari luas tanamnya. Menurut Pak Kades, sekali panen untuk satu desa bisa mencapai 15 ton, dalam sebulan terjadi dua kali panen.

Desa Rantau Bertuah terletak di antara 101° 20' – 101° 21' Bujur Timur dan 0° 43' – 0° 5' Lintang Utara. Di sebelah utara dan barat berbatasan dengan Desa Minas Barat, sedangkan di sebelah Selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Dilihat topografinya, sekitar 0-2 persen merupakan dataran, 2-8 persen berombak, 8-25 persen bergelombang, dan 25-40 persen berbukit, dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan air laut. Menurut data di Kantor Desa, luas Desa Rantau Bertuah adalah 9.613,86 Ha. Luas pemukiman terbagi menjadi lahan pekarangan sebesar 75 Ha dan lahan diversifikasi sebesar 600 Ha. Sedangkan yang digunakan sebagai lahan desa terbagi menjadi lahan fasilitas umum sebesar 8 Ha, kuburan 2 Ha, Test Farm 4 Ha, Kas Desa 10 Ha, dan lainnya lahan cadangan.

Potensi alam di Rantau Bertuah yang memiliki 2 dusun, 4 Rw, dan 13 RT saat ini tidak ada, karena warga sebagian besar bekerja sebagai buruh saja. Kelapa sawit yang banyak tumbuh di pekarangan rumah warga bukan sumber daya alam yang menghasilkan karena memang sudah ditanam sejak pertama desa ini berdiri tahun 1993 sebagai Eks Transmigrasi Pola HTI Binaan PT Arara Abadi. Transmigran tidak hanya orang Jawa, tapi juga penduduk lokal. Masing-masing KK mendapat tanah sebanyak 2 Ha lengkap dengan rumah papan. Baru 2 tahun terakhir ini kelapa sawit digalakan penanamannya setelah ada bapak angkat dari PTP V (Perusahaan perkebunan kelapa sawit) yang memberi modal pada penduduk untuk menanam kelapa sawit. Rencana sistem pembagian hasil produksi kelapa sawit dengan sistem bagi hasil. Namun produksi kelapa sawit belum dapat dinikmati karena baru dapat dipanen setelah minimal 3 tahun ditanam.

## **2.2. Kependudukan**

Jumlah penduduk Desa Minas Barat menurut registrasi penduduk sampai dengan September 2006 tercatat sebanyak 2.533 jiwa. Banyaknya penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibanding penduduk perempuan, yaitu 1.361 jiwa penduduk laki-laki dan 1.172 jiwa penduduk perempuan. Banyaknya rumah tangga sebesar 573, dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga sekitar 4 sampai 5 jiwa. Menurut penuturan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penduduk desa ini mayoritas berusia produktif (15-64 tahun), yaitu sekitar 60 persen, usia 0-14 tahun sekitar 30 persen, dan sisanya penduduk usia 65 tahun lebih. Selama setahun terakhir tidak ada kasus perempuan yang menikah di usia kurang dari 17 tahun. Umumnya para wanita di sini menikah di usia 17-18 tahun. Sebagian besar penduduk Desa Minas Barat adalah Suku Sakai, yaitu sekitar 34 persen. Sisanya merupakan Suku Batak, Suku Minang dan Suku Nias. Sebagian besar penduduk beragama Islam, sisanya Kristen Protestan. Hanya ada 5 penduduk beragama Hindu.

Penduduk Desa Rantau Bertuah lebih sedikit dibanding Desa Minas Barat, yaitu sebanyak 1.770 jiwa, yang terdiri dari 966 jiwa penduduk laki-laki dan 804 penduduk perempuan, dengan 354 rumah tangga (berdasarkan registrasi penduduk keadaan

September 2006). Mayoritas penduduk berusia produktif (17-60 tahun), sekitar 56 persen, kemudian usia 0-16 tahun sebanyak 42 persen, selebihnya di atas usia 60 tahun. Selama setahun terakhir tidak ada kasus perempuan yang menikah di usia kurang dari 17 tahun. Pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya tapi hanya sebagian kecil. Penduduk di desa ini lebih beragam sukunya, yaitu Suku Jawa yang merupakan suku mayoritas, selebihnya Suku Minang, Melayu, Nias, dan Batak. Dari seluruh penduduk terdapat 1.732 yang beragama Islam, selebihnya Kristen Protestan dan Khatolik.

### **2.3. Ketenagakerjaan**

Sekitar 20 persen penduduk Minas Barat bekerja sebagai buruh di perusahaan, kemudian 20 persen petani Palawija (ubi kayu), 20 persen petani kelapa sawit, selebihnya menjadi pengangguran, sehingga tingkat pengangguran di desa ini cukup tinggi, yaitu sekitar 40 persen. Kondisi seperti ini terjadi mengingat budaya penduduk asli (Suku Sakai) yang berpendidikan rendah dan malas untuk bekerja.

Petani palawija kebanyakan menanam ubi kayu di kebun atau ladang. Namun hasil panennya tidak dapat dikonsumsi dalam bentuk asli ubi kayu segar, melainkan diolah terlebih dahulu menjadi makanan khas adat Suku Sakai yang disebut "Mengalouw". Menurut Pak Kades, ubi kayu yang diproduksi di desa ini tidak dapat langsung dimakan dalam bentuk aslinya, karena mengandung zat beracun sehingga sangat berbahaya jika langsung dimakan sebelum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Pengolahan ubi kayu menjadi Mengalouw lewat beberapa tahapan proses. Menurut riwayat, jaman dulu pengolahan ubi kayu pertama dikupas, kemudian direndam dulu di sungai selama 3 hari, baru diparut. Tapi sekarang tidak perlu direndam. Setelah diparut, dibuang seratnya kemudian dipres (dibuang airnya), baru disangrai. Hasil ubi yang disangrai ini yang disebut mengalouw yang dapat bertahan sampai 3 bulan. Mengalouw dapat dimakan langsung begitu saja atau dicampur air matang sedikit sehingga lebih terasa empuk dan dijadikan makanan pokok sehari-hari tanpa atau dengan lauk (biasanya teri asin goreng). Biasanya mengalouw dimakan sebagai sarapan pagi, meskipun ada yang dipakai untuk makan siang. Menurut Pak Kades, penduduk asli ini mengkonsumsi mengalouw bukan karena susah memperoleh nasi, melainkan karena ingin mempertahankan makanan tradisi nenek moyang. Rata-rata penduduk dapat memproduksi mengalouw sebanyak 8 gantang seminggu. Satu gantang setaraf dengan sekitar 1,5 Kg. Selain dikonsumsi sendiri, sebagian hasil mengalouw dijual kepada sesama Suku Sakai baik di desa ini maupun di luar desa. Tinggi rendahnya kualitas mengalouw ditentukan dari proses pembuatannya. 8 mata (satu mata sekitar 1 ons) mengalouw kualitas biasa yang berwarna kekuningan, bisa laku sekitar 5 ribu rupiah. Namun untuk kualitas tinggi berwarna agak keputihan bisa laku sampai 15 ribu rupiah.

Penduduk yang bekerja di luar desa hanya sekitar 5 orang dan umumnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan. Keluarga mereka tetap di desa Minas, seminggu sekali pulang. Anak-anak yang bekerja untuk mencari nafkah tidak ada di desa ini, walaupun bekerja hanya sekedar membantu orang tua menjaga warung atau membantu membuat mengalouw.

Mengingat letak desanya yang dikelilingi oleh Hutan Akasia milik PT Arara Abadi, maka sebagian besar penduduk Desa Rantau bertuah juga bekerja sebagai buruh pada perusahaan tersebut. Hanya sebagian kecil yang bekerja menjadi pedagang, petani sayuran, dan jasa perorangan, seperti tukang urut, atau pengobatan alternatif lainnya. Namun demikian, menurut Pak Kades (Muslim), pengangguran di desa ini cukup banyak. Sementara penduduk yang bekerja di kabupaten lain hanya sebagian kecil saja, umumnya mereka bekerja sebagai karyawan di perusahaan. Sampai saat ini penduduk belum ada yang menjadi TKI di luar negeri. Anak-anak umur 10-14 tahun yang bekerja mencari nafkah hanya sebagian kecil saja. Umumnya anak-anak bekerja sebagai buruh kasar di PTP V (Arara Abadi), yaitu membersihkan alang-alang di perkebunan akasia tersebut. Alasan mereka bekerja adalah untuk menambah keperluan sekolah seperti tas, sepatu, buku, alat tulis, dan sebagainya.

#### **2.4. Pendidikan**

Desa Minas Barat terdapat 4 Sekolah Dasar (SD) yaitu SDN 01, 02, 03, dan 09. Seluruh SDN di desa ini dibangun oleh PT. CALTEX. Demikian juga dengan perawatan dan perbaikannya diurus dan didanai oleh PT. CALTEX. Sehingga kondisi bangunan sekolah sampai sekarang masih tetap bagus. Perbaikan terakhir dilakukan tahun 2005 kemarin. Saat ini sedang dibangun SDN 11 di KM 49, baru selesai 2 lokal (kelas). Istilah KM (kilometer) untuk menyebut suatu tempat sudah biasa diucapkan oleh penduduk desa ini, mengingat letak desa yang memanjang di sekitar jalan raya utama antara KM 31 sampai dengan KM 49. Disamping SD juga ada 1 SMP yaitu SMPN 1 Minas, sedangkan SMA tidak ada di sini. Anak-anak yang akan melanjutkan sekolahnya ke SMA harus ke Minas Jaya, satu-satunya SMA Negeri di Kecamatan Minas. Dalam kenyataannya hanya sedikit penduduk Minas Barat yang melanjutkan ke SMA, rata-rata pendidikan tertinggi hanya sampai ke tingkat SD atau SMP saja. Hal ini disebabkan oleh partisipasi penduduk asli (Suku Sakai) yang kurang terhadap pendidikan. Mereka lebih suka bermalas-malasan atau sebagian membantu orang tua mencari makan.

Penduduk yang buta huruf relatif banyak di desa ini, terutama yang berusia antara 40 sampai dengan 50 tahun, termasuk Pak Kades sendiri. Namun menurut keterangan Sekdes, masih ada sekitar 30 persen penduduk berusia 7 sampai 40 tahun yang buta huruf. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk terutama Suku asli (Sakai) tidak sekolah. Program paket keaksaraan (sebelum tahun 2004) dan Kejar Paket A (tahun 2000-an) pernah diadakan. Pada dua bulan pertama kegiatan ini aktif diikuti, namun lama-lama peminatnya berkurang. Bukan karena programnya yang kurang bagus, melainkan masyarakat sendiri yang mulai malas datang untuk mengikutinya. Mereka lebih baik membolos dan lebih mementingkan mencari nafkah. Anak-anak yang putus sekolah menurut Sekdes hanya sedikit, kebanyakan anak-anak lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP. Justru sebagian besar penduduk di desa ini banyak yang tidak mengenyam bangku sekolah, sekitar 69 persen. Bukan karena tidak ada biaya, melainkan karena sudah tradisi tidak mau sekolah.

Fasilitas pendidikan di Desa Rantau Bertuah lebih minim dibanding Desa Minas barat. SDN hanya ada satu yang dibangun oleh Pemda Siak, sehingga untuk mengantisipasi kekurangan tempat diadakan Madrasah Diniyah (MDA) yang gedungnya menumpang di SDN. Pagi digunakan oleh SDN, siangnya digunakan untuk MDA. Sementara SMP Negeri tidak ada, dan oleh PT CALTEX dibangun Madrasah Tsanawiyah (MTS). Anak-anak yang ingin melanjutkan ke SMP Negeri harus ke Minas Barat di SMPN 1 Minas dan kos di sana. Kondisi bangunan kedua sekolah tersebut saat ini mulai agak rusak, sehingga menurut Pak Kades tahun 2007 nanti akan diperbaiki oleh Pemda. Minat anak-anak untuk sekolah di sini cukup tinggi meskipun masih ada sebagian kecil yang tidak sekolah karena alasan biaya. Namun berkat adanya program BOS yang dimulai tahun 2005 tidak alasan lagi untuk tidak sekolah, karena semua dari mulai uang sekolah, buku, alat tulis, tas, dan seragam gratis.

Penduduk yang buta huruf di Desa Rantau Bertuah ini umumnya mereka yang sudah berusia di atas 40 tahun. Sementara Program Keaksaraan dan Program Paket A belum pernah ada.

### **2.5. Kesehatan**

Fasilitas kesehatan di Desa Minas Barat hanya Puskesmas Pembantu dengan tenaga medis satu bidan. Sedangkan dokter hanya ada di puskesmas induk di Minas Jaya yang jaraknya sekitar 3 Km. Tenaga medis lainnya adalah 3 dukun bayi terlatih dan 2 dukun bayi tidak terlatih. Antara bidan dan dukun terlatih belum terjalin kerja sama karena belum ada kemauan untuk bekerja sama dari dukun bayi terlatih. Ibu-ibu yang melahirkan lebih senang ke dukun karena disamping menolong melahirkan dukun juga merawat ibu yang melahirkan denganurut dan memandikan bayinya setiap hari. Penduduk yang berobat ke puskesmas juga kurang karena lebih senang berobat ke pengobatan alternative yang dikenal dengan sebutan "bedikie" suatu pengobatan dengan cara herbal namun mengandung unsur magic karena menggunakan mantra-mantra khusus. Menurut bidan Masyitoh pengobatan ini tidak ditarik biaya, namun sebetulnya mahal karena harus menyediakan syarat-syarat, ditambah sedia rokok, kopi, dan sebagainya untuk dukunya. Umumnya suku sakai jika berobat maunya sekali datang langsung cepat sembuh, jika tidak maka tidak datang lagi ke pustu. Padahal warga miskin yang ingin berobat ke pustu dengan gratis syaratnya hanya menunjukkan KK dan KTP saja, karena sudah 6 bulan ini Askeskin ditarik. Hal ini disebabkan banyak terjadi salah sasaran pada penerima Askeskin dan menimbulkan kecemburuan sosial. Pustu lebih ramai diminati oleh ibu-ibu yang mau KB. Banyaknya akseptor KB ada 404, dan sekitar 90 persennya menggunakan jenis KB suntik. Meskipun akseptor KB cukup banyak namun tingkat kelahiran di desa ini cukup tinggi, setahun terakhir ini saja ada 80 kelahiran. Umumnya mereka ber KB hanya untuk menjarangkan kelahiran saja. Rata-rata setiap rumah tangga mempunyai 4 anak.

Kematian bayi yang terjadi selama setahun terakhir ini adalah 5 bayi dari 80 persalinan, atau sekitar 6 persen. Penyebab kematian bayi ini umumnya karena terlambat

mendapatkan pertolongan pada saat melahirkan. Beberapa penyebab terlambatnya pertolongan diantaranya yang pertama ibu-ibu banyak melahirkan di dukun. Karena ada kelainan dukun sudah tidak mampu menangani, namun terlambat di bawa ke pustu. Kedua, persalinan yang seharusnya hanya dapat ditangani di rumah sakit, namun terlambat ditolong karena tidak terpenuhinya syarat-syarat seperti surat keterangan Gakin dan KK untuk mendapatkan pertolongan dari rumah sakit. Padahal oleh bidan sudah sering diingatkan untuk mengurus KK sebagai salah satu kelengkapan, namun masyarakat banyak yang belum mengurusnya. Ketiga, karena selama hamil ibu-ibu tidak pernah memeriksakan kehamilannya, sehingga janin tidak terpantau perkembangannya, normal atau tidak. Dua diantara bayi yang meninggal diakibatkan menderita hidrosuphalus dan sungsang. Penyebab lainnya adalah karena faktor keterlambatan penanganan dari pihak rumah sakit. Menurut bidan Masyitoh masih ada unsur dinomor duakan bagi pasien yang menggunakan kartu miskin.

Jumlah Posyandu di desa ini ada 3, yaitu di pustu sendiri, di KM 40, dan di KM 49. Kegiatan masing-masing posyandu satu bulan sekali dengan jadwal yang berbeda. Di Pustu setiap tanggal 18, di KM 40 setiap tanggal 16, dan di KM 49 setiap tanggal 10 setiap bulannya. Setiap posyandu terdiri dari 2 orang kader. Kader berasal dari ibu rumah tangga biasa, istri RT atau istri Kades justru tidak aktif karena umumnya mereka tidak bisa membaca. Kondisi posyandu sama saja dibanding tiga tahun yang lalu, demikian juga dengan kegiatannya masih yang rutin belum ada kegiatan lain. Partisipasi masyarakat mengikuti kegiatan posyandu lumayan aktif meskipun masih ada yang malas, sehingga harus didatangi oleh petugas terutama pada saat kegiatan PIN. Disamping dari Dinas Sosial, PT CALTEX juga sering memberi bantuan MPASI berupa susu bubuk SGM 1,2, dan 3, bubur, sup, dan biskuit. Posyandu yang sering mendapat bantuan MPASI dari PT. CALTEX adalah yang berada di KM 40 karena letaknya yang berdekatan dengan lokasi PT. CALTEX. Bantuan diberikan setiap bulan selama setahun. Kasus bayi/balita yang kurang gizi hanya di desa ini cukup banyak, kira-kira setengah dari jumlah bayi/balita (sekitar 190 anak) dan kebanyakan dari Suku Nias yang kondisi ekonominya kurang. Hal ini juga berkaitan dengan budaya Suku Nias yang lebih suka membeli minum minuman beralkohol dan rokok dibanding memenuhi kebutuhan gizi anak. Pernah ada kasus salah satu kondisi fisik bayi tidak ada perkembangan setelah dipantau selama 2 minggu, meskipun sudah diberi bantuan susu SGM sebanyak 12 kotak dari Dinas Sosial. Setelah ditelusuri ternyata bantuan tersebut tidak diberikan ke bayi melainkan dijual oleh orang tuanya. Menurut Bu Masyitoh kegiatan PIN berjalan dengan lancar, tidak ada kasus yang serius.

Di Desa Rantau Bertuah ada satu pustu. Kondisi pustu yang dibangun sejak berdirinya desa ini (tahun 1993) ada sudah lebih bagus dan lebih luas sejak direhab pada tahun 2005 oleh PEMDA. Luas bangunannya 7 x 6 m persegi. Tenaga medis di antaranya 1 bidan di pustu, 1 dukun terlatih, 3 dukun tidak terlatih, dan 1 mantri kesehatan. Mantri ini merupakan karyawan PT Arara Abadi yang tinggal dan buka praktek di desa ini. Disamping itu terdapat pengobatan akupunktur dan patah tulang. Letak pustu dekat dengan kantor desa. Sesekali dokter datang ke desa ini jika ada pengobatan

masal, terakhir datang tahun 2005 akhir. Menurut bu bidan, bayi yang meninggal selama setahun terakhir ini tidak ada. Sementara hanya ada satu kasus balita yang meninggal akibat komplikasi antara diare dan meningitis dan terlambat berobat. Selama dua tahun terakhir ini tidak ada ibu hamil dan melahirkan yang meninggal. Hal ini karena antara bidan dengan dukun dan tenaga medis lain sudah terjalin kerjasama yang cukup baik. Kasus gizi bayi kurang hanya ada satu, namun bukan karena kurang makan melainkan ada kelainan dalam pencernaannya sehingga kurang mampu mengkonsumsi makanan layaknya anak normal. Hal ini diakibatkan sewaktu lahir berat badannya di bawah standar.

Akseptor KB di desa ini ada 285 orang, dan sekitar 70 persennya menggunakan alat KB suntik (tiga bulan). Warga yang mendapat askeskin di desa ini 70 KK. Meskipun tidak memiliki askeskin, cukup dengan menunjukkan KTP desa sini dan KK sudah dapat berobat gratis, asalkan miskin. Tarif berobat dan periksa kehamilan di pustu antara jam 8-12 siang cukup 5000 rupiah saja dengan fasilitas obat puskesmas/generik. Jika ada yang mau obat luar, berbeda ongkosnya. Namun demikian berobat di luar jam tersebut juga melihat situasi dan kondisi pasien yang diobati.

Posyandu ada satu, kegiatannya dilakukan di aula/pendopo kantor desa. Posyandu mempunyai 3 kegiatan, masing-masing Posyandu Balita, Bina Keluarga Balita (BKB), dan Posyandu Lansia. Posyandu Balita dan Bina Keluarga Balita (BKB) diadakan setiap tanggal 13 setiap bulan, sedangkan Posyandu Lansia setiap tanggal 20. Setiap kegiatan kadernya berbeda, masing-masing 7 kader untuk balita, 15 kader untuk BKB, dan 3 kader untuk lansia. Sampai saat ini posyandu balita dan BKB masih bergabung tempatnya, rencananya yang akan datang BKB dipisah di kantor BKB sendiri. Sementara kegiatan lansia dipusatkan di pustu. Kegiatan posyandu balita merupakan kegiatan rutin seperti penimbangan, imunisasi, pemberian makanan tambahan, pemeriksaan ibu hamil, dan KB. Sedangkan kegiatan BKB di antaranya adalah memonitor perkembangan fisik dan mental anak, misalnya anak umur 1 tahun seharusnya sudah bisa berjalan tapi belum sehingga dicari penyebabnya dan diberi solusinya atau diarahkan dengan cara permainan, dan sebagainya. Kemudian memberi penyuluhan kepada ibu-ibu di antaranya mengenai menu makanan sehat untuk anak disertai demo masak, dan sebagainya. Partisipasi ibu-ibu mendatangi posyandu cukup aktif, yang sudah mendaftar sekitar 80 persen dari balita di desa ini. Dana kegiatan posyandu sepenuhnya dari swadaya masyarakat, ibu-ibu hanya dibebani 1000 rupiah setiap datang untuk pemberian makanan tambahan. Kadang-kadang dari PT CALTEX memberi bantuan berupa sup atau bubur, terakhir 6 bulan yang lalu. Kegiatan PIN selama ini berjalan lancar tidak ada kasus sakit akibat PIN.

### **2.6. Sarana/Prasarana/Infrastruktur**

Meskipun Desa Minas Barat relatif dekat dari pusat pemerintahan Tingkat I, mudah dijangkau dan letaknya di pinggir jalan raya utama, namun fasilitas listrik belum masuk ke desa ini. Penerangan di rumah-rumah penduduk umumnya menggunakan lampu teplok atau sentir dengan bahan bakar minyak tanah. Hanya beberapa keluarga cukup mampu saja yang menggunakan diesel. Satu diesel dapat dipakai bersama sekitar 10

rumah tangga dengan cara patungan. Namun pemakaian diesel tidak sampai 24 jam penuh, hanya dinyalakan dari mulai menjelang maghrib sampai dengan sekitar jam 7 pagi. Konsekuensinya, penerangan jalan di malam hari juga tidak ada, sehingga tampak gelap. Tempat ibadah untuk umat muslim ada satu masjid (Al'Falah) dan tiga mushola. Sedangkan untuk kaum nasrani ada tiga gereja. Kondisi masjid dibanding tiga tahun yang lalu lebih besar dan luas bangunannya setelah direhab. Sarana olah raga hanya lapangan bola untuk olah raga sepak bola. Kondisi bangunannya saat ini masih sama seperti yang dulu.

Kantor pos hanya ada di Minas Jaya. Tidak ada kantor pos keliling, sehingga masyarakat yang mau berkirim surat menitip pak pos yang datang, kolektif dengan tetangga, atau dapat ke kantor pos langsung menggunakan oplet yang tarifnya sekitar 3000 rupiah. Wartel, telpon umum, dan bank juga hanya ada di Minas Jaya. Sebagian masyarakat sudah menggunakan HP sebagai alat komunikasi. Sedangkan bioskop hanya ada di Pakanbaru. Meskipun tempatnya sudah permanen, pasar di desa ini ramainya hanya setiap hari Jumat. Kondisi bangunan dibanding tiga tahun yang lalu masih tetap sama, namun suasananya makin ramai baik dari sisi pembeli, penjual, maupun variasi jenis barang yang dijual. Kantor KUD ada, tapi kegiatannya tidak aktif karena pengurusnya juga tidak aktif akibat sibuk berbisnis sendiri. Toko atau warung sembako jarang ditemui, yang banyak warung yang menjual jajanan.

Jalan utama yang menghubungkan dari desa ke kecamatan adalah jalan aspal beton, sedangkan dari kantor desa ke pemukiman penduduk sebagian besar masih berupa tanah dilapisi kerikil. Alat transportasi dari desa ke kecamatan dapat menggunakan oplet (roda empat) atau bus yang tarifnya sekitar 3000 rupiah. Dari desa ke pemukiman penduduk tergantung letak tempat tinggal penduduk tersebut. Jika di penggir jalan dapat menggunakan oplet atau bus. Sementara jika letaknya agak ke dalam jalan kaki atau dengan naik ojeg yang tarifnya 5000 rupiah. Sebagai air minum dan masak, sebagian besar penduduk menggunakan air PAM yang mulai ada sejak pertengahan 2005. Disamping itu penduduk juga menampung air hujan dengan tangki ukuran 500 liter untuk memasak. Sedangkan untuk mandi penduduk menggunakan air sumur yang jaraknya bisa sampai setengah Km dari rumah. Tempat buang air/kotoran umumnya ke jurang, di atasnya dibuat WC dari bahan kayu berbentuk kotakan dan pintunya hanya ditutupi kain. Hanya sebagian kecil penduduk yang memiliki WC sendiri di rumah. Kondisi desa yang berbukit-bukit dan banyak jurang dimanfaatkan oleh penduduk untuk membuang sampah begitu saja ke jurang.

Kondisi sarana/prasarana/infrastruktur seperti listrik, kantor pos, wartel, telpon umum, bioskop, KUD, dan Bank di Desa Rantau Bertuah tidak jauh berbeda dengan Desa Minas Barat. Yang lebih parah lagi, sinyal telpon seluler tidak muncul, sehingga beberapa penduduk yang memiliki HP harus memiliki antena khusus untuk HP. Tempat ibadah hanya untuk umat muslim, yaitu 1 unit masjid (Al'Anshar) dan 4 mushola. Kondisi masjid sejak direhab sudah semakin bagus dan berlantai keramik. Untuk berolahraga, desa ini memiliki sarana olah raga yang sederhana, terdiri dari lapangan bola, lapangan

volly, dan lapangan bulutangkis. Semua dibuat dengan dana swadaya masyarakat. Meskipun tempatnya sudah permanen, pasar di desa ini ramainya hanya setiap hari Jumat. Kondisi bangunan dibanding tiga tahun yang lalu masih tetap sama, namun suasananya makin ramai baik dari sisi pembeli, penjual, maupun variasi jenis barang yang dijual. Toko/warung kurang banyak, meskipun ada hanya warung jajanan dan rokok.

Berbeda dengan Desa Minas Barat yang cukup ramai dilalui oleh kendaraan umum, Desa Rantau Bertuah letaknya terpencil di tengah Hutan Akasia milik PT Arara Abadi. Jarak antara pusat pemerintah kecamatan ke kantor Desa Rantau bertuah sekitar 33 Km. Sementara jarak dari kantor desa dengan jalan raya utama saja mencapai 14 Km. Jalan dari jalan raya untuk menuju desa tersebut masih berbentuk jalan tanah dilapisi batu-batu kecil seperti kerikil. Sepanjang jalan menuju desa tersebut kanan kirinya hanya hutan akasia, sehingga untuk menuju ke sana harus sebelum magrib (gelap), karena sepanjang jalan tidak terdapat penerangan. Kondisi jalan yang berliku-liku disertai banyak belokan membuat banyak peluang orang tersesat jika tidak dipandu oleh penduduk yang lebih tahu tentang letak desa tersebut. Jika kita berkunjung ke desa tersebut dan kemalaman, lebih baik menginap daripada pulang malam. Penduduk yang mau bepergian ke Minas Jaya dapat naik oplet yang hanya ada pada jam-jam tertentu dengan ongkos sebesar 10 ribu rupiah, itupun tidak setiap hari ada, ramainya hanya setiap hari jumat. Jika tidak ada oplet, beberapa penduduk naik ojeg hanya sampai ke jalan raya dengan ongkos 25 ribu rupiah. Dilanjutkan naik kendaraan umum (bus) yang tarifnya 3000 rupiah. Jalan-jalan dari kantor desa ke pemukiman penduduk umumnya masih tanah, sebagian kecil sudah dilapisi kerikil.

Meskipun desa ini letaknya terpencil di tengah hutan, namun karena desa eks transmigrasi maka kondisi dan letak infrastruktur jalan dan perumahan tertata rapih. Jarak antara rumah satu dengan lainnya cukup jauh tidak berdempetan. Fasilitas air minum penduduk umumnya sumur galian. Namun sebagian masyarakat masih membeli air bersih seharga 30 ribu per tangki (sekitar 30 liter) karena kualitas air sumur mereka kurang bersih. Pernah ada kasus tanah dibor namun yang keluar bukan air tapi lumpur. Sarana tempat buang air/kotoran pada sebagian penduduk di WC umum yang dibangun PEMDA bersamaan pembangunan rumah desa eks transmigrasi ini. Sebagian lagi sudah memiliki tempat sendiri di rumah masing-masing. Penduduk desa ini umumnya membuang sampah di lubang tanah galian kemudian dibakar.

### **2.7. Sosial Budaya/Partisipasi**

Hampir setiap rumah tangga di Desa Minas Barat memiliki televisi dan radio, karena hanya dua media elektronik itu saja yang banyak diminati sebagai sarana informasi. Namun hanya sebagian kecil penduduk yang memiliki antena parabola. Sehubungan tidak tersedia listrik, untuk menonton TV penduduk menggunakan aki. Sedangkan sarana informasi lewat media cetak seperti koran hanya sekitar 10 rumah tangga yang

berlangganan. Perpustakaan dan perpustakaan keliling tidak ada di desa ini, walaupun ada hanya di sekolah. Meskipun tidak digerakkan kegiatan siskamling, namun menurut ibu-ibu keadaan desa ini cukup aman, tidak pernah terjadi pencurian selama setahun terakhir. Kejadian yang sering terjadi adalah ditemukan mayat di sekitar jurang. Penduduk yakin mayat tersebut bukan warga desa ini. Diduga mayat tersebut penduduk luar desa yang sengaja dibuang di desa ini. Polsek terdekat berada di Minas Jaya.

Kegiatan gotong royong seperti kerja bakti yang sering dilakukan hanya jika ada momen penting seperti Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus dan dilakukan oleh seluruh penduduk desa. Menurut Pak Kades sudah menjadi watak penduduk desa ini jika ada kegiatan gotong royong harus satu desa, karena jika tidak akan terjadi kecemburuan sosial. Kegiatan PKK sudah tidak aktif lagi. Pernah diadakan kegiatan menanam tanaman apotik hidup di depan rumah, namun kurang jalan karena ibu-ibunya juga kurang aktif. Kursus-kursus hanya yang diadakan oleh PT. CALTEX di Pakanbaru dan dikoordinir oleh Dinas Tenaga Kerja. Kursus ini sudah diadakan sejak tahun 2003. Tahun ini Desa Minas Barat mendapat jatah kursus merias pengantin sebanyak 5 orang. Menurut ibu-ibu bekal pengetahuan hasil kursus tidak dapat dipraktekan karena terbentur tidak ada listrik dan kurangnya air bersih, sehingga keinginan untuk buka usaha salon, jahitan, bengkel, dan lainnya tidak terealisasi.

Sementara itu rumah tangga Desa Rantau Bertuah yang memiliki TV menurut tokoh masyarakat (Pak Tamam Mukdi) hanya sekitar 30 persen. Karena keterbatasan pemakai diesel yang hanya sekitar 15 persen rumah tangga, sehingga rata-rata penduduk menggunakan aki untuk menyalakan TV. Hal yang sama juga dilakukan oleh pengguna diesel jika ingin nonton di siang hari. Perpustakaan/perpustakaan keliling atau taman bacaan belum ada, hanya di sekolah saja. Keadaan desa ini cukup aman. Sebelum tahun 2000 pernah terjadi perampokan motor, pelakunya dari luar desa, namun sampai sekarang tidak pernah terjadi lagi. Karena dianggap sudah aman, maka kegiatan siskamling diadakan sewaktu-waktu saja, tidak ada jadwal khusus. Gotong royong berupa kerja bakti bersih desa selalu diadakan setiap hari jumat.

Kegiatan PKK di desa ini cukup aktif, diantaranya dalam bidang kesehatan, kesenian, dan keagamaan. Dalam bidang kesehatan, mengundang ibu-ibu PKK dari kecamatan untuk memberi penyuluhan kepada ibu-ibu yang aktif dalam posyandu BKB mengenai seputar kesehatan rumah tangga, seperti cara hidup bersih, menu sehat, dan sebagainya. Di bidang kesenian membentuk group rebana, yang melibatkan juga murid-murid MDA dan MTS. Group rebananya pernah menang dalam perlombaan antar desa. Di bidang keagamaan membentuk majlis ta'lim ibu-ibu yang aktif mengadakan pengajian rutin setiap hari Kamis. Bapak-bapaknya juga tidak ketinggalan mengadakan pengajian setiap malam jumat. Penceramah dari penduduk sendiri. Untuk mengurangi kejenuhan, sesekali mengundang penceramah dari luar desa. Kegiatan olah raga cukup aktif yang dikoordinir oleh karang tarunanya. Perkembangan kegiatan-kegiatan tersebut semakin tahun semakin meningkat, terutama kegiatan keagamaan. Seiring meningkatnya

pembangunan di desa ini, semakin banyak berdatangan penduduk dari luar desa yang menetap di desa ini.

### **2.8. Lain-lain**

Kebijakan dan upaya yang dilakukan aparat desa untuk memajukan desa Minas Barat sampai saat ini belum ada. Program-program yang sudah diperoleh dari pemerintah dan masih berlangsung sampai saat ini adalah program beras raskin untuk keluarga miskin yang berjumlah 202 KK. Semestinya masing-masing mendapat jatah membeli 10 Kg, namun dalam kenyataannya tidak demikian. Beberapa keluarga ada yang membeli kurang dari atau lebih dari 10 Kg, bahkan ada yang tidak membeli sama sekali dikarenakan pada saat pembagian jatah belum memiliki uang. Satu Kg beras raskin dijual seharga 1500 rupiah. Hampir 100 persen penduduk mendapat kartu sehat, namun sejak 6 bulan yang lalu ditarik. Hali ini disebabkan banyak terjadi salah sasaran.

Meskipun akses desanya yang mudah dijangkau, dilewati lalu lintas jalan sehingga ramai, dan sering mendapatkan bantuan dari PT. CALTEX, namun partisipasi warga untuk membangun desanya kurang. Masyarakat desa ini sulit untuk digerakkan, sehingga pembangunan desanya juga lambat bahkan cenderung sama dari tahun ke tahun. Disamping itu budaya masyarakatnya yang malas dan suka berfoya-foya. Pernah ada kasus warga yang mendapat bantuan BLT sebagian digunakan untuk foya-foya. Ada komentar yang menyatakan masyarakat desa ini sudah keenakan dimanja oleh bantuan-bantuan dari PT. CALTEX. Namun Desa ini belum pernah mendapat bantuan IDT karena dianggap desanya sudah kaya akibat sering dibantu oleh PT.CALTEX. Bantuan dana pembangunan yang diperoleh selama tiga tahun terakhir hanya dari pemerintah, yaitu kompensasi dana subsidi BBM ditujukan untuk pendidikan yang disebut dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana tersebut dimulai sejak tahun 2005, sehingga anak-anak SD gratis dari SPP, buku, sepatu, kaos kaki, tas, sampai pakaian. Bantuan yang diterima lebih banyak langsung dalam bentuk fisik, seperti WC umum, sekolah dan perbaikannya, serta pembangunan jalan. Di samping itu dalam bentuk makanan, seperti makanan pengganti air susu ibu (bubur, susu, biskuit, dan sup). Bantuan tersebut berasal dari PT. CALTEX dan PEMDA Siak. Menurut Pak Kades, rencana akan dibangun pasar supaya aktifitasnya bisa setiap hari (tidak hanya hari Jumat), kemudian penambahan pembangunan masjid, yang disponsori oleh PT. CALTEX. Kendala dalam memajukan desa ini adalah dari partisipasi masyarakat yang masih kurang. Masyarakat desa ini susah untuk diajak berfikir maju karena malas.

Kebijakan dan upaya yang dilakukan aparat desa untuk memajukan desa Rantau Bertuah sampai saat ini belum ada. Program-program yang sudah diperoleh dari pemerintah dan masih berlangsung sampai saat ini adalah program beras. Masing-masing KK mendapat jatah 25 sampai dengan 30 liter dalam sebulan. Pembagian dilaksanakan setiap tanggal 15. Menurut Pak Kades pembagian raskin cukup untuk seluruh warga. Kartu sehat tidak ada, yang ada kartu BLT untuk sekitar 30 KK. Dengan hanya menunjukkan kartu BLT dapat berobat gratis di pustu.

Meskipun desanya terpencil di tengah hutan, namun partisipasi masyarakatnya dalam membangun desanya bagus. Dalam tiga tahun terakhir ini tidak ada bantuan dana pembangunan dari pihak lain. Sebelumnya pernah ada dari PT. CALTEX berupa pelatihan penanganan ternak lebah madu bekerjasama dengan Dinas Kehutanan, namun karena kurang dilaksanakan dengan serius terbengkalai di jalan. Padahal sempat berhasil diusahakan. Kendala yang menghambat perkembangan pembangunan desa ini karena belum ada listrik PLN dan kurangnya air bersih.

### **3. Gambaran Rumah Tangga Desa Tertinggal**

Banyaknya responden rumah tangga yang diwawancarai dalam studi mendalam ini ada 10 rumah tangga, masing-masing 5 rumah tangga di Desa Minas Barat dan 5 Rumah tangga di Desa Rantau Bertuah.

#### **3.1. Keterangan Rumah Tangga**

##### **3.1.1. Rumah Tangga Desa Minas Barat**

Responden yang berhasil diwawancarai di Desa Minas Barat semuanya ibu-ibu, karena pada saat wawancara suaminya sedang tidak berada di rumah. Hanya satu rumah tangga yang berhasil diwawancarai bersama suaminya. Umur kepala rumah tangga responden di Minas Barat bervariasi antara 24 tahun sampai dengan 30 tahun, demikian juga dengan umur para istrinya. Hanya satu kepala rumah tangga yang sudah berumur 45 tahun. Kelima responden masih berstatus menikah. Salah satu responden bernama Bu Sari berasal dari Suku Batak merupakan istri keempat dan suaminya dari Suku Sakai.

Tiga rumah tangga mempunyai tanggungan masing-masing 2 orang. Satu rumah tangga mempunyai tanggungan 3 orang. Satu rumah tangga sisanya memiliki tanggungan 5 orang. Tiga rumah tangga belum memiliki tanggungan anak sekolah karena anaknya masih berumur di bawah 2 tahun. Satu rumah tangga mempunyai tanggungan 1 anak sekolah di TK. Satu rumah tangga lagi (Bu Sari) masih mempunyai tanggungan anak sekolah sebanyak 4 anak, yang masih sekolah di SD dan TK. Bu Sari terakhir menjadi akseptor KB suntik, namun dilepas karena ingin mempunyai anak laki-laki. Sudah menjadi tradisi orang Suku Batak mempunyai keturunan anak laki-laki merupakan suatu kebanggaan, sementara mereka belum memilikinya. Anak kelima mereka laki-laki, namun meninggal. Bu Sari ini mempunyai kebiasaan yang cukup membahayakan, yaitu suka merokok. Dalam sehari bisa menghabiskan 3 batang. Kebiasaan tersebut tetap berlangsung meskipun dalam kondisi hamil. Menurutnya kebiasaan tersebut tidak mengganggu janinnya, terbukti semua anak-anaknya lahir dan tumbuh dengan sehat. Alasan anak kelimanya meninggal menurutnya akibat kiriman ilmu magic dari lawan suaminya yang tidak suka mempunyai anak laki-laki. Sebenarnya kebiasaan buruk Bu Sari tersebut sudah diperingatkan oleh bidan, tetapi tak diindahkan.

### **3.1.2. Rumah Tangga Desa Rantau Bertuah**

Responden yang berhasil diwawancarai di Desa Rantau Bertuah juga ibu-ibu, hanya satu responden bapak-bapak. Umur kepala rumah tangga responden juga bervariasi antara 32 tahun sampai dengan 56 tahun, demikian juga dengan umur para istrinya. Ada satu kepala rumah tangga yang sudah berumur 74 tahun (Pak Jenggot). Kelima responden masih berstatus menikah. Namun istri Pak Jenggot tidak berada di desa ini, melainkan ikut anaknya berdomisili di Medan. Hanya 6 bulan sekali mengunjungi suaminya.

Tiga rumah tangga mempunyai tanggungan keluarga 2 orang, satu rumah tangga mempunyai tanggungan 3 orang, dan satu rumah tangga mempunyai tanggungan 8 orang, yaitu keluarga Bu Sabarniyah (6 anak + 1 menantu). Satu rumah tangga mempunyai tanggungan anak sekolah di SMP. Namun karena SMP Negeri hanya berada di Minas Barat, maka anaknya menetap di Minas Barat ikut saudaranya. Sementara keluarga Bu Sabarniyah masih mempunyai tanggungan 4 anak sekolah, masing-masing 2 anak di SD dan 2 anak di MTS. Anak pertama sudah menikah tapi masih tinggal satu rumah dengan suaminya. Anak kedua sudah tidak sekolah lagi, putus sekolah pada saat kelas 2 MTS dan sekarang tinggal dengan neneknya. Alasan tidak sekolah lagi karena kemauan si anak tidak ada. Anak ketiga dan keempat masih duduk di MTS kelas 1, sedangkan anak no. 5 dan 6 masih di SD. Anak ke tujuh baru berumur 5 tahun.

## **3.2. Pengeluaran Rumah Tangga**

### **3.2.1. Rumah Tangga Desa Minas Barat**

Pengeluaran lima rumah tangga masing-masing berkisar antara 700 ribu sampai dengan 1.200 ribu rupiah sebulan, kecuali pengeluaran rumah tangga Bu Sari yang mencapai 2.200 ribu rupiah sebulan. Hal ini disebabkan jumlah anggota rumah tangga Bu Sari yang lebih banyak dibanding rumah tangga lainnya. Dari seluruh pengeluaran, porsi pengeluaran untuk makanan lebih besar dibandingkan non makanan, berkisar antara 58 persen sampai dengan 84 persen. Persentase terendah terjadi pada keluarga Bu Fatmawati, karena ada pengeluaran untuk kontrak dan pulsa telepon seluler yang cukup besar. Sedangkan persentase pengeluaran untuk makan terbesar terjadi di keluarga Pak Sugiman. Hal ini disebabkan pengeluaran untuk non makanan yang sangat penting seperti penerangan (diesel), air (pam), dan perumahan tidak ada. Menurut Pak Sugiman, rumah yang mereka tempati adalah rumah saudaranya sehingga gratis, termasuk diesel dan air. Pengeluaran non makanan lainnya jarang, apalagi pakaian, paling pada saat lebaran.

Semua rumah tangga rata-rata makan tiga kali sehari. Namun variasi makannya yang lengkap dengan lauk dan sayuran hanya siang dan malam hari. Sedangkan untuk sarapan pagi biasanya makan seadanya. Seperti keluarga Bu Sari sarapan hanya nasi dengan sambal. Siang dan malam baru lengkap dengan lauk dan sayur seperti bayam atau kangkung. Lauknya lebih sering teri atau ikan bilis karena murah harganya. Dalam

seminggu sesekali makan tahu dan telur, ayam jarang karena mahal. Tergantung keadaan, kalau lagi murah baru makan ayam. Lain halnya dengan keluarga Pak Sugiman, kalau tidak mempunyai uang untuk membeli beras, cukup makan mengalouw (kadang dicampur nasi) lauknya teri. Kalaupun ada nasi, sarapan cukup dengan mengalouw. Rumah tangga lain sarapan paginya hanya dengan kue-kue.

### **3.2.2. Rumah Tangga Desa Rantau Bertuah**

Pengeluaran empat rumah tangga responden masing-masing berkisar antara 700 ribu sampai dengan 2.300 ribu rupiah sebulan. Salah satu pengeluaran rumah tangga responden (Bu Sirah) tidak dapat diperkirakan karena rumah tangga tersebut tidak pernah belanja. Untuk makan setiap hari lebih sering dari pemberian tetangga yang merasa kasihan melihat kondisi ekonomi mereka. Kalau tidak ada pemberian mereka hanya makan mengalouw. Sebagaimana di Desa Minas Barat, pengeluaran untuk makanan responden di desa ini juga lebih besar dibanding pengeluaran untuk non makanan, berkisar antara 60 sampai dengan 80 persen. Pengeluaran untuk makanan rumah tangga Bu Sabarniyati paling besar, karena jumlah anggota rumah tangganya paling banyak.

Pola makan rumah tangga di desa ini tidak jauh berbeda dengan di Minas Barat. Sebagai contoh keluarga Bu Sabarniyati, supaya pengeluaran cukup sebulan mereka lebih sering mengonsumsi ikan teri sebagai lauk harian. Ketemu ikan, telur, atau ayam paling-paling seminggu sekali. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Pak Jenggot. Bahkan Pak Jenggot sering makan dalam sehari hanya sekali, tapi kuat mengonsumsi kopi sehingga pengeluaran untuk gula lebih banyak dibanding untuk beras. Lain halnya dengan keluarga Bu Sirah yang bisa mengonsumsi ayam hanya sebulan sekali. Dua rumah tangga lainnya (Bu bidan dan Bu Sapniwati) lebih lengkap jenis makanan yang dikonsumsi, karena tingkat ekonominya berkecukupan untuk dibanding rumah tangga lain.

## **3.3. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga**

### **3.3.1. Rumah Tangga Desa Minas Barat**

Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya satu rumah tangga bekerja sebagai buruh di perusahaan konstruksi dari pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore, dengan pendapatan sekitar 900 ribu rupiah sebulan. Menurut Suryani istri kepala rumah tangga, penghasilan tersebut cukup untuk hidup bersama suami dan anaknya yang masih berumur 2 tahun meskipun pas-pasan. Dari kelima rumah tangga tersebut hanya ada satu rumah tangga yang istrinya ikut bekerja untuk menambah penghasilan suami, yaitu Bu Fatmawati. Bu fatmawati menjual voucher telpon seluler. Dalam sebulan omsetnya mencapai antara 400 sampai 500 ribu rupiah. Sedangkan suaminya malam dari jam 8 sampai jam 6 pagi sebagai security di PT. CALTEX mendapat penghasilan 2 juta rupiah. Paginya mengajar di SD sebagai guru honorer mendapat penghasilan sekitar 1 juta rupiah. Untuk

menghidupi keluarganya sebulan dengan anak baru satu lebih dari cukup, sehingga bisa menabung.

Keadaan keluarga Bu Fatmawati sangat berbeda dengan keadaan ekonomi keluarga Bu Sari yang memiliki 4 anak dan keempatnya sekolah semua. Untuk menopang hidupnya, Bu Sari yang sedang hamil 8 bulan ini hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya yang bekerja sebagai makelar tanah, mobil, dan sebagainya. Pekerjaan suaminya tidak menentu (musiman) tergantung ada order atau tidak, sehingga jam kerja dan besar penghasilannya tidak menentu. Menurut Bu Sari jika berhasil rata-rata mendapat sekitar 1 juta, sebulan bisa 2 kali. Namun sebulan terakhir ini belum ada pekerjaan. Sehingga kehidupan Bu Sari tampak sangat memprihatinkan. Sementara 2 rumah tangga lain kepala rumah tangganya bekerja sebagai buruh di PT. Arara Abadi membersihkan semak-semak pohon akasia, pekerjaan tambahannya juga sebagai buruh di ladang kelapa sawit. Rata-rata mendapat upah 27.500 per hari. Setiap hari bekerja antara 8 sampai 10 jam, minggu libur.

### 3.3.2. Rumah Tangga Desa Rantau Bertuah

Lapangan usaha pekerjaan kepala rumah tangga responden bervariasi, masing-masing 3 rumah tangga di sektor pertanian, satu rumah tangga di sektor perdagangan, dan sisanya di sektor konstruksi. Dari penghasilan yang didapat dari pekerjaannya, tidak semua rumah tangga tercukupi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh Bu Sirah dan suaminya (Suku Sakai) hampir setiap hari mencari damar di hutan. Per hari bisa mendapatkan damar sekitar 5 sampai 10 Kg, kadang-kadang pulang dengan tangan hampa. Satu kilo damar dijual seharga 700 rupiah. Selain damar kadang-kadang mencari madu hutan di atas pohon sialang. Dengan penghasilan sebesar itu tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari bersama suami dan satu anaknya yang sudah tidak sekolah. Bahkan menurut penuturannya, setiap hari tidak pernah belanja, untuk makan berasal dari pemberian tetangga. Selama mencari damar di hutan hanya berbekal mengalouw, garam, dan cabe. Minumnya air sungai.

Rumah tangga lain yang berusaha di sektor pertanian adalah Pak Jenggot dan Pak Syafril (suami Bu Sabarniyati). Pak Jenggot menanam sayur-sayuran di pekarangan rumahnya yang luas. Di samping itu memelihara ternak ayam dan angsa. Pak Jenggot tidak menjajakan atau menjual hasil panennya di pasar, melainkan konsumen sendiri yang datang ke tempatnya. Sedangkan Pak Syafril bekerja sebagai buruh harian di PTP V (Perusahaan perkebunan PT Riau Abadi Lestari), yang tugasnya membersihkan alang-alang dan menyabuti rumput. Sehari mendapat upah Rp. 17.500, sabtu minggu libur. Untuk menambah penghasilan yang masih kurang, Pak Syafril meminta lembur yang sistemnya secara borongan, yaitu 1 Ha dibayar Rp. 40 ribu. Sementara dua rumah tangga selebihnya memiliki tingkat ekonomi yang lebih cukup dibanding lainnya. Yang pertama berusaha dagang bahan bangunan (material) dan yang kedua usaha kontraktor (kerjasam dengan PT. CALTEX).

### 3.4. Fasilitas Perumahan

#### 3.4.1. Rumah Tangga Desa Minas Barat

Kondisi perumahan sebagai tempat tinggal merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Tiga dari lima rumah tangga menempati rumah kontrakan. Satu rumah tangga menempati rumah sendiri, dan satu rumah tangga masih menumpang di rumah saudaranya. Luas bangunan bervariasi berkisar antara 21 meter persegi sampai dengan 64 meter persegi. Kondisi perumahan dua rumah tangga sudah permanen dan cukup baik kondisinya dengan dinding tembok beratapkan seng dan lantainya ada yang menggunakan plester semen dan ada yang menggunakan keramik. Sedangkan tiga rumah tangga lainnya masih belum permanen, dindingnya terbuat dari papan kayu, lantai dari semen plester. Hanya satu rumah yang lantainya kayu papan, karena bentuk rumahnya rumah panggung. Tiga rumah tangga sudah mempunyai kamar mandi sendiri, dengan fasilitas tempat buang air besar. Selebihnya masih menggunakan WC dan kamar mandi umum yang dibuat swadaya masyarakat.

Sumber air minum tiga rumah tangga menggunakan air pam. Disamping itu mereka juga menampung air hujan untuk persediaan jika air pam macet. Keluarga Bu Sari membeli air untuk keperluan minum dan masak, 1 tangki dibeli seharga 30 ribu rupiah. Sementara keluarga Bu Fatmawati menggunakan air mineral yang dibawa oleh suami dari tempat kerjanya untuk air minum. Untuk keperluan memasak membeli air, sedangkan untuk mencuci baju menggunakan air hujan. Fasilitas penerangan empat rumah tangga menggunakan diesel meskipun secara patungan. Sementara keluarga Bu Sari masih menggunakan lampu teplok minyak tanah. Hanya untuk keperluan menonton TV saja Bu Sari menyalur diesel dari tetangga.

#### 3.4.2. Rumah Tangga Desa Rantau Bertuah

Rumah yang ditempati responden merupakan rumah sendiri, kecuali satu rumah tangga bu bidan yang menempati rumah dinas. Luas bangunan berkisar antara 36 sampai dengan 64 meter persegi. Sebagaimana umumnya model rumah transmigrasi, atap rumah responden menggunakan seng, dindingnya dari kayu papan, lantainya semen plester, kecuali rumah bu bidan yang dindingnya dari tembok dan lantainya keramik. Rumah Bu Sapniwati dindingnya sebagian tembok (depan) sebagian lagi kayu papan (belakang). Lantainya semen plester hanya sudah dialasi plastik lantai. Kondisi rumah Bu Sirah lebih memprihatinkan. Ruangnya los tanpa sekat ukuran 6 x 6 meter persegi, sebagian besar lantainya masih tanah, dan jauh dari syarat rumah sehat. Karena sangat miskin, barang-barangnya tidak punya. Dindingnya yang terbuat dari kayu papan sudah banyak yang berlubang, sehingga pernah dimasuki oleh ular. Menurut Pak Kades, rumah tangga ini pernah diusulkan mendapat rumah tinggal dari program P2WKSS.

Untuk keperluan air minum, bersumber dari air sumur galian. Tiga rumah tangga sudah memiliki sumur sendiri di rumahnya, kecuali keluarga Bu Sirah dan Pak Jenggot

yang masih menggunakan sumur umum. Keluarga bu bidan mengambil air dari rumah orang tuanya di Minas menggunakan dirigen karena sumurnya tidak mengeluarkan air. Untuk keperluan mencuci baju menggunakan air hujan. Ada salah satu kebiasaan keluarga Bu Sirah, yaitu meminum air mentah tanpa memasak air terlebih. Menurutnya hal itu sudah terbiasa, sehingga perutnya tidak sakit. Justru tidak puas jika dimasak. Mereka merebus air ketika akan membuat kopi. Kamar mandi dan tempat buang air besar semua sudah di rumah sendiri, kecuali rumah Bu Sirah dan Pak Jenggot. Jenis penerangan menggunakan lampu togog atau sentir, hanya dua rumah tangga yang menggunakan genset.

### **3.5. Keterangan Sosial Budaya**

#### **3.5.1. Rumah Tangga Desa Minas Barat**

Sebelumnya untuk keperluan berobat empat rumah tangga mendapat kartu sehat untuk mendapatkan keringanan, kecuali Keluarga Bu Sari. Namun sudah 6 bulan yang lalu ditarik kembali karena banyak terjadi salah sasaran. Saat ini ada dua rumah tangga yang masih mendapat jatah berobat gratis dari bidan desa asalkan sebelum jam 12 siang. Hanya keluarga Bu Fatmawati yang mendapat Askes dari PT. CALTEX, karena suaminya karyawan di sana. Keluarga Pak Sugiman yang tidak mendapat keringanan berobat ke pustu. Menurut beliau tarif berobat di pustu sekitar 5000 sampai 15.000 rupiah, tergantung jenis penyakitnya, kecuali pemeriksaan kehamilan gratis. Dari lima rumah tangga hanya keluarga Pak Sugiman yang mendapat jatah beras miskin (raskin). Dia membeli raskin 6 bulan sekali sebanyak 15 Kg seharga 1000 rupiah per Kg. Keluarga Bu Sari tidak pernah mendapat raskin karena sering terlambat mendengar kabar ada raskin, sehingga sudah habis pada saat mau membeli. Lain lagi alasan Bu Suryani yang tidak mempunyai uang pada saat ada raskin, sehingga tidak membeli.

Dua rumah tangga (Bu Sari dan Bu Fatmawati) menyatakan taraf hidup keluarganya saat ini memburuk dibandingkan 3 tahun yang lalu. Alasan Bu Sari karena dulu pekerjaan suaminya lebih mudah didapat, sementara alasan Bu Fatmawati karena dulu masih mempunyai usaha rumah makan padang. Sebaliknya dua rumah tangga menyatakan membaik, dengan alasan masing-masing sudah memiliki rumah sendiri dan sudah berumah tangga. Sementara keluarga Bu Suryani menyatakan sama saja dengan tiga tahun yang lalu, dengan alasan masih tetap mengontrak, belum mempunyai rumah sendiri. Selama 3 tahun terakhir menurut semua responden memang ada pembangunan di desa ini, seperti rehab mesjid, penambahan sekolah (SDN 11), perbaikan jalan, karena desa ini sering mendapat bantuan dari PT. CALTEX. Namun pembangunan fisik desanya tidak berpengaruh pada kualitas hidup penduduknya. Dari dulu sampai sekarang sama saja, bahkan cenderung lambat. Hal ini disebabkan dari masyarakatnya sendiri yang tidak mau maju.

### 3.5.2. Rumah Tangga Desa Rantau Bertuah

Semua rumah tangga yang menjadi responden tidak memiliki kartu sehat dan selama setahun terakhir ini belum pernah mendapat bantuan atau keringanan biaya kesehatan untuk berobat. Sebenarnya rumah tangga Bu Sirah gratis jika berobat ke pustu, namun mereka lebih sering berobat ke bedikie. Alasan tidak berobat ke pustu karena takut. Mereka akan berobat ke pustu jika badannya panas. Anaknya yang terkecil juga lahir dengan pertolongan dukun kampung. Anaknya jarang dibawa ke posyandu karena males. Dari 5 rumah tangga responden, hanya keluarga Bu Sirah dan Pak Jenggot yang mendapat beras miskin. Setiap bulan Pak Jenggot membeli raskin sebanyak 15 Kg seharga 1000 rupiah per Kg. Sedangkan Bu Sirah meskipun mendapat jatah raskin tidak pernah membelinya karena tidak mampu.

Empat rumah tangga menyatakan taraf hidupnya sama saja dibandingkan 3 tahun yang lalu, kecuali rumah tangga Bu Sapniwati yang menyatakan membaik. Hal ini berkaitan dengan semakin membaik usaha suaminya. Mengenai pembangunan di desa ini, rata-rata responden menyatakan meningkat. Selama 3 tahun terakhir sudah banyak terjadi perubahan. Desanya semakin ramai karena semakin banyak penduduk luar desa yang pindah ke desa ini. Jalan-jalan di pemukiman yang sebelumnya tanah sudah mengalami pengerasan dengan dilapisi kerikil dan batu-batu kecil. Irigasi dan drainase sudah bagus. Lingkungan desa relatif aman. Kondisi bangunan yang dulu tidak dimanfaatkan sekarang sudah berfungsi. Bangunan Puskesmas Pembantu lebih baik kondisinya setelah diperbaiki. Rencana dulunya mau dibangun jembatan dan diusahakan listrik masuk desa, namun setelah dipertimbangkan, lebih didahulukan pembangunan jalan.

## **3.6. Fasilitas Pedesaan**

### 3.6.1. Rumah Tangga Desa Minas Barat

Dari 5 rumah tangga hanya keluarga Bu Sari yang mempunyai anak yang sudah sekolah. Anak pertama dan kedua sudah sekolah di SD yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah dan dapat ditempuh dengan jalan kaki. Sedangkan anak ketiga dan keempat (kembar) masih sekolah di TK yang relatif dekat dari rumah (sekitar kantor desa). Untuk berobat atau memeriksakan kehamilan Bu Sari ke pustu yang letaknya di sebelah rumahnya, apalagi mendapat fasilitas berobat gratis dari bu bidan. Demikian juga dengan rumah tangga lain. Hanya keluarga Pak Sugiman yang letak rumahnya agak jauh dari pustu, sekitar setengah Km.

Fasilitas lain seperti masjid, musholla, pasar, dan kantor desa jaraknya relatif dekat, dapat ditempuh dengan jalan kaki. Sementara puskesmas, wartel, kantor pos, toko, dan bank hanya ada di ibu kota kecamatan (Minas Jaya) yang jaraknya sekitar 12 Km dan dapat ditempuh dengan kendaraan umum (bus atau oplet). Mereka tidak pernah menonton bioskop, karena hanya ada di Pakanbaru.

### 3.6.2. Rumah Tangga Desa Rantau Bertuah

Akses rumah tangga desa terhadap fasilitas di desa tidak jauh berbeda. Bedanya hanya di fasilitas pendidikan yang masih kurang. Untuk melanjutkan ke SMP Negeri anak-anak harus ke Desa Minas Barat, karena di desa ini belum ada. Jumlah SD Negeri pun hanya satu, ditambah Madrasah Diniyah. Jarak rumah responden dengan kantor desa dan fasilitas lain agak berjauhan, kira-kira 300 sampai dengan 500 meter karena rumah model transmigrasi yang jaraknya agak berjauhan dengan tetangga.

## **3.7. Lain-lain**

### 3.7.1. Rumah Tangga Desa Minas Barat

Semua rumah tangga responden mempunyai balita. Setiap balita sudah lengkap diimunisasi, termasuk mengikuti Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dan tidak ada keluhan. Lama diberi air susu ibu (ASI) rata-rata sampai berumur 2 tahun. Ada dua balita yang baru berumur 2,5 bulan dan 21 bulan, menurut ibunya rencana mau disusui sampai umur 2 tahun. Balita yang minum ASI saja tanpa tambahan MP-ASI bervariasi. Balita Bu Suryani Pak Sugiman misalnya, baru kenal makanan lain setelah berumur setahun. Hal ini disebabkan anak tidak mau makan, bahkan sampai sekarang susah makan. Tapi sebelumnya selain ASI sejak umur 6 bulan suka minum teh. Tiga rumah tangga lainnya masing-masing hanya sampai umur 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan sudah diberi susu bubuk dan bubur susu. Rata-rata rumah tangga pernah mendapat bantuan program MP-ASI berupa susu SGM, sop, biskuit, bubur kacang hijau, baik dari Dinas Sosial maupun PT. CALTEX di posyandu. Namun ada dua rumah tangga yang balitanya tidak suka dengan susu tersebut, sehingga dikembalikan ke posyandu dan sebagian dikasih ke tetangga.

### 3.7.2. Rumah Tangga Desa Rantau Bertuah

Dari lima rumah tangga responden, ada dua rumah tangga yang mempunyai balita. Masing-masing balitanya berumur 26 bulan (perempuan) dan 14 bulan (laki-laki). Semua balita sudah lengkap diimunisasi termasuk PIN, karena rajin dibawa ke posyandu. Balita perempuan minum ASI selama dua tahun dan ASI eksklusif selama 6 bulan. Sejak umur 6 bulan hingga sekarang minum susu tambahan Chillkid dan makan bubur Milna. Sedangkan balita laki-laki sampai sekarang masih minum ASI. Sejak umur 4 bulan diberi makanan tambahan bubur susu Promina. Sekarang mulai sedang belajar makan nasi. Bantuan MP-ASI pernah diperoleh dari PT. CALTEX berupa sup dan bubur kacang hijau lewat posyandu. Terakhir bantuan diperoleh 6 bulan yang lalu dari saat wawancara.

Salah satu rumah tangga yaitu keluarga Bu Sabarniyati mempunyai anak yang sekolah sambil bekerja, yaitu anak ke 3 (15 tahun) dan ke 4 (13 tahun) yang sama-sama masih duduk di kelas 1 MTS. Mereka bekerja di tempat yang sama dengan ayahnya, yaitu di PTP V yang dulunya bernama PT. Riau Lestari Abadi (RAL), perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pagi hingga siang mereka bekerja, siangnya baru sekolah.

Sehari diberi upah sama seperti ayahnya, yaitu 17.500 rupiah. Pekerjaannya juga sama dengan ayahnya menyabuti rumput dan membersihkan alang-alang. Alasan mereka bekerja adalah untuk tambahan keperluan mereka sendiri, seperti membeli tas, buku, sepatu, kaos kaki, dan sebagainya. Kadang-kadang jika ada sisa ibunya diberi sebagian dari penghasilan mereka. Menurut ibunya, dampak dari bekerja anak-anak kadang-kadang membolos sekolah jika ada lembur dari tempat kerjanya. Mereka lebih cenderung ke pekerjaannya daripada sekolah.

<https://www.bps.go.id>

### **Kecamatan Kaliwungu - Kendal - Jawa Tengah**

#### **1. Gambaran Kecamatan Wilayah Penelitian**

##### **1.1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Kaliwungu terletak pada 101°13-110°18 Bujur Timur dan 6°32-6°58 Lintang Selatan. Apabila dilihat menurut batas wilayah, Kecamatan Kaliwungu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singorojo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Brangsong dan sebelah timur dengan Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Kecamatan yang memiliki ketinggian tanah sekitar 4,5 meter di atas permukaan laut ini memiliki suhu udara pada siang hari sekitar 32 °C dan malam hari sekitar 26 °C. Jarak dari ibu kota Kaliwungu ke Propinsi Jawa Tengah adalah 21 Km yang dapat ditempuh dengan angkutan umum, sementara jarak ke Kabupaten Kendal sendiri hanya 7 Km yang juga dapat ditempuh melalui jalur darat dengan menggunakan angkutan umum.

##### **1.2. Perkembangan Kelurahan/Desa**

Kecamatan Kaliwungu secara administratif terbagi menjadi 15 desa, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tanggal 10 Maret 2006 akan dipecah menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan. Pelaksanaan Perda tersebut belum dilaksanakan hingga studi mendalam ini dilakukan, karena masih dalam tahap persiapan. Kecamatan Kaliwungu terdiri dari 9 desa, diantaranya: Kumpulrejo, Nolakerto, Sarirejo, Krajan Kulon, Wonorejo, Molorejo, Kutoarjo, Sumberejo dan Karang Tengah. Sedangkan Kecamatan Kaliwungu Selatan akan terdiri dari 7 desa, yaitu: Magelung, Darupono, Kedungsuren, Protomulyo, Plantaran, Sukomulyo dan Jeruk Giling (yang diambil dari Kecamatan Singorojo karena letak geografisnya lebih dekat dengan Kaliwungu).

##### **1.3. Klasifikasi Desa tertinggal**

Dari 16 desa di Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan, menurut Camat Kaliwungu, yang dapat dikategorikan sebagai desa tertinggal adalah desa-desa yang berada Kaliwungu Selatan karena ada beberapa faktor yang dapat menjadikan desa tersebut tertinggal dibandingkan wilayah lain, seperti: infrastruktur desa, hal ini berkaitan dengan kondisi geografis yang sebagian besar masih merupakan hutan; kedua, masalah mata pencaharian mayoritas penduduk, yaitu bekerja sebagai buruh tani, hal ini berkaitan dengan penghasilan yang relatif rendah dan sangat bergantung pada alam; ketiga, letak geografis yang sebagian besar adalah hutan dan lahan pertanian.

Menurut Camat Kaliwungu, identifikasi mengenai desa yang relatif tertinggal dibandingkan desa lainnya itu berasal dari pusat dengan istilah "desa tertinggal" dengan tujuan untuk menentukan desa maju dan kurang maju. Sedangkan istilah di kabupaten adalah desa mampu dan kurang mampu terkait dengan bantuan yang dinamakan Dana Alokasi Umum.

#### **1.4. Program Peningkatan Kesejahteraan Penduduk**

Upaya yang sudah dilaksanakan untuk memajukan Kecamatan Kaliwungu dalam bidang pembangunan adalah program pembangunan infrastruktur desa, sedangkan upaya membangun masyarakat berupa pengurangan pengangguran dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan usaha *Home Industri* guna memperluas lapangan kerja. Sementara itu, pembangunan infrastruktur yang sudah terwujud sampai saat ini adalah pembangunan jalan di Desa Magelung, pembuatan tambak udang di Desa Wonorejo yang pada saat studi ini dilakukan sudah ke tahap pemeliharaan udang, pembangunan pendopo, pembangunan gedung instansi di kecamatan, diantaranya untuk Dinas Perikanan, Kehutanan, Pertanian dan termasuk Badan Pusat Statistik. Sementara itu, pembangunan yang sedang berjalan adalah pembangunan sarana olah raga yaitu lapangan tenis dan pembangunan kantor Camat Kaliwungu Selatan.

Dalam hal pembangunan tersebut di atas, bantuan dana berasal dari APBD sebagai stimulan, yang kemudian diikuti oleh pemberdayaan masyarakat, agar tidak bergantung pada dana pemerintah pusat. Contoh di Kedungsuren sudah dilaksanakan papinisasi, misalnya pembangunan memakan dana 5 juta, dana ini berasal dari DAU sebesar 1 juta (sumbernya dari pusat), sedangkan sisanya sebesar 4 juta berasal dari swadaya masyarakat. Sementara itu, alur dana yang berasal dari pusat diberikan secara bertahap ke provinsi, kemudian ke kabupaten (APBD Kendal) dan langsung ke desa melalui dinas teknis. Jika dana dari pusat belum cair, biasanya ditalangi oleh pemerintah daerah (Pemda).

Peran serta masyarakat dalam membangun desa dituangkan dalam wadah kelembagaan desa yaitu LKMD, yang sekarang menjadi Lembaga Pemberdayaan Desa (LPD). Tugas lembaga ini adalah membantu masyarakat untuk merencanakan kemudian melaksanakan kegiatan yang diharapkan masyarakat. Adapun prosedur pelaksanaan kegiatan sebelumnya didahului oleh Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) dengan topik usulan pembangunan yang berasal dari RT, RW yang kemudian akan disampaikan hingga ke kabupaten. Setelah itu, disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) sebagai acuan pembangunan desa selama 5 tahun oleh masyarakat, kemudian disusun prioritas pembangunan dengan memperhatikan sumber dana berasal dari mana.

Kendala yang dihadapi dalam pembangunan adalah rendahnya kualitas SDM. Masyarakat pada umumnya memiliki pemahaman yang kurang akibat tingkat pendidikan yang rendah sehingga kemampuan membangun atau memotivasi dirinya juga rendah. Jika masyarakat pemahamannya sudah cukup bagus sebetulnya pembangunan sudah dapat berjalan dengan lancar. Disamping masyarakat, hal lain yang lebih penting dalam kelancaran pembangunan adalah ketersediaan dana. Walaupun kesadaran, kemampuan dan pemahaman masyarakat sudah tinggi, tetapi jika dananya kurang, pembangunan juga tidak akan berjalan lancar.

## **2. Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Tertinggal**

Berdasarkan penghitungan indeks komposit yang diperoleh dari data PODES 2003, terdapat lima desa di Kecamatan Kaliwungu yang memiliki indeks komposit terendah, yaitu Magelung (3,05), Kumpul Rejo (3,16), Nolokerto (3,16) Sarirejo (3,42) dan Krajan Kulon (3,42). Namun menurut aparat kecamatan, desa tersebut kurang cocok dijadikan sebagai wilayah penelitian. Hanya Desa Magelung saja yang dianggap cocok, sementara desa lainnya memiliki karakteristik yang lebih baik. Sehingga diputuskan desa lain yang akan dijadikan sebagai wilayah penelitian adalah Kedungsuren.

### **2.1. Kondisi Geografis**

Desa Kedungsuren merupakan desa yang memiliki jarak tempuh terjauh dari ibu kota Kecamatan Kaliwungu, yaitu sekitar 10 Km. Batas-batas wilayah desa Kedungsuren sebelah utara berbatasan dengan Desa Magelung, sebelah selatan dengan Kecamatan Singorojo, sebelah barat dengan Kecamatan Brangsong dan sebelah Timur dengan Desa Darupono. Desa ini merupakan desa swakarya dengan luas kira-kira 14 Km<sup>2</sup> yang terbagi-bagi menjadi 10 RW dan 47 RT. Namun, lahan yang cukup luas tersebut hanya ditempati oleh 2 281 kepala keluarga, karena areal desa Kedungsuren juga meliputi beberapa hutan. Bahkan banyak penduduk yang terkonsentrasi disuatu tempat dikelilingi oleh hutan. Sehingga tidak asing lagi jika mayoritas penduduk adalah petani dan pencari kayu di hutan.

Sedangkan Desa Magelung adalah desa yang berbatasan dengan Desa Kedungsuren yang memiliki jarak ke Kecamatan Kaliwungu hanya sekitar 4 Km. Desa swakarya ini memiliki luas sekitar 800,241 Ha yang terdiri dari 10 RW dan 36 RT dengan jumlah dusun sebanyak 16 dusun. Topografi desa yang terletak ditepi hutan ini berbukit-bukit dan geografisnya berupa dataran. Dengan kondisi tanahnya yang kurang subur, di desa ini tidak terdapat sawah. Oleh sebab itu penduduk sekitar hanya dapat bertanam ubi kayu, bengkoang dan tanaman lain saja. Sementara itu, sumber daya alam nonpangan yang potensial tidak terdapat didesa ini, adapun terdapat pasir kali, kualitasnya rendah sehingga hanya dapat digunakan oleh penduduk lokal saja.

## **2.2. Kependudukan**

Berdasarkan registrasi penduduk Bulan Agustus 2006, jumlah penduduk Kedungsuren sebanyak 9.296 orang, dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang hampir sebanding, dimana penduduk perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki, yaitu sekitar 50,62 persen. Desa yang memiliki kepadatan penduduk sekitar 664 penduduk per Km<sup>2</sup> ini dihuni oleh penduduk berusia muda (0-14 tahun) sekitar 33,48. Sementara itu, penduduk perempuan yang menikah usia muda sangat sedikit, terutama sejak tahun 80-an. Saat ini rata-rata perempuan di Kedungsuren menikah setelah berusia 17 tahun.

Kondisi kependudukan di Desa Magelung tidak jauh berbeda dengan desa Kedungsuren. Berdasarkan hasil registrasi penduduk Bulan Agustus 2006, jumlah penduduk Magelung ada sebanyak 7.056 orang yang terdiri dari 3.540 orang penduduk laki-laki dan 3.516 orang penduduk perempuan yang tergabung menjadi 1.807 kepala keluarga. Desa yang dihuni sekitar 32,76 persen penduduk muda (umur 0-14 tahun) ini memiliki kepadatan penduduk sekitar 882 orang per Ha.

## **2.3. Ketenagakerjaan**

Kondisi ketenagakerjaan di desa Kedungsuren dan Desa Magelung relatif sama. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) relatif rendah dan berfluktuatif. Rendahnya TPT ini disebabkan oleh tingkat urbanisasi yang relatif tinggi. Karena para pelaku urbanisasi ini tujuan utamanya untuk bekerja. Sedangkan penyebab TPT berfluktuatif adalah banyaknya pekerja yang tidak tetap atau sering disebut pekerja serabutan baik disektor pertanian maupun nonpertanian. Sementara itu, jumlah pekerja anak relatif kecil, walaupun ada mereka berstatus sebagai pekerja tidak dibayar.

Mobilitas penduduk di Kedungsuren dan Magelung cukup tinggi. Hal ini dapat dimaklumi, terutama di Desa Magelung, karena potensi Sumber Daya Alamnya relatif sedikit mengingat tanah pertanian di desa ini hanya dapat ditanami tanaman tertentu saja. Tempat tujuan para migran ini adalah kota-kota besar, seperti: Semarang, Yogyakarta, Jakarta dan Surabaya. Mereka yang berurbanisasi mayoritas kepala rumahtangga dengan tujuan untuk bekerja, terutama di sektor perdagangan dan konstruksi, sementara yang bekerja di sektor lain hanya sedikit. Selain urbanisasi, beberapa penduduk juga melakukan migrasi ke luar negeri. Emigran ini mayoritas adalah perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumahtangga, dengan negara tujuannya adalah negara-negara asia, seperti Malaysia, Korea, Singapura dan Arab Saudi.

### **2.4. Pendidikan**

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Kedungsuren terdiri dari 5 buah bangunan SD dan 1 buah bangunan Madrasah Ibtidaiyah dengan jarak terdekat sekitar 500 meter dan jarak terjauh sekitar 6 Km, sementara SMP hanya ada satu buah dengan jarak ke kantor desa sekitar 500 meter. Sedangkan SMA tidak ada, sehingga penduduk yang bersekolah SMA harus menempuh jarak 16 Km untuk belajar di SMA desa tetangga. Keberadaan fasilitas pendidikan tersebut sudah ada jauh sebelum tahun 2003, sehingga ada sebagian kondisi bangunan sekolah yang sudah rusak. Namun, bangunan yang rusak tersebut sudah diajukan untuk direnovasi bahkan sudah ada yang diperbaiki. Sekolah yang sudah diajukan untuk diperbaiki adalah 2 buah SD, sedangkan yang diperbaiki 1 buah SD, sementara 2 buah SD masih bagus dan SMP masih sangat bagus.

Sedangkan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Magelung terdiri dari 3 bangunan SD yang berjarak paling dekat sekitar 600 meter dan terjauh sekitar 2 Km, sementara SMP dan SMA tidak terdapat di desa ini. Dengan demikian, penduduk yang bersekolah SMP dan SMA harus menempuh jarak masing-masing 1 Km dan 600 m ke desa terdekat. Kondisi bangunan sekolah-sekolah tersebut sudah lumayan bagus dan keberadaannya sudah lebih dari 3 tahun.

Dalam hal kemampuan baca tulis, sebagian besar penduduk baik di Desa Kedungsuren maupun di Desa Magelung sudah dapat membaca dan menulis, walaupun ada yang buta huruf, mereka adalah penduduk yang sudah berusia tua (kira-kira 65 tahun ke atas), sehingga program-program pemberantasan buta huruf sudah tidak berjalan lagi saat ini. Adapun program Paket A dan Paket B sejak beberapa tahun terakhir kurang berjalan lancar.

Program wajib belajar sembilan tahun di kedua desa tampaknya cukup berhasil, karena penduduk yang putus sekolah atau penduduk yang tidak melanjutkan ke SMP sudah hampir tidak ada lagi, walaupun ada kasus tersebut, bukan karena masalah biaya tapi karena sudah malas belajar, dan itu terjadi pada satu atau dua orang saja. Sementara penduduk yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA masih ada, hal ini dikarenakan ketidakmampuan dalam hal biaya. Sedangkan penduduk yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya sedikit saja, tidak sampai 10 persen dari total penduduk yang tamat SMA.

### **2.5. Kesehatan**

Fasilitas kesehatan di Desa Kedungsuren terdiri dari 1 buah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang letaknya berdekatan dengan kantor desa dan sudah berdiri sejak tahun 1992. Tenaga medis yang ada diantaranya satu orang bidan dan satu orang perawat serta 5 orang dukun bayi terlatih, sementara dokter hanya memantau kegiatan puskesmas saja, tidak terjun langsung menangani Pustu. Selain Pustu, terdapat juga tujuh Posyandu

yang keberadaannya sudah lebih dari tiga tahun dan memiliki jarak terjauh sekitar 6 Km dan terdekat sekitar 2 Km dari kantor desa. Aktivitas Posyandu ini diantaranya penimbangan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pengobatan, penyuluhan dan imunisasi. Pada saat Pekan Imunisasi Nasional (PIN), jumlah balita yang diimunisasi sekitar 650 orang.

Fasilitas kesehatan yang ada di Desa Magelung hanya Poliklinik desa (Polindes) yang jaraknya sekitar 400 m dari kantor desa dan keberadaannya sudah lebih dari 3 tahun serta tujuh Posyandu yang jaraknya sekitar 100 m hingga 3 Km. Kegiatan Posyandu ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan Posyandu di Kedungsuren, yaitu melayani penimbangan, pengobatan, PMT, penyuluhan dan imunisasi. Sedangkan tenaga medis yang ada di desa ini hanya seorang bidan dan seorang dukun terlatih.

Masalah kesehatan yang terjadi di Desa Kedungsuren dalam satu tahun terakhir diantaranya kematian seorang bayi yang disebabkan oleh penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), kematian balita yang disebabkan oleh demam berdarah, dan status gizi buruk yang diderita oleh satu orang bayi yang berat badannya hanya 2 Kilogram, serta gizi buruk yang diderita oleh seorang balita yang disebabkan oleh nafsu makan yang sangat rendah padahal motivasi dan usaha sang ibu sudah cukup baik. Masalah kesehatan yang dialami penduduk sekitar lainnya adalah penyakit ringan yang biasa terjadi. Sedangkan Masalah-masalah kesehatan baik kematian bayi/balita dan kasus gizi buruk tidak terjadi di Desa Magelung dalam kurun waktu setahun terakhir.

Berdasarkan catatan Keluarga Berencana (KB) Desember 2005, jumlah pasangan usia subur di Desa Kedungsuren ada sebanyak 1.450. Sekitar 1.063 orang mengikuti program KB. Sementara itu, jumlah PUS di Desa Magelung ada sebanyak 1.396 dan akseptor KB ada sebanyak 1.027 orang. Jenis KB yang digunakan oleh para akseptor baik di Desa Kedungsuren maupun Magelung mayoritas adalah KB suntik. Sedangkan jenis KB lain yang umum dipakai adalah pil, implan dan steril.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di bidang kesehatan, penduduk desa di Kecamatan Kaliwungu beserta kecamatan lain di Indonesia yang dianggap "kurang mampu" berhak mendapatkan pelayanan berobat gratis. Salah satu syarat untuk mendapatkan pelayanan gratis tersebut diantaranya harus mempunyai kartu sehat atau askeskin. Penerima kartu sehat di Desa Kedungsuren sebanyak 271 kepala keluarga, sementara di Desa Magelung terdapat 559 kepala keluarga. Namun di kedua desa kartu sehat ini belum didistribusikan saat studi ini dilakukan, karena masih dalam proses pengajuan.

### **2.6. Sarana/Prasarana/Infrastruktur**

Penduduk di Desa Kedungsuren dan Magelung 90 persen sudah menggunakan listrik PLN sejak tahun 90-an, namun bukan berarti setiap rumah memiliki rekening sendiri karena banyak rumahtangga yang menggunakan listrik PLN secara bersama-sama, atau penduduk setempat menggunakan istilah "nyalur". Dengan adanya listrik tersebut, penerangan jalan saat ini sudah menggunakan listrik dan dikenai PPJ (Pajak Penerangan Jalan).

Tempat ibadah di Kedungsuren berupa mesjid ada sebanyak 6 buah dan mushola sebanyak 21 buah, sementara di Magelung ada sebanyak 5 mesjid dan 17 Langgar dengan kondisi di setiap desa masih sangat bagus karena penduduk sekitar masih tergolong religius, sehingga mereka sangat mengutamakan sarana ibadah tersebut. Keberadaan mesjid dan mushola tersebut secara umum sudah ada sebelum tahun 2003.

Sarana olah raga yang ada di Kedungsuren cukup beragam, seperti lapangan bola, bulutangkis dan tenis meja, dengan jarak sekitar 300 m hingga 6 Km. Penggunaan sarana olahraga ini gratis dan dikelola oleh masyarakat secara mandiri melalui organisasi kepemudaan. Kondisi lapangan bulu tangkis dan lapangan bola kondisinya cukup bagus karena sudah dicor. Sementara sarana olah raga yang ada di Magelung diantaranya lapangan Volly, lapangan bola dan badminton. Masing-masing berjarak 200 m, 1,5 Km dan 500 m dari kantor desa. Lapangan tersebut masih berupa tanah, namun cukup terawat karena sering digunakan oleh pemuda sekitar.

Sarana transportasi di Kedungsuren relatif kurang. Angkutan yang digunakan mengandalkan ojek dan angkutan desa yang jumlah dan waktunya terbatas, sehingga jika hendak menuju ke suatu tempat, penduduk Kedungsuren harus menunggu lama angkutan umum tersebut. Namun bagi sebagian orang yang mempunyai pendapatan lebih, masalah ini bukan suatu penghalang untuk melakukan mobilitas, karena pada umumnya mereka mempunyai kendaraan sendiri terutama motor. Selain minimnya angkutan, kendala lain yang dihadapi penduduk Kedungsuren adalah akses jalan menuju kecamatan yang terbuat dari aspal dengan kondisi yang rusak berat. Sementara jalan lain diantaranya jalan tanah dan papling yang menghubungkan antar desa.

Tidak jauh berbeda dengan sarana transportasi di Kedungsuren, di Desa Magelung angkutan umum yang diandalkan masyarakat adalah ojek dan angkutan desa yang berbentuk mobil bak terbuka dengan kuantitas dan waktu yang terbatas. Hanya saja keadaan jalan aspal yang menghubungkan desa dengan kecamatan sudah sangat bagus karena baru satu tahun dibangun.

Fasilitas komunikasi seperti kantor pos tidak terdapat di desa Kedungsuren, sehingga jika penduduk hendak berkirim surat atau barang harus ke ibu kota kecamatan yang jaraknya sekitar 12 Km dari kantor desa. Demikian halnya dengan penduduk Magelung, jika hendak ke kantor pos harus menempuh jarak sekitar 4 Km ke kantor pos Kaliwungu. Sedangkan warung telekomunikasi dan telepon umum di Kedungsuren keberadaannya sudah cukup lama dan sudah relatif banyak. Wartel terdekat berada di kantor desa, sementara terjauh jaraknya sekitar 6 Km dari kantor desa. Sedangkan di Magelung belum terdapat wartel, namun demikian desa tetangga terdekat sudah terdapat wartel yang jaraknya hanya 500 meter saja.

Sarana ekonomi seperti pasar, Koperasi KUD, Bank dan pertokoan tidak terdapat di desa Kedungsuren dan Magelung. Sarana-saran tersebut letaknya di Kecamatan Kaliwungu yang jaraknya sekitar 10-12 Km dari Kedungsuren dan 4 Km dari Magelung. Sementara yang ada di Desa Kedungsuren dan Magelung sendiri adalah BKK (Bank Kredit Kecamatan) unit pembantu dengan sistem "keliling" yang kegiatannya adalah simpan pinjam dan buka setiap Sabtu dan Minggu di kantor desa, sedangkan lokasi tetap BKK sendiri adanya di Kecamatan Kaliwungu.

Dalam hal perumahan, fasilitas air minum penduduk di kedua desa mayoritas berasal dari sumur, namun tidak setiap rumah mempunyai sumur. Karena penggunaan sumur itu sendiri sifatnya bersama, artinya digunakan oleh beberapa rumahtangga. Sementara tempat buang air/kotoran penduduk masih banyak yang disungai, hanya sebagian penduduk saja yang menggunakan jamban pribadi. Demikian halnya dengan tempat pembuangan sampah, mayoritas penduduk membuangnya ke sungai dan sebagian kecil membuang di kebun bagi rumahtangga yang mempunyai kebun.

## **2.7. Sosial Budaya/Partisipasi**

Dalam mengakses informasi, hampir 70 persen penduduk di Kedungsuren maupun Magelung mempunyai sarana televisi, sementara hanya satu dua orang saja yang berlangganan koran/majalah. Sedangkan perpustakaan walaupun ada kurang berfungsi karena tidak ada minat dari penduduk sekitar, demikian halnya dengan taman bacaan/PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Membaca).

Dalam hal organisasi kemasyarakatan, organisasi yang dibentuk penduduk di kedua desa diantaranya Karangtaruna, PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) serta remaja mesjid. Di Kedungsuren kegiatan Karangtaruna masih berjalan dan aktif melakukan kegiatan-kegiatan kepemudaan baik dalam bidang olahraga, seni maupun sosial kemasyarakatan, walaupun tidak dilakukan secara rutin. Sedangkan di Magelung Karangtaruna tidak berjalan dengan lancar. Tetapi dalam hal kegiatan PKK, penyelenggaraan di kedua desa cukup reguler. Di Kedungsuren PKK dilaksanakan setiap Rabu Pon dengan diisi oleh kegiatan-kegiatan arisan, penyuluhan, demo masak dan

kursus kecantikan. Sedangkan di Magelung kegiatan PKK dilakukan sebulan sekali dengan diisi kegiatan arisan. Sementara itu kegiatan lain yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan ini diantaranya mengarahkan warga untuk bergotong-royong.

Kondisi keamanan kedua desa relatif aman karena kegiatan siskamling rutin dilakukan. Adapun pendanaan kegiatan siskamling ini salah satunya berasal dari iuran warga yang dinamakan "jumputan". Pelaksanaan siskamling ini sendiri sudah terstruktur, karena terdapat penjadwalan yang jelas warga mana yang mempunyai tugas siskamling pada Hari A atau Hari B, sehingga warga melakukan tugas secara bergantian.

### **2.8. Lain-lain**

Kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan untuk memajukan warga di Desa Kedungsuren diantaranya: pengiriman warga untuk kursus membuat pupuk kompos, pengembangan pertanian dengan melakukan studi banding ke daerah lain dan pengembangan *home industri*. Sumber dana baik berupa uang maupun barang untuk pembangunan sarana dan prasarana diantaranya berasal pemerintah, swasta dan dari warga sendiri. Dana dari pemerintah berupa DAU yang cair setiap satu tahun sekali, selain itu dari instansi pemerintah seperti Departemen Industri yang memberikan bantuan berupa alat-alat pembuatan kerupuk, serta dari Dinas Sosial berupa bantuan dana sebesar 3,5 juta rupiah untuk pengembangan kegiatan Karangtaruna. Sedangkan dana dari swasta diantaranya dari Undip (Universitas Diponegoro) berupa bantuan peralatan pertanian serta penyuluhan-penyuluhan, selain itu IAIN pernah memberikan alat-alat untuk membuat roti. Dana lain berasal dari TKI yang menyumbang uang untuk pembangunan mesjid.

Kendala dalam membangun desa diantaranya adalah dana. Sampai saat studi ini dilakukan, pembangunan jalan desa belum juga dilakukan padahal kondisi jalan sudah sangat rusak parah. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan dana padahal warga sekitar sudah siap sedia jika mereka diminta untuk melakukan renovasi jalan. Sedangkan kendala membangun masyarakatnya sendiri adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan karena mereka hanya mengandalkan kemampuan bertani saja sehingga kurang mampu mengembangkan diri dibidang lain.

Sedangkan pembangunan fisik maupun mental yang sudah dilakukan di Desa Magelung diantaranya pembangunan jalan aspal yang menghabiskan dana yang cukup banyak, sedangkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri salah satunya pemberdayaan keterampilan bekal usaha, tetapi saat ini sudah tidak berjalan lagi. Sumber dana pembangunan untuk Desa Magelung berasal dari DAU dan dana Penghijauan, sedangkan dari individu maupun swasta tidak ada, sehingga dapat dikatakan kendala utama pembangunan di Desa Magelung adalah dana. Sementara partisipasi masyarakat cukup baik.

### 3. Gambaran Rumah Tangga Desa Tertinggal

Studi ini selain menggambarkan kondisi desa juga menggambarkan beberapa rumah tangga yang tinggal di Kedungsuren dan Magelung. Rumahtangga yang dimaksud merupakan representasi kehidupan penduduk di desa yang dianggap tertinggal. Jumlah rumahtangga yang dipilih dari setiap desa ada sebanyak 5 rumahtangga.

#### 3.1. Keterangan Rumah Tangga

##### Di Desa Kedungsuren

Rumahtangga pertama di kepalai oleh seorang janda tua yang sudah berumur 61 tahun. Beliau menanggung hidup 4 anggota rumahtangga lainnya yang berjenis kelamin laki-laki, tiga orang masih bersekolah SD, yaitu cucu kandung dan 1 orang pengangguran yang merupakan anak kandungnya. Sementara wanita tua ini hanya lah satu-satunya pencari nafkah di rumahtangga ini.

Kepala rumahtangga kedua berjenis kelamin laki-laki yang berumur 30 tahun dengan tanggungan hidup sebanyak 5 orang, yaitu istri dan empat orang anak. Tiga orang anaknya masih duduk di bangku SD dan 1 orang lainnya sudah duduk di bangku SMP. Dua dari 4 anak di rumahtangga ini adalah pekerja anak. Satu bekerja mengangon kerbau dan satu lagi membantu ayahnya membuat batu bata.

Rumahtangga yang ketiga dikepalai oleh seorang laki-laki berumur 40 tahun dengan jumlah tanggungan hidup cukup banyak yaitu 6 orang yang terdiri dari satu orang isteri dan lima orang anak, dua diantaranya masih sekolah SD. Sementara anggota rumahtangga yang bekerja hanya sang ayah sendiri dengan pekerjaan yang tidak menentu sebagai buruh tani.

Rumahtangga yang keempat dikepalai oleh seorang laki-laki yang berumur sekitar 45 tahun. Jumlah tanggungan keluarganya hanya 4 orang, yaitu seorang isteri yang mempunyai kekurangan tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar (bisu tuli), satu orang anak yang sekolah di SD serta 2 orang balita yang usianya tidak terpaut jauh yaitu berumur 2 tahun dan 3,5 tahun.

Rumahtangga yang kelima dikepalai oleh seorang laki-laki tua yang berumur 50 tahun lebih. Jumlah tanggungan hidupnya sangat banyak, yaitu 8 orang termasuk isteri dan anak-anaknya. Dua orang anaknya masih sekolah SD, dua orang sudah tidak bersekolah lagi sejak tamat SD, satu orang balita dan sisanya belum sekolah. Sementara yang bekerja hanya kepala rumahtangga sendiri dan satu orang anak yang sudah tidak sekolah yang membantu mencari rumput untuk ternak kambing.

### Di Desa Magelung

Rumahtangga pertama di kepalai oleh seorang laki-laki yang masih muda berumur 28 tahun. Beliau menanggung hidup 4 orang anggota rumahtangga, diantaranya seorang isteri dan tiga orang anaknya yang masih kecil-kecil, dua diantaranya masih balita dan satu lagi belum sekolah. Pekerja rumahtangga ini hanyalah kepala rumahtangga sendiri.

Kepala rumahtangga kedua adalah seorang janda berumur 48 tahun yang menanggung hidup seorang balita saja yang baru berusia 18 bulan. Sementara 4 orang anaknya sudah tidak tinggal di rumah. Satu orang tinggal di sebelah rumahnya, satu orang bekerja di Jakarta, satu orang bekerja di pabrik rotan di Semarang dan satu orang lagi wanita berusia 20 tahun yang menjadi TKW di Malaysia. Untuk mencari nafkah, janda ini bekerja sebagai buruh tani, namun tidak setiap hari karena kalau musim kemarau beliau tidak bekerja lagi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kadang-kadang mengandalkan anaknya yang bekerja di Jakarta.

Rumahtangga yang ketiga dikepalai oleh seorang laki-laki berumur 60 tahun dengan jumlah tanggungan hidup cukup banyak yaitu 5 orang yang terdiri dari satu orang isteri dan empat orang anak, dua diantaranya sudah bekerja. Anak yang tamat SMP bekerja di pabrik rotan dan anak yang tamat SD bekerja sebagai buruh bangunan. Sementara anggota rumahtangga lain yang juga bekerja adalah sang isteri sendiri yang menggarap kebun milik sendiri, karena kepala rumahtangga ini sudah tidak dapat berjalan lagi akibat kecelakaan yang menimpanya tiga tahun lalu.

Rumahtangga yang keempat dikepalai oleh seorang laki-laki yang berumur sekitar 50 tahun. Jumlah tanggungan keluarganya hanya 4 orang, yaitu seorang isteri yang lumpuh akibat menderita *stooke*, dua orang anak yang masih sekolah SMP serta 1 orang anak yang sudah tidak bersekolah lagi. Anggota rumahtangga yang bekerja hanya kepala rumahtangga sendiri

Rumahtangga yang kelima dikepalai oleh seorang laki-laki tua yang berumur 70 tahun lebih. Jumlah tanggungan hidupnya sangat banyak, yaitu 7 orang termasuk isteri dan anak-anaknya. Satu orang anaknya masih sekolah MI, yang lainnya sudah tidak sekolah lagi. Sementara yang bekerja ada tiga orang termasuk kepala rumahtangga dan dua orang anaknya yang juga sebagai buruh tani.

### **3.2. Pengeluaran Rumah Tangga**

#### Di Desa Kedungsuren

Kondisi perekonomian rumahtangga terpilih di Desa Kedungsuren sangat memprihatinkan. Dalam sebulan, pengeluaran per kapita setiap rumahtangga tidak lebih dari Rp. 120.000,- bahkan ada yang hanya Rp. 57.000,-, yaitu dirumahtangga keempat. Demikian halnya di rumahtangga pertama, ketiga dan kelima, yang masing-masing mempunyai pengeluaran per kapita per bulan masing-masing Rp. 65.200,-, Rp. 57.857,- dan Rp. 57.778,-. Sedangkan rumahtangga kedua mempunyai pengeluaran per kapita per bulan Rp. 120.000,-, paling tinggi diantara rumahtangga lainnya. Hal ini wajar mengingat rumahtangga ini mempunyai usaha sendiri yaitu membuat batu bata dan juga memiliki ternak kerbau.

Walaupun pendapatan di setiap rumahtangga terpilih relatif rendah, frekuensi anggota rumahtangga untuk makan mayoritas justru normal, yaitu tiga kali sehari kecuali rumahtangga keempat yang hanya dua kali dalam sehari. Namun demikian, variasi makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi konsep empat sehat lima sempurna, karena makanan yang dikonsumsi hanya nasi, sayur dan lauk yang seadanya, kadang-kadang hanya makan nasi dan lauk saja. Lauk yang dimaksud bukan telur, daging, ikan segar atau ayam melainkan tempe, tahu, kacang-kacangan yang ada di kebun atau ikan asin. Sementara lauk bergizi tinggi (telur, daging, ikan, ayam) sangat jarang dikonsumsi.

#### Di Desa Magelung

Tidak jauh berbeda dengan rumahtangga di Kedungsuren, rumahtangga terpilih di Magelung mempunyai pengeluaran per kapita per bulan yang sangat rendah, dengan kisaran Rp. 49.625,- (rumahtangga kelima) hingga Rp. 180.000,- (rumahtangga kedua). Sedangkan rumahtangga pertama, ketiga dan keempat memiliki pengeluaran per kapita masing-masing Rp. 67.000,-, Rp. 111.667,- dan Rp. 77.200,-. Rendahnya pengeluaran ini mungkin disebabkan oleh pendapatan yang rendah pula, karena mayoritas pekerjaan anggota rumahtangganya adalah pekerja serabutan di sektor pertanian. Adapun lebih tingginya pengeluaran rumahtangga kedua disebabkan oleh adanya bantuan keuangan dari rumahtangga lain, yaitu anaknya. Sedangkan pada rumahtangga ketiga, lebih tingginya pengeluaran per kapita per bulan disebabkan karena lahan pertanian yang dikelola merupakan milik sendiri dan ada bantuan keuangan dari kedua anaknya yang sudah bekerja.

Sama halnya yang terjadi di Desa Kedungsuren, di Desa Magelung mayoritas setiap anggota rumahtangga makan tiga kali sehari kecuali di rumahtangga keempat dan kelima yang frekuensi makannya hanya 2 kali sehari. Variasi makanan pun tidak jauh berbeda, setiap anggota rumahtangga mengkonsumsi makanan dengan kombinasi nasi, sayur dan lauk seadanya atau nasi dan lauk saja, sementara lauk bergizi sangat jarang dikonsumsi.

### **3.3. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga**

#### Di Desa Kedungsuren

Lapangan kerja utama kepala rumahtangga yang dicacah di Kedungsuren, tiga diantaranya buruh tani yang bekerja dari jam 08.00 hingga 11.00 yang kemudian merumput atau bersih-bersih kebun dari jam 12.00 hingga 17.00. Dengan jumlah hari kerja per bulan yang tidak menentu, pendapatan yang diterima ketiga kepala rumahtangga ini pun tidak menentu, rata-rata per bulan hanya memperoleh sekitar Rp. 175.000,- hingga Rp. 250.000,-, yang diperoleh oleh kepala rumahtangga saja, kecuali di rumahtangga ketiga yang jumlah anggota rumahtangga bekerjanya 2 orang.

Kepala rumahtangga lainnya, yaitu rumahtangga pertama bekerja sebagai penjual katul di pasar dengan jam kerja 8 jam per hari dan pendapatan yang diperoleh sekitar Rp. 120.000,- hingga Rp. 140.000,- per bulan padahal kepala rumahtangga ini hanya satu-satunya yang bekerja. Sedangkan kepala rumahtangga yang kedua bekerja sebagai pembuat batu bata di usaha batu bata milik sendiri yang merupakan warisan keluarga. Kepala rumahtangga yang mempunyai jam kerja perhari sekitar 10 jam per hari ini memperoleh penghasilan sekitar Rp. 150.000,- per minggu. Dalam membuat bata, kepala rumahtangga ini dibantu oleh anaknya yang sudah tidak bersekolah lagi, sementara satu orang anaknya yang masih sekolah, bekerja mengangon kerbau milik sendiri setiap pulang sekolah kira-kira 2 jam per hari.

#### Di Desa Magelung

Di Desa Magelung empat kepala rumahtangga di rumahtangga terpilih mempunyai pekerjaan bertani dengan jam kerja yang sama pula yaitu mulai pukul 7.00-11.00 dan dilanjutkan jam 12.00 sampai jam 17.00 dengan jumlah hari kerja 10 sampai 20 hari per bulan. Semua kepala rumahtangga menggarap lahan milik orang lain kecuali rumahtangga ketiga. Selain bertani (menggarap kebun atau sawah), sebagian kepala rumahtangga juga mencari rumput atau mencari kayu ke hutan. Pendapatan yang diperoleh dari hasil bertani sekitar Rp. 120.000,- sampai Rp. 175.000,- per bulan. Bagi rumahtangga ketiga yang mempunyai tiga anggota rumahtangga pekerja, penghasilan yang diperoleh per bulan sekitar Rp. 700.000,-, yang diperoleh dari isteri yang bekerja di ladang sendiri, seorang anak yang bekerja di usaha pembuatan meubel dari rotan dan seorang anak yang bekerja sebagai kuli bangunan, sementara kepala rumahtangganya tidak bekerja karena tidak dapat berjalan akibat kecelakaan.

### **3.4. Fasilitas Perumahan**

#### Di Desa Kedungsuren

Rumahtangga pertama menempati rumah milik sendiri dengan luas lantai hanya 4x6 m<sup>2</sup> atau sekitar 4,8 m<sup>2</sup> per anggota rumahtangga. Jenis atap, dinding dan lantai terluas masing-masing terbuat dari genteng, kayu dan tanah. Untuk keperluan minum dan memasak sehari-hari, rumahtangga yang menggunakan sarana penerangan dari lampu sentir ini mengambil air dari sumur tetangga terdekat. Sedangkan untuk buang air besar, setiap anggota rumahtangga harus pergi ke sungai.

Rumahtangga kedua yang dihuni oleh 6 orang anggota rumahtangga menempati rumah kontrakan yang memiliki luas 6x3 m<sup>2</sup>. Jenis atap, dinding dan lantai rumah kontrakan ini masing-masing terbuat dari genteng, kayu dan tanah. Rumahtangga yang sudah mempunyai sarana penerangan listrik "nyalur" ini walaupun sudah mempunyai sumur untuk keperluan memasak dan minum, tetap saja setiap anggota rumahtangganya buang air di sungai karena tidak mempunyai jamban sendiri.

Rumahtangga ketiga menempati rumah milik orang tua dengan luas 4x6 m<sup>2</sup> atau sekitar 3,4 m<sup>2</sup> per anggota rumahtangga. Sama seperti rumahtangga pertama dan kedua, rumah tangga ini menempati rumah dengan jenis atap, dinding dan lantai terluas masing-masing terbuat dari genteng, kayu dan tanah. Sumber air minum rumahtangga ini berasal dari sumur mesjid yang berada di sebelah rumah, sedangkan untuk buang air, setiap anggota rumahtangga harus pergi ke sungai.

Fasilitas dan kondisi perumahan rumahtangga keempat dan kelima tidak berbeda dengan rumahtangga pertama baik dalam hal status penguasaan tempat tinggal, jenis atap, dinding dan lantai terluas, jenis penerangan dan tempat buang air besar. Hanya saja rumahtangga keempat memiliki sumber air minum dari pancuran artesis dan memiliki luas lantai hunian sebesar 40 m<sup>2</sup>. Sedangkan rumahtangga kelima mempunyai sumber air minum dari sumur sendiri dan luas lantai hunian sebesar 7x12 m<sup>2</sup> atau sekitar 9,3 m<sup>2</sup> per anggota rumahtangga.

#### Di Desa Magelung

Tidak berbeda dengan kondisi dan fasilitas perumahan di Desa Kedungsuren, rumahtangga terpilih di Desa Magelung memiliki tempat tinggal dengan jenis atap, dinding dan lantai terluas masing-masing berupa genteng, kayu dan tanah. Sedangkan jenis penerangan juga berasal dari listrik PLN dengan cara "nyalur", kecuali rumahtangga ketiga yang menggunakan listrik PLN dengan rekening sendiri. Tempat buang air besar pun masih sama di sungai, sementara sumber air minum berasal dari sumur sendiri,

kecuali rumahtangga pertama dan keempat yang menggunakan sumur dari tetangga. Sementara luas lantai di setiap tempat tinggal rumahtangga terpilih masing-masing sebesar: 78 m<sup>2</sup>, 84 m<sup>2</sup>, 135 m<sup>2</sup>, 91 m<sup>2</sup> dan 68 m<sup>2</sup> atau dengan luas hunian per kapita masing-masing sekitar: 15,6 m<sup>2</sup>, 42 m<sup>2</sup>, 22,5 m<sup>2</sup>, 18,2 m<sup>2</sup> dan 8,5 m<sup>2</sup>.

### **3.5. Keterangan Sosial Budaya**

#### Di Desa Kedungsuren

Rumahtangga terpilih di Kedungsuren semuanya belum mendapatkan kartu sehat walaupun sudah diajukan dan belum pernah mendapat bantuan atau keringanan biaya kesehatan dalam berobat selama setahun terakhir. Sementara itu dalam hal pembelian beras raskin, semua rumahtangga mengaku pernah membeli beras raskin, namun jumlahnya bervariasi. Rumahtangga pertama membeli beras raskin sebesar 80 Kg dalam setahun, rumahtangga kedua membeli beras raskin sebanyak 90 Kg, sedangkan rumahtangga ketiga, keempat dan kelima membeli beras raskin masing-masing sebanyak 30 Kg, 48 Kg dan 48 Kg.

Dalam memandang perkembangan taraf hidup keluarga selama 3 tahun terakhir, tiga rumahtangga mengaku ada peningkatan, sementara rumahtangga lainnya yaitu rumahtangga kedua dan keempat mengaku sama saja atau tidak merasakan peningkatan atau penurunan. Sedangkan dalam memandang pembangunan yang terjadi di desa Kedungsuren sendiri semua responden mengaku sudah maju atau ada peningkatan dibandingkan 3 tahun yang lalu.

#### Di Desa Magelung

Sama dengan yang terjadi di Kedungsuren, rumahtangga terpilih di Magelung semuanya belum mendapatkan kartu sehat walaupun sudah diajukan dan belum pernah mendapat bantuan atau keringanan biaya kesehatan dalam berobat selama setahun terakhir karena tidak pernah sakit dan walaupun sakit mereka mengobati sendiri dengan jalan membeli obat dari warung. Hanya satu rumahtangga saja yang anggotanya pernah sakit kemudian berobat dan tidak mendapatkan keringanan biaya padahal sudah sampai menjual ladang. Hal ini terjadi pada rumahtangga ketiga. Sementara itu dalam hal pembelian beras raskin, semua rumahtangga mengaku pernah membeli beras raskin, yang rata-rata membeli 30 Kg selama setahun terakhir. Rumahtangga pertama membeli beras raskin sebesar 48 Kg, sedangkan rumahtangga lainnya membeli beras raskin hanya 30 Kg selama setahun terakhir.

Dalam memandang perkembangan taraf hidup keluarga selama 3 tahun terakhir, tiga rumahtangga mengaku sama saja atau tidak mengalami penurunan maupun

peningkatan, sementara rumahtangga lainnya yaitu rumahtangga kedua dan ketiga mengaku mengalami penurunan. Sedangkan dalam memandang pembangunan yang terjadi di desanya tiga responden mengaku sudah ada peningkatan dibandingkan 3 tahun yang lalu dan sisanya mengaku sama saja.

### **3.6. Fasilitas Pedesaan**

#### Di Desa Kedungsuren

Fasilitas maupun infrastruktur/sarana dan prasarana yang ada di Desa Kedungsuren diantaranya Sekolah SD, SMP, Pustu, Posyandu, mesjid dan mushola, lapangan olahraga serta Wartel, sementara fasilitas yang lain seperti sekolah SMA, pasar, kantor pos, bioskop, toko dan Bank tidak terdapat di desa ini. Dengan demikian, untuk menuju ke tempat-tempat tersebut, anggota rumahtangga terpilih harus pergi ke desa tetangga atau ke kota kecamatan. Jarak dari rumahtangga terpilih ke kecamatan secara berurutan adalah 10,5 Km, 10,5 Km, 10,5 Km, 12,5 Km dan 12,5 Km.

Rumahtangga pertama, kedua dan ketiga yang memiliki jarak hanya sekitar 500 m dari kantor desa, harus menempuh jarak sekitar 1 Km untuk menuju sekolah SD, SMP dan Pustu, sementara untuk menuju sekolah SMA, harus menempuh jarak 16 Km. Sedangkan untuk pergi Posyandu dan mushola masing-masing hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 5 menit, karena jaraknya hanya sekitar 50 m.

Rumahtangga keempat dan kelima yang memiliki jarak 2,5 Km dari kantor desa, untuk menuju ke sekolah SMP, dan Puskesmas, harus menempuh perjalanan sejauh 2,5 Km. Sementara untuk menuju sekolah SD, mesjid dan sekolah SMA masing-masing harus menempuh jarak 30 m, 50 m dan 1 Km. Jalan dari rumahtangga ini ke fasilitas/tempat-tempat tersebut terbuat dari tanah yang dicampur batu-batuan. Sedangkan jalan untuk menuju ke kota kecamatan terbuat dari aspal yang sudah rusak parah.

#### Di Desa Magelung

Fasilitas yang ada di Desa Magelung lebih sedikit dibandingkan dengan fasilitas yang ada di Desa Kedungsuren. Fasilitas tersebut diantaranya sekolah SD, Polindes, Posyandu, lapangan olahraga dan sarana tempat ibadah. Sementara fasilitas yang lain seperti sekolah SMP, SMA, pasar, kantor pos, bioskop, toko, Wartel dan Bank tidak terdapat di Desa ini. Dengan demikian, untuk menuju ke tempat-tempat tersebut, anggota rumahtangga terpilih harus pergi ke desa tetangga atau ke kota kecamatan. Jarak dari rumahtangga terpilih ke kecamatan secara berurutan adalah 4,5 Km, 5,5 Km, 5,5 Km, 7 Km dan 7 Km.

Jarak rumahtangga pertama ke sekolah SD, SMP, SMA, mesjid, serta Polindes tidak lebih dari 1 Km, sementara jarak rumahtangga ini ke kantor desa hanya 500 m. Sedangkan rumahtangga kedua dan ketiga yang rumahnya berdekatan, untuk menuju

ke sekolah SD, SMP, SMA, puskesmas dan mesjid harus menempuh jarak masing-masing 1 Km, 1 Km, 3 Km, 3 Km, dan 500 m. Jarak rumahtangga ini dengan kantor desa sekitar 2 Km.

Rumahtangga keempat dan kelima berada di daerah yang jauh dari kantor desa, yaitu sekitar 2,5 Km. Sehingga untuk menuju ke tempat-tempat seperti SMP, SMA dan Polindes harus menempuh jarak lebih dari 3 Km, sedangkan untuk menuju bangunan SD dan mesjid hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit saja, karena jaraknya hanya 500 m.

### **3.7. Lain-lain**

#### Di Desa Kedungsuren

Rumahtangga terpilih kedua dan kelima memiliki anggota rumahtangga yang bersatus pekerja anak. Di rumahtangga kedua, jumlah pekerja anak ada dua orang, yaitu anak yang masih bersekolah SD yang membantu ayahnya mengangon kerbau saat pulang sekolah dengan jam kerja sekitar 2-3 jam per hari dan anak yang membantu membuat batu bata di usaha batu bata yang dikelola kepala rumahtangga dengan jam kerja yang tidak menentu, kadang-kadang hanya 1 jam dan kadang-kadang sampai 3 jam. Pekerjaan membuat batu bata tersebut dilakukan oleh anak yang sudah tamat SD dan tidak melanjutkan ke SMP. Sedangkan di rumahtangga yang kelima, pekerja anak yang dimaksud adalah anak yang masih bersekolah SD yang membantu mencari rumput untuk kambing milik keluarga dengan jam kerja perhari sekitar 3 jam dalam tiga kali seminggu.

Di rumahtangga keempat dan kelima terdapat balita dengan jumlah masing-masing dua orang dan satu orang. Balita di rumahtangga keempat berumur 3,5 tahun dan 2 tahun, sedangkan di rumahtangga kelima berumur 3 tahun. Setiap anak balita di kedua rumahtangga ini tidak minum susu selain ASI dan masing-masing pernah mengikuti PIN maupun mendapatkan bantuan program MP-ASI. Balita yang berumur 3,5 tahun di rumahtangga keempat sudah tidak mendapatkan ASI sejak beberapa bulan setelah dilahirkan, sementara adiknya sampai studi ini dilakkan masih mendapatkan ASI karena menurut diagnosis bidan setempat balita tersebut sewaktu masih bayi memiliki berat badan yang sangat rendah, yaitu 2 Kg lebih dan sampai sekarang bayi tersebut masih sulit untuk makan. Sedangkan balita di rumahtangga kelima sampai saat studi ini dilakukan masih diberi ASI walaupun sudah berusia 3 tahun.

#### Di Desa Magelung

Rumahtangga pertama dan kedua mempunyai seorang balita yang masing-masing berumur 3 tahun dan 18 bulan. Kedua balita tersebut pernah mengikuti PIN maupun mendapatkan bantuan program MP-ASI. Balita di rumahtangga pertama masih diberi ASI sampai saat studi ini dilakukan dan mendapatkan makanan lain sejak berumur

setengah tahun. Sedangkan balita di rumahangga kedua tidak pernah mendapatkan ASI, karena sang ibu yang menjadi TKW di Malaysia sudah meninggalkannya sejak dilahirkan, sehingga makanan sehari-harinya hanya air putih yang dimasukkan ke dot setiap pagi dan siang hari, sementara jika ada susu bayi, saat malam hari baru diberikan, tetapi itu sangat jarang karena kepala rumahtangga yang juga nenek dari balita ini tidak sanggup untuk membeli susu. Semenjak berusia satu tahun, balita ini mulai mendapatkan makanan, seperti nasi yang dicampur sayuran atau roti yang diberikan saat siang hari dan malam hari.

Di rumahtangga ketiga dan keempat terdapat anggota rumahtangga yang lumpuh (tidak bisa berjalan), yaitu kepala rumahtangganya sendiri (di rumahtangga ketiga) dan isteri dari kepala rumahtangga (di rumahtangga keempat). Adapun penyebab lumpuhnya kepala rumahtangga ketiga adalah kecelakaan, yaitu terjatuh dari sepeda motor saat dibonceng 3 tahun yang lalu. Walaupun sudah berkali-kali berobat dan menghabiskan uang sangat banyak, sampai saat studi ini dilakukan, kepala rumahtangga ini tetap tidak bisa sembuh dan berjalan seperti semula. Sedangkan penyebab lumpuhnya anggota rumahtangga keempat adalah penyakit *stroke*, akibat terjatuh sekitar 2 tahun yang lalu. Sama seperti yang terjadi pada kepala rumahtangga ketiga, penderita lumpuh ini walaupun sudah berobat dan menghabiskan uang sekitar Rp. 1 juta di sebuah rumah sakit swasta sampai saat studi ini dilakukan belum mendapatkan peningkatan yang berarti, sehingga upaya penyembuhan sudah tidak dilakukan lagi karena sudah tidak mempunyai biaya lagi.

### **Kecamatan Kertak Hanyar - Banjar - Kalimantan Selatan**

#### **I. Gambaran Kecamatan Wilayah Penelitian**

##### **1.1. Keadaan Geografis**

Kecamatan Kertak Hanyar adalah salah satu dari 16 kecamatan yang berada di Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Daerah ini berada pada garis 114°45'47" Lintang Selatan dan garis 3°27'29" Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Kertak Hanyar 81,30 km<sup>2</sup> atau 1,76 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjar, dengan kondisi topografinya adalah dataran. Batas wilayah administrasi kecamatan ini :

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Banjarmasin
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tabuk
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gambut, dan
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Aluh-Aluh

##### **1.2. Perkembangan Desa/Kelurahan**

Kecamatan Kertak Hanyar terbagi menjadi 25 desa, 1 kelurahan dan 154 Rukun Tetangga (RT), dimana dalam tiga tahun terakhir ini tidak terjadi pemekaran wilayah. Ibu kota kecamatan Kertak Hanyar adalah Kertak Hanyar I yang berlokasi sangat strategis. Kantor kecamatannya berada di pinggir jalan utama dari Kabupaten Banjar menuju Kota Banjarmasin. Jarak desa/kelurahan terdekat menuju kantor kecamatan sekitar 0,50 km sedangkan jarak terjauh 20 km. Meskipun ibu kota kecamatan mempunyai lokasi yang cukup strategis namun tidak dengan lokasi desa-desanya. Dari 26 desa/kelurahan sebagian besar wilayahnya berlokasi cukup jauh dari kecamatan.

##### **1.3. Klasifikasi Desa Tertinggal**

Desa tertinggal terbagi menjadi dua kategori yaitu desa tertinggal di daerah tertinggal dan desa tertinggal di daerah tidak tertinggal. Beberapa hal yang menjadi penyebab desa tertinggal di daerah tidak tertinggal antara lain adalah sulitnya lapangan pekerjaan, kurangnya fasilitas pendidikan, serta kurangnya fasilitas kesehatan yang tersedia di desa yang dikategorikan tertinggal itu. Sedangkan untuk desa tertinggal di daerah tertinggal penyebab utamanya adalah tidak tersedianya akses transportasi yang menjadi sarana penghubung desa tersebut dengan daerah lain dan usaha mayoritas penduduk di desa tersebut tidak ada.

Dari 26 desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kertak Hanyar terdapat lima desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal di daerah tidak tertinggal. Dua desa diantaranya adalah sebagai tempat dilakukannya penelitian tentang studi mendalam

ini yaitu Desa Banua Hanyar dan Pandan Sari. Klasifikasi Desa Banua Hanyar adalah desa swasembada, begitu juga dengan Desa Pandan Sari.

#### **1.4. Program Peningkatan Kesejahteraan Penduduk**

Program yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kecamatan Kertak Hanyar antara lain dilakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur desa berupa pengerasan jalan, pembuatan jembatan, irigasi, pendalaman&pelebaran sungai dan sarana air bersih. Bantuan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang penyalurannya dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berkedudukan di Kabupaten.

Selain itu ada juga program yang diluncurkan dari pemerintah yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) atau Community Empowerment for Rural Development Program (CERD). Tujuan dari program ini adalah untuk mengentaskan masyarakat miskin pedesaan. Wujud dari program ini di Kecamatan Kertak Hanyar berupa pemberian modal untuk budidaya berternak itik. Dimana sebelumnya masyarakat diberikan penyuluhan bagaimana mengelola dana tersebut yaitu dengan cara dibentuk koperasi. Setelah itu masyarakat diberikan penyuluhan tentang bagaimana cara berternak itik yang bagus, mengingat sebagian besar dari wilayah kecamatan ini terdapat banyak sungai-sungai. Semua masyarakat berhak meminjam dana tersebut sebagai modal berternak itik namun mereka mempunyai kewajiban untuk mencicil dalam setiap bulannya melalui koperasi yang sudah terbentuk tadi. Pinjaman yang sudah kembali akan dipinjamkan lagi kepada masyarakat yang lain. Di Kecamatan Kertak Hanyar bantuan ini baru diberikan kepada dua desa.

Dari kompensasi kenaikan harga bahan bakar dan minyak (BBM), warga mendapat keringanan biaya berobat bagi masyarakat miskin dan keringanan biaya pendidikan untuk sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk berobat secara gratis masyarakat harus mendaftarkan diri di RT/RW atau perangkat desa untuk mendapatkan kartu miskin. Kartu ini bisa dipergunakan sebagai surat untuk mendapatkan pelayanan gratis. Tetapi menurut informasi dari Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar yaitu Ibu Siti Rofikoh, dalam setahun terakhir masyarakat cukup dengan menunjukkan KTP, Kartu Keluarga (KK) dan surat pengantar dari kepala desa setempat untuk mendapatkan pelayanan berobat gratis.

Pemberian bantuan beras atau biasa disebut dengan istilah raskin juga masih berjalan meskipun pengirimannya sering terlambat. Pemberian bantuan ini dengan cara membeli beras dengan harga yang murah dan hanya khusus untuk masyarakat yang miskin saja. Cara memperolehnya harus menunjukkan kartu miskin juga, yang diperoleh dari RT/RW atau aparat desa.

## **II. Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Tertinggal**

### **2.1. Kondisi Geografis**

Desa yang terpilih sebagai tempat penelitian adalah Desa Banua Hanyar dan Pandan Sari. Desa Banua Hanyar terletak sekitar 4-5 km dari ibu kota kecamatan. Untuk sampai ke desa ini dibutuhkan waktu sekitar 15-20 menit dengan menggunakan alat transportasi ojek atau sepeda, karena meskipun jarak desa dengan ibu kota kecamatan relatif dekat tetapi tidak ada kendaraan umum yang menuju ke desa tersebut. Namun tidak sedikit dari penduduk di desa ini yang cukup dengan berjalan kaki. Jalan utama menuju Desa Banua Hanyar adalah jalan tanah yang sudah diperkeras, namun kondisinya sudah banyak yang rusak. Desa ini mempunyai luas wilayah 6,4 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah administrasinya adalah: di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Lakum, di sebelah Selatan dan Timur dengan wilayah Kecamatan Gambut dan di sebelah Barat dengan Desa Pasar Kamis. Desa Banua Hanyar terbagi dalam 1 Rukun Warga (RW) dan 3 Rukun Tetangga (RT). Desa ini tidak memiliki kantor kepala desa sehingga untuk urusan administrasi kantor, pertemuan warga, penyuluhan-penyuluhan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan desa dilakukan di rumah kepala desa. Kepala desa di wilayah Kabupaten Banjar biasa disebut dengan istilah "pembakal".

Desa kedua adalah Desa Pandan Sari dimana letak desa ini lebih jauh dari ibu kota kecamatan yaitu sekitar 15-20 km dengan waktu tempuh sekitar 60 menit. Perjalanan menuju desa ini bisa menggunakan angkutan darat atau angkutan sungai. Perjalanan darat dengan menggunakan ojek atau sepeda, sedangkan perjalanan melalui sungai dengan menggunakan perahu motor yang biasa disebut dengan istilah klotok. Penduduk Desa Pandan Sari lebih memilih menggunakan angkutan klotok dibandingkan dengan menggunakan ojek, karena biayanya lebih murah. Ongkos ojek bisa dua sampai tiga kali lipat ongkos klotok. Desa Pandan Sari mempunyai luas wilayah 2,25 km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 1 RW, 3 RT dan 2 Rukun Jiran. Rukun Jiran adalah anak RT yang menjadi penghubung dengan desa-desa yang terpencil, sebenarnya sama saja dengan RT hanya saja jumlah warganya lebih sedikit. Batas wilayah administrasi Desa Pandan Sari adalah : di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kela Timur, disebelah Selatan dengan Desa Mekar Sari, di sebelah Barat dengan Desa Handil Bujur, dan di sebelah Timur dengan Desa Tatah Layap. Desa ini sebenarnya mempunyai kantor kepala desa sendiri namun kondisinya sudah tidak layak sehingga kantornya bertempat di rumah kepala desa seperti yang dialami di desa Banua Hanyar.

### **2.2. Kependudukan**

Jumlah penduduk keadaan pertengahan tahun 2006 di Desa Banua Hanyar sebanyak 408 jiwa yang terdiri dari 199 jiwa penduduk laki-laki, 209 jiwa penduduk perempuan dan 99 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan jumlah penduduk di Desa Pandan Sari adalah sebanyak 515 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 249 jiwa, jumlah penduduk perempuan 269 jiwa dan 122 KK.

Di Desa Banua Hanyar, menurut informasi yang diperoleh bahwa dalam satu tahun terakhir tidak ada penduduk perempuan yang menikah diusia muda atau di bawah 16 tahun. Rata-rata mereka menikah pada usia 20 tahun atau lebih. Begitu juga dengan data yang diperoleh dari Desa Pandan Sari.

Data penduduk yang diperoleh dari profil desa/kelurahan pertengahan tahun 2006 berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Pertengahan 2006**

Golongan Umur	Banua Hanyar		Pandan Sari	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-12 bulan	5	7	8	13
13 bulan-4 tahun	11	12	18	22
5-6 tahun	15	16	12	13
7-12 tahun	13	14	21	23
13-15 tahun	21	23	16	19
16-18 tahun	23	24	17	13
19-25 tahun	33	34	39	36
26-35 tahun	21	22	33	45
36-45 tahun	17	17	43	32
46-50 tahun	21	21	19	17
51-60 tahun	11	11	15	25
61-75 tahun	6	6	15	10
75+ tahun	2	2	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>199</b>	<b>209</b>	<b>249</b>	<b>269</b>

### **2.3. Ketenagakerjaan**

Sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai petani, baik sebagai buruh tani, penyewa/penggarap atau mengerjakan sawah milik sendiri. Petani di Desa Banua Hanyar dan Pandan Sari kebanyakan hanya sebagai buruh tani. Sedangkan pemilik lahan sawah di dua desa ini rata-rata berasal dari luar desa. Petani di desa ini adalah petani sawah tadah hujan dan sawah pasang surut. Tingkat kesuburan tanahnya pada tingkatan sedang. Sekali tanam dibutuhkan waktu 10 bulan, yaitu mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penyiangan sampai dengan panen. Biasanya dimulai pada bulan Oktober sampai dengan bulan Agustus tahun berikutnya, sehingga dalam satu tahun hanya dilakukan satu kali panen. Jumlah petani di Desan Banua Hanyar dan Pandan Sari jika dilihat dari status pekerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Distribusi Penduduk menurut Janis Pekerjaan

Desa	Pemilik	Penyewa/Penggarap	Buruh Tani	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Banua Hanyar	71	113	139	323
Pandan Sari	90	70	150	310

Selain bermata pencaharian sebagai petani, penduduk yang lain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari pegawai kelurahan, guru, mantri kesehatan dan bidan, sedangkan penduduk yang lain ada yang bekerja sebagai tukang ojek, sopir klotok/jasa angkutan perahu, tukang kayu, tukang batu, tukang cukur dan warung.

Menurut informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Banua Hanyar yaitu Bapak Abdul Salam dan Kepala Desa Pandan Sari yaitu Bapak Agus Salim, jumlah pengangguran di Desa Banua Hanyar mencapai sekitar 40 persen sedangkan di Desa Pandan Sari sekitar 5-10 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Pengangguran ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan informasi mengenai lapangan pekerjaan dan keterbatasan lapangan pekerjaan di desa tersebut. Karena keterbatasan lapangan pekerjaan ini menyebabkan beberapa penduduk memilih bekerja di luar desa bahkan sampai keluar kecamatan dan kabupaten. Ada sekitar 15 persen penduduk yang bekerja di luar Desa Banua Hanyar maupun luar desa Pandan Sari. Pekerjaan dari mereka diantaranya ada yang bekerja sebagai buruh/karyawan di industri kayu ulin, pabrik roti, penjaga toko, buruh kasar di bengkel dan lain-lain. Untuk pekerja anak (10-14 tahun) menurut informasi yang diperoleh hanya sekitar 3 persen dari masing-masing desa, hal ini terpaksa dilakukan karena orang tuanya yang tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya. Biasanya pekerjaan yang dilakukan adalah mencari ikan di sungai yang hasilnya di bawa ke pasar untuk ditukarkan dengan beras.

### 2.4. Pendidikan

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan pendidikan yang cukup. Fasilitas utama adalah adanya gedung sekolah, guru dan murid. Namun baik di Desa Banua Hanyar maupun Pandan Sari tidak ada bangunan sekolah baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU). Anak-anak usia sekolah dari kedua desa ini bersekolah di luar desanya. Untuk anak-anak SD yang berasal dari Desa Banua Hanyar rata-rata bersekolah SD di Desa Pasar Kamis yang jaraknya sekitar 1 km. Sedangkan anak-anak SMP bersekolah di SMP yang berada di Desa Sungai Lakum yang bejarak 3 km sedangkan untuk SMUnya mereka bersekolah di kecamatan lain yaitu di Kecamatan Gambut. SMU yang terdekat berjarak 6 km. Kondisi bangunan-bangunan sekolah ini masih cukup bagus dan keberadaan sekolah baik SD, SMP maupun SMU sudah lebih dari 10 tahun.

Sementara itu anak sekolah yang berasal dari Desa Pandan Sari, untuk tingkat SD jarak dari desa ke SD terdekat sekitar 2 km, tingkat SMP jarak dengan SMP terdekat sekitar 6 km dan tingkat SMU jarak dan SMU terdekat berjarak sekitar 4 km. Kondisi bangunan sekolah-sekolah tersebut juga masih bagus dan keberadaannya juga sudah lebih dari 10 tahun.

Penduduk yang buta huruf dari kedua desa tersebut rata-rata sekitar 10 persen dan kebanyakan adalah usia tua. Baik di Desa Banua Hanyar maupun Pandan Sari tidak ada program pemberantasan buta huruf. Sekitar 9 tahun yang lalu pernah ada program kejar paket A dan paket B tapi di desa Tatah Layap yaitu desa yang berbatasan dengan Desa Pandan Sari dan ada beberapa penduduk Desa Pandan Sari yang sempat mengikutinya.

Di Desa Pandan Sari, anak-anak yang putus Sekolah Dasar (SD) yaitu usia 7-12 tahun sebanyak 2 persen, putus SMP (13-15 tahun) sebanyak 5 persen dan putus SMU (16-18 tahun) sebanyak 20 persen. Mereka terpaksa putus sekolah karena faktor biaya. Dengan kondisi ekonomi yang sulit membuat orang tua mereka tidak mampu lagi untuk membiayai anaknya bersekolah terutama yang melanjutkan ke jenjang SMU karena di SMU tidak ada bantuan dana dari biaya operasional sekolah (BOS) yang diperoleh dari kompensasi BBM. BOS hanya untuk tingkat SD dan SMP saja.

## **2.5. Kesehatan**

Di Desa Banua Hanyar maupun Pandan Sari tidak ada fasilitas kesehatan seperti puskesmas induk, puskesmas pembantu (pustu), maupun klinik. Penduduk dari kedua desa ini jika berobat harus pergi ke desa lain. Untuk Desa Banua Hanyar jarak ke puskesmas terdekat sekitar 1,5 - 2 km. Tapi untuk penyakit-penyakit ringan biasanya penduduk desa ini cukup berobat ke rumah bidan desa yang kebetulan tinggal di desa ini. Tenaga kesehatan medis yang ada di Desa Banua Hanyar selain bidan desa, ada satu orang mantri kesehatan, sedangkan tenaga yang non medis ada 3 orang dukun bayi tidak terlatih.

Jumlah kematian bayi dan balita dalam setahun terakhir ini tidak ada, begitu juga dengan kematian ibu karena kehamilan dan melahirkan. Status gizi bayi dan balita dalam kondisi sedang. Banyaknya akseptor atau pengguna KB sekitar 60 persen dengan alat KB yang mayoritas digunakan adalah jenis pil.

Posyandu di Desa Banua Hanyar hanya ada satu posyandu yang tempatnya berada di samping rumah kepala desa dengan kondisi bangunan sangat sederhana sekali. Kegiatan yang dilakukan posyandu di desa ini antara lain penimbangan bayi dan balita, pemberian makanan tambahan, pemberian imunisasi dan PIN. Selain itu juga dilakukan arisan untuk ibu-ibunya. Kegiatan posyandu dilakukan sebulan sekali setiap tanggal 15 dibantu oleh kader-kader posyandu desa setempat. Yang menjadi kader di Desa Banua Hanyar ini salah satunya adalah istri kepala desa. Dalam setahun terakhir pernah

dilakukan pengkaderan posyandu yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas kerja untuk melakukan program-program baru.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Desa Pandan Sari, dimana penduduk desa ini jika akan berobat ke puskesmas harus ke desa lain yaitu ke desa Tatah Balayung yang jaraknya sekitar 5 km. Namun ada puskesmas pembantu yang jaraknya lebih dekat yaitu sekitar 2,5 km, tetapi pustu ini hanya buka setiap hari Selasa saja, pustu ini berada di Desa Tatah Layap. Tenaga kesehatan yang ada di desa ini hanya seorang bidan desa saja.

Jumlah kematian baik bayi/balita maupun ibu hamil/melahirkan dalam setahun terakhir ini tidak ada. Status gizi bayi dan balita juga sedang. Akseptor KB sekitar 60 orang, mereka ada yang menggunakan alat kontrasepsi seperti pil, suntik, implan dan jamu. Namun akseptor yang paling banyak adalah menggunakan jenis pil juga. Posyandu di Desa Pandan Sari ini juga ada satu dengan jumlah kadernya 3 orang, salah satunya adalah anak kepala desa. Kegiatan posyandu dilakukan setiap hari Rabu Minggu ke tiga atau sekitar tanggal 16-17. Kegiatan yang dilakukan sama seperti di Desa Banua Hanyar. Selama beberapa tahun terakhir tidak ada program pengkaderan posyandu, program pengkaderan terakhir dilakukan tahun 1994.

### **2.6. Sarana/Prasarana/Infrastruktur**

Kondisi jalan utama dari ibu kota kecamatan ke Desa Banua Hanyar adalah jalan tanah yang sudah diperkeras, namun kondisinya sudah banyak yang rusak. Akses keluar masuk desa ini dengan menggunakan ojek dan sepeda, tetapi banyak yang hanya jalan kaki karena ongkos ojek yang cukup mahal. Desa ini tidak dilalui kendaraan umum. Penerangan di desa ini sebagian besar penduduknya sudah menggunakan listrik PLN, hanya sekitar 10 persen yang belum menggunakan penerangan listrik. Tetapi untuk penerangan di jalanan belum ada, penerangan di jalan berasal dari masing-masing rumah tangga, itupun hanya beberapa orang saja. PLN masuk ke desa ini kira-kira sudah 10 tahun yang lalu. Fasilitas tempat ibadah di desa ini hanya ada dua mushola saja yang keberadaannya sudah lebih dari 20 tahun dan kondisinya kurang bagus. Di desa ini tidak ada masjid, gereja maupun pura/wihara. Di desa ini juga tidak tersedia sarana olah raga, kantor pos, pasar, wartel, Koperasi Unit Desa (KUD), dan bank. Kantor pos terdekat sekitar 5 km dari wilayah Desa Banua Hanyar ini. Begitu juga dengan pasar, pasar terdekat berada di wilayah Kecamatan Gambut sekitar 5 km, yang ada hanya warung-warung kecil yang ketersediaan barang-barangnya juga terbatas. Wartel terdekat sekitar 3 km dan keberadaan wartel ini juga belum lama, baru sekitar 2 tahun.

Jalan utama menuju Desa Pandan Sari bisa menggunakan jalan darat dan sungai. Jalan darat menuju desa ini adalah jalan tanah yang diperkeras juga, namun kondisinya tidak jauh berbeda seperti jalan di Desa Banua Hanyar, sudah banyak yang rusak. Dan transportasi menuju ke desa ini menggunakan ojek dan sepeda karena tidak dilalui kendaraan umum. Sarana transportasi yang lain adalah melalui sungai dengan

menggunakan perahu mesin (klotok) karena sepanjang wilayah desa ini dilalui oleh sungai. Transportasi melalui sungai banyak menjadi pilihan penduduk desa ini karena dirasa lebih murah daripada ojek. Listrik PLN juga sudah masuk di desa ini, sekitar 60 persen yang menggunakan listrik PLN sedangkan yang 40 persen masih menggunakan lampu pelita/semprong. Tempat ibadah di desa ini juga hanya ada dua mushola, tempat ibadah yang lain maupun sarana yang lain juga tidak tersedia. Kantor pos terdekat sekitar 10 km yaitu di Kota Banjarmasin. Sedangkan kantor pos di wilayah Kecamatan Kertak Hanyar justru lebih jauh yaitu sekitar 14 km. Wartel terdekat juga baru bisa ditemukan sekitar 6 km dari desa ini.

## **2.7. Sosial Budaya/Partisipasi**

Tingkat keamanan di wilayah dua desa ini cukup bagus, jarang terjadi pencurian ataupun keributan antar warga. Di Desa Banua Hanyar dilakukan kegiatan siskamling oleh warga setempat, 3-5 orang perwakilan dari masing-masing RT bergiliran pada setiap malamnya. Gotong royong juga dilakukan setiap 1-2 bulan sekali, kegiatan yang biasa dilakukan adalah membersihkan jalan, sungai dan rumah ibadah. Selain itu Untuk kegiatan keagamaan baik bapak-bapak maupun ibu-ibunya seminggu sekali dilakukan pengajian (yasinan), yaitu setiap hari kamis malam. Kegiatan PKK juga sebulan sekali dilakukan, kegiatan utamanya hanya arisan ibu-ibu. Kegiatan karang taruna ada tetapi tidak terlalu aktif, hanya pada saat-saat tertentu saja, misalnya saat memperingati hari besar keagamaan dan memperingati hari kemerdekaan pada bulan Agustus.

Jika di Desa Banua Hanyar siskamling rutin dilakukan, berbeda dengan siskamling di Desa Pandan Sari. Menurut informasi dari kepala desa, tidak ada siskamling yang dilakukan oleh masyarakat desa ini dengan alasan karena merasa kondisi sudah cukup aman. Sedangkan alasan lain adalah jika dilakukan siskamling justru akan mengundang orang-orang jahat untuk datang ke desa ini karena merasa penasaran, mengingat masyarakat di desa ini kebanyakan hidup sederhana karena kondisi ekonomi yang sulit sehingga masyarakat jarang yang memiliki barang-barang mewah. Contohnya yang mempunyai televisi di desa ini baru sekitar 50 persen sedangkan yang memiliki sepeda motor baru sekitar 15 orang. Jarak desa dengan kantor Polsek terdekat sekitar 16 km. Kegiatan gotong royong yang biasa dilakukan masyarakat Pandan Sari adalah setiap enam bulan sekali membersihkan jalan dan sungai sebagai sarana transportasi dan setiap menjelang bulan puasa membersihkan mushola. Sedangkan kegiatan PKK dilakukan pengajian seminggu sekali yaitu setiap hari rabu sekaligus dilakukan arisan, tetapi untuk arisan hanya sebulan sekali. Kegiatan untuk karang tarunanya juga sama seperti yang dilakukan di Desa Banua Hanyar.

Perpustakaan/perpustakaan keliling dan pusat kegiatan belajar membaca/taman bacaan, baik di Desa Banua Hanyar dan Pandan Sari tidak ada. Kursus-kusus yang dilakukan di desa dalam setahun terakhir juga tidak ada.

### **2.8. Lain-lain**

Masih menurut keterangan yang disampaikan oleh masing-masing kepala desa, kebijakan dan upaya yang sudah dilakukan oleh kepala desa dan aparat desa untuk memajukan wilayah di Desa Banua Hanyar antara lain pembersihan dan perbaikan jalan. Untuk kelompok tani dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan diberikan penyuluhan namun kurang berhasil karena terbatasnya tenaga PPLnya dan minat dari masyarakat yang kurang. Partisipasi warga sendiri juga kurang aktif dalam membangun desanya karena sulitnya ekonomi. Dalam tiga tahun terakhir ada bantuan dana dari kecamatan tetapi buka untuk pembangunan fisik, bantuan itu hanya untuk operasional desa seperti untuk pembelian alat tulis, perbaikan sepeda motor dinas, untuk perjalanan dinas dan PKK.

Sedangkan di Desa Pandan Sari program yang sudah dilakukan dalam mensejahterakan kehidupan warganya adalah dengan pemberian bantuan beras untuk warga yang miskin, berobat gratis ke puskesmas dengan menunjukkan KTP dan KK, tidak menggunakan kartu sehat lagi. Dalam tiga tahun terakhir di desa ini dibangun lumbung padi dan peninggian jalan, dananya berasal dari pemerintah atau hibah desa melalui pemerintah tingkat II.

Kendala yang dihadapi dalam memajukan wilayah di dua desa ini karena kondisi ekonomi masyarakat yang lemah membuat masyarakatnya kurang aktif, rendahnya tingkat pendidikan yang memengaruhi sumber daya manusianya dan lambatnya pemberian dana bantuan ke dasa ini.

## **III. Gambaran Rumah Tangga Desa Tertinggal**

### **3.1. Keterangan Rumah Tangga**

Dalam penelitian ini pada masing-masing desa ditemui 5 responden sehingga jumlah seluruhnya ada 10 responden. Usia dari kepala rumah tangga yang termuda adalah 22 tahun sedangkan yang lainnya sudah berusia di atas 40 tahun. Status perkawinan dari 10 responden tersebut adalah 9 responden berstatus kawin dan 1 responden cerai mati, yang berasal dari Desa Banua Hanyar yaitu Ibu Siti Aisah. Rata-rata anggota rumah tangga dari masing-masing responden sekitar 3-7 orang. Dari 10 responden tersebut yang mempunyai anggota rumah tangga yang masih bersekolah ada 5 rumah tangga yang rata-rata masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan responden yang masih mempunyai bayi ada 1 rumah tangga dan responden yang memiliki balita ada 5 rumah tangga.

### **3.2. Pengeluaran Rumah Tangga**

Dalam penelitian ini juga ditanyakan pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan non makanan. Pengeluaran untuk makanan per minggunya pada masing-masing rumah tangga tidak jauh berbeda karena pola makan dan bahan makanan yang

dikonsumsi pada masing-masing rumah tangga tersebut hampir sama. Dalam sehari rata-rata mereka makan tiga kali yaitu pagi, siang dan malam hari. Makanan yang dikonsumsi pada saat makan pagi dan malam hari rata-rata hanya nasi dan lauk saja, sedangkan sayuran dikonsumsi pada saat makan siang. Sayuran yang dikonsumsi dari masing-masing rumah tangga berasal dari hasil kebun sendiri. Sedangkan untuk lauk pauknya yang dikonsumsi biasanya berupa telur dan ikan, baik ikan yang berasal dari hasil tangkapan di sungai maupun membeli di pasar. Ayam dan daging hanya dikonsumsi sesekali saja karena menurut mereka harganya mahal. Sehingga jika dihitung rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk makanan dalam seminggu sekitar Rp 150.000,- sampai Rp 300.000,- Namun ada satu rumah tangga yang kondisi ekonominya sangat kurang sekali sehingga untuk pengeluaran makanan dalam seminggu hanya Rp.55.000,-. Jumlah anggota rumah tangga ini adalah 3 orang dan mereka hanya makan sehari dua kali yaitu makan siang dan malam.

Untuk pengeluaran non makanan yang rutin seperti untuk sewa/kontrak rumah, membayar listrik, membeli minyak tanah/kayu bakar, membeli air untuk minum/masak pada masing-masing rumah tangga juga tidak jauh berbeda yaitu sekitar Rp 115.000,- sampai Rp 170.000,- per bulannya. Sedangkan untuk pengeluaran yang lainnya seperti barang dan jasa, pakaian, barang-barang tahan lama dan pajak, pungutan dan asuransi pada masing-masing rumah tangga sangat bervariasi.

### **3.3. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga**

Lapangan pekerjaan utama dari kepala rumah tangga (krt) adalah 7 krt sebagai petani yaitu sebagai petani menggarap sawah sendiri (1 krt), petani penggarap/sewa (5 krt) dan buruh tani (1 krt), sedangkan lapangan pekerjaan utama dari 3 krt lainnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu guru SD, pedagang kue dan buruh pabrik.

Untuk rumah tangga petani biasanya dalam satu hari mereka dua kali turun ke sawah yaitu pagi dan siang hari. Pagi mereka berangkat sekitar jam tujuh atau delapan sampai jam dua belas siang, mereka pulang ke rumah untuk makan siang dan menunaikan ibadah sholat dan akan kembali lagi ke sawah sekitar jam dua sampai jam lima sore. Sehingga total jam kerja petani dalam satu hari sekitar 7-8 jam. Sedangkan jumlah jam kerja yang lainnya seperti Guru SD sekitar 6 jam yaitu dari jam tujuh sampai dengan jam satu siang dan buruh pabrik sekitar 8 jam. Untuk Ibu Intan yang mempunyai lapangan pekerjaan utamanya sebagai pedagang kue, mulai membuat kue sekitar jam lima pagi, lalu dia jajakan sendiri keliling desa kadang sampai keluar desa dan kembali lagi ke rumahnya sekitar jam satu siang. Ibu Intan terpaksa harus membanting tulang sendiri untuk menghidupi keluarganya karena suaminya menderita lumpuh dan sudah tidak bisa membantu mencari nafkah. Sementara dalam rumah tanggai ini masih mempunyai satu anak yang masih sekolah, satu balita dan ibu mertua.

Untuk menambah penghasilan dari pekerjaan utama krt yang dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya maka krt mencari pekerjaan

tambahan. Pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh kepala rumah tangga antara lain ada yang mengumpulkan sampah/plastik, sebagai buruh kasar di bengkel dan sebagai guru mengaji di pesantren. Pak Mahyuni yang mempunyai pekerjaan sebagai guru SD, setelah pulang mengajar menggarap sawah milik orangtuanya dengan sistem bagi hasil, begitu juga yang dilakukan oleh Ibu Intan yang manggarap sawah milik saudaranya sepulang dari berdagang kue. Selain itu ada beberapa anggota rumah tangga lain seperti anak dan istri yang membantu mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Pekerjaan yang dilakukan antara lain membantu di sawah, menjahit baju, penjaga toko dan buruh di pabrik.

Pendapatan per bulan pada masing-masing rumah tangga sangat bervariasi tergantung dari jenis pekerjaannya. Untuk yang bekerja sebagai petani, khususnya sebagai penggarap/sewa, pendapatan yang diperoleh dalam satu kali panen dihitung dari berapa borongan sawah yang dikerjakan. Hasil panen dari satu borongan sekitar 8 blek (88 kg) atau 1 bleknya 11 kg gabah basah, dimana 2,5 blek (27,5 kg) disetor kepada pemilik sawah. Dalam satu kali panen biasanya petani menggarap/menyewa paling sedikit sekitar 25 borongan dan paling banyak 100 borongan. Harga gabah jika dijual dalam kondisi basah per bleknya sekitar Rp.35.000,-, tetapi terkadang bisa lebih mahal tergantung kondisi gabah dan harga pasaran. Sehingga rata-rata pendapatan petani khususnya petani penggarap/sewa dalam sekali panen (10 bulan) sekitar Rp 875.000,- sampai Rp 3.500.000,-.

Sedangkan pendapatan untuk pekerjaan tambahan atau pekerjaan anggota rumah tangga yang lainnya tergantung dari jenis pekerjaan, seperti anaknya Ibu Siti Aisah yang bekerja sebagai buruh kasar di bengkel, mempunyai penghasilan sekitar Rp.60.000 – Rp 100.000,- per minggunya tetapi setelah dipotong untuk transport hanya sisa sekitar Rp 30.000 – Rp 70.000,-. Berbeda dengan Pak Harmain, salah satu ketua RT di Desa banua Hanyar ini selain menggarap sawah milik saudaranya juga sebagai guru mengaji di pesantren. Pak Harmain mulai mengajar jam 14.00-17.00 setiap hari Senen-Jumat, honor yang diperoleh adalah Rp.7.500,- per hari tidak membayar transport karena pulang pergi mengajar cukup menggunakan sepeda.

### **3.4. Fasilitas Perumahan**

Jenis perumahan di wilayah ini hampir seluruhnya adalah rumah panggung. Luas lantainya antara 24 – 50 m<sup>2</sup> dengan jenis lantai terluas adalah kayu. Jenis dinding terluas sebagian besar juga terbuat dari kayu. Sedangkan atap rumahnya bermacam-macam, ada yang menggunakan atap rumbia, sirap atau kayu ulin, asbes dan juga seng. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempat sebagian besar adalah milik sendiri, tetapi ada dua responden yang membangun rumahnya di tanah milik orang tuanya dan satu responden menempati rumah dinas.

Sumber air minum utama dari dua desa ini adalah air leding, dimana cara memperolehnya dengan membeli per jerigen dengan harga per jerigennya sebesar Rp.350,-. Dalam satu hari per rumah tangga bisa menghabiskan 2-3 jerigen. Air leding ini khusus dikonsumsi untuk minum dan masak saja. Sedangkan untuk mandi dan mencuci menggunakan air sungai atau air sumur. Dari 10 responden hanya ada satu rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari sumur. Untuk tempat buang air besar dan kamar mandi dilakukan di sungai dengan cara membuat bangunan berukuran sekitar 1X1 m<sup>2</sup> yang beratap dan berdinding kayu. Tempat bangunan ini ada di atas sungai bagian pinggir yang biasa disebut dengan jamban.

Untuk penerangan sebagian besar sudah menggunakan listrik PLN meskipun banyak diantara mereka yang hanya nyantol. Nyantol adalah meminta jaringan listrik kepada tetangganya yang mempunyai instalasi sendiri, cara pembayarannya dengan memberikan iuran tiap bulannya kepada tetangga tersebut sesuai dengan penggunaan, ukurannya biasanya jumlah lampu yang dipakai. Tetapi masih ada dua rumah tangga yang penerangannya masih menggunakan sentir yaitu keduanya berada di Desa Banua Hanyar.

### **3.5. Keterangan Sosial Budaya**

Menurut informasi dari kepala desa setempat, tidak semua warga mempunyai kartu sehat untuk mendapat keringanan dalam berobat. Dari 5 responden yang berasal dari Desa Banua Hanyar hanya 3 responden yang mengaku pernah memiliki dan menggunakan kartu sehat tersebut. Masih menurut pengakuan responden bahwa tidak mudah menggunakan kartu sehat untuk mendapatkan keringanan berobat karena banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Namun kartu sehat itu sekarang sudah tidak berfungsi lagi, sekarang sudah lebih mudah untuk mendapatkan keringanan berobat. Bagi masyarakat yang kurang mampu cukup dengan menunjukkan surat pengantar dari ketua RT setempat, KTP dan KK saja kepada petugas Puskesmas tempat mereka berobat. Baik di Desa Banua Hanyar maupun Pandan Sari sudah berlaku sekitar setahun terakhir.

Bantuan beras atau biasa disebut dengan raskin juga masih ada di dua desa ini. Setiap rumah tangga masing-masing mendapat jatah 10 liter dengan harga Rp.12.000,- Mereka bisa membeli lebih dari 10 liter jika ada rumah tangga yang tidak mengambil jatahnya. Kadang-kadang mereka sengaja tidak mengambil jatah bersanya dengan alasan masih mempunyai simpanan beras dari hasil panen.

Menurut pendapat responden dari masing-masing desa di peroleh keterangan bahwa dalam tiga tahun terakhir, tidak ada pembangunan di desanya, yang ada hanya perbaikan jalan utama saja, yang sebelumnya masih jalan tanah sekarang sudah diperkeras itupun sebagian sudah mulai rusak lagi. Di Desa Pandan Sari dilakukan pengerukan sungai supaya tidak dangkal karena sungai ini sebagai sarana transportasi. Limbah/tanah dari hasil pengerukan sungai ini digunakan untuk pemadatan jalan.

### **3.6. Fasilitas Pedesaan**

Fasilitas khususnya di Desa Banua Hanyar dan Pandan Sari seperti sekolah, puskesmas, pasar, wartel, kantor pos, bioskop, KUD dan bank tidak ada. Semua fasilitas-fasilitas tersebut berada di luar masing-masing desa. Fasilitas yang tersedia di dua desa ini hanya tempat ibadah yaitu mushola, masing-masing desa ada dua mushola. Sedangkan jarak dari rumah responden yang dikunjungi dengan kantor kelurahan (rumah kepala desa) sekitar 200 - 600 m. Hanya satu responden yang rumahnya agak jauh dari rumah kepala desa, yaitu sekitar 1 km. Jika dilihat jarak dari masing-masing rumah responden menuju ke tempat-tempat fasilitas terdekat yang semuanya berada di luar desa, tidak berbeda jauh dengan jarak dari kantor kepala desa (rumah kepala desa).

### **3.7. Lain-lain**

Dari 10 responden ada sebanyak 4 rumah tangga yang masih memiliki bayi/balita. Diperoleh keterangan bahwa semua bayi/balita ini telah diberikan imunisasi secara lengkap. Lamanya pemberian air susu ibu (ASI) sekitar 18 – 30 bulan dan tidak ada yang mendapatkan program bantuan makanan pengganti ASI. Jika dilihat dari umur dan berat badan dari 4 bayi/balita ini, ada satu balita yang mempunyai status gizi kurang yaitu anak dari keluarga Pak Abidin. Pada usia 2,5 tahun (30 bulan) hanya mempunyai berat badan 12 kg. Penyebab utama dari kurangnya gizi pada balita ini adalah karena kondisi keluarganya yang miskin dan kondisi ibu dari balita ini yang sering sakit-sakitan.

Dengan keterbatasan lapangan pekerjaan pada masing-masing desa, dari 10 responden yang ditemui tidak ada anggota rumah tangganya yang bekerja sebagai TKI/TKW. Paling jauh mereka bekerja di luar kabupaten, tapi kebanyakan mereka bekerja hanya di luar desa dan luar kecamatan saja.

## **Kecamatan Lingsar - Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat**

### **1. Gambaran Kecamatan Wilayah Penelitian**

#### **1.1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Lingsar merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Kecamatan Lingsar berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Gangga
- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada
- Sebelah Selatan : Kecamatan Narmada
- Sebelah Barat : Kecamatan Gunung Sari dan Kota Mataram

Jarak dari Kecamatan Lingsar ke Kota Mataram (ibu kota Propinsi Nusa Tenggara Barat) lebih dekat yaitu hanya berjarak 9 km dibandingkan jarak dari Kecamatan Lingsar ke Kecamatan Gerung (ibu kota Kabupaten Lombok Barat). Perjalanan dari Kota Mataram ke Kecamatan Lingsar lewat jalan darat dengan angkutan umum dapat ditempuh sekitar 20 menit. Sedangkan jarak dari ibukota kecamatan Lingsar ke ibukota Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Gerung) adalah sekitar 82 km, dapat ditempuh lewat jalan darat dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dengan menggunakan angkutan umum.

Luas wilayah Kecamatan Lingsar adalah 79,75 Km<sup>2</sup>, atau hanya sekitar 4,05 persen dari luas Kabupaten Lombok Barat. Wilayah Kecamatan Lingsar sebagian besar adalah tanah kering dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah pertanian (yaitu ladang dan kebun) serta sawah yang subur dan hutan, dengan topografi yang merupakan dataran rendah dan berbukit-bukit. Sebagian besar tanah kering tersebut banyak ditanami tanaman buah-buahan.

#### **1.2. Perkembangan Kelurahan/Desa**

Secara administratif Kecamatan Lingsar membawahi 10 desa, yaitu Desa Peteluah Indah, Desa Lingsar, Desa Batu Kumbang, Desa Batu Mekar, Desa Karang Bayan, Desa Langko, Desa Sigerongan, Desa Duman, Desa Dasan Geria dan Desa Gegerung. Dari 10 desa tersebut terdiri dari 67 Dusun, dan 331 Rukun Tetangga (RT).

Menurut Camat Lingsar (Bapak Mahnan), Kecamatan Lingsar termasuk Kecamatan baru. Pada tahun 2003 beberapa kecamatan di Kabupaten Lombok Barat mengalami pemekaran wilayah. Salah satu yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan Narmada yang pecah menjadi dua kecamatan yaitu menjadi Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar. Kalau pemekaran desa di Kecamatan Lingsar selama tiga tahun terakhir tidak ada hanya di beberapa desa terjadi pemekaran dusun. Salah satunya terjadi di Desa

Peteluah Indah, dimana sebelumnya membawahi 4 dusun sejak tahun 2005 menjadi 6 dusun.

### **1.3. Klasifikasi Desa tertinggal**

Dari 10 desa di Kecamatan Lingsar dimana 5 desa termasuk dalam klasifikasi desa swadaya, masing-masing Desa Peteluah Indah, Desa Karang Bayan, Desa Sigerongan, Desa Dasan Geria dan Desa Gegerung. Sedangkan untuk klasifikasi desa swakarya dan Swasembada masing-masing 3 desa dan 2 desa. Menurut Bapak Camat Lingsar Penentuan klasifikasi desa tersebut adalah dari Kabupaten. Selain itu juga Kabupaten dan BPS Kabupaten Lombok Barat menentukan desa-desa yang termasuk dalam golongan desa tertinggal. Berdasarkan hasil penghitungan PODES yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat dengan melihat indeks komposit menunjukkan dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Lingsar 5 diantaranya termasuk dalam kategori desa tertinggal (yaitu Desa Langko, Desa Peteluah Indah, Desa Batu Mekar, Desa Batu Kumbang dan Desa Karang Bayan). Kelima desa tersebut memiliki nilai indeks komposit antara 3,3 sampai 3,4. Menurut Pak Camat, penentuan desa tertinggal oleh BPS Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten terhadap kelima desa tersebut sudah sesuai dengan situasi dan kondisi desa-desa tersebut yang sangat minim jika dilihat tingkat sosial ekonomi masyarakat, Sarana dan Prasarana wilayah.

Kriteria utama dalam menilai/menentukan klasifikasi desa tertinggal menurut Pak Camat adalah ditinjau dari kondisi alam/keadaan lingkungan dan dari tingkat masyarakatnya sendiri.

### **1.4. Program Peningkatan kesejahteraan Penduduk**

Kebijakan dan upaya yang sudah dilakukan oleh camat untuk memajukan wilayahnya antara lain, Pembinaan kedesa-desa di wilayahnya, potensi desa berkembang cukup luar biasa. Wilayah ini termasuk daerah pertanian, program pembangunan irigasi sudah berjalan dengan baik. Program pembangunan jalan dan perbaikan jalan yang sudah rusak trus diupayakan untuk memperlancar distribusi pengangkutan hasil bumi wilayah tersebut, karena daerah ini potensi buah-buahan dan perikanan.

Program yang sudah dilaksanakan dalam mensejahterakan kehidupan warga dari pemerintah daerah atau pusat yang sudah dilaksanakan adalah pemberdayaan kepada masyarakat dalam program P4K dalam hal kelompok tani di tiap-tiap desa yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan budidaya dibidang pertanian, peternakan dan perikanan. Tahun 2005 Desa Dasan Geria terpilih sebagai desa Gerakan Sayang Ibu dan pada tahun 2006 Desa Sigerongan dan Desa Batu Kumbang juga termasuk dalam Gerakan Sayang Ibu. Program di bidang pendidikan melalui program orang tua asuh untuk pendidikan tingkat SMA dan dana BOS. Pemberian dan penyaluran beras raskin.

Menurut bapak camat Lingsar, Kecamatan nyaris tidak mempunyai dana pembangunan untuk desa-desanya atau dana untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kebijaksanaan Camat atau tugas camat hanya melakukan pembinaan desa

di wilayahnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah dan UU no. 32 tahun 1999 sehingga muncul paradigma baru bahwa camat bukan kepala wilayah tetapi perangkat daerah dan masing-masing desa memiliki otonomi dan kewenangan terhadap wilayahnya.

Kecamatan hanya memperoleh informasi mengenai program pembangunan atau program peningkatan kesejahteraan untuk desa dari DATI II, sedangkan dana program tersebut langsung diserahkan kepada masing-masing desa, kecamatan hanya mendapat tembusan atau pemberitahuan desa-desa di kecamatannya yang mendapatkan dana tersebut. Tugas camat hanya memantau dana yang disalurkan tersebut untuk program apa. Dan untuk melihat tingkat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan kemajuan dari desa-desa tersebut.

Program peningkatan kesejahteraan penduduk yang sudah berjalan antara lain PKSBBM (Program Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak) dimana setiap desa mendapat bantuan sebesar Rp. 200 juta untuk membangun sarana dan fasilitas umum di desanya, diantaranya digunakan untuk membangun jalan semen disekitar pemukiman penduduk, membangun dan memperbaiki kantor desa karena kondisinya yang sudah rusak, membangun bak-bak penampungan air bagi penduduk yang disebut "Pompa Weslik". Tahun 2006 setiap desa memperoleh ADD (Alokasi Dana Desa) setiap desa mendapat Rp. 50 juta dan program P2KP yaitu memberikan bantuan modal atau tambahan modal kepada penduduk desa yang memiliki usaha (merupakan dana bergulir), raskin dan untuk tahun 2006 adalah program Askeskin.

Selain itu juga dalam pembinaan ke desa-desa kecamatan bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti Dinas sosial, dinas pertanian, dinas tenaga kerja dan balai latihan kerja daerah. Instansi biasanya langsung menurunkan bantuan dana ke desa tanpa melihat klasifikasi atau golongan desa (tertinggal atau tidak) yang dilihat adalah kondisi riil di masyarakat dari desa tersebut. Seperti yang terjadi di desa Lingsar dinas sosial membantu masyarakat dengan memberikan keramba untuk membudidayakan ikan. Karena daerah tersebut potensi atau penghasil ikan sedangkan masyarakat kekurangan dana untuk pengadaan peralatan maka dikucurkanlah dana. Desa Karang Bayan memiliki kawasan hutan maka yang dikembangkan adalah budidaya buah-buahan dan disana juga terdapat desa adat, dimana pada saat musim durian, tidak hanya penduduk dari Lombok Barat saja yang datang tapi dari kabupaten-kabupaten lain datang untuk membeli hasil buah-buahan dari desa tersebut. Maka dibangunlah di desa tersebut pasar rakyat bantuan untuk pengelolaan pemasaran hasil buah-buahan agar lancar.

Untuk melihat kemajuan desanya dari dana program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya, yang dilakukan oleh Kecamatan adalah dengan mengikut sertakan desa dalam lomba desa yang dilaksanakan oleh Tingkat I atau Tingkat II, setiap desa mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lomba tersebut. Pada tahun 2006 dalam lomba desa wakil dari Kecamatan Lingsar adalah Desa Batu Mekar dan hanya menduduki peringkat ke 7 dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

Kendala yang dihadapi dalam pembangunan wilayah desa adalah pendidikan penduduk di wilayah ini relatif rendah di dukung oleh perilaku adat budaya setempat yang masih cukup kental. Ekonomi masyarakatnya mayoritas menengah ke bawah. kasus-kasus agama seperti Ahmadiyah membuat tingkat keamanan tidak kondusif.

## **2. Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Tertinggal**

### **2.1. Kondisi Geografis**

Sebagai wilayah penelitian dalam studi ini dipilih 2 desa dengan kriteria yang dekat dengan ibu kota provinsi dan termasuk dalam klasifikasi desa swadaya dan desa tertinggal. Maka dipilihlah Desa Karang Bayan dan Desa Peteluah Indah. Topografi Desa Karang Bayan berbukit-bukit memiliki luas wilayah 5,75 km<sup>2</sup> atau sekitar 7,21 persen dari luas Kecamatan Lingsar. Sebagian besar lahan di Desa Karang Bayan adalah tanah kering yaitu seluas 480 Ha, tanah sawah 89 Ha, pekarangan dan lainnya 35 Ha. Pada umumnya lahan kering ditanami pohon buah-buahan (seperti rambutan, mangga, nangka, pisang, pepaya). Sedangkan sawah di wilayah ini adalah sawah irigasi yang dapat ditanami 2 kali dalam setahun.

Desa Peteluah Indah memiliki topografi datar dengan luas wilayah 2,81 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,52 persen dari luas Kecamatan Lingsar. Sebagian besar lahan di Desa Peteluah Indah adalah tanah persawahan dengan luas mencapai 186 Ha yang dapat ditanami padi sebanyak 2 kali dalam setahun dan merupakan sawah irigasi. Tanah kering hanya 54 Ha, serta tanah pekarangan dan lainnya mencapai luas 45 Ha.

### **2.2. Kependudukan**

Mayoritas penduduk di Desa Karang Bayan adalah suku asli daerah setempat, secara administratif Desa Karang Bayan terdiri dari 5 Dusun dan 34 RT. Berdasarkan hasil registrasi penduduk Desa Karang Bayan Tahun 2005 memiliki jumlah penduduk sebanyak 4 515 jiwa atau 8,07 persen dari jumlah penduduk Kecamatan Lingsar, dimana sebagian besar adalah penduduk perempuan yaitu 2 295 jiwa dan sisanya 2 220 jiwa adalah penduduk laki-laki. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, ada sebanyak 1 239 penduduk yang berumur 0-14 tahun, 3 080 penduduk yang berumur 15-64 tahun dan sisanya 146 penduduk yang berumur 65 tahun ke atas. Kepadatan penduduk di wilayah ini setiap kilo meter perseginya sekitar 785 jiwa, banyaknya rumah tangga di Desa Karang Bayan ada sebanyak 1 192 dengan rata-rata anggota rumah tangga sekitar 4 orang.

Secara administratif Desa Peteluah Indah membawahi 4 dusun tetapi sejak tahun 2005 menjadi 6 dusun dan 24 RT. Berdasarkan hasil registrasi penduduk Desa Peteluah Indahn Tahun 2005 memiliki jumlah penduduk sebanyak 5 419 jiwa atau sekitar 9,69 persen dari jumlah penduduk Kecamatan Lingsar, banyaknya penduduk laki-laki 2 613 dan sisanya 2 809 adalah penduduk perempuan. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, ada sebanyak 1 670 penduduk yang berumur 0-14 tahun, 3 628 penduduk yang

berumur 15-64 tahun dan sisanya 121 penduduk yang berumur 65 tahun ke atas. Desa Peteluah Indah lebih padat dibandingkan desa Karang Bayan, dimana setiap kilo meter persegi di wilayah ini dapat ditemui sekitar 3 843 orang. Banyaknya rumah tangga di Desa Peteluah indah 1 552 dengan rata-rata anggota rumah tangga sekitar 3 orang.

Penduduk di kedua desa sebagian besar termasuk dalam kelompok umur usia produktif. Tingkat perempuan yang menikah di usia muda di ke dua desa berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan sudah mulai menurun, jika dilihat usia wanitanya yang menikah usia 15-16 tahun pada tahun 2005 sampai bulan Juli 2006 sudah tidak ada tetapi untuk wanita yang berumur 17-19 tahun masih ditemui, dimana pada tahun 2005 di Desa Karang Bayan terdapat 77 PUS dan di Desa Peteluah Indah ada sebanyak 42 PUS.

### **2.3. Ketenagakerjaan**

Sebagian besar penduduk di Desa Karang Bayan bekerja di sektor pertanian, di sektor perdagangan, dan sektor industri. Luas lahan persawahan, dan lahan kering (ladang, tegalan dan perkebunan) di wilayah Karang Bayan cukup luas, banyak dijumpai lahan kering (ladang, tegalan dan perkebunan). Sehingga wilayah ini merupakan daerah pertanian banyak rumah tangga yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, namun sebagian besar mereka hanya sebagai buruh tani saja atau sebagai petani penggarap yang mengerjakan lahan milik orang lain dengan sistim bagi hasil, karena sawah dan tanah kebun yang mereka garap adalah milik orang lain. Tingkat pengangguran di Desa Karang Bayan cukup tinggi sekali dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini yang merupakan akibat dari peristiwa "Bom Bali" sehingga banyak industri kerajinan rumahtangga yang tutup selain itu juga karena tingkat pendidikan mereka rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan di kota. Tingkat mobilitas pekerja di desa ini untuk yang bekerja sebagai TKI di luar negeri ada sekitar 100 orang. Sedangkan untuk pekerja anak yang bekerja di industri rumah tangga atau pabrik tidak ada, umumnya mereka hanya sebagai pekerja keluarga saja yaitu membantu orang tua di sawah atau kebun.

Gambaran yang sama juga terlihat di Desa Peteluah Indah, dimana sebagian besar penduduk di wilayah ini menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Dari mereka yang bekerja di sektor pertanian hampir 70 persen hanya sebagai buruh tani, hanya sedikit yang menjadi petani pemilik. Karena hampir sebagian besar lahan persawahan dan tanah perkebunan di wilayah Peteluah Indah dimiliki atau dikuasai oleh orang-orang Kota yang tinggal di Mataram. Kondisi yang sama juga terjadi di Desa Peteluah Indah dimana sejak terjadinya Bom Bali mengakibatkan banyak pengangguran. Menurut informasi yang diperoleh dari Sekretaris Desa Peteluah Indah ada sekitar 200 kepala rumah tangga yang bekerja di Kota Mataram sebagai kuli angkut di Mandalika. Pekerja anak di wilayah ini ada sekitar 11 persen menurut Sekde Desa Peteluah Indah.

### **2.4. Pendidikan**

Fasilitas sekolah yang ada di dua desa tersebut baru sampai tingkat SD saja. Desa Karang Bayan memiliki fasilitas 1 SD inpres dan 1 SD non inpres yang jaraknya sekitar 100 meter dari kantor desa dengan kondisi baik salah satu SD ada sejak tahun 1965. Desa Peteluah Indah memiliki 2 SD (1 inpres dan 1 non inpres) yang jaraknya sekitar 300 meter dari kelurahan serta 1 Madrasah Ibtidaiyah yang jaraknya sekitar 1 km dari kelurahan. Sedangkan untuk fasilitas sekolah tingkat SMP dan SMA tidak ada di ke dua desa tersebut, ada di desa lain. Jarak yang terdekat ke sekolah SMP dan SMA dari kantor desa Karang Bayan adalah 4 km sedangkan jarak dari kantor desa Peteluah Indah ke SMP dan SMA terdekat adalah 3 km.

Program-program pendidikan luar sekolah yang tujuannya adalah untuk memberantas buta aksara yang ada di desa Karang Bayan antara lain ada Kejar dan Getas (Gerakan Pengentasan Aksara). Sasaran program tersebut adalah untuk penduduk usia 40 tahun ke atas. Program pemberantasan buta aksara yang ada di Desa Peteluah Indah yaitu Keaksaraan Fungsional, karena di desa tersebut memiliki PKBM disalah satu dusun.

Informasi yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di dua desa tempat penelitian masih cukup rendah, banyak ditemui anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau putus sekolah. Rata-rata anak-anak mereka hanya sekolah sampai tamat SD atau SMP saja. Anak usia sekolah yang putus sekolah atau hanya tamat SD dan SMP di Desa Karang Bayan sebanyak 65 persen sedangkan di Desa Peteluah Indah sebanyak 74 persen.

### **2.5 Kesehatan**

Fasilitas Kesehatan yang ada di desa Karang Bayan antara lain adalah Polindes yang jaraknya 500 meter dari kantor desa, sedangkan rumah sakit dan puskesmas tidak ada di wilayah ini. Untuk Puskesmas ada didesa tetangga dan yang terdekat jaraknya adalah 6 km dari kantor desa, sedangkan rumah sakit jaraknya kurang lebih 17 km dari kantor desa letaknya di wilayah Kota Mataram. Tenaga kesehatan yang ada di wilayah ini adalah bidan desa dan mantri kesehatan masing-masing 1 orang dan dukun bayi yang terlatih ada sebanyak 5 orang.

Desa Peteluah Indah untuk fasilitas kesehatan lebih lengkap, dimana sudah memiliki puskesmas (yang merupakan puskesmas kecamatan), dengan tenaga kesehatan 2 orang dokter, 8 orang perawat dan 1 orang mantri kesehatan dan 1 orang bidan desa. Dukun bayi yang sudah terlatih ada sebanyak 6 orang. Jarak puskesmas dengan kantor desa sekitar 500 meter. Selain puskesmas ada puskesmas pembantu yang letaknya dekat dengan rumah bidan desa. Rumah sakit yang terdekat ada di Kota mataram yang jaraknya sekitar 15 km dari kantor desa Peteluah Indah.

Kematian bayi dan balita pada tahun 2005 tercatat 4 bayi dan 1 anak balita di desa Karang Bayan, sedang sampai dengan bulan Juli tahun 2006 ada 2 bayi yang meninggal dan untuk anak balita tidak ada. Pada tahun 2005 di Desa Peteluah Indah tercatat sebanyak 3 bayi dan 1 anak balita meninggal, sedangkan pada tahun 2006 kondisi sampai bulan Juli tercatat 2 bayi meninggal dunia, sedangkan untuk anak balita tidak ada. Kematian ibu karena kehamilan dan melahirkan di kedua desa tersebut selama tahun 2005 dan sampai dengan bulan Juli tahun 2006 tidak ada.

Tingkat kesehatan bayi dan balita di Desa Karang Bayan berdasarkan informasi dari pengurus posyandu selama tahun 2005 ada 3 anak balita yang mengalami gizi buruk tetapi tidak sampai pada tingkat busung lapar atau merasmus sedangkan untuk bayi tidak ada. Informasi yang sama dari pengurus posyandu Desa Peteluah Indah pada tahun 2005 ada sebanyak 5 bayi yang mengalami gizi buruk dan balita 10 anak yang berat badannya dibawah normal. Pada tahun 2006 kondisi sampai bulan Juli di Desa Karang Bayan dan Desa Peteluah Indah tidak ditemui bayi dan balita yang mengalami gizi buruk atau berat badan dibawah normal, semua anak bayi dan balita dalam kondisi berat normal.

Program KB di Desa Karang Bayan dan Peteluah Indah sudah sangat berhasil, terlihat dari banyak penduduk usia subur yang menjadi akseptor KB. Pada tahun 2005 banyaknya akseptor KB di Desa Karang bayan tercatat 654 akseptor dan KB yang digunakan terbanyak adalah menggunakan KB suntik yaitu sebanyak 408, diikuti oleh akseptor yang menggunakan pil dan IUD masing-masing 134 akseptor dan 68 akseptor. Akseptor KB di Desa Peteluah Indah lebih banyak dibanding desa Karang Bayan yaitu mencapai 860 akseptor. Sama dengan di Desa Karang Bayan, dimana sebagian besar akseptor menggunakan KB suntik yaitu sebanyak 427 akseptor, selanjutnya yang cukup banyak adalah menggunakan KB pil dan implan masing masing 256 akseptor dan 90 akseptor.

Informasi yang diperoleh dari pak kades Desa Karang Bayan dan Wakil Kades Desa Peteluah Indaharganya yang mendapatkan kartu sehat ada sebanyak 706 orang sedangkan di desa Peteluah Indah hanya separuhnya dari Desa Karang Bayan yaitu 329 orang dan itu hanya mencakup 2 dusun saja yaitu Dusun Bukit Nunggal dan Dusun Bugbug Selatan.

Posyandu di Desa Karang Bayan dan Desa Peteluah Indah masing-masing memiliki 5 buah, dimana hampir setiap dusun mempunyai 1 posyandu dan keberadaannya sudah lebih dari 3 tahun. Setiap posyandu memiliki 4 kader dan pengkaderan untuk pengurus posyandu selalu dilakukan untuk menggantikan kader yang pindah atau kader yang sudah tidak aktif lagi atau mengundurkan diri. Jarak posyandu yang terdekat dari kantor Desa Karang Bayan adalah sekitar 300 meter dan 700 meter adalah jarak yang terdekat antara posyandu dengan kantor Desa Peteluah Indah.

Walaupun belum terpenuhinya seluruh fasilitas kesehatan di dua desa tersebut, namun dari fasilitas yang ada telah dapat membantu masyarakat dibidang kesehatan. Keberadaan posyandu di kedua desa tersebut cukup aktif dilakukan rutin sebulan sekali dalam memantau kesehatan anak-anak balita dan bayi serta ibu hamil, dengan kegiatan antara lain penimbangan bayi dan balita, pemberian makanan tambahan berupa roti/biskuit dan susu, imunisasi termasuk program PIN, pemberian vitamin A setiap bulan Agustus. Pada tahun 2005 untuk program PIN dilaksanakan sampai 4 kali dalam setahun dan kegiatan itu harus dilakukan oleh semua posyandu. Selain itu juga kegiatan posyandu selalu dihadiri oleh dokter dari puskesmas guna memberikan penyuluhan kesehatan. yang dilakukan oleh posyandu setempat sudah cukup membantu masyarakat dalam memperoleh informasi kesehatan dan kebersihan lingkungan.

### **2.6. Sarana/Prasarana/Infrastruktur**

Sarana jalan di wilayah Desa Karang Bayan menuju Kecamatan dan desa-desa disekitarnya sudah cukup memadai, dengan kondisi jalan yang di aspal hanya 9 km, 17 km diperkeras dan 12 km merupakan jalan tanah. Jalan utama dipemukiman penduduk adalah semen dengan lebar 2 meter yang dibangun dari program P2KP (Proyek Pengentasan Kemiskinan Perkotaan). Tetapi akses keluar masuk di wilayah ini agak sulit walaupun dilalui oleh kendaraan umum (sejenis mikrolet), karena jumlah kendaraan umum tersebut sangat jarang di wilayah ini sedangkan ojek tidak begitu banyak. Untuk mencapai rumah-rumah penduduk sangat sulit karena tidak ada akses jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua (motor/ojek) itupun sangat sulit karena jalan di pemukiman penduduk bertingkat tingkat sesuai dengan struktur daerahnya yang berbukit-bukit. Jika musim hujan jalan semen itu licin dan jika musim kering jalan semen itu berdebu dan licin juga, sehingga harus berhati-hati jalan di pemukiman penduduk.

Fasilitas listrik di Desa Karang Bayan mulai ada sejak tahun 1991 dan penduduk yang sudah memanfaatkan/pengguna listrik sebanyak 330 rumah tangga. Kantor desa sendiri belum memanfaatkan aliran listrik yang ada dan penerangan jalan di desa juga tidak ada. Tempat ibadah yang ada di desa ini hanya ada mesjid, musholla dan pura masing-masing ada 4 buah, 1 buah dan 1 buah dan keberadaannya sudah lebih dari 3 tahun sedangkan untuk gereja ada di desa lain yang jaraknya sekitar 6 km. Tanah milik Pemda yang ada di Desa Karang Bayan sementara waktu digunkan oleh desa tersebut sebagai sarana olah raga dan dibuatlah lapangan sepakbola, bulu tangkis dan bola volly. Kantor pos keliling ada seminggu sekali setiap hari Selasa dan letaknya di kantor desa. Tidak semua desa memiliki KUD termasuk Desa Karang Bayan, karena satu KUD membawahi/melayani beberapa desa. KUD yang terdekat dari desa tersebut berjarak sekitar 4 km. Penduduk di wilayah ini memanfaatkan sumber mata air sebagai fasilitas air minum yang dialirkan di bak-bak penampungan yang disebut "Pompa Weslik", dimana dimasing-masing dusun dibangun 3-4 buah bak penampungan.

Kondisi jalan yang ada di Desa Peteluah Indah menuju ke kecamatan dan desa-desa sekitar yang diaspal hanya sejauh 6 km, diperkeras 12 km dan tanah 11 km. Jalan-jalan di pemukiman penduduk adalah tanah diperkeras yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua saja. Alat transportasi yang ada antara lain angkuta umum (bemo), ojek dan cidomo. Kondisinya hampir sama dengan di Desa Karang Bayan untuk mencapai rumah-rumah penduduk sangat sulit karena tidak ada akses jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua (motor/ojek) itupun sangat sulit karena jalan di pemukiman penduduk melewati kebun atau ladang milik penduduk di wilayah tersebut dengan kondisi tanah yang berbatu-batu dan tidak rata (naik-turun), sehingga untuk mencapai ke rumah penduduk harus dilanjutkan dengan berjalan kaki.

Listrik PLN mulai masuk ke Desa Peteluah Indah sejak tahun 1982 dan saat ini tercatat 788 rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik. Penerangan jalan di desa sudah ada sejak tahun 2002 dan itu masih jarang. Fasilitas tempat ibadah yang ada di desa Peteluah Indah antara lain masjid 6 buah, musholla 30 buah dan pura 1 buah sedangkan fasilitas gereja tidak ada dan jarak yang terdekat dari desa adalah 5 km. Desa Peteluah Indah tidak mempunyai fasilitas KUD dan yang terdekat jaraknya sekitar 2 km. Untuk memperoleh air minum penduduk setempat banyak memanfaatkan air sumur.

## **2.7. Sosial Budaya/Partisipasi**

Rumah tangga yang tinggal di Desa Karang Bayan yang memiliki TV sekitar 52 persen dari jumlah rumah tangga yang ada dan di Desa Peteluah Indah sekitar 60 persen rumah tangga yang memiliki TV, sedangkan hampir setiap rumah tangga di ke dua desa memiliki radio, karena hanya dua media elektronik itu saja yang banyak dimiliki sebagai sarana informasi. Sarana informasi lewat media cetak seperti koran hampir semua rumah tangga yang tinggal di ke dua desa tersebut tidak berlangganan. Perpustakaan dan perpustakaan keliling tidak ada di dua desa ini, walaupun ada hanya di sekolah.

Tingkat keamanan di wilayah Desa Karang Bayan cukup aman walaupun Polsek Lingsar jaraknya cukup jauh dari desa tersebut yaitu sekitar 4 km, selama satu tahun terakhir tidak pernah ada pencurian. Karena cukup aman sehingga tidak ada kegiatan siskamling. Kegiatan gotong royong antar warga masih cukup kental di desa ini terutama jika ada pembangunan. Pembangunan jembatan, pembangunan/perbaikan masjid, pembangunan jalan disekitar dusun, pembangunan bak-bak untuk penampungan air disetiap dusun semuanya dikerjakan oleh warga dengan cara bergotong royong. Selain itu juga setiap seminggu sekali dilakukan pembersihan lingkungan, istilah mereka adalah jumat bersih. Kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok PKK biasa dilakukan 2 bulan sekali. Tetapi untuk kursus-kursus yang diadakan oleh PKK bekerjasama dengan depnaker atau dengan dinas sosial selama satu tahun terakhir adalah kursus perbengkelan, kursus menjahit.

Polsek Lingsar terletak di Desa Peteluah Indah, dimana jaraknya dari kantor desa sekitar 1,3 km. Keamanan di wilayah Desa Peteluah Indah sama dengan Desa Karang Bayan cukup aman selama satu tahun terakhir tidak pernah terjadi pencurian sehingga tidak ada kegiatan siskamling di wilayah ini. Informasi dari wakil kades menyatakan untuk tingkat kerusuhan sering sekali terjadi di wilayah ini karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakatnya sehingga mudah sekali terprovokasi oleh orang-orang yang mengadu domba masalah agama bukan masalah dengan agama lain tapi antar umat islam dengan aliran yang berbeda seperti aliran ahmadiyah. Kegiatan gotong royong antar warga sangat baik, setiap hari jumat dilakukan kegiatan kebersihan dilingkungan dusun masing-masing yang disebut jumat bersih. Selama tahun 2006 kegiatan ibu-ibu kelompok PKK di desa tersebut tidak aktif disebabkan karena bapak kades sudah habis masa jabatannya sampai akhir tahun 2005 tetapi belum ada penggantinya sehingga untuk sementara waktu masih tetap dipegang oleh kades yang lama sambil menunggu penggantinya. Tetapi untuk kursus-kursus yang diselenggarakan oleh dinas setempat bekerja sama dengan kelompok PKK tetap berjalan seperti kursus memasak, kursus menjahit dan kursus perbengkelan untuk anak cacat. Desa Peteluah Indah memiliki PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Membaca) yang cukup aktif selain kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF), kegiatan yang dilakukan di PKBM tersebut adalah kejar paket A dan B, kursus komputer, pertukangan dan perbengkelan.

### **2.8. Lain-lain**

Kebijakan dan upaya yang sudah dilakukan oleh kepala Desa Karang Bayan dalam usaha mamajukan desanya adalah karena di desa tersebut banyak sekali bahan dasar akar-akaran maka kepada warganya untuk selalu mengembangkan kerajinan akar-akaran yang merupakan kerajinan turun temurun dari nenek moyang mereka sehingga dapat menjadi ciri khas buah tangan atau kerajinan dari desa mereka. Sedangkan di Desa Peteluah Indah untuk saat ini belum ada kebijakan atau usaha untuk mamajukan desanya. Hanya dari dana pembangunan yang diperoleh di kedua desa ini yang diperoleh dari program PKSBBM digunakan untuk membangun penerangan di desa, fasilitas umum, sarana dan prasarana wilayah (seperti jalan di dusun-dusun, kali yang melewati desa tersebut di dam agar tidak longsor dan pengaspalan jalan desa) dan pemugaran kantor desa.

Bantuan dana pembangunan yang diperoleh selama tiga tahun terakhir hanya dari pemerintah baik pusat maupun daerah, melalui kompensasi dana subsidi BBM. Dalam Program pengentasan kemiskinan Penduduk di Desa karang Bayan yang sudah dilakukan adalah program P2KP yaitu pemberian modal kepada penduduk yang mempunyai usaha (dana bergulir) selain itu penyantunan untuk orang-orang jompo. Pembangunan perumahan untuk warga miskin yang rumahnya sudah tidak layak atau rusak dan masuk kategori rumah tidak sehat, untuk tahun 2005 telah dibangun sebanyak 20 rumah sehat untuk 20 warga di pusatkan di Dusun Tresak Barat. Mendaftarkan warganya yang tidak mampu untuk mendapatkan kartu BLT dan sementara Askeskin belum keluar maka kartu BLT tersebut dapat digunakan untuk berobat gratis di puskesmas atau di rumah

sakit. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak tahun 2005, sehingga anak-anak SD gratis dari SPP, buku, sepatu, kaos kaki, tas, sampai pakaian dan perbaikan gedung sekolah. Program lainnya adalah membuat pusat kerajinan dari akar rumput untuk mengurangi pengangguran.

Program dalam mensejahterakan kehidupan warganya dari pemerintah pusat atau daerah di Desa Peteluah Indah yang sudah dilakukan adalah program P2KP yaitu pemberian modal kepada penduduk yang cacat untuk melakukan usaha (dana bergulir), mendaftarkan warganya yang tidak mampu untuk mendapatkan kartu BLT dan sementara Askeskin belum keluar maka kartu BLT tersebut dapat digunakan untuk berobat gratis di puskesmas atau di rumah sakit. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak tahun 2005, sehingga anak-anak SD gratis dari SPP, buku, dan perbaikan gedung sekolah. Kondisi kantor desa yang sudah rusak berat sehingga dirubuhkan dan dibangun kembali dan belum selesai, sumber dananya adalah dari ADD.

Program beras raskin yaitu pembelian beras murah untuk orang miskin seharga Rp. 1000,- per kg. Informasi dari kepala desa, untuk beras raskin tahun 2005 setiap desa bisa menerima lebih dari 11 ton sehingga setiap rumah tangga miskin dapat membeli 20 kg. Tetapi untuk tahun 2006 untuk desa Karang Bayan setiap bulan hanya menerima 7,38 ton dan desa Peteluah Indah menerima 8,98 ton, beras raskin tersebut langsung disalurkan ke masing-masing dusun. Walaupun kenyataan yang terjadi dilapangan berbeda, karena di setiap dusun tidak hanya warga miskin yang membeli beras raskin tapi semua warga/penduduk yang tidak miskin dapat membeli raskin tersebut. Untuk itu setiap kepala dusun membagi untuk warga yang miskin mendapat jatah 10 kg dan sisa beras murah dibagi rata kepada penduduk yang mampu yang mau membeli dengan harga per kilogramnya sama yaitu Rp. 1000,- jadi tidak khusus diperuntukkan untuk orang miskin saja, karena kalau tidak dibagi rata akan menimbulkan kesulitan pada saat kadus atau kades membutuhkan bantuan warga.

Kendala yang menghambat perkembangan pembangunan di dua desa ini karena masih rendahnya SDM disebabkan pendidikan warga di desa tersebut masih rendah. Pendidikan yang rendah sehingga sulit bagi penduduk untuk mencari pekerjaan yang layak selain itu tidak tersedianya lapangan pekerjaan di desa. Belum semua warga dapat memanfaatkan fasilitas penerangan listrik PLN.

### **3. Gambaran Rumah Tangga Desa Tertingal**

#### **3.1. Keterangan Rumah Tangga**

Responden rumah tangga untuk masing-masing desa dipilih 5 rumah tangga, dari informasi di lapangan diperoleh keterangan sebagai berikut lima responden di Desa Karang Bayan empat responden kepala rumah tangga menurut status perkawinan adalah kawin dan berumur antara 31-45 tahun dan satu orang cerai mati yaitu Bapak Wira Bakti berumur 69 tahun. Salah satu anak bapak Wira Bakti adalah kader posyandu.

Sedangkan di Desa Peteluah Indah lima responden kepala rumah tangga berstatus kawin, umur responden kepala rumah tangga lebih bervariasi masing-masing satu kepala rumah tangga yang berumur 36 tahun, 40 tahun, 41 tahun dan dua kepala rumah tangga berumur 65 tahun. Salah satu kepala rumah tangga yang berumur 65 tahun adalah pak Dulatif saat ini dia tinggal bersama istrinya yang ke tiga. Istri pertama dan istri ke duanya telah diceraiannya dan anak-anak ikut dengan istrinya.

Banyaknya anggota rumah tangga responden di desa Karang Bayan 2 rumah tangga memiliki anggota rumah tangga 4 orang (yaitu keluarga bapak Irman dan bapak Yan Sinar). Keluarga pak Irman memiliki 2 orang anak yang masih balita dan belum ada yang bersekolah, sedangkan keluarga pak Yan Sinar juga memiliki 2 orang anak, satu orang anaknya masih bersekolah di SD dan satu orang anaknya putus sekolah hanya sampai kelas 3 SMP saja setelah itu tidak melanjutkan lagi. Jumlah anggota rumah tangga bapak Nopian sebanyak 6 orang, dua anaknya masih sekolah di SMP dan satu anaknya sudah menikah dan masih kumpul dengan keluarga pak Nopian. Bapak Wira Bakti adalah duda, lima anak-anaknya sudah besar sudah tamat SMA dan semuanya bekerja. Keluarga Pak Rukiman mempunyai enam orang anak, 3 orang anaknya masih sekolah di SD dan SMP, 2 orang anaknya setelah lulus SMP tidak melanjutkan sekolah lagi dan satu orang anaknya masih balita dan belum sekolah.

Responden rumah tangga di desa Peteluah Indah yaitu keluarga Pak Imran mempunyai tanggungan 2 anak yang masih sekolah di SD dan TK dan satu orang anaknya sudah tidak sekolah lagi hanya sampai kelas 6 SD dan tidak melanjutkan lagi. Keluarga Pak Dulatif mempunyai tanggungan 2 anak yang masih sekolah di SD dan satu anak balita yang belum sekolah. Keluarga Pak Muhammad dan Pak Atinah masing-masing memiliki 5 orang anak dan masing-masing hanya satu anaknya yang masih sekolah. Dua anak Pak Muhammad masih balita dan dua anaknya lagi sudah tidak bersekolah satu hanya sampai kelas 6 SD dan satu hanya sampai kelas 2 SMP, sedangkan keluarga pak Atinah tiga orang anaknya sudah putus sekolah tidak sampai tamat SD dan satu orang masih balita dan belum sekolah. Keluaraga Pak Sahdi memiliki 3 orang anak, satu anaknya masih sekolah di SMP sedangkan 2 anaknya sudah tidak sekolah lagi hanya lulus SMP dan salah satunya menjadi kader posyandu.

### **3.2. Pengeluaran Rumah Tangga**

Pengeluaran lima rumah tangga responden di Desa Karang Bayang masing-masing berkisar antara Rp. 600.000,- sampai dengan Rp. 800.000,- sebulan. Dari seluruh pengeluaran, porsi pengeluaran untuk makanan lebih besar dibandingkan non makanan, dimana rata-rata pengeluaran untuk makanan sehari berkisar antara Rp. 15.000 sampai Rp. 20.000,- dan pengeluaran untuk makanan tidak berbeda jauh jika dilihat dari banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran non makanan yang dirasakan cukup besar oleh setiap rumah tangga adalah pengeluaran untuk transport dan pengeluaran untuk listrik rata-rata mereka sebulan membayar antara Rp. 40.000,- sampai Rp. 60.000,- dan untuk minyak tanah cukup sedikit karena mereka memasak masih dengan kayu

bakar. Empat rumah tangga rata-rata makan dua kali dalam sehari yaitu hanya makan siang dan malam saja sedangkan untuk makan pagi cukup minum teh manis panas atau kopi panas saja kadang-kadang diselingi kue seadanya seperti pisang goreng atau ubi/singkong rebus. Dari ke empat keluarga tersebut menu mereka cukup sederhana sekali setiap makan selalu ada nasi dan sayur sedang lauk yang rutin ada adalah tempe dan tahu untuk telur seminggu cukup sekali saja itu pun hasil dari ternak sendiri sedangkan untuk ikan seminggu hanya dua sampai tiga kali saja. Satu rumah tangga yang makan tiga kali sehari yaitu keluarga Pak Wira Bakti dan variasi makanannya cukup lengkap selalu ada nasi, sayur dan lauk ikan/telur, walaupun untuk makan pagi biasanya sangat sederhana cukup nasi dengan lauk seadanya yaitu tempe/tahu dan telur atau ikan.

Pengeluaran sebulan dari Responden rumah tangga di Desa Peteluah indah tidak berbeda jauh dengan di Desa Karang Bayan, dimana dari lima responden rumah tangga pengeluaran sebulan berkisar antara Rp. 600.000,- sampai dengan Rp. 900.000,-. Dari seluruh pengeluaran, porsi pengeluaran untuk makanan lebih besar dibandingkan non makanan, dimana rata-rata pengeluaran untuk makanan sehari berkisar antara Rp. 20.000 sampai Rp. 25.000,- dan pengeluaran untuk makanan tidak berbeda jauh jika dilihat dari banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran terbesar untuk non makanan adalah pengeluaran untuk transport sedangkan pengeluaran untuk listrik rata-rata mereka menyantol ke tetangga yang mempunyai listrik sehingga mereka hanya membayar sebesar Rp 10.000,- dan untuk minyak tanah cukup sedikit karena mereka memasak masih dengan kayu bakar.

Jika di Desa Karang Bayan rata-rata rumah tangga makan sehari dua kali kebalikannya di Desa Peteluah Indah semua rumah tangga rata-rata makan tiga kali sehari. Namun variasi makannya yang lengkap dengan lauk dan sayuran hanya siang dan malam hari. Sedangkan untuk makan pagi biasanya makan cukup seadanya yaitu nasi dan lauk tahu/tempe atau ikan kadang-kadang.

### **3.3. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga**

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya, tiga responden rumah tangga di Desa Karang Bayan, selain kepala rumah tangga yang bekerja, istri-istri mereka juga turut bekerja membantu mencari tambahan untuk keluarga. Tiga kepala rumah tangga tersebut bekerja sebagai buruh tani yang bekerja selama 8 jam (dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore), sehari mereka dibayar Rp. 10.000,- sampai Rp. 15.000,-, rata-rata upah yang di dapat sebulan adalah Rp. 300.000. Istri mereka bekerja ada yang membuka warung yang menjual sayur-mayur, ada yang sebagai pedagang makanan keliling (bubur dan plecing) dan membuka warung sembako, rata-rata keuntungan yang diperoleh dari hasil jualan mereka berkisar antara Rp. 15.000,- sampai Rp. 30.000,-. Satu kepala rumah tangga (Pak Yan Sinar) bekerja sebagai pencari kayu di hutan, biasanya bekerja dari jam 6-9 pagi, dilanjutkan dengan melakukan pekerjaan tambahan yaitu mencari

ikan di kali hasilnya sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual selain itu jika musim buah maka Pak Yan Sinar membeli buah-buahan tetangganya yang sedang panen dan menjualnya di pasar (sebagai pedagang buah-buahan), menurutnya rata-rata setiap hari dapat membawa uang sebesar Rp. 25.000. Sedangkan Pak Wira Bakti umurnya sudah cukup tua sehingga ia hanya menggantungkan hidupnya dari pendapatan anak-anaknya saja, ke lima anaknya sudah bekerja semua ada yang menjadi guru TK, ada yang bekerja sebagai staf desa, ada yang bekerja menjadi buruh di percetakan dan ada yang sebagai karyawan swasta.

Berbeda dengan responden rumah tangga di Desa Karang Bayan dimana istri banyak membantu suami mencari nafkah, sedangkan istri-istri yang menjadi responden di Desa Peteluah Indah tidak ada yang bekerja. Kepala rumah tangga mempunyai pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tiga kepala rumah tangga bekerja sebagai buruh tani yang bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore upah mereka sehari Rp. 15.000 dan sebulan rata-rata mereka mendapat upah sekitar Rp. 400.000,-. Dari hasil yang diperoleh tidak cukup untuk itu mereka mempunyai pekerjaan tambahan dimana satu orang mempunyai pekerjaan tambahan sebagai tukang parkir pada malam hari, dan dua orang bekerja sebagai pedagang buah keliling. Satu orang bekerja sebagai pedagang sayur keliling dan sore harinya bekerja sebagai tukang ojek, rata-rata penghasilan yang diperoleh tiap bulan sekitar Rp. 800.000,-. Satu orang bekerja sebagai buruh di tempat pemeliharaan ikan yang bekerja dari jam 4 pagi sampai jam 5 sore, tidak mempunyai pekerjaan tambahan hanya mengandalkan dari upah sebagai buruh perikanan saja. Rata-rata setiap bulan memperoleh penghasilan sekitar Rp. 750.000,-.

### **3.4. Fasilitas Perumahan**

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah melalui perumahan sebagai tempat tinggal. Status kepemilikan rumah responden di dua desa semuanya adalah milik sendiri. Desa Karang Bayan dan Desa Peteluah Indah termasuk desa dengan kategori desa tertinggal, sehingga masih banyak ditemui bangunan rumah penduduk yang kurang memenuhi syarat sebagai rumah sehat.

Kondisi perumahan responden tiga dari lima responden di Desa Karang Bayan ini bentuknya sudah permanen dan cukup baik dua rumah responden dengan atap genteng dan satu rumah beratap seng. Dinding rumah responden tersebut satu rumah responden berdinding tembok dan dua responden yang lainnya berdinding kayu sedang lantai rumah ke tiga responden masih semen dengan luas lantai masing-masing 63 m<sup>2</sup> dan dua rumah dengan luas 40 m<sup>2</sup>. Dua rumah responden lainnya beratapkan rumbia dengan dinding rumah gedeg/bambu yang dianyam dan lantainya masih tanah, luas lantai rumahnya hanya 16 m<sup>2</sup>. Jarak antara rumah penduduk yang satu dengan lainnya agak berjauhan karena dipisahkan oleh lahan pekarangan yang cukup luas tetapi bangunan rumah cukup kecil. Hanya dua rumah yang mempunyai fasilitas kamar mandi sendiri sedangkan yang lainnya tidak punya tapi walaupun punya kamar mandi semua rumah

tangga kalau buang air mereka akan pergi ke kali. Responden rumah tangga untuk kebutuhan air bersih mereka menggunakan air dari sumber mata air yang dialirkan ke bak-bak penampungan (pompa weslik) dan semua rumah tangga sudah menggunakan penerangan listrik PLN.

Kondisi perumahan responden di Desa Peteluah Indah lebih baik dibandingkan Desa Karang Bayan karena bentuknya sudah permanen dan cukup baik untuk dikatakan sebagai rumah sehat. Empat dari lima responden kondisi rumah mereka sudah beratapkan genteng dan dindingnya sudah tembok. Tiga rumah berlantaikan semen dan satu rumah tangga berlantaikan keramik dengan luas lantai berkisar antara 35 m<sup>2</sup> sampai 60 m<sup>2</sup>. Satu rumah responden di wilayah ini cukup memprihatinkan karena atap rumah itu runtuh di terjang badai pada awal tahun 2005 dan si pemilik tidak dapat memperbaikinya sehingga sampai saat ini atap rumahnya hanya dari karung plastik, dindingnya yang masih kokoh berdiri terbuat dari batako sedangkan lantainya masih tanah sehingga luas lantai yang sementara masih bisa digunakan untuk berlindung hanya 6 m<sup>2</sup>. Jarak antara rumah penduduk yang satu dengan lainnya agak berjauhan karena dipisahkan oleh lahan pekarangan yang cukup luas tetapi bangunan rumah cukup kecil. Rumah tangga tersebut sudah mempunyai fasilitas kamar kecil/mandi sendiri tetapi untuk buang air mereka lebih suka pergi ke kali dan untuk kebutuhan air bersih mereka menggunakan air dari sumur tak terlindung. Fasilitas penerangan rumah tangga yang menjadi responden sebanyak 4 rumah tangga sudah menggunakan listrik PLN walaupun menyantol dari tetangganya, hanya satu rumah tangga yang atapnya runtuh menggunakan lampu teplok.

### **3.5. Keterangan Sosial Budaya**

Responden yang mempunyai kartu sehat di Desa Karang Bayan sebanyak tiga rumah tangga. Satu rumah tangga tidak mempunyai kartu sehat tetapi beberapa anggota rumah tangganya mempunyai fasilitas askes karena menjadi PNS dan satu rumah tangga tidak mempunyai sama sekali kartu sehat. Rumah tangga yang mempunyai kartu sehat selama satu tahun terakhir satu rumah tangga pernah menggunakan atau memanfaatkan untuk berobat ke puskesmas pada saat anaknya sakit, satu rumah tangga pernah menggunakan pada saat melahirkan anak yang terakhir di bidan desa karena mempunyai kartu sehat maka tidak dikenakan biaya atau gratis. Sedangkan rumah tangga yang lainnya selama satu tahun terakhir belum pernah menggunakan kartu sehatnya untuk berobat.

Semua responden rumah tangga di Desa Peteluah Indah tidak mempunyai kartu sehat, tetapi tiga rumah tangga memiliki kartu BLT, menurut mereka dengan kartu BLT mereka dapat berobat secara gratis sementara menunggu keluarnya kartu askeskin. Tetapi mereka belum pernah menggunakan kartu BLT tersebut sebagai fasilitas untuk berobat.

Rumah tangga responden di Desa Karang Bayan dan Peteluah Indah pernah membeli beras raskin dan menurut mereka beras raskin rutin selalu ada setiap bulan kecuali pada bulan Februari-April alasan pemda dan Kades kepada warga karena pada saat itu musim panen sehingga harga beras dipasaran cukup murah. Empat responden rumah tangga di Desa Karang Bayan setiap bulan mendapat jatah pembelian raskin hanya 4 kg dengan harga Rp.1000,- dan itu berlaku untuk semua warga, tetapi ada satu responden setiap bulan dapat membeli raskin sebanyak 10 kg dengan harga Rp. 1.000,- per kg. Kejadian yang sama juga terjadi di Desa Peteluah Indah, dimana semua responden rumah tangga mendapat jatah membeli raskin 4 kg setiap bulan dengan harga Rp. 1.000,- per kg. Raskin tidak hanya diperuntukkan untuk warga yang kurang mampu tapi semua warga dapat membelinya untuk itu dibagi rata sehingga jatah untuk semua warga dapat membeli sebanyak 4 kg saja.

Satu rumah tangga di Desa Karang Bayan menyatakan taraf hidup keluarganya saat ini memburuk dibandingkan 3 tahun yang lalu. Alasannya karena usaha istrinya sebagai pedagang sayuran saat ini sering tidak laku. Sebaliknya dua rumah tangga menyatakan membaik, keluarga Pak Wira Bakti dengan alasan anak-anaknya sudah bekerja semua sehingga meringankan beban orang tua dan keluarga Pak Nopian dengan alasan karena sekarang istrinya membantu bekerja dengan membuka warung sehingga dapat menambah penghasilan keluarga. Sedangkan dua rumah tangga menganggap sama saja keadaannya dengan tiga tahun yang lalu, dengan alasan karena pendapatan mereka meningkat namun pengeluaran juga meningkat. Selama 3 tahun terakhir sudah banyak pembangunan yang dilakukan antara lain jalan-jalan di pemukiman yang sebelumnya tanah sudah mengalami pengerasan dengan cara disemen, untuk air bersih warga tidak perlu berjalan jauh lagi ke pusat mata air karena sekarang sudah dibangun bak-bak penampungan air yang digerakkan oleh pompa weslik di setiap dusun ada sekitar 3 buah untuk setiap dusun. Kantor desa sudah dibangun dan cukup luas walaupun untuk listrik belum ada, sehingga setiap kegiatan harus dilakukan dari pagi hari sampai sore hari saja. Lingkungan desa relatif aman. Namun pembangunan fisik desanya tidak berpengaruh pada kualitas hidup penduduknya. Dari dulu sampai sekarang sama saja. Hal ini disebabkan dari masyarakatnya sendiri yang tidak mau maju karena pendidikan penduduk masih rendah dan masih kental dengan kehidupan agama dan adat istiadat yang kuat.

Informasi dari dua rumah tangga yang tinggal di Desa Peteluah Indah menyatakan taraf hidupnya sama saja dibandingkan 3 tahun yang lalu, karena walaupun pendapatan suami meningkat tetapi diimbangi harga kebutuhan pokok juga naik sehingga tidak berpengaruh, dua rumah tangga menyatakan taraf hidupnya meningkat dibandingkan 3 tahun lalu disebabkan karena mempunyai usaha sampingan sebagai tukang ojek dengan motor milik sendiri dan yang lainnya memiliki usaha sebagai pedagang buah. Satu rumah tangga menyatakan semakin menurun, hal ini berkaitan dengan penghasilannya sebagai buruh di pembudidayaan ikan tidak mengalami peningkatan dan tidak mempunyai pekerjaan tambahan sedangkan harga barang-barang terus naik. Mengenai pembangunan di desa ini, rata-rata responden menyatakan meningkat. Selama 3 tahun terakhir sudah

banyak terjadi perubahan. Desanya semakin ramai karena pembangunan jalan yang menghubungkan dusun yang satu dengan yang lainnya dan mulai ada penerangan jalan walaupun belum semuanya sehingga membuat desa ini semakin ramai. Irigasi dan drainase sudah bagus. Lingkungan desa relatif aman.

### **3.6. Fasilitas Pedesaan**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari rumah tangga yang menjadi responden bahwa untuk fasilitas pendidikan yang ada di Desa Karang Bayan hanya SD yang jaraknya cukup dekat dengan pemukiman penduduk dapat ditempuh dengan jalan kaki, dimana jarak dari rumah ke bangunan SD yang terdekat sekitar 500 meter. Tetapi untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA ada di Desa Lingsar yang harus ditempuh dengan berjalan kaki dahulu sekitar 500 meter ke tempat/jalan yang dilalui oleh kendaraan umum dan dari jalan tersebut jaraknya sekitar 4 km. Untuk berobat warga biasanya pergi ke pusku atau polindes yang letaknya dekat dengan kantor desa. Warga juga aktif membawa anaknya ke posyandu yang diadakan setiap tanggal 15 untuk menimbang bayi/balita, imunisasi dan menerima makanan tambahan untuk bayi dan balita serta pemeriksaan kehamilan. Dalam setiap kegiatan posyandu selalu hadir bidan desa dan perawat dari puskesmas kecamatan. Fasilitas lain yang ada di desa adalah pasar tidak permanen atau pasar darurat, masjid, musholla dan toko yang letaknya dekat dengan rumah warga dapat ditempuh dengan jalan kaki, sedangkan kantor pos keliling ada di kantor desa seminggu sekali tiap hari Selasa jaraknya dari rumah penduduk sekitar 1,5 km.

Kondisi di Desa Peteluah Indah sama dengan di Desa Karang Bayan, dimana untuk anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang SMP dan SMA harus keluar desa yang terdekat adalah ke desa Lingsar yang jaraknya sekitar 2 km dari desa Peteluah Indah. SMA di Desa Lingsar baru ada 3 tahun lalu sebelumnya untuk melanjutkan SMA harus ke Kota Mataram. Fasilitas Kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh warga adalah puskesmas kecamatan yang jaraknya sekitar 1,5 km dari pemukiman penduduk, pusku dan posyandu jaraknya sekitar 200 meter. Kegiatan posyandu dilakukan setiap tanggal 13 selalu dihadiri oleh dokter puskesmas, perawat dan bidan desa, yang dilakukan dalam setiap kegiatan antara lain penimbangan, imunisasi, pemeriksaan KB dan ibu hamil, pemberian makanan tambahan (biskuit dan susu). Selain itu juga selalu ada peragaan resep untuk membuat makanan pendamping untuk bayi dan balita.

Fasilitas pasar di desa ini tidak ada tetapi ada warung sayur atau tukang sayur keliling sehingga penduduk dapat berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari di warung dan tukang sayur. Masjid dan musholla ada dan letaknya dekat dengan pemukiman penduduk sekitar 100 meter, kantor pos keliling ada di kantor desa seminggu dua kali (Selasa dan Jumat). Jarak pemukiman penduduk dengan kantor desa sekitar 1,5 km.

### **3.7. Lain-lain**

Responden rumah tangga di Desa Karang Bayan yang mempunyai balita selalu membawa anaknya pada saat PIN untuk mendapatkan imunisasi polio bahkan pada

tahun 2005 setiap anak balita di imunisasi polio sampai 5 kali dalam setahun. Informasi dari ibu balita menyatakan bahwa anaknya telah mendapatkan imunisasi lengkap dan lama balita tersebut diberi air susu ibu (ASI) ada yang sampai umur 1 tahun ada juga yang sampai umur 2,5 tahun. Tetapi untuk ASI eksklusif rata-rata hanya sampai umur bayi 2 bulan saja setelah itu bayi mereka sudah diberi makan pisang dan jarang ibu memberikan susu bubuk atau susu kaleng kepada bayinya jika ada uang lebih dan dapat membeli baru sang bayi dapat minum susu bubuk. Namun setelah bayi mereka tidak disusui lagi maka otomatis bayi/balita tersebut tidak minum susu lagi sampai saat ini, minum susu hanya saat diberikan di posyandu saja yaitu MP-ASI.

Dua rumah tangga yang menjadi responden di Desa Peteluah Indah mempunyai anak balita selalu mengikuti Pekan Imunisasi Nasional (PIN), dimana pada tahun 2005 dalam setahun sampai 5 kali dan tidak pernah ada keluhan. Satu orang anak balita lama diberi ASI sampai usia 2 tahun sedang satu balita lagi lama diberi ASI hanya 5 bulan saja karena ASI sang ibu tidak keluar. Balita yang minum ASI saja atau ASI eksklusif lamanya hanya 3 bulan dan 5 bulan saja setelah itu si bayi sudah diberi susu bubuk dan makanan seperti bubur dan buah pisang. Responden keluarga Pak Rukiman anak balitanya pernah mendapat susu MP-ASI dan biskuit dari posyandu dan puskesmas. Sedangkan Bapak Irman anak Balitanya tidak pernah mendapatkan MP-ASI atau biskuit.

Keterangan dari responden rumah tangga di kedua desa tersebut tidak ada anaknya yang menjadi pekerja anak. Beberapa keluarga yang anaknya putus sekolah, kegiatan anaknya saat ini dalam mengisi waktu luang hanya bermain atau anak laki-laki biasanya membantu orang tuanya disawah atau di kebun dan anak perempuan melakukan pekerjaan rumah dan membantu ibunya di rumah saja. Saat ini sedang musim buah dan sudah waktunya petik seperti buah mangga dan nangka sebentar lagi akan musim rambutan dan durian, rumah tangga responden yang bekerja sebagai buruh petik banyak dibantu oleh anak laki-laki yang sudah tidak bersekolah lagi.

## Kecamatan Somba Opu - Gowa - Sulawesi Selatan

### Pendahuluan

Propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari lima propinsi yang dipilih secara purposive untuk dilakukan studi kualitatif tentang Identifikasi Desa Tertinggal. Dan dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan jarak yang terdekat dengan ibukota propinsi, yaitu Kota Makassar. Dan dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, dipilih kecamatan yang juga dilakukan secara purposive, yaitu Kecamatan Somba Opu. Dan dari Kecamatan Somba Opu akan ditentukan 2 kelurahan/desa secara purposive berdasarkan penghitungan Indeks Komposit Potensi Desa (Podes) Hasil Sensus Pertanian 1993, tetapi tidak menutup kemungkinan bila di tingkat kecamatan memilih kelurahan/desa sesuai kondisi lapangan yang terbaru.

### 1. Gambaran Kecamatan Somba Opu

#### 1.1 Wilayah Geografis

Kecamatan Somba Opu berbatasan dengan Kota Makassar di sebelah Utara dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pallangga dan Kabupaten Takalar. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pallangga dan Kota Makassar dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu.

Kecamatan Somba Opu mempunyai luas 28,09 km<sup>2</sup> atau hanya 1,49 persen dari luas Kabupaten Gowa, dengan sebagian besar berada di dataran rendah. Kecamatan Somba Opu ini merupakan kecamatan terkecil luasnya dibandingkan dengan 8 kecamatan lainnya.

#### 1.2 Perkembangan Kelurahan/Desa

Kecamatan Somba Opu sebelum tahun 1997 membawahi 4 desa. Dan sejak tahun 1997 sudah menjadi 14 desa karena terjadi pemekaran wilayah, dan saat ini ke empat belas desa tersebut sudah berubah status menjadi kelurahan. Salah satu kelurahan yang menjadi tempat penelitian studi kualitatif ini adalah Kelurahan Samata yang sebelum terjadi pemekaran Samata adalah merupakan desa induk. Sementara tempat kedua yang menjadi tempat penelitian adalah Kelurahan Mawang yang merupakan hasil dari pemekaran desa.

#### 1.3 Klasifikasi Desa Tertinggal

Berdasarkan Hasil Penghitungan Indeks Komposit Podes ST 1993, kelurahan/desa yang terpilih adalah kelurahan/desa yang mempunyai Indeks terkecil, sehingga dari hasil perhitungan terpilih Kelurahan Samata dan Kelurahan Tamarunang, keduanya merupakan desa dengan klasifikasi swadaya, yaitu desa yang masih terikat oleh tradisi

karena taraf pendidikannya relatif rendah, produksi diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga dan komunikasi keluar sangat terbatas. Sementara kelurahan/desa yang lainnya sudah berstatus swasembada yaitu desa yang lebih maju, tidak terikat lagi oleh adat istiadat yang ketat.

Tetapi berdasarkan kriteria dari pihak Kecamatan Somba Opu, kriteria utama dalam menentukan kelurahan/desa tertinggal adalah salah satunya banyaknya penduduk miskin di wilayah tersebut dan letak pemukiman penduduk yang terpelosok, jauh dari jalan raya, serta letak kelurahan/desa yang jauh dari ibukota kecamatan, sehingga akses untuk mencapai ke tempat-tempat fasilitas umum masyarakat sangat sulit.

Maka dari penggabungan dua kriteria desa tertinggal ini, terpilihlah Kelurahan Samata dan Kelurahan Mawang sebagai wilayah untuk dilakukan studi kualitatif.

### **1.4 Program Peningkatan Kesejahteraan Penduduk**

Berdasarkan pengakuan pejabat kecamatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Indra selaku Sekretaris Camat, ada dua program yang sudah dilakukan, yaitu pembentukan Puskesmas Pembantu (Pustu), sehingga di setiap kelurahan sudah ada pustu. Dan program yang kedua adalah diadakannya SPASS (Sanggar Pendidikan Anak Soleh) berupa TPA dan TKA yang diadakan secara gratis bagi penduduk miskin. Program Spass ini adalah program dari Bupati. Diharapkan dengan diadakannya Pustu dan Spass, minimal masyarakat miskin dapat teratasi masalah kesehatan dan pendidikannya, walau masih dalam taraf yang sangat minim.

Program lain yang sudah dilakukan pemerintah setempat dalam bidang pembangunan untuk memajukan Kecamatan Somba Opu adalah pembuatan *ring road* sepanjang lebih kurang 30 kilometer dengan lebar jalan 2 meter, yang menghubungkan antara Samata dengan Kota Makassar, sehingga bila hendak menuju ke Makassar tidak perlu melalui ibukota kabupaten, Sungguminasa lagi. Jalan ini merupakan jalan pintas yang sengaja dibuat oleh pemerintah setempat guna mempermudah masyarakat untuk menuju ke Makassar.

## **2. Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Tertinggal**

### **2.1 Wilayah Geografis**

Kelurahan Samata berbatasan dengan Kota Makassar di sebelah Utara, Kelurahan Ronang Polong di sebelah Selatan, Kelurahan Romang Polong di sebelah Selatan dan Kelurahan Tombolo di sebelah Barat. Kelurahan Samata ini termasuk dalam klasifikasi desa swadaya dengan luas wilayah 4 311 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 2 lingkungan 7 RW dan 16 RT. Secara umum, gambaran di Kelurahan Samata dapat dikatakan cukup baik dan sudah tergolong maju walaupun melalui hasil ST 1993 tergolong desa tertinggal. Namun seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan pembangunan, kelurahan ini sudah banyak mengalami kemajuan. Hal ini juga dikarenakan lokasi Kelurahan Samata

yang dekat dengan Sungguminasa, ibukota Kabupaten Gowa, sehingga akses masyarakat ke beberapa fasilitas desa sangat mudah dijangkau.

Namun demikian, masih ada satu kelompok masyarakat (25 KK), yang masih belum tersentuh oleh pembangunan, belum ada listrik dan hidup terisolir dari penduduk yang lain, letaknya dikelilingi oleh sawah, sehingga akses untuk menuju ke lokasi tersebut sangat sulit, selain panas karena gersang dan tandus, juga harus melewati genangan air dan lumpur setinggi lutut. Karena kondisi inilah, maka hingga jaman era globalisasi ini, sekelompok masyarakat yang terisolir tersebut belum tersentuh pembangunan listrik masuk desa. Ironis sekali, mengingat Kelurahan Samata ini adalah kelurahan yang terdekat dengan ibukota kabupaten. Anak-anak usia sekolah yang tinggal di lingkungan tersebut banyak yang tidak bersekolah dan bayi/balita sulit untuk berobat ke posyandu/pustu.

Sementara Kelurahan Mawang secara geografis berbatasan dengan Kelurahan Romang Polong di sebelah Utara, Kelurahan Borong Loe di sebelah Selatan, serta Kelurahan Bontoramba di sebelah Barat dan Kelurahan Borongloe di sebelah Timur. Berdasarkan pengakuan pejabat setempat, kelurahan ini termasuk dalam klasifikasi desa swasembada, namun pernyataan ini tidak sesuai dengan kondisi Kelurahan Mawang yang tidak lebih maju dibandingkan dengan Kelurahan Samata, bahkan dapat dianggap lebih terbelakang. Sementara Samata masih tergolong dalam desa swadaya.

Luas Kelurahan Mawang lebih kecil dibandingkan dengan Samata, yaitu hanya 199,5 km<sup>2</sup>. Dan membawahi 2 lingkungan, dengan 4 RW dan 14 RT. Seperti halnya Samata, Mawang tidak memiliki potensi utama/sumber daya alam yang dapat menghasilkan bagi masyarakat setempat.

## **2.2 Kependudukan**

Banyaknya penduduk di Samata 3.638 jiwa, yang terdiri dari 1.801 laki-laki dan 1.837 perempuan, dengan jumlah rumah tangga 696. Bila dilihat dari wanita yang menikah muda (di bawah usia 16 tahun) selama setahun terakhir, di kelurahan tidak ada. Rata-rata wanita menikah di kelurahan ini berkisar antara 18 hingga 20 tahun. Dan jika dilihat penduduk berdasarkan kelompok umur, maka usia produktif (15-64 tahun) lebih mendominasi dibandingkan dengan kelompok usia anak (0-14 tahun) dan kelompok lansia (65+ tahun), yaitu ada sekitar lebih dari 50 persen.

Sementara banyaknya penduduk di Kelurahan Mawang sebesar 2.896 jiwa, yang tidak dapat dirinci berdasarkan jenis kelamin, karena registrasinya yang kurang lengkap dibandingkan dengan di Samata, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 488. Untuk wanita yang menikah di usia muda, sama dengan Samata, hampir dapat dikatakan nol persen karena dalam setahun terakhir hanya terjadi pada satu orang wanita. Sedangkan banyak penduduk berdasarkan kelompok umur, usia produktif masih lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang lain, hanya pihak kelurahan tidak dapat memperkirakan besarnya dalam persentase.

### **2.3 Ketenagakerjaan**

Dari aspek ketenagakerjaan, mayoritas penduduk Kelurahan Samata memiliki mata pencaharian di sektor pertanian di wilayahnya sendiri, tidak menggarap lahan sawah di kelurahan/desa lain, yaitu sekitar 60 persen dari penduduk yang bekerja. Sisanya bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Makassar, sehingga tingkat mobilitas kerja bagi pekerja buruh bangunan sangat tinggi, karena sebagian besar dilakukan di kota. Walaupun sebagian penduduk bekerja di pertanian dan di bangunan, namun tingkat pengangguran di Kelurahan Samata tergolong cukup tinggi, banyak penduduk usia produktif yang terpaksa harus menganggur karena belum adanya kesempatan kerja, baik di desanya maupun di kota. Sementara ada sekitar 30 persen dari anak usia sekolah yang menyambi bekerja sebagai pekerja anak di sektor perdagangan atau sektor jasa. Mereka bekerja di luar jam-jam sekolah, pagi hari atau siang hari sepulang sekolah.

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di Kelurahan Mawang. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan bangunan, hanya tingkat mobilitas kerja di Mawang sangat rendah karena kebanyakan dari mereka bekerja di desa mereka sendiri, jarang yang bekerja di kota atau di kelurahan/desa lain. Hal ini kemungkinan dikarenakan jarak tempuh yang lumayan jauh, sehingga jika mereka harus bekerja keluar desanya, akan membutuhkan transport dan uang makan yang cukup besar. Sementara pekerja anak juga sekitar 30 persen dari seluruh anak usia sekolah, tetapi kebanyakan mereka bekerja di sawah membantu orang tuanya.

### **2.4 Pendidikan**

Walaupun Kelurahan Samata tidak terlalu banyak memiliki sekolah, namun karena jarak ke ibukota kabupaten sangat dekat, maka akses untuk sekolah sangat mudah dijangkau oleh penduduk. Sekolah yang berada di wilayah Kelurahan Samata adalah, Sekolah Dasar (SD) 2 buah yang sudah ada sejak tahun 1960 dan sampai sekarang masih dalam kondisi fisik yang layak pakai dan hanya berjarak 500 meter dari kantor kelurahan. Dan sebuah Yayasan Sosial yang memiliki sebuah Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan sebuah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang baru 2 tahun yang lalu berdiri, yang juga hanya berjarak sekitar 300-400 meter dari kantor lurah.

Berdasarkan keterangan pihak kelurahan, penduduk yang buta huruf ada sekitar 10 persen, dan itupun sudah usia tua. Namun demikian tetap diadakan Program Pemberantasan Buta Huruf Paket B yang sudah dimulai sejak tahun 2003. Tentang angka putus sekolah, secara tepatnya pihak kelurahan tidak dapat memberikan data yang akurat, namun gambaran mereka, kebanyakan anak-anak yang putus sekolah adalah sampai tingkat sekolah dasar.

Lain halnya dengan keadaan pendidikan di Kelurahan Mawang. Kelurahan ini hanya mempunyai satu TK dan satu SD yang jaraknya sekitar 300 meter dari kantor lurah. Sekolah ini sudah cukup lama berdiri, lebih dari 5 tahun, baru mengalami renovasi

hanya belum memiliki pagar. Namun demikian belum dapat menampung seluruh anak usia sekolah dasar untuk bersekolah di situ, sehingga banyak anak-anak yang sekolah di kelurahan lain dengan menggunakan transportasi bagi yang mampu dan bagi yang kurang mampu terpaksa harus putus sekolah. Sehingga tidak mengherankan jika penduduk yang buta huruf di Kelurahan Mawang ini hingga mencapai sekitar 70 persen. Maka untuk memperkecil penduduk yang buta huruf, maka diadakanlah Program Pemberantasan Buta Huruf yang dilakukan oleh Dinas Sosial, agar dapat melibatkan banyak ibu, maka mereka menggunakan pendekatan dengan cara memasak. Bahan-bahan yang digunakan untuk memasak kemudian mereka perkenalkan dengan huruf, untuk memudahkan mereka mengingat dan semakin semangat untuk belajar. Program ini sudah berjalan 3 bulan, dengan dibantu oleh aparat kelurahan setempat. Selain itu ada pula Program TK Padu bagi anak-anak putus sekolah yang belum bisa membaca dan menulis, sudah berjalan selama 6 bulan.

## **2.5 Kesehatan**

Di bidang kesehatan, Samata hanya mempunyai satu Pustu dan satu Toko Obat yang jaraknya hanya sekitar 700 meter dari kantor lurah dan keberadaannya sudah ada lebih dari 3 tahun yang lalu. Selain Pustu dan Toko Obat, sarana kesehatan yang ada di Samata adalah posyandu. Di sini terdapat 4 posyandu, tetapi yang aktif hanya 2 buah, sementara yang 1 kadang aktif kadang tidak, karena tidak mempunyai peralatan yang lengkap. Posyandu yang terdekat hanya berjarak 100 meter dari kelurahan. Dan agar bidan dapat hadir di kedua posyandu, maka kegiatan di posyandu dilakukan pada tanggal yang berbeda, yaitu setiap tanggal 8 dan 10 setiap bulannya. Kegiatan kedua posyandu ini termasuk aktif, selain melakukan penimbangan bayi/balita, juga memberikan vitamin A dan imunisasi, termasuk PIN program pemerintah yang baru lalu. Untuk menunjang keberhasilan PIN, para kader posyandu aktif berkeliling untuk mengajak para ibu untuk membawa anaknya ke posyandu untuk mendapatkan PIN. Selain itu peran Pustu juga tidak kalah penting, mereka melakukan program pengkaderan kepada ibu-ibu PKK agar mampu berperan aktif untuk meningkatkan program pelayanan bagi masyarakat melalui posyandu-posyandu.

Selain sarana kesehatan, prasarana kesehatan juga tidak kalah pentingnya. Di Kelurahan Samata ini, ada 5 orang dokter, seorang bidan dan 2 orang mantri kesehatan. Namun demikian dalam setahun terakhir di kelurahan ini telah terjadi satu kali kematian bayi lahir prematur (kembar) dan 6 orang bayi/balita dengan status gizi kurang dan gizi buruk, namun berkat kerja keras para kader posyandu dengan dibantu dengan Ibu Sukinah selaku bidan desa, maka dalam waktu 3 bulan, 6 orang bayi/balita ini sudah kembali normal hingga mencapai status gizi baik. Sementara itu, jika dilihat dari program Keluarga Berencana (KB), banyak pasangan usia subur yang sudah menjadi akseptor KB, yaitu sekitar 60 persen. Dan mayoritas mereka memilih suntik.

Lain halnya dengan keadaan sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Mawang. Di Mawang belum terdapat satupun fasilitas kesehatan kecuali hanya ada 3 posyandu dan seorang bidan namun tinggal di Kelurahan Tombolo. Sehingga bila

masyarakat memerlukan pengobatan, mereka berobat ke posyandu (jika kebetulan ada bidan sedang bertugas) atau terpaksa ke puskesmas yang berada di Kelurahan Samata atau di Kecamatan Somba Opu yang berjarak sekitar 6 kilometer. Sehingga aktivitas di posyandu tidak hanya melayani bayi/balita saja, melainkan juga melakukan pemeriksaan khususnya untuk lansia, seperti pemeriksaan tekanan darah, berat badan dan juga pemberian vitamin lansia.

Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan ini menyebabkan setahun terakhir terjadi adanya kematian bayi dalam kandungan usia 7 bulan karena tidak terdeteksi sebelumnya oleh bidan, sehingga terlambat untuk ditangani. Dan tidak lama berselang, ibu dari anak tersebut juga meninggal dunia karena kekurangan vitamin. Selain itu, di Mawang juga sempat terjadi bayi/balita dengan status gizi buruk, namun tidak sampai busung lapar dan kemudian dapat diatasi hingga normal kembali.

Sementara banyaknya akseptor KB tidak dapat diperkirakan berapa persen, hanya mayoritas menggunakan suntik dan pil.

### **2.6 Sarana/Prasarana/Infrastruktur**

Mayoritas rumah penduduk Samata sudah menerima aliran listrik, hanya ada sekelompok masyarakat yang terisolir yang belum mendapatkan listrik. Mereka hidup terpisah dari komunitas penduduk. Tepatnya lokasi mereka berada di Lingkungan Borong Raukang Kampung Rapo Ciduk RW 06 RT 01, ada sebanyak 25 KK.

Sarana lain yang terdapat di Samata adalah mesjid ada 8 buah, yang paling dekat dengan kelurahan jaraknya sekitar 1 km. Sebuah kantor pos pembantu, sudah ada lebih dari 3 tahun yang lalu. Dua buah wartel yang baru ada pada tahun 2005, jaraknya 500 meter dari kantor lurah. Dan beberapa buah warung kecil. Sementara kelurahan ini belum memiliki fasilitas sarana olah raga, bioskop, pasar, KUD dan Bank. Sehingga jika masyarakat perlu berbelanja atau melakukan kegiatan di KUD, maka harus menempuh jarak sekitar 6-7 km, karena pasar/KUD tersebut ada di Sungguminasa, ibukota Kabupaten Gowa.

Sementara di Kelurahan Mawang, walaupun letaknya agak lebih jauh dari kota dibandingkan dengan Kelurahan Samata, namun seluruh penduduk Mawang sudah dapat menikmati fasilitas listrik, sekalipun penduduk yang rumahnya di pelosok mendapatkannya dari menyantol di tiang listrik. Sarana yang ada lainnya adalah mesjid 6 buah, yang terdekat berjarak hanya 100 meter, dan keberadaannya sudah ada lebih dari 3 tahun yang lalu. Tiga buah wartel, baru ada pada awal tahun 2006, salah satunya berada di depan kelurahan. Dan beberapa warung-warung kecil. Sama halnya dengan Samata, bila masyarakat akan berbelanja maka mereka harus ke pasar di Sungguminasa.

Alat transportasi yang mereka gunakan, baik di Samata maupun di Mawang selain ojek motor adalah angkutan umum, yang biasa mereka sebut "petek-petek". Dan fasilitas air minum penduduk adalah berasal dari air sumur. Sedangkan tempat buang

air 65 persen sudah menggunakan jamban sendiri dengan leher angsa. Dan tempat pembuangan sampah dengan dibakar di halaman rumah mereka masing-masing.

## 2.7 Sosial Budaya/Partisipasi

Sekalipun masyarakat Samata seluruhnya sudah menikmati listrik, namun masih ada sekitar 30 persen penduduknya yang belum mempunyai televisi, sehingga mereka hanya menikmati hiburan dari siaran radio. Demikian pula halnya dengan penduduk Mawang masih banyak yang belum memiliki televisi.

Dari tingkat keamanan wilayah, Samata memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi karena berada di perbatasan Makassar, sehingga selama 2 tahun terakhir telah terjadi 3 sampai 4 tindak kriminalitas, walaupun ada kegiatan siskamling, bahkan di Samata mempunyai 10 pos ronda, tetapi hanya 5 yang aktif. Namun demikian dapat segera diatasi karena jarak 1 km dari kantor lurah ada pos polisi pembantu, sementara jarak ke Polsek sekitar 6 km. Di Mawang karena bukan berada di perbatasan kota, maka dapat dikatakan aman, walai hanya ada Babinsa dan siskamling.

Kegiatan karang taruna dan pelaksanaan kursus-kursus di Samata dapat dikatakan cukup aktif, karena mereka memiliki kepengurusan yang lengkap dan didukung dengan jajaran aparat kelurahan yang senior, sehingga walau Pak Zubair baru sebulan menduduki jabatan sebagai Lurah Samata, namun kegiatan-kegiatan seperti olah raga dan pengajian bagi karang taruna selalu ada. Juga kegiatan untuk kaum ibu seperti kursus rias pengantin dan kegiatan sosial lainnya sering dilakukan, walaupun terkadang tidak dilakukan di kantor lurah, melainkan dilakukan di kantor Camat Somba Opu atau bahkan di kantor Bupati Gowa.

Sementara di Kelurahan Mawang, hal semacam ini belum terlihat, karena banyak aparat kelurahan yang masih baru, hanya sekitar 3 orang staf honor yang sudah mengabdikan lama, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial budaya belum terlihat. Mengingat letak Kelurahan Mawang yang agak terpelosok.

## 2.8 Lain-lain

Kebijakan dan upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat di Samata adalah akan dibangunnya menara mesjid yang memerlukan dana ratusan juta, namun menurut pengakuan pejabat kelurahan, dana tersebut sudah ditanggung oleh seorang pengusaha yang tidak mau disebut namanya. Selain itu, melalui LKMD dan beberapa donatur tidak tetap, akan dibuat gorong-gorong dan lampu jalan serta beberapa pos ronda dan jembatan. Partisipasi warga dalam pembangunan di wilayahnya sangat besar, hal ini dapat dibuktikan pada saat pembangunan *ring road* Samata ke Makassar, warga menyambut dengan positif dan berperan aktif dalam membantu mewujudkan jalan tembus ini. Namun demikian ada beberapa kendala pada saat pembebasan tanah untuk pembuatan jalan, ada seorang warga yang tidak mau membebaskan tanahnya dan banyaknya campur tangan "para pejabat tinggi", sehingga karena beberapa rumah warga

masih mempunyai hubungan famili dengan para pejabat atau ada tanah milik pejabat di daerah tersebut, maka terpaksa pembuatan jalan yang seharusnya dibuat lurus, jadi berbelok ke kanan/kiri karena tidak boleh mengganggu tanah/rumah milik "pejabat tinggi". Selain program dari pemerintah setempat, mereka juga mendapatkan bantuan Raskin dan JPS dari pemerintah pusat.

Program yang dilakukan di Mawang juga tidak berbeda dengan di Samata. Pemasangan lampu jalan, perbaikan gorong-gorong dan perbaikan lorong merupakan program kerja yang akan dan sedang dilakukan, karena baru terealisasi pemasangan lampu jalan di sebagian tempat saja. Dalam mewujudkan program-program pembangunan ini, tidak ada dana dari pengusaha/donatur khusus, melainkan hanya diperoleh dari Alokasi Dana Kecamatan yang diterima setiap tahun. Kelurahan Mawang juga menerima bantuan JPS dan Raskin, namun pembagian Raskin masih kurang dan belum menjangkau keseluruhan penduduk miskin, karena menurut beberapa pengakuan informan, para perangkat desa dan pejabat setempat (sampai tingkat RT) serta para petugas yang membagikan Raskin juga mendapat jatah Raskin, sehingga yang seharusnya warga mendapat 10 kg per KK, terpaksa hanya mendapat 5 kg per KK, bahkan ada warga mendapatkan Raskin 2 bulan sekali karena digilir.

### **3. Gambaran Rumah Tangga Desa Tertinggal**

Studi ini dilakukan hingga ke tingkat rumah tangga, sehingga dari setiap kelurahan akan dipilih 5 rumah tangga juga secara purposiv, dengan mempertimbangan kondisi di lapangan dan memilih rumah tangga yang mempunyai kasus gizi kurang/busung lapar dan rumah tangga yang memiliki pekerja anak, serta dipilih salah satu rumah tangga pejabat setempat (RT/RW atau pengurus posyandu).

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dan dengan dibantu oleh 2 orang aparat kelurahan, maka khusus di Kelurahan Samata diputuskan untuk memilih beberapa rumah tangga miskin yang terdapat di daerah yang terisolir, yang belum mendapatkan listrik, yaitu di Lingkungan Borong Raukang Kampung Rapo Ciduk RT 01 RW 06.

Adapun jalan menuju lokasi tersebut sangat gersang dan kering, panas matahari terasa sangat menyengat, kondisi jalan masih tanah dan berbatu, dapat dilalui oleh kendaraan roda empat tetapi jalan terlalu sempit, dan bila dilalui oleh kendaraan roda duapun hanya sampai di ujung jembatan. Karena selepas jembatan terbentang hamparan sawah dan genangan lumpur yang setinggi lutut. Melihat kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk dilalui, maka diputuskan untuk memilih rumah tangga yang berada di pinggir jembatan saja, yang kondisinya juga sangat jauh di bawah rata-rata.

Sementara rumah tangga yang terpilih di Kelurahan Mawang adalah rumah tangga yang letaknya di pinggir kali, jauh dari jalan utama, namun masih banyak pepohonan, sehingga walaupun harus ditempuh dengan berjalan kaki, karena tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda dua, tidak terasa panas dan gersang.

### 3.1 Keterangan Rumah Tangga

Kelima rumah tangga yang terpilih di Samata, salah satunya adalah rumah tangga Wakil Ketua RT. Yang menjadi responden seluruhnya adalah kepala rumah tangga yang kemudian didampingi oleh istrinya. Umur kepala rumah tangga berkisar antara 21 tahun hingga 42 tahun, dengan banyaknya anggota rumah tangga 4 sampai 8 orang. Dan dari 5 rumah tangga, 3 diantaranya mempunyai bayi/balita, dan semuanya masih mempunyai ART yang masih sekolah, tetapi salah satu dari 3 rumah tangga tersebut anaknya terpaksa harus putus sekolah karena orang tua sakit sehingga sudah tidak bekerja lagi, dan tidak mampu untuk menghidupi keluarganya, apalagi untuk membeli buku-buku dan seragam sekolah. Karena kondisi ini, maka mereka terpaksa menjual hasil pertanian yang seharusnya untuk dikonsumsi sendiri. Sementara 2 rumah tangga yang lain memiliki pekerja anak usia 7 hingga 12 tahun. Di wilayah ini kebanyakan anak-anak bekerja di tempat pemotongan hewan di bagian yang memilah-milah isi perut hewan dan kemudian dibersihkan. Rata-rata mereka bekerja dari jam 2 dini hari hingga jam 6 pagi. Akibatnya, salah seorang anak yang masih duduk di kelas III SD terpaksa harus dirawat di Rumah Sakit karena sakit Thypus.

Sementara di Kelurahan Mawang umur kepala rumah tangga yang menjadi responden berkisar dari 23 tahun hingga 45 tahun, dengan salah satunya adalah Ketua RT 05/RW 04. Banyaknya anggota rumah tangga juga tidak berbeda dengan di Samata, yaitu 4 hingga 7 orang. Semua rumah tangga masih mempunyai anak usia sekolah dan bayi/balita, kecuali rumah tangga bapak ketua RT karena semua anaknya sudah Tamat SMK tetapi belum ada yang bekerja, hanya 1 orang yang bekerja di sawah. Dua rumah tangga memiliki pekerja anak dan 1 rumah tangga memiliki anak yang putus sekolah karena orang tuanya sakit, sehingga terlambat mendaftar sekolah.

### 3.2 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rata-rata rumah tangga per minggu yang digunakan untuk makan di Kelurahan Samata berkisar antara Rp 118.300,- hingga ada yang mencapai Rp 301.000,- tergantung dari banyaknya anggota rumah tangga (ART). Semakin banyak ART nya, maka makin banyak pengeluarannya, walaupun besarnya pengeluaran tersebut sudah termasuk dari beras/sayuran yang berasal dari hasil panen sendiri.

Harga beras di wilayah tersebut cukup tinggi, yaitu sekitar Rp 3.000,- per liter, sehingga bila dari hasil kerja mereka sebagai buruh tani, mereka dibayar dengan menggunakan beras/gabah sebanyak 3 karung, maka mereka dapat gunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari, yang walaupun tidak menutup kemungkinan dapat dijual sewaktu-waktu bila mereka tidak mempunyai uang. Demikian juga dengan sayuran, seperti bayam, kangkung dan daun singkong serta buah pepaya, dapat mereka petik dari kebun mereka sendiri atau dari tetangga/famili di sekitar. Sedangkan untuk lauk pauknya, kebanyakan dari mereka mengkonsumsi ikan cuek (ikan yang sudah diawetkan) seharga Rp 5.000,- dan telur ayam sebutir untuk sehari. Ikan cuek untuk dikonsumsi

anak-anak tetapi telur ayam hanya khusus untuk balita karena tidak ada bayi/balita yang diberi susu formula oleh orang tuanya selain daripada ASI. Kondisi ini hampir sama dilakukan oleh kelima rumah tangga yang terpilih studi ini. Walau mereka makan 3 kali dalam sehari, namun tidak ada variasi makanan, karena keterbatasan uang yang mereka miliki dan mahalnya harga-harga bahan makanan serta jauhnya jarak tempat tinggal dengan pasar tradisional, sehingga mereka hanya dapat berbelanja dari tukang sayur keliling. Tetapi walaupun kondisi mereka sangat pas-pasan, namun bagi anak usia sekolah tetap mempunyai jatah uang saku untuk jajan sebesar Rp 2.000,- hingga Rp 3.000,- per hari dan rokok untuk kepala rumah tangga sebesar Rp 5.000,- hingga Rp 10.000,- per harinya.

Selain pengeluaran untuk makanan, pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan non makanan di Kelurahan Samata ini berkisar dari Rp 113.400,- hingga Rp 237.800,-. Uang ini hanya untuk membeli minyak tanah (Rp 2.700,- per liter per hari), sabun mandi, sabun cuci, odol, shampo dan membayar listrik ke rumah tangga yang memberi listrik dengan cara nyantol sekitar Rp 10.000,- hingga Rp 30.000,- per bulannya. Bahkan seorang responden yang anaknya dirawat di rumah sakit karena thypus terpaksa harus mengeluarkan uang ekstra untuk membayar perawatan di rumah sakit sebesar Rp 400.000,- dan transport untuk pergi pulang ke rumah sakit sebesar Rp 300.000,-. Uang ini didapat dari hasil pinjaman dari majikan di tempat KRT bekerja sebagai satpam.

Sementara rata-rata pengeluaran rumah tangga di Kelurahan Mawang berkisar dari Rp 145.250,- hingga Rp 204.750,- setiap minggunya. Tidak berbeda dengan responden di kelurahan Samata, di Mawang, variasi makanan yang mereka konsumsi tidak berbeda. Jenis makanan yang dikonsumsi hanya sayur dan ikan cuek saja, bahkan tidak/jarang membeli telur ayam. Jika sudah membeli ikan maka tidak membeli telur, demikian pula sebaliknya. Bagi mereka yang penting ada nasi dan sayur atau sambel, sudah cukup. Sehingga tak heran jika ada responden yang memiliki bayi/balita yang sering sakit, mengingat asupan gizinya sangat jauh dari cukup. Si ibu hanya mengharapkan susu/bubur kacang ijo/sayur sop/vitamin dari posyandu setempat yang diterima setiap bulan sekali. Sementara anak-anak usia sekolah, gizinyapun sangat jauh dari sempurna, mereka lebih suka atau lebih mengutamakan membeli makanan jadi (jajan) daripada membeli makanan yang bergizi. Demikian pula kaum bapak, ada beberapa responden yang setiap hari harus membeli rokok walau eceran dan pendapatan rumah tangga sangat minim, tetapi kebiasaan merokok ini sangat sulit untuk dihilangkan.

Selain pengeluaran untuk makanan, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan kisarannya dari Rp 72.000,- hingga Rp 262.000,- per minggu. Pengeluaran ini biasa digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti minyak tanah, sabun cuci, odol, sabun mandi dan listrik yang juga nyantol di salah satu rumah tangga yang mempunyai aliran listrik resmi.

### 3.3 Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga

Dari 5 KRT yang menjadi responden pada studi ini, 2 orang diantaranya bekerja sebagai buruh bangunan, seorang buruh bangunan pada suatu perusahaan swasta yang ada di Kota Makassar, sehingga harus pulang seminggu sekali untuk menghemat transportasi, dengan lamanya jam kerja 8 jam, yaitu dari jam 8.00 hingga jam 16.00 WITA. Yang seorang lagi sebagai buruh bangunan serabutan tidak terikat pada suatu perusahaan tertentu, dengan jam kerja yang tidak menentu, tetapi pada umumnya sehari mereka bekerja selama 8 jam. Sementara KRT yang lain bekerja sebagai penjual sayur keliling ada 2 orang dengan jam kerja dari jam 4.00 pagi hingga jam 13.00 WITA. Dan yang seorang lagi sebagai satpam di suatu perumahan di Kota Makassar dengan jam kerja dari jam 19.00 hingga jam 7.00 pagi.

Pekerjaan tambahan ART yang lain adalah sebagai buruh tani, tetapi ada 2 rumah tangga yang mempunyai pekerja anak, mendapat tambahan dari pekerjaan anaknya, yaitu jasa di sebuah pemotongan hewan.

Adapun lokasi tempat kerja mereka sebagian bekerja pada tempat yang permanen, yaitu yang bekerja sebagai buruh bangunan pada suatu perusahaan swasta dan seorang satpam yang bekerja di suatu perumahan penduduk. Sementara pekerjaan yang lainnya tidak berada pada tempat yang permanen.

Sementara upah/gaji yang diterima sebagai seorang satpam adalah sebesar Rp 350.000,- setiap bulannya, tetapi dalam sebulan total pendapatan yang diterima rumah tangga tersebut sebesar Rp 550.000,-, yaitu setelah ditambah dengan penghasilan dari pekerja anak. Sedangkan untuk buruh bangunan, menerima upah setiap minggu sebesar Rp 120.000,- atau Rp 480.000,- sebulan. Tetapi rumah tangga yang KRT nya bekerja di suatu perusahaan swasta, total penghasilan yang diterima selama sebulan sebesar Rp 1.400.000,-, hal ini dikarenakan ada 3 ART yang bekerja sebagai buruh bangunan di tempat yang sama. Dan sebagai penjual sayur keliling, memiliki pendapatan sebesar Rp 15.000,- setiap harinya atau mendapat Rp 450.000,- setiap bulannya. Namun jika di total selama sebulan, masing-masing rumah tangga penjual sayur keliling ini dapat mengumpulkan uang sebesar Rp 1.050.000,- dan Rp 1.200.000,-. Penghasilan ini berasal dari ART lain yang juga bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Di Kelurahan Mawang, lapangan usaha utama KRT pada rumah tangga yang menjadi responden adalah sebagai buruh tani 2 orang, sopir angkutan 2 orang (sopir angkutan penumpang dan sopir truk pengangkut aspal) dan seorang sebagai buruh bangunan. Bagi KRT yang bekerja sebagai buruh tani, rata-rata jam kerja mereka dari jam 7.00 – jam 12.00, kemudian jam 13.00 mulai bekerja lagi hingga sore jam 17.00. Sementara bagi sopir angkutan, biasa bekerja dari jam 8.00 – 18.00, sedangkan bagi sopir truk bekerja dari jam 7.00 – jam 7.00 pada keesokan harinya. Dan sebagai buruh bangunan mempunyai jam kerja jam 7.00 – jam 17.00.

Penghasilan mereka sebulan cukup bervariasi karena ada beberapa rumah tangga yang mempunyai pekerjaan tambahan. Seperti rumah tangga yang pekerjaan utama KRT nya sebagai buruh tani, salah satunya mempunyai pekerjaan tambahan sebagai buruh bangunan dengan upah Rp 20.000,- per hari, sehingga jika ada pekerjaan bangunan, dia dapat upah setiap bulannya sekitar Rp 600.000,-. Sementara KRT yang pekerjaan utamanya sebagai sopir angkutan, juga mempunyai pekerjaan tambahan sebagai buruh bangunan, sehingga jika dalam sebulan ia bekerja sebagai buruh bangunan, maka penghasilan sebulan yang ia terima sekitar Rp 750.000,-. Dan KRT yang pekerjaan utamanya sebagai buruh bangunan, total penghasilan rumah tangga selama sebulan dapat mencapai lebih dari satu juta rupiah karena yang bekerja sebagai buruh bangunan selain KRT, ada 3 orang anaknya yang membantu KRT juga sebagai buruh bangunan.

### **3.4 Fasilitas Perumahan**

Bila dilihat dari tempat pemukiman responden, 60 persen dari responden di Samata menempati rumah milik sendiri, walaupun hanya seluas 35 m<sup>2</sup> hingga 72 m<sup>2</sup>, dengan banyaknya ART 4 hingga 5 orang. Sementara 40 persen lainnya, masih menempati rumah milik orang tua/mertua, dengan luas lantai 54 m<sup>2</sup> dan 100 m<sup>2</sup>, yang ditempati oleh 7 hingga 8 orang. Jenis atap terluas dari rumah yang mereka tempati adalah seluruhnya dengan asbes. Namun demikian dinding dan jenis lantai terluas pada rumah milik orang tua/mertua terbuat tembok dan semen. Sementara rumah milik sendiri karena berbentuk rumah panggung, maka baik dinding maupun lantai terbuat dari kayu. Fasilitas yang lain seperti sumber air minum dan tempat buang air besar/kamar mandi, seluruh rumah tangga responden menggunakan air sumur dan masing-masing sudah mempunyai kamar mandi milik sendiri. Dan jenis penerangan mereka adalah listrik PLN, walaupun semuanya masih nyantol dengan rumah tangga yang mempunyai meteran listrik resmi.

Lain halnya dengan kondisi perumahan penduduk yang menjadi responden di Kelurahan Mawang. Hampir semua responden menempati rumah milik sendiri, hanya 1 rumah tangga yang masih menumpang pada rumah orang tua. Walaupun demikian, luas lantai rumah mereka sangat kecil, luas lantai mereka berkisar dari 30 m<sup>2</sup> hingga 54 m<sup>2</sup>, dengan jumlah ART yang tinggal di rumah yang kecil tersebut dari 4 hingga 7 orang jiwa, dan hampir setiap rumah mempunyai bayi/balita. Jenis atap rumah hampir seluruh responden rumahnya beratap asbes, hanya 1 rumah yang masih beratap kayu. Dinding rumah masih ada yang terbuat dari kayu. Demikian pula dengan lantai terluas, sebagian besar sudah semen, tetapi masih ada yang berasal dari kayu, tetapi ada pula yang sudah lantai ubin. Sumber air minum semuanya berasal dari air sumur. Tempat buang air besar di kelurahan ini masih banyak yang belum mempunyai jamban sendiri, masih menggunakan fasilitas umum, bahkan masih ada yang di semak-semak, karena jauh dari jamban umum. Ironisnya, rumah yang jenis lantainya sudah terbuat dari ubin tetapi jenis penerangannya masih menggunakan pelita dan tempat buang air besar di semak-semak. Sementara rumah yang atap, dinding dan lantai masih terbuat dari kayu,

sudah mempunyai sumur sendiri dan sudah menikmati penerangan dengan listrik, sekalipun masih nyantol dari tiang listrik dekat rumahnya. Hal ini disebabkan karena rumah yang belum mendapatkan listrik, berada agak di pelosok, sehingga belum dapat menikmati fasilitas ini sekalipun hanya dengan menyantol ke tetangga atau ke tiang listrik di dekat rumahnya.

### **3.5 Keterangan Sosial Budaya**

Agak berbeda dengan keterangan rumah tangga yang lain, keterangan sosial budaya ini mempunyai kemiripan dalam beberapa hal tentang sosial budayanya. Baik responden di Samata maupun di Mawang, mayoritas sudah mempunyai Askin (Askes Miskin) sebagai pengganti dari Kartu Sehat, sehingga penduduk bila akan berobat cukup dengan membawa Askin, maka semua biaya pengobatan akan gratis. Tetapi bila ada penduduk yang kartu Askinnya belum terbit, maka terpaksa dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,- setiap kali berobat. Pada rumah tangga responden yang salah satu ART nya pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Gowa selama 3 hari karena sakit thypus, dengan menggunakan Kartu Askin, maka biaya perawatan rumah sakit dibebaskan hanya harus membeli obat-obatan yang diperlukan sebesar Rp 400.000,-.

Tentang pembagian raskin, baik di Samat maupun di Mawang, penduduk yang mendapatkan tidak dalam kilogram, melainkan dalam liter, alasan pihak kelurahan adalah agar seluruh penduduk miskin di wilayahnya dapat raskin, tetapi setelah ditelusuri lebih dalam ternyata dari 10 responden, 5 responden tidak mendapat jatah raskin, padahal kondisi mereka sangat perlu dibantu. Yang anehnya, di Samata dari 5 responden yang ditemui, hanya 1 responden yang mendapat raskin, yaitu di rumah tangga Wakil Ketua RT, sementara 4 rumah tangga yang lain, yang kebetulan bukan pejabat pemerintahan setempat, tidak mendapat pembagian beras raskin. Demikian pula yang terjadi di Mawang, dari 5 responden yang diwawancarai, seorang responden tidak mendapat jatah raskin, padahal kondisinya miskin dan masih mempunyai anak balita. Tetapi justru para pejabat pemerintahan setempat (salah satunya rumah tangga Ketua RT menjadi responden) tidak terlewatkan, bahkan menurut informasi setempat, dari Lurah hingga Ketua RT pasti mendapat raskin. Raskin yang diterima penduduk tidak gratis, melainkan penduduk harus membayar kompensasinya sebesar Rp 1.000,- per liter. Dan setiap rumah tangga mendapat jatah 10 liter, maka mereka harus membayar Rp 10.000,-

Demikian pula halnya dengan pendapat mereka tentang bagaimana kondisi taraf hidup keluarga dibandingkan keadaan 3 tahun yang lalu. Sebagian besar penduduk yang menjadi responden mengaku lebih parah karena biaya hidup semakin meningkat, sementara kesempatan kerja sangat kecil. Tetapi dari responden yang menjabat sebagai pejabat pemerintahan setempat mempunyai jawaban yang berbeda, mereka menyatakan bahwa kondisi taraf hidup mereka lebih baik dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Karena sekarang ada raskin, ada Kartu Askin dan anak-anak dapat sekolah dengan baik.

### **3.6 Fasilitas Pedesaan**

Fasilitas yang ada di kelurahan setempat, yang dirasakan dapat diakses secara mudah oleh penduduk di Samata dan Mawang adalah hanya Sekolah Dasar dan mesjid. Sementara fasilitas yang lain seperti Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pasar tradisional dan wartel harus berjalan sekitar 1,5 hingga 8 kilometer dari rumah responden. Bahkan posyandupun masih belum tersedia di sekitar rumah responden, sehingga posyandu terdekat yang dapat dijangkau oleh responden adalah berjarak 500 meter dari rumahnya. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa betapa terencilnya letak rumah responden sehingga belum terjangkau oleh pembangunan daerah. Atau dapat dipertanyakan kepada pemerintah setempat, mengapa pada jaman era globalisasi seperti sekarang ini, masih banyak rakyatnya yang belum tersentuh dengan pembangunan, yang seharusnya mereka sudah sepatasnya dapat menikmati fasilitas yang layak secara mudah.

### **3.7 Lain-lain**

Pada rumah tangga yang mempunyai balita, rata-rata mereka secara rutin memberikan imunisasi sesuai jadwal yang sudah baku, sehingga balita akan mendapatkan imunisasi wajib secara lengkap pada umur 9 bulan. Dan bagi para balita, umumnya masih mendapatkan ASI dari ibunya hingga umur 2 tahun, karena anaknya susah disapih dan ibunya sengaja masih memberikan ASI nya walaupun sudah tidak ada kandungan gizi yang mencukupi bagi si anak, mengingat asupan gizi si ibu yang jauh dari sempurna. Dan bagi mereka yang sudah lepas dari ASI, si ibu tidak memberi susu formula lagi karena kondisi ekonomi orang tua yang jauh di bawah cukup, sehingga sangat sulit jika harus membeli susu formula untuk anak balitanya, jadi mereka hanya mengharapkan program bantuan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) atau bubur atau vitamin A yang diberikan oleh para kader posyandu.

Bagi rumah tangga yang mempunyai pekerja anak, jika ditanyakan kepada si anak alasan bekerja, mereka akan menjawab membantu orang tua. Namun bagi orang tua, hanya sedikit orang tua yang dapat merasakan jerih payah anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Biasanya upah yang mereka dapatkan, mereka gunakan untuk jajan. Walaupun hal ini dapat juga dikatakan sebagai membantu orang tua, karena dengan demikian mereka tidak lagi meminta uang saku kepada orang tua. Namun demikian anak usia sekolah yang terpaksa bekerja akan cenderung lebih banyak menggunakan uangnya untuk jajan dibandingkan digunakan untuk membantu orang tuanya, walaupun ada juga anak yang dengan sungguh-sungguh menggunakan uangnya untuk membantu kebutuhan rumah tangga, seperti yang terjadi pada rumah tangga yang anaknya dirawat di rumah sakit karena terlalu lelah bekerja pada dini hari dan sekolah pada pagi hari.